

LAPORAN AKHIR
CETAK BIRU STIK BKKBN 2020-2024
DAN *ROADMAP* STIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	7
1. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan.....	10
2. Visi, Arah Kebijakan BKKBN	11
2.1. Visi BKKBN.....	11
2.2. Misi BKKBN	11
2.3. Tujuan.....	11
2.4. Sasaran Strategis.....	11
3. Kondisi SPBE BKKBN Saat Ini	13
3.1. Arsitektur Bisnis	13
3.1.1. Model Bisnis BKKBN.....	13
3.1.2. Dekomposisi Fungsi Bisnis	14
3.2. Arsitektur Data Saat Ini	20
3.3. Arsitektur Layanan Saat Ini	45
3.3.1. Layanan Administrasi Pemerintahan Saat Ini	45
3.3.2. Layanan Publik Saat Ini	47
3.4. Arsitektur Aplikasi Saat Ini	49
3.4.1. Kondisi Aplikasi Saat Ini Secara Umum.....	49
3.5. Arsitektur Infrastruktur Saat Ini	61
3.5.1. Arsitektur Jaringan	61
3.5.2. Arsitektur Server dan Storage.....	64
3.5.3. Arsitektur DC-DRC	73
3.5.4. Fasilitas Fisik	74
3.6. Arsitektur Keamanan Saat Ini.....	75
3.7. Tata Kelola TI Saat Ini.....	78
4. SPBE BKKBN Target	80
4.1. Arsitektur Bisnis	80
4.2. Arsitektur Data Target	87
4.3. Arsitektur Layanan Target	110
4.4. Arsitektur Aplikasi Target.....	116

4.5.	Arsitektur Infrastruktur Target	150
4.6.	Arsitektur Keamanan Sistem Informasi	159
4.7.	Tata Kelola TI.....	167
5.	<i>Gap Analysis</i>	194
5.1.	Gap Analysis Arsitektur Aplikasi.....	194
5.2.	Gap Analysis Arsitektur Infrastruktur	206
5.3.	Gap Analysis Arsitektur Keamanan	210
5.4.	Gap Analysis Tata Kelola TI	212
6.	<i>Peta Rencana Arsitektur Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan dan Tata Kelola TI.....</i>	233
6.1.	Inisiatif Arsitektur Aplikasi	233
6.2.	Deskripsi Inisiatif Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan.....	237
6.3.	Deskripsi Inisiatif Tata Kelola TI	241
7.	<i>Lampiran.....</i>	243
7.1.	Estimasi Anggaran Infrastruktur.....	243
7.2.	Lampiran Kebijakan.....	245
7.3.	Lampiran Prosedur.....	287
i.	Lampiran Prosedur Manajemen Proyek TI	287
1.1.1	Lampiran Perbaikan Prosedur Pengembangan Aplikasi	292
7.3.1.	Lampiran Prosedur Instalasi Software	318
7.3.2.	Lampiran Prosedur Manajemen Perubahan TI.....	328
7.3.3.	Lampiran Prosedur Manajemen Service Desk dan Incident	345
7.3.4.	Lampiran Prosedur Manajemen Permasalahan	357
7.3.5.	Lampiran Prosedur Manajemen Mutu Pengembangan TI.....	368
7.3.6.	Lampiran Prosedur Manajemen Mutu Operasi TI.....	373
7.4.	Lampiran Detil Kompetensi	379
7.4.1.	IFT01 – Business Relationship Management	379
7.4.2.	IFT02 – Service Design.....	380
7.4.3.	IFT03 – Service Desk.....	381
7.4.4.	IFT04 – Service Strategy	382
7.4.5.	IFT05 – Enterprise Architecture	383
7.4.6.	IFT06 – IT Project – Management	385
7.4.7.	IFT07 – Application Development	386
7.4.8.	IFT08 – Business Solution Architecture	387
7.4.9.	IFT09 – DC/DRC Hardware Architecture	389
7.4.10.	IFT10 – Network & Security Architecture.....	390
7.4.11.	IFT11 – Database/ Big Data.....	391
7.4.12.	IFT12 – System Instalation	393

7.4.13.	IFT13 – Service Transition	396
7.4.14.	IFT14 – IT Ifrastructure Operation	397
7.4.15.	IFT15 – Application Support.....	398
7.4.16.	IFT16 – Network Support	401
7.4.17.	IFT17 – Database Administration	403
7.4.18.	IFT18 – Security Administration	405
7.4.19.	IFT19 – IT Governance	406
7.4.20.	IFT20 – Risk Management.....	408
7.4.21.	IFT21 – Quality & Comformance Management	409
7.4.22.	IFT22 – Security Management.....	412
7.4.23.	IFT23 – Human Resource Management.....	414
7.5.	Lampiran IT Maturity Assessment.....	417
7.5.1.	PO1 – Define IT Strategic Plan	417
7.5.2.	PO2 – Define the Information Architecture	420
7.5.3.	PO3 – Determine Technological Direction.....	423
7.5.4.	PO4 – Define the IT Processes, Organization and Relationship.....	426
7.5.5.	PO5 – Manage the IT Investment	430
7.5.6.	PO6 – Communicate Management Aims and Direction	433
7.5.7.	PO7 – Manage IT Human Resources	436
7.5.8.	PO8 – Manage Quality	439
7.5.9.	PO9 – Assess and Manage IT Risks	442
7.5.10.	PO10 – Assess and Manage IT Risks	444
7.5.11.	AI1 – Identify Automated Solution.....	447
7.5.12.	AI2 – Acquire and Mantain Application Software.....	449
7.5.13.	AI3 – Acquire and Mantain Technology Infrastucture	453
7.5.14.	AI4 – Enable Operation And Use	456
7.5.15.	AI5 – Procure IT Resources.....	459
7.5.16.	AI6 – Manage Changes	462
7.5.17.	AI7 – Install and Accredite Solutions and Changes.....	465
7.5.18.	DS1 – Define and Manage Service Levels	467
7.5.19.	DS2 – Manage Third-Party Services	470
7.5.20.	DS3 – Manage Performance and Capacity	474
7.5.21.	DS4 – Ensure Continuous Service	477
7.5.22.	DS5 – Ensure Systems Security	480
7.5.23.	DS6 – Identify and Allocate Costs	483
7.5.24.	DS7 - Educate & Train Users.....	486
7.5.25.	DS8 – Manage Service Desk and Incidents	489
7.5.26.	DS9 – Manage the Configuration.....	492
7.5.27.	DS10 – Manage Problem.....	494

7.5.28.	DS11 – Manage Data.....	496
7.5.29.	DS12 – Manage the Physical Environment	499
7.5.30.	DS13 – Manage Operations.....	502
7.5.31.	ME1 – Monitor and Evaluate IT Performance.....	505
7.5.32.	ME2 – Monitor and Evaluate Internal Control.....	508
7.5.33.	ME3 – Ensure Compliance With External Requirements	511
7.5.34.	ME4 – Provide IT Governance.....	514

Daftar Gambar

Gambar 1 Belanja TIK Pemerintah Indonesia	9
Gambar 2 GambarBagan Proses SPBE Indonesia	10
Gambar 3 Model Bisnis BKKBN.....	13
Gambar 4 Topologi Jaringan Komputer	62
Gambar 5 Peta Aplikasi BKKBN Target.....	118
Gambar 6 Arsitektur Jaringan	150
Gambar 7 Arsitektur Server dan Storage.....	153
Gambar 8 Arsitektur Jaringan SPBE.....	154
Gambar 9 Arsitektur Keamanan.....	156
Gambar 10 Layer Arsitektur Keamanan	159
Gambar 11 Pemisahan Security sebagai komponen dan service	161
Gambar 12 Pengelolaan Otentikasi dan Identitas	162
Gambar 13 Access Management.....	163
Gambar 14 Threat Management.....	163
Gambar 15 Antivirus/Anti Malware.....	164
Gambar 16 Data Leak Prevention.....	165
Gambar 17 Identity Management.....	165
Gambar 18 Security Information & Event Management.....	166
Gambar 19 Arsitektur Komponen Tools.....	192

Daftar Tabel

Tabel 1 Dekomposisi Fungsi Bisnis Saat Ini.....	14
Tabel 2 Arsitektur Data Saat Ini	20
Tabel 3 Layanan Administrasi Pemerintahan Saat Ini.....	46
Tabel 4 Katalog Aplikasi Saat Ini	49
Tabel 5 Daftar Perangkat Jaringan	63
Tabel 6 List Server	64
Tabel 7 List Storage	70
Tabel 8 Fasilitas Data Center.....	74
Tabel 9 Arsitektur Keamanan Saat Ini	75
Tabel 10 Deskripsi Arsitektur Keamanan.....	76
Tabel 11 Model Bisnis BKKBN Target	80
Tabel 12 Dekomposisi Fungsi Bisnis BKKBN Target	81
Tabel 13 Tabel Arsitektur Data Target.....	88
Tabel 14 Daftar Layanan Administrasi Pemerintahan BKKBN Target.....	114
Tabel 15 Katalog Aplikasi Target Matriks Aplikasi VS Kategori	119
Tabel 16 Spesifikasi Tool Data Warehouse.....	146
Tabel 17 Spesifikasi Business Intelligence	148
Tabel 18 Daftar Perangkat	150
Tabel 19 Fasilitas Data Center.....	155
Tabel 20 Deskripsi Naratif Blok Arsitektur Keamanan.....	157
Tabel 21 Database Security	159
Tabel 22 Pemetaan Kewenangan.....	167
Tabel 23 Struktur Organisasi.....	169
Tabel 24 Profil Kompetensi	180
Tabel 25 Tabel Pemenuhan Kompetensi.....	183
Tabel 26 Indikator Kinerja	189
Tabel 27 Teknologi Pendukung	190
Tabel 28 Rekomendasi Teknologi Pendukung Tata Kelola TI	192
Tabel 29 Gap Analysis Arsitektur Aplikasi	194
Tabel 30 Gap Analysis Arsitektur Infrastruktur	206
Tabel 31 Analisa Strategi Migrasi	207
Tabel 32 Gap Analysis Arsitektur Keamanan	210
Tabel 33 GAP Analysis Proses COBIT 4.1	212
Tabel 34 Daftar Inisiatif Aplikasi	233
Tabel 35 Daftar Inisiatif Infrastruktur dan Keamanan	237

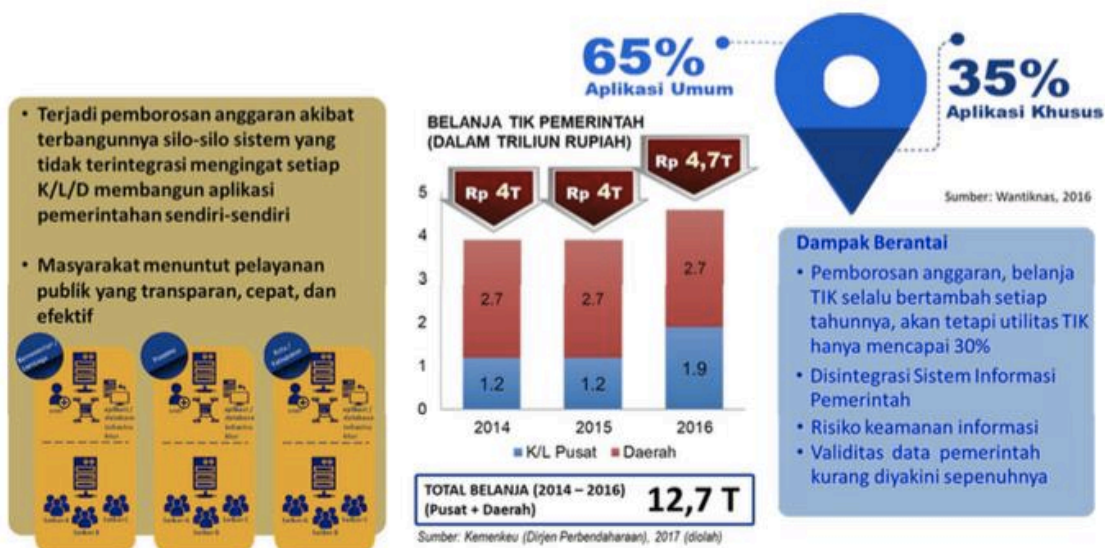
Tabel 36 Daftar Inisiatif Tata Kelola TI.....	241
---	-----

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data survey Gartner dan juga lembaga riset lainnya, diketahui bahwa saat ini belanja TI dunia mencapai angka ribuan trilyun per tahun dimana pada tahun anggaran 2019 ini diproyeksikan akan mencapai angka USD 3.790 Billion atau kurang lebih setara dengan Rp 54.955 triliun (sumber: Gartner, 2019).

Untuk kondisi di Indonesia berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan didapatkan bahwa data belanja TIK Pemerintah Indonesia per tahun mencapai lebih dari 4 Triliun Rupiah sebagaimana terlihat pada gambar terlampir (sumber: Kemenkeu, 2017). Namun itupun diperkirakan terjadi pemborosan anggaran yang cukup besar akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri. Terjadilah pemborosan anggaran belanja TIK yang selalu bertambah tiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30% saja. Sementara di sisi lain fakta menunjukkan bahwa risiko terkait TIK semakin tinggi, bahkan sudah mencapai tingkatan tiga besar dunia. Data lainnya menunjukkan bahwa kegagalan sistem TIK mencapai angka lebih dari 65% berdasarkan hasil survei dari Gartner, ditambah dengan kondisi validitas data pemerintah yang kurang diyakini sepenuhnya kebenarannya. Padahal masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.



Gambar 1 Belanja TIK Pemerintah Indonesia

Setelah itu pertanyaan lebih lanjut dalam konteks sumber daya informasi adalah bagaimana memastikan agar data yang digunakan dan informasi yang dihasilkan dapat secara efektif dan efisien dikelola pendistribusiannya. Apakah pengendalian risiko pendistribusian data dan informasi saat ini sudah sesuai dengan toleransi risiko organisasi? Sudahkah terdapat klasifikasi informasi sehingga dapat menjadi dasar untuk mengefektifkan penerapan kendali terhadap risiko di balik informasi tersebut? Apakah ada kelemahan kendali yang perlu ditingkatkan dalam tata kelola TI pemerintahan?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Arahannya bertujuan agar bagaimana lembaga pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada pemangku kepentingannya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, meningkatkan transparansi, kontrol, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. E-Government yang memadai sangat bermanfaat dalam mengefisienkan biaya administrasi relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan referensi terkini, istilah e-Government sebelumnya mulai digantikan dengan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Seiring dengan telah dirilisnya Perpres no. 95 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dirilisnya PermenpanRB No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE dan telah berjalannya pelaksanaan evaluasi internal SPBE di K/L/D/I menjadi dasar urgensi perlunya implementasi SPBE yang memadai.



Gambar 2 GambarBagan Proses SPBE Indonesia

Salah satu amanah Perpres no. 95 tahun 2018 adalah setiap K/L agar menyusun Arsitektur SPBE di level instansi masing-masing. Oleh karena itu maka disusunlah dokumen Rancangan Arsitektur Layanan, Bisnis, Data, dan Aplikasi SPBE BKKBN tahun 2020-2024.

1.2. Tujuan

Tujuan Cetak Biru STIK BKKBN 2020 – 2024 dan Roadmap STIK BKKBN yaitu:

- a. Mengidentifikasi kondisi arsitektur SPBE BKKBN saat ini sebagai referensi baseline untuk perbaikan kedepan;
- b. Menghasilkan rancangan arsitektur, tata kelola, manajemen SPBE BKKBN kedepan;
- c. Menghasilkan roadmap inisiatif program strategis SPBE BKKBN.

2. Visi, Arah Kebijakan BKKBN

Berdasarkan kepada Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 didapatkan visi, misi, tujuan, dan sasaran BKKBN sebagai berikut.

2.1. Visi BKKBN

Visi BKKBN adalah “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

2.2. Misi BKKBN

Misi BKKBN adalah:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

2.3. Tujuan

BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

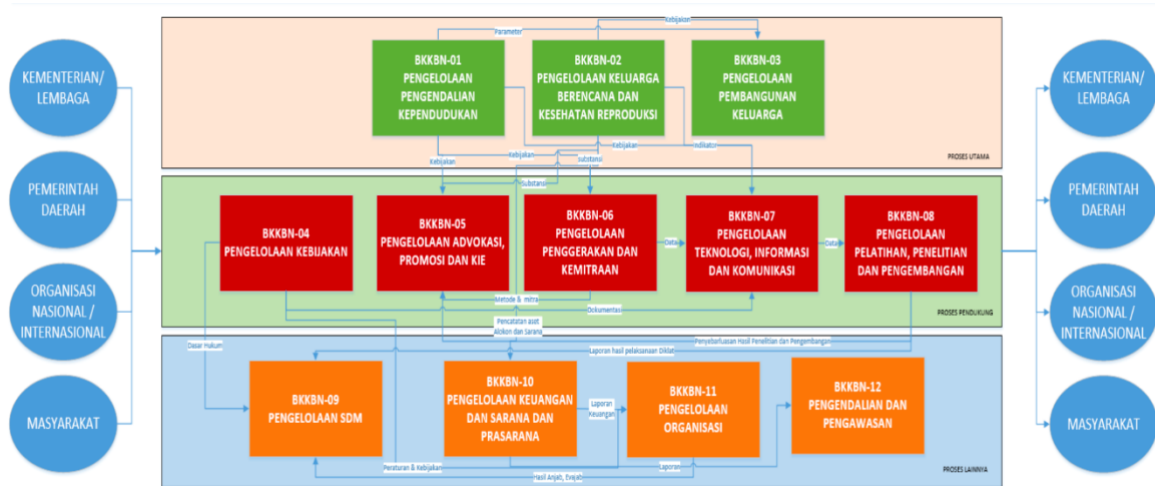
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.

5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

3. Kondisi SPBE BKKBN Saat Ini

3.1. Arsitektur Bisnis

3.1.1. Model Bisnis BKKBN



Gambar 3 Model Bisnis BKKBN

Dalam Peta Proses Bisnis terdapat beberapa pengelompokan, yaitu proses inti, proses pendukung dan proses sumber daya / proses lainnya. Berikut penjelasan mengenai pengelompokan :

- a. Proses Inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
 - Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
 - Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- b. Proses Pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
 - Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- c. Proses Lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

3.1.2. Dekomposisi Fungsi Bisnis

Tabel 1 Dekomposisi Fungsi Bisnis Saat Ini

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
Inspectorat Utama	Inspectorat Wilayah I/II/IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Evaluasi Kelembagaan 2. Perencanaan Audit 3. Pelaksanaan Audit Internal (Audit Kerja, Keuangan, Evaluasi) 4. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu 5. Pelaksanan Review (Laporan Keuangan, RKAK/L, SAKIP, RKBMN, PIPK, Penyerapan Anggaran, Revisi Anggaran, Penerimaan Pajak) 6. Pelaksanan Review Khusus 7. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 8. Pelaksanaan Pemantauan Gratifikasi 9. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan 10. Penilaian ZI-WBK
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penggagaran Tahunan 2. Penyusunan Rencana Strategi 5 Tahun
	Biro Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 2. Layanan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi 3. Pengembangan Pegawai 4. Pemantauan Disiplin, Kinerja Individu Pegawai dan Tunjangan Kinerja
	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ketersediaan Alokasi dan Sarana KB 2. Pendelegasian wewenang pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan 3. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker 4. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat di Level Kementerian/Lembaga 5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 6. Penatausahaan Keuangan 7. Pengelolaan BMN; Perencanaan Kebutuhan BMN 8. Pengelolaan BMN; Penatausahaan BMN 9. Pengelolaan BMN; Evaluasi BMN 10. Pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Pelaporan DAK Subbidang KB 12. Penyelenggaraan dan evaluasi SPIP
	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Undang-undang Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Keikutsertaan pembahasan harmonisasi rancangan undang-undang 3. Pembentukan peraturan Pemerintah dan Presiden 4. Pembentukan Peraturan Kepala Badan 5. Perencanaan Pembentukan Perundang-undangan terkait dengan Kependudukan dan keluarga berencana 6. Pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan 7. Pembentukan keputusan kepala Badan/Eselon I 8. Penjatuhan Hukuman Disiplin berat 9. Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Jabatan 10. Pengelolaan Bisnis Proses dan SOP 11. Pengelolaan Reformasi Birokrasi 12. Pengelolaan Penyusunan Standar Pelayanan 13. Penanganan Masalah Hukum 14. Pendampingan Saksi/Ahli 15. Pertimbangan atau pendapat hukum 16. Pengelolaan Evaluasi Kelembagaan
	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keamanan dan ketertiban lingkungan BKKBN 2. Pengelolaan Sistem Kearsipan dan persuratan 3. Pengelolaan Pelayanan Keprotokolan 4. Penggajian Pegawai 5. Pengadaan Barang dan Jasa 6. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
Deputi Pengendalian Penduduk	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) Fasilitasi data penduduk melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk usia anak - Penduduk usia produktif dan reproduktif - Penduduk lanjut usia rentan Pengelolaan pokja Bangga Kencana Efektif Fasilitas Data Penduduk Melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Usia Anak-anak - Reproduksi - Lanjut Usia dan Rentan
	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Penetapan Parameter/Proyeksi Pengendalian Penduduk Pengelolaan Profil Kependudukan Evaluasi dokumen perencanaan daerah (RPJMD) (Kegiatan evaluasi RPJMD sudah dilaksanakan secara konsisten namun belum terdapat dokumentasi resmi)
	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan Penyediaan Materi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal, Informal, dan Non Formal
	Direktorat: Analisis Dampak Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Analisis/Kajian Dampak Kependudukan Pengelolaan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan Faskes untuk pelayanan KB yang terstandarisasi

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
Kesehatan Reproduksi	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Pelayanan KB-KR 2. Pembinaan Faskes Pelayanan KB yang terstandarisasi 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Faskes
	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelangsungan hidup Ibu dan Anak 2. Pembinaan Pencegahan PMS dan HIV/AIDS 3. Pembinaan Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Fertilitas
	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesertaan KB di 100 Kab/kota dengan kesertaan rendah (12 Prov) 2. Peningkatan Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 3. Peningkatan Kesertaan KB Pria
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita dan Anak 2. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak melalui Bina Keluarga Balita dan anak
	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja 2. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja Melalui Bina Keluarga Remaja 3. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat
	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Melalui Bina Keluarga Lansia 2. Pengelolaan Program Kelanjut usiaan
	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Advokasi 2. Pengelolaan Kemitraan Dalam Negeri 3. Pengelolaan Kemitraan Luar Negeri
	Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Promosi/KIE 2. Pengelolaan Berita Melalui Media Massa
	Direktorat Pelaporan dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Informasi (Pengelolaan Data Program) 2. Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi 3. Pemanfaatan Data dan Informasi Program KKBPK
	Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Penggerak Program KKBPK di Bina Lini Lapangan melalui Tenaga Lini Lapangan, Institusi Masyarakat Pendesaan, melalui mekanisme 2. Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	Direktorat: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyelenggaraan diklat dalam negeri (Pendidikan jangka Panjang) 4. Penyelenggaraan Diklat Dalam Negeri (Diklat Teknis/Fungsional/Kepemimpinan)
	Direktorat: Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Panjang) 2. Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Pendek/OST) 3. Penyelenggaraan Pelatihan/Konferensi Internasional 4. Partisipasi dalam Konferensi/Pertemuan/Sidang Internasional 5. Kerjasama luar negeri 6. Pengelolaan Administrasi Dinas Peserta

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 2. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan 3. Kemitraan dan Pengelolaan Administrasi Puslitbang Kependudukan
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan program Kependudukan, KB dan KS b. Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Program KKBPK dengan mitra

3.2. Arsitektur Data Saat Ini

Data-data eksisting di BKKBN pada setiap Direktorat sebagai berikut.

Tabel 2 Arsitektur Data Saat Ini

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
Inspectorat Utama	Inspectorat Wilayah I	Perencanaan Audit	1. Kebijakan Pengawasan	1. Rencana Pengawasan
	Inspectorat Wilayah II	Pelaksanaan Audit Internal (Audit Kerja, Keuangan, Evaluasi)	1. Laporan Keuangan	1. Laporan Hasil Pengawasan
	Inspectorat Wilayah III	Penilaian ZI-WBK	1. Evidence	1. Laporan hasil pemantauan ZI WBK
	Inspectorat Wilayah I /II/III	Perencanaan Audit	1. Kebijakan Pengawasan 2. Program Pengawasan	1. Rencana Pengawasan
		Pelaksanaan Audit Internal (Audit Kerja, Keuangan, Evaluasi)	1. Laporan Keuangan 2. Evidence	1. Laporan Hasil Pengawasan
		Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu	1. Evidence	1. Laporan Hasil Pengawasan
		Pelaksanaan Review (Laporan Keuangan, RKAK/L, SAKIP, RKBMN, PIPK, Penyerapan Anggaran, Revisi Anggaran, Penerimaan Pajak)	1. Laporan Keuangan 2. RKAK/L 3. Penyerapan Anggaran 4. Revisi Anggaran	1. Laporan Hasil Review
		Pelaksanaan Review Khusus	1. Evidence	1. Laporan Hasil Review
		Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Laporan Hasil Pengawasan	1. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			2. Tindak lanjut hasil Pengawasan	
		Pelaksanaan Pemantauan Gratifikasi	1. Laporan Gratifikasi	1. Laporan Pemantauan Gratifikasi
		Penanganan Situasi Benturan Kepentingan	1. Laporan benturan kepentingan 2. Evidence	1. Penanganan benturan kepentingan
		Penilaian ZI-WBK	1. Laporan Keuangan 2. Evidence	1. Laporan hasil pemantauan ZI WBK
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan	Perencanaan dan Pengagaran Tahunan	1. Data berbasis perencanaan 2. Usulan struktur program dan anggaran (SPA) 3. Pembahasan 4. Trilateral Meeting 5. Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran I 6. Usulan Kegiatan dan Anggaran kepada Eselon I, Kepala BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi 7. Diseminasi kepada Eselon I, Eselon II dan Perwakilan 8. Hasil telaahan RKKAL 9. Perjanjian Kinerja dan rencana penarikan anggaran	1. Data Basis Perencanaan 2. SPA Pusat dan Provinsi 3. Dokumen Trilateral Meeting 4. Penyelenggaraan KOREN I dan II 5. RKAKL 6. Perjanjian Kinerja 7. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
		Penyusunan Rencana Strategi 5 Tahun	1. Hasil evaluasi tengah tahu RPJM/Renstra 2. Kajian (background study) Hasil Evaluasi Renstra sebelumnya (Program Bangsa Kencana)	1. Dokumen Renstra BKKBN 2. Dokumen Balanced Scorecard BKKBN 3. Perban Renstra 4. Perban BSC

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Hasil Evaluasi Renstra 4. Rekomendasi Kebijakan Program dan indikator untuk renstra baru serta RPJMN 5. Balanced Scorecard 6. Rancangan Dokumen Renstra BKKBN 7. Rancangan Dokumen Renstra melalui Rapat Pimpinan 8. Peraturan Badan penetapan Renstra 9. Peraturan Badan penetapan BSC 10. Sosialisasi Renstra 11. Review Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Kepka peta Strategi dan IKU
	Biro Sumber Daya Manusia	Perencanaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Jabatan 2. Kondisi Eksisting Pegawai 3. Proyeksi Pensiun/Mutasi 4. Data ABK 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Pegawai 2. Usulan Informasi
Layanan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Data basis kepegawaian 2. Dokumen digital kepegawaian 3. Data ABK 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SK Pengangkatan, pemberhentian, serta mutasi 	
Pengembangan Pegawai		<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Basis Kepegawaian 2. Data Basis Kompetensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi pengembangan pegawai 	
Pemantauan Disiplin, Kinerja Individu Pegawai dan tunjangan kinerja		<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Perjanjian Kinerja 2. Data SKP Tahunan dan Bulanan 3. Data capaian kinerja pegawai tahunan dan bulanan 4. Data presensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Evaluasi kinerja 2. Hasil evaluasi kedisiplinan 3. Hasil penghitungan tunjangan kinerja 	

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah ketersediaan Alokasi dan Sarana KB	1. Data Stock Alokasi	1. Stock Alokasi 2. Laporan F/V Gudang 3. Laporan Stock Opname
		Pengelolaan BMN; Penatausahaan BMN	1. Administrasi Pengelolaan BMN 2. Usulan persetujuan penghapusan dan pemusnahan BMN 3. Usulan persetujuan hibah BMN 4. Usulan surat keputusan (SK) penghapusan BMN, penetapan status penggunaan BMN, SK, penetapan Sewa BMN 5. Labelisasi BMN	1. Surat-surat persetujuan dan keputusan dibidang pengelolaan BMN 2. Data labelisasi BMN
		Pendelegasian wewenang pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan	1. Sesuai amanat UU, kewenangan penggunaan anggaran/barang pada PA. Dalam menjalankan amanah pelimpahan kewenangan atribusi ini, PA dapat mendelegasikan kewenangan baik Sebagian/seluruhnya kepada KPA. Untuk APBN, pendelegasian PA kepada KPA bersifat ex-officio pada jabatan Kepala Satuan Kerja atau dalam hal tertentu cukup dengan mekanisme penunjukkan kepada pejabat lain, tanpa SK penetapan dari Presiden	1. SK penetapan KPA yang ditandatangani oleh PA 2. LKKL

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			2. Dalam hal pelaporan keuangan, mekanisme dan tata cara pelaporan keuangan sudah diatur oleh PMK yang mengharuskan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	
		Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker	1. Data keuangan dan BMN setiap Satuan Kerja (42 Satker)	1. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja (42 Satker)
		Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian/Lembaga	1. Data konsolidasi keuangan dan BMN seluruh satuan kerja (42 satker) yang telah dilakukan rekonsiliasi secara intern maupun ekstern; 2. Laporan keuangan disusun selama tiga kali dalam satu tahun anggaran yaitu Laporan Keuangan Periode Semester I, periode Tahunan Unaudited, dan Laporan keuangan Audited	Laporan Keuangan BKKBN
		Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Data Keuangan dan BMN seluruh satuan kerja (42 Satker)	Berita Acara Rekonsiliasi
		Penatausahaan Keuangan	1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban LPJ Bendahara melalui Tarik data dari aplikasi SPRINT-Kemenkeu;	1. Monitoring LPJ bendahara, Monitoring Rekening pengeluaran di BKKBN, 2. Terdokumentasi sertifikat bendahara di BKKBN yang

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Dokumentasi data sertifikasi bendahara 3. Pemantauan rekening pengeluaran di lingkungan BKKBN 	<ul style="list-style-type: none"> mengikuti sertifikasi melalui BKKBN Pusat
		Pengelolaan BMN; Perencanaan Kebutuhan BMN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usulan kebutuhan BMN dari satuan kerja 2. Usulan kebutuhan BMN di level penggunaan barang yang merupakan konsolidasi dari data usulan satuan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana kebutuhan BMN Level Satuan Kerja 2. Dokumen rencana kebutuhan BMN Level Lembaga
		Pengelolaan BMN; Evaluasi BMN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN 2. Laporan BMN level pengguna barang 3. Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN 4. Investarisasi BMN 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Rekonsiliasi BMN di level Lembaga dan satuan kerja 2. Laporan BMN 3. Laporan wasdal BMN 4. Laporan hasil investarisasi BMN
		Pemantauan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 2. Realisasi Anggaran 3. Form SPJ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai KPA 2. Materi Pembinaan Satker 3. Form SPJ\ 4. Realisasi Anggaran Detail
		Pelaporan DAK Subbidang KB	<ul style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran DAK kab/kota 2. Realisasi barang dari DAK pada kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi DAK
		Penyelenggaraan dan evaluasi SPIP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen persiapan SPIP 2. Kegiatan sesuai Renstra 3. Kebijakan/SOP 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPIP 2. Manajemen Risiko 3. Maturitas SPIP

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Pembentukan undang-undang Bidang Kependudukan dan keluarga berencana	1. Penyusunan Naskah Akademik usulan dalam program legislasi nasional	1. Undang-Undang
		Keikutsertaan Pembahasan Harmonisasi undang-undang	1. Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang yang sudah diharmonisasi
		Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Presiden	1. Usulan pengajuan RPP dan Ran Perpres dalam program RPP dan Perpres 2. Penyusunan Naskah Akademik RPP dan Ranperpres	Naskah Akademik RPP dan Ranperpres
		Pembentukan Peraturan Kepala Badan	1. Daftar program Legislasi BKKBN 2. penyusunan Rancangan Peraturan BKKBN 3. Harmonisasi Rancangan Peraturan BKKBN 4. Penetapan Rancangan Peraturan BKKBN	Peraturan BKKBN
		Perencanaan Pembentukan Perundang-undangan terkait dengan kependudukan dan Keluarga Berencana	1. Usulan Rancangan dari pemrakarsa	1. Keputusan daftar program legislasi BKKBN
		Pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan	1. Peraturan BKKBN 2. Keputusan BKKBN 3. Surat Edaran BKKBN Informasi hukum lainnya	1. Publikasi melalui aplikasi JDIH Publikasi melalui buku

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pembentukan Keputusan Kepala Badan /Eselon 1	konsep/rancangan keputusan kepala	Keputusan Kepala/Keputusan eselon 1
		Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat	Permasalahan kepegawaian	penetapan penjatuhan hukuman disiplin
		Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Jabatan	1. Jabatan 2. Urutan Fungsi dan Kegiatan	Informasi Faktor Jabatan dan Uraian Pekerjaan.
		Pengelolaan Bisnis Proses dan SOP	1. Peta Strategi 2. Tugas dan Fungsi	Peta Bispro leven 0-n
		Pengelolaan Reformasi Birokrasi	1. Roadmap RB 2. Rencana Aksi RB 3. Tim RB	Capaian Pelaksanaan RB
		Pengelolaan Penyusunan Standar Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat atas hasil pelayanan publik
		Penanganan Masalah Hukum	permasalahan hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara	fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara
		Pendampingan Saksi/Ahli	1. Permohonan/permintaan sebagai saksi 2. Permohonan/permintaan sebagai ahli	1. tersedianya saksi/ahli 2. Didampingi saksi/ahli.
		Pertimbangan atau Pendapat Hukum	1. Peristiwa/permasalahan hukum 2. peraturan perundang undangan	Kajian/telaahan permasalahan hukum

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pengelolaan Evaluasi Kelembagaan	1. Proses Bisnis Organisasi 2. Renstra 3. struktur organisasi	Indeks Efektifitas Organisasi
	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Keamanan dan ketertiban lingkungan BKKBN	1. Surat permintaan fasilitasi protokoler (keamanan mengikuti) Jadwal piket, informasi kejadian, informasi kehilangan barang	1. Laporan fasilitasi keamanan yang mengikuti kegiatan protokoler 2. Laporan jadwal petugas keamanan Laporan kejadian dan kehilangan barang
		Pengelolaan sistem kearsiapan dan persuratan	Arsip/dokumen dari komponen/unit kearsiapan (UK) 2 berupa arsip statis	1. Tersimpannya arsip statis dari UK 2 ke UK 1 2. Tersimpannya arsip statis UK 1 yang tidak dimusnahkan ke ANRI
		Pengelolaan Pelayanan Keprotokolan	1. Surat permohonan fasilitasi keprotokolan 2. Data jadwal pimpinan	Laporan fasilitasi kegiatan keprotokolan
		Penggajian Pegawai	1. Data terkait perhitungan gaji dari Biro SDM 2. Data mutase 3. Data absensi	Pembayaran gaji tunjangan, uang makan, kekurangan-kekurangan (gaji berkala, uang makan, dan lain-lain)
		Pengadaan Barang dan Jasa	1. RKAKL 2. Dokumen pengadaan 3. Permohonan Pokja dari komponen	1. Rencana pengadaan 2. Pemilihan penyedia/vendor 3. Surat tugas Pokja 4. Forum diskusi
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Permintaan pelayanan sarana dan prasarana dari unit kerja	Laporan pelayanan sarana dan prasarana ke unit kerja

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pelaksanaan hubungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Berita BKKBN di Media Online Program dan kegiatan Bangsa Kencana BKKBN Kegiatan Kepala BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> Analisa berita di media online secara harian, mingguan, dan bulanan Press Realease di media online dan website
Deputi Pengendalian Penduduk	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Perhitungan indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK). Fasilitasi data penduduk melalui: <ul style="list-style-type: none"> Penduduk usia anak Penduduk usia produktif dan reproduktif Penduduk lanjut usia rentan 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan IPBK Bersama BPS Capaian IPBK 	<ol style="list-style-type: none"> Data IPBK terimplementasi Terwujudnya PBK Data penduduk usia anak, usia produktif, usia lanjut, dan rentan
		Pengelolaan pokja Bangsa Kencana Efektif. Fasilitas data penduduk melalui : <ul style="list-style-type: none"> Usia anak-anak Reproduksi Lanjut usia dan rentan 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pokja Bangsa Kencana Efektif Data capaian pokja Bangsa Kencana efektif di Kab/kota 	Tidak disebutkan Output
	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	Pengelolaan Penetapan Parameter/Proyeksi Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> Data dari sensus/ Survei Laporan kesepakatan penentuan asumsi proyeksi untuk perhitungan proyeksi Dokumentasi hasil kesepakatan terkait variabel yang akan diperhitungkan 	<ol style="list-style-type: none"> Parameter program bangsa kencana (Laporan/Buku) Perhitungan proyeksi untuk parameter program bangsa kencana dalam dokumen perencanaan daerah

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
				3. Perhitungan proyeksi untuk perencanaan kebutuhan alkon
		Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Data dari sensus/ survei 2. Data Lintas sektor	Buku dengan konten/ tematik terkait kondisi tertentu dari level nasional sampai provinsi (lansia, balita, usia subur, dan lain-lain)
		Evaluasi dokumen perencanaan daerah (RPJMD) (Kegiatan evaluasi RPJMD sudah dilaksanakan secara konsisten namun belum terdapat dokumentasi resmi)	RPJMD dari masing-masing daerah	Laporan evaluasi dokumen perencanaan daerah
	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan	1. Data Capaian Program DITPENDUK - Formal : SD, SMP, SMA/K, PTPK - Non Formal : Diklat, Pramuka Informal : MASS-PK	1. Hasil Capaian program Ditpenduk 3 jalur - Formal : SD, SMP, SMA/K, PTPK - Non Formal : Diklat, Pramuka Informal : MASS-PK
		Penyediaan Materi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal, Informal, dan Non Formal	1. Konten Materi penduk - Formal : SD, SMP, SMA/K, PTPK - Non Formal : Diklat, Pramuka - Informal : MASS-PK 2. Kegiatan pengelolaan dan implementasi ditpenduk di 3 jalur :	1. Materi Penduk - Formal : SD, SMP, SMA/K, PTPK - Non Formal : Diklat, Pramuka Informal : MASS-PK

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ul style="list-style-type: none"> - Formal : SD, SMP, SMA/K, PTPK - Non Formal : Diklat, Pramuka Informal : MASS-PK	
	Direktorat: Analisis Dampak Kependudukan	Pengelolaan Analisis/Kajian Dampak Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Profil 2. Data PK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian 2. Model
		Pengelolaan Model Solusi Strategis Pnendalian Dampak Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data SDKI 2. SUSENAS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian 2. Model
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB	Pembinaan Faskes untuk pelayanan KB yang terstandarisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga dokter/Bidan yang kompeten memberikan pelayanan KB MKJP 2. Sarana pelayanan KB MKJP 3. Alat dan Obat Kontrasepsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya tenaga dokter/bidan yang terlatih dalam memberikan pelayanan KB MKJP 2. Terpenuhinya sarana pelayanan KB di Faskes 3. Terpenuhinya alat dan obat kontrasepsi di faskes dan tidak terjadinya stok out alokon MKJP selama lebih dari 2 bulan dalam 1 tahun
	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB	Pembinaan Faskes Pelayanan KB yang terstandarisasi	Standar Kompetensi (Pelatihan BKKBN)	Tenaga provider yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan pelayanan KB-KR	Standar kompetensi (Pelatihan BKKBN)	Tenaga Provider yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di faskes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akseptor/masyarakat ingin mendapatkan pelayanan/konsultasi KB 2. Data direktori faskes (klinik, PMB (Praktek Mandiri Bidan), puskesmas, rumah sakit, Pustu, dan lain-lain) 3. Karakteristik akseptor 4. Data provider (dokter dan bidan) 5. Data konsultasi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi drop out dengan platform KLIK-KB dengan fitur reminder pada akseptor 2. Modern CPR (Contraception Prevalensi Rate) 3. Karakteristik akseptor 4. Data provider (dokter dan bidan) 5. Data rekam medis, hasil konsultasi akseptor/masyarakat oleh bidan konsultasi
	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	Pembinaan Kelangsungan hidup Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pelayanan KBPP 2. Data Persalinan 	Peningkatan cakupan persentase KBPP
		Pembinaan Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Data PMS dan HIV	Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang PMS dan HIV AIDS bagi remaja dan keluarga
		Pembinaan Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Fertilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data WUS yang melakukan penilaian mandiri risiko kanker serviks 2. Data perhitungan usia biologis perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang Kesehatan reproduksi wanita khususnya risiko kanker serviks 2. Peningkatan pengetahuan mengenai masa subur

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
				untuk perencanaan kehamilan
	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah khusus	Peningkatan Kesertaan KB di 100 Kab/kota dengan kesertaan rendah (12 Prov)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data peserta KB baru dan Peserta KB aktif di 100 Kab/kota 2. Data unmet need di 100 Kab/kota 3. Data kesertaan KB (CPR) di 100 Kab/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kesertaan KB (CPR) di 100 Kab/kota 2. Persentase Unmet need Kab/kota 3. Mengetahui potensi/persebaran tenaga pelayanan KB di lapangan (100 Kab/kota)
		Peningkatan Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kesertaan KB keluarga PBI 2. Data kesertaan KB keluarga Non PBI 	Untuk mengetahui jumlah keluarga PBI dan Non PBI yang mendapatkan pelayanan KB
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data peserta aktif dan peserta KB baru KB Pria (MOP/Vaksetomi dan kondom) 2. Data tenaga provider yang telah mendapatkan pelatihan MOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kesertaan KB Pria (MOP/Vaksetomi dan kondom) 2. Mengetahui persebaran tenaga provider yang telah dilatih MOP/Vaksetomi di seluruh provinsi
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan konsep/desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita dan Anak 2. Menyusun perbaikan konsep/desain program pembinaan ketahanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain Program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 2. Perbaikan konsep/desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<p>keluarga melalui Bina keluarga Balita dan anak</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan uji coba desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Melakukan perbaikan desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga Balita dan anak berdasarkan hasil uji coba Melakukan diseminasi desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Finalisasi desain Program Pembinaan Ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil uji coba desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba Laporan kegiatan diseminasi desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Hasil final desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak melalui Bina Keluarga Balita dan anak	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun rancangan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> Draft konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun perbaikan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 3. Melakukan uji coba desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 4. Melakukan perbaikan desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Melakukan diseminasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 6. Finalisasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perbaikan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 3. Hasil uji coba desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 4. Desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Laporan diseminasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 6. Desain final program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 7. Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
				pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak
	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran program adalah keluarga yang memiliki remaja 2. Tergabung dalam kelompok kegiatan (Poktan) BKR (Bina Keluarga Remaja) 	Buku membantu remaja merencanakan masa depannya
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja Melalui Bina Keluarga Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran program adalah keluarga yang memiliki remaja 2. Tergabung dalam kelompok kegiatan (POKTAN) BKR (Bina Keluarga Remaja) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 1001 cara bicara orangtua dengan remaja 2. Buku jurnal 1001 cara bicara 3. Kartu bermain 1001 cara bicara
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran program adalah remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah 2. Tergabung dalam kelompok kegiatan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Rencanan Masa Depanmu 2. Modul tentang kita
	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Melalui Bina Keluarga Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 7 dimensi Lansia Tangguh 2. Orientasi pendampingan perawatan jangka Panjang (PJP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman 7 Dimensi Lansia Tangguh 2. Meningkatkan keterampilan keluarga dalam pendampingan PJP
		Pengelolaan Program Kelanjut usiaan	Sosialisasi persiapan bagi pra lansia menjadi lansia tangguh	Peningkatan kemampuan pra lansia menjadi lansia Tangguh

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga 2. Data capaian program DITPEMKON 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data implementasi kegiatan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga 2. Hasil capaian program DITPEMKON
	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	Pengelolaan Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen (Pergub, Perwal, dan lain-lain) 2. Dokumen MoU 3. Dokumen PKS
		Pengelolaan Kemitraan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen MoU 2. Dokumen PKS 3. Rencana Aksi
		Pengelolaan Kemitraan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen MoU 2. Dokumen PKS 3. Rencana Aksi
	Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Pengelolaan Promosi/KIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan strategi komunikasi yang ditentukan ditingkat pusat dapat dipertajam dan dikembangkan di tingkat provinsi atau kab/kota 2. Pengembangan narasi, talking point Bersama para pakar 3. Pengembangan desain/prototype/template isi pesan Bersama direktorat pengampu/wali pesan 4. Distribusi desain/prototype kepada pengelola KIE sub Nasional dan mitra kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi KIE yang sesuai kebutuhan/keinginan khalayak 2. Proses promosi/sosialisasi yang efektif dan efisien 3. Pengelola KIE yang kompeten

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan KIE/promosi melalui berbagai media (channeling) berdasarkan segmentasi (wilayah, kelompok umur, dan seterusnya) 6. Pengelolaan Media KIE (lini atas, lini tengah, dan lini bawah) serta upaya menjaga keterlibatan audience 7. Evaluasi, monitoring sebagai dasar pelaksanaan program KIE tahun berikutnya 8. Peningkatan kapasitas pengelola KIE tingkat pusat Provinsi/Kabupaten/Kota sampai lini lapangan 	
		Pengelolaan Berita Melalui Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan agenda setting berdasarkan isu media maupun isu khalayak 2. Penentuan isu yang akan di angkat dalam redaksi media 3. Penyusunan talking point 4. Penyampaian pesan atau berita dari narasumber melalui media massa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi / berita tertayang pada media baik yang bersifat promosi produk atau program maupun pencitraan dan advokasi 2. BKKBN hadir pada isu-isu strategis yang relevan 3. Tekonfirmasinya isu/pemberitaan yang tidak/kurang selaras atau pada saat krisis komunikasi
	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Pengelolaan Data Informasi(Pengelolaan Data Program)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rutin (perubahan kebijakan, aturan main, rencana strategis) dan non rutin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar data, standar template (collect data) dalam bentuk form data

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			2. Data dasar kader, Faskes, keluarga, kelompok kegiatan (balita, remaja, lansia), keluarga sejahtera	2. Pelaporan pengelolaan data
		Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi	1. Regulasi 2. Informasi dan kebutuhan komponen	1. Sistem pencatatan (prototype) 2. Sistem pelaporan (prototype)
		Pemanfaatan data dan informasi Program KKBPK	1. Pengambilan keputusan (stakeholder meliputi : gubernur, walikota, dan jajaran lainnya) 2. Data operasional	Data analytic
	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan	Pengelolaan Penggerakan Program KKBPK di Bina Lini Lapangan melalui Tenaga Lini Lapangan, Institusi Masyarakat Pendesaan, melalui mekanisme	1. Pencatatan dan Pemantauan Kegiatan Penyuluh KB/PLKB Kinerja Penyuluh KB sesuai dengan wilayah kerja/desa binaan (Evisum) 2. Jaminan kompetensi Penyuluh KB/PLKB untuk menduduki jenjang jabatan di atasnya (sertifikasi). 3. Pemberian informasi, materi, apresiasi kerja dan motivasi secara langsung dan adanya komunikasi interaktif secara parsial maupun secara global dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada SDM lini lapangan melalui	1. Pencapaian kinerja penyuluh KB/PLKB 2. Tenaga penyuluh KB/PLKB yang kompeten 3. Meningkatnya pengetahuan tenaga lini lapangan (penyuluh KB/PLKB PNS dan Non PNS) kader PPKBD/Sub PPKBD

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<p>pemanfaatan media sistem informasi lini lapangan (SILILI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pencatatan dan pemantauan kegiatan PLKB Non PNS sesuai dengan wilayah kerja/desa binaan (desktop) 5. Pencatatan dan pelaporan kegiatan mekanisme operasional di tingkat desa/kelurahan 	
		Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kegiatan penyuluh KB/PLKB secara real-time 2. Pelaporan kegiatan PLKB Non PNS setiap bulan 3. Penyampaian materi dan media informasi terupdate dan terkini secara langsung kepada 1,2 juta pengakses SILILI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data capaian kinerja penyuluh yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja penyuluh KB/PLKB PNS 2. Data capaian kinerja PLKB Non PNS 3. Data desa/kelurahan yang melakukan kegiatan mekanisme operasional lini lapangan 4. Meningkatnya pengetahuan pengelola dan pelaksana program lini lapangan dan tenaga lini lapangan (penyuluh KB/PLKB PNS dan Non PNS) kader PPKBD/Sub PPKBD 5. Data presensi/kehadiran penyuluh KB/PLKB

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	Direktorat: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan diklat dalam negeri (Pendidikan jangka Panjang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Pendidikan jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing unit kerja sehingga setelah selesai melaksanakan pendidikan jangka panjang dapat memberikan pemikiran baru guna pengembangan organisasi 2. Pelaksanaan seleksi bagi calon peserta pendidikan jangka Panjang 	Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai dengan bidang ilmu dengan unit kerja
		Penyelenggaraan Diklat Dalam Negeri (Diklat Teknis/Fungsional/Kepemimpinan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pelatihan kepemimpinan bagi pejabat structural BKKBN 2. Tersedianya pelatihan teknis bagi ASN BKKBN 3. Tersedianya pelatihan bagi ASN BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pelatihan ASN minimal 20 JP tiap tahun terpenuhi 2. ASN yang menduduki jabatan fungsional memahami tugas fungsi serta cara pencapaian karier masing-masing
	Direktorat: Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Panjang)	Penawaran Beasiswa jangka panjang dari Pulin	Orang/pegawai yang dapat mengikuti pendidikan jangka panjang diluar negeri
		Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Pendek/OST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tawaran Studi Jangka Pendek dari LN (Luar Negeri) 2. Pegawai yang bekerja di bidang studi jangka pendek yang ditawarkan 	Orang/ pegawai yang dapat mengikuti pendidikan jangka pendek diluar negeri

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Penyelenggaraan Pelatihan/Konferensi Internasional	Koordinat dengan mitra KL terkait	Peserta pelatihan dari luar negeri yang datang ke Indonesia dalam kerangka program Bangsa Kencana
		Partisipasi dalam Konferensi/Pertemuan/Sidang Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan kepada BKKBN 2. Penyusunan statement BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan/Pejabat BKKBN yang mengikuti pertemuan tingkat internasional 2. Statement BKKBN dalam forum internasional
		Kerja sama luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi proses pengajuan kerja sama (data nama, kontak, bidang kerja sama), hasil penjajagan, informasi proses MOU, rencana induk kerja kegiatan 2. Road Map Kegiatan dan Input kegiatan 3. Nama direktorat dan nama perwakilan BKKBN Provinsi, kebutuhan program, dan kemampuan/kelebihan program yang dimiliki untuk dikerjasamakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi sejarah kerja sama dan monitoring kerja sama 2. Dokumentasi dan informasi proses kegiatan 3. Mapping kerja sama luar negeri
		Pengelolaan Administrasi Dinas Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. file penting, spj scanan 2. data SBU/SBM Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi file yang aman dalam jaringan internal BKKBN 2. SPJ otomatis

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Penduduk	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Processing 2. Referensi untuk memperkaya hasil penelitian 	Tidak dituliskan output
		Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun materi Diseminasi 2. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan kependudukan 	Tersosialisasikannya hasil penelitian dan pengembangan kependudukan untuk digunakan sebagai input kebijakan/referensi untuk penelitian selanjutnya
		Kemitraan dan Pengelolaan Administrasi Puslitbang Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola administrasi anggaran 2. Tata Kelola persuratan dan kearsipan 3. Database mitrakerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya tata Kelola administrasi keuangan Puslitbang kependudukan yang accountable 2. Terselenggaranya tata Kelola persuratan dan kearsipan puslitbang kependudukan yang cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan baik 3. Terselenggaranya kemitraan dengan Lembaga penelitian atau pusat studi lainnya
		Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan	Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Program KKBPK dengan mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang Kerjasama kemitraan dengan mitra baik dari perguruan tinggi maupun kementerian/Lembaga 2. Kapasitas dan kompetensi SDM peneliti yang mumpuni,

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Keluarga Sejahtera		3. Tersedianya panduan Kerjasama penelitian dan pengembangan	
		Pelaksanaan penelitian dan pengembangan program Kependudukan, KB dan KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disahkannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga. 2. Kapasitas dan kompetensi fungsional peneliti dalam menghasilkan karya tulis ilmiah (jurnal) berskala nasional dan internasional. 3. Peningkatan kemampuan melalui pelatihan yang mendukung fungsi penelitian dan pengembangan 4. Adanya tim etika penelitian yang terdiri dari para pakar sesuai bidangnya. Tim etika telah disahkan dengan SK Kepala BKKBN 5. Telah dibentuk dan disahkannya majelis assessor peneliti 6. Tersedianya SOP Puslitbang KB dan KS 	Hasil penelitian dan pengembangan sebagai input perumusan kebijakan program

3.3. Arsitektur Layanan Saat Ini

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

3.3.1. Layanan Administrasi Pemerintahan Saat Ini

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Layanan administrasi meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Keuangan
4. Pengadaan barang dan jasa
5. Kepegawaian
6. Kearsipan
7. Pengelolaan barang milik Negara
8. Pengawasan akuntabilitas kinerja
9. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah

Tabel 3 Layanan Administrasi Pemerintahan Saat Ini

No.	Layanan	Sistem Pendukung Informasi	Keterangan
1	Perencanaan dan Penganggaran	RKAKL	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
2		KRISNA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu, KemenPAN-RB, dan Bappenas
3	Keuangan	SAIBA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
4		Persediaan	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
		E-Rekon	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
5		CaLK SATKER	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
10	Pengelolaan BMN	SIMAK BMN	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
12		SIMAN	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
13	Pengadaan Barang dan Jasa	SIRUP	Aplikasi disediakan oleh LKPP
15		LPSE	Aplikasi disediakan oleh LKPP
16	Kepegawaian	Layanan Manajemen Kepegawaian BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
17		SAPK	Aplikasi disediakan oleh BKN
18		Layanan Absensi Pegawai	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
19		SKP Online	Aplikasi disediakan oleh BKN
20	Manajemen Kinerja	E-SAKIP	Aplikasi disediakan oleh KemenPAN-RB
21	Monitoring dan Evaluasi	Layanan Manajemen Kinerja BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
22		SMART DJA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
23		E-Monev	Aplikasi disediakan oleh Bappenas
24	Hukum	Layanan JDIH BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN

No.	Layanan	Sistem Informasi Pendukung	Keterangan
25	Pengawasan Pengaduan	Pengaduan Publik	Aplikasi disediakan oleh KemenPAN-RB
26		Layanan Pengawasan Internal BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
27		SIMWAS	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
28		Whistle Blower	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
29	Perpustakaan	E-Library	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN

3.3.2. Layanan Publik Saat Ini

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Layanan publik saat ini sebagai berikut.

No.	Layanan	Sistem Informasi Pendukung	Keterangan
1.	Pengendalian Penduduk	Rumah Dataku	
2.		Kampung KB	
3.		Sipendu (Sistem Informasi Peringatan Dini Kependudukan)	
4.	KBKR	Monika	
5.		Manajemen Alkon	
6.	KSPK	SiapNikah	
7.		Golantang	
8.		Yo-Sakurga	
9.		OrangtuaHebat	
10.		SINTA	
11.		Satya Gatra	
12.	Penelitian, Pelatihan	CITC	
13.		E-Learning	
14.		E-Journal	
15.		SIGA	

No.	Layanan	Sistem Informasi Pendukung	Keterangan
16.	Pengolahan Data Keluarga	PK (Pendataan Keluarga)	
17.		BDKI	
18.		PBDKI	
19.		YANKB	
20.		DALAP	
21.		Non-Rutin	
22.		Survey Management	

3.4. Arsitektur Aplikasi Saat Ini

3.4.1. Kondisi Aplikasi Saat Ini Secara Umum

Berikut ini adalah deskripsi aplikasi eksisting BKKBN.

Tabel 4 Katalog Aplikasi Saat Ini

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
1.	BSC	Aplikasi pengukuran kinerja	Biro Perencanaan
2.	Google Form	Aplikasi umum publik	
3.	Website koren.bkkbn.go.id http//e-	Aplikasi media perencanaan program dan anggaran termasuk pelaksanaan KOREN	
4.	SPA	Aplikasi SPA online, saat ini masih dalam bentuk dummy/prototype, dan masih belum digunakan masih dalam tahap penyempurnaan	
5.		Aplikasi ini berfungsi untuk mengakomodir usulan perencanaan program	
6.	SIPUJJA	Aplikasi untuk melakukan pengukuran evaluasi kinerja	
7.	SIMSDM	Aplikasi SIMSDM Memberikan dukungan agar proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Modul-modul aplikasi SIMSDM diantaranya adalah : Modul Cuti, Model Gaji, Modul Mutasi, Modul Digitalisasi, Modul Pengukuran Kinerja, Modul Data Pegawai, Modul Hukuman dan Disiplin, Modul Assesment, Modul Penilaian 360 derajat(penilaian internal),Pola karir	Biro Sumber Daya Manusia

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
8.	SAPK	My SAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat	
9.	E-FORMASI	Aplikasi eksternal yang dikembangkan Kementerian PANRB dalam menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja (Kementerian PANRB)	
10.	SIDIKA	Aplikasi dalam pengelolaan sistem pelatihan dan Pendidikan di BKKBN yang terdapat modul Manajemen training dan pendidikan	
11.	SIPP	Aplikasi SIPP Digunakan untuk mengelola informasi pendapatan dan penghasilan pegawai. Modul-modul pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pendapatan Pegawai) diantaranya memuat tentang : Modul gaji pegawai, potongan PPH pegawai, tunjangan kinerja pegawai	
12.	Presensi Online	Aplikasi yang digunakan untuk presensi dan kehadiran serta mengukur nilai keefektifan pegawai dengan fitur sebagai berikut : Fitur Login/logout, Fitur Profil, Fitur input in/out, Fitur maps, Fitur pelaporan absensi	
13.	Aplikasi SAIBA	Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrua) merupakan aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk keperluan Pelaporan (Kemenkeu)	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
14.	Aplikasi SIMAK BMN	Pelaporan dan masukkan barang milik negara dengan pelaporan anggaran tahun lalu dan anggaran tahun berjalan (Kemenkeu)	
15.	Aplikasi Akuntansi Persediaan (UAKPB)	Aplikasi yang digunakan untuk pelaporan Anggaran berjalan dengan tahun anggaran lalu yang dibuktikan dalam dokumen sumber persediaan masuk dan untuk rekaman data dalam pencatatan transaksi yang dilakukan setiap satker BUMN (Kemenkeu)	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
16.	Aplikasi E-REKON	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (Kemenkeu)	
17.	SMART Kemenkeu	Aplikasi yang dikembangkan Kemenkeu untuk Pelaporan Kinerja Anggaran Satker	
18.	Sakura	Aplikasi untuk mengelola sistem pengelolaan anggaran BKKBN	
19.	Morena DAK	Aplikasi yang digunakan untuk Perencanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan membantu pendanaan untuk kegiatan di wilayah Provinsi Kabupaten	
20.	E-SPIP BKKBN	Aplikasi SIPP Digunakan untuk mengelola informasi pendapatan dan penghasilan pegawai.	
21.	F/V Gudang (Logistik)	Aplikasi Dokumentasi pelaporan pergudangan	
22.	SIRIKA	Aplikasi Meningkatkan visibilitas serta kualitas dan tingkat pemanfaatan data ketersediaan alkon (versi baru aplikasi logistik)	
23.	CaLK Satker	penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Lembaga dalam penyusunan Laporan Keuangan. (Kemenkeu)	
24.	SIMAN	Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. (Kemenkeu)	
25.	Aplikasi JDIH	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Aplikasi ini bertujuan untuk produk hukum dan berita hukum dan pendataan dalam bentuk dokumentasi payung hukum	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
26.	Google Form	Aplikasi Umum Publik	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
27.	E-Monev	Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menilai capaian kinerja (BAPPENAS)	Direktorat: Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
28.	SPSS (Aplikasi pengelolaan data statistik) / Statistik Rutin	Aplikasi yang digunakan sebagai pengukuran nilai dari pelaporan pelayanan Keluarga Berencana dan pengendalian Lapangan dan sebagai sarana dalam menyediakan library dan perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif sebagai software analisis data	Direktorat: Perencanaan Pengendalian Penduduk
29.	SPECTRUM (Aplikasi Proyeksi Penduduk)	Aplikasi yang dikembangkan oleh Avenir Health. Spectrum digunakan sebagai penyusun kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan	
30.	FPET (Family Planning Estimation Tool)	Tools yang dikembangkan oleh Track20. Aplikasi digunakan untuk memonitor pencapaian program KB dan dapat memproyeksi situasi diwaktu yang akan datang melalui konsep modelling (proyeksi) yang dihasilkan	
31.	Tools Standar Desktop (Excel)	Aplikasi dasar dan standar dalam membantu kegiatan operasional bisnis dan mendukung kebutuhan TI	
32.	Aplikasi Pemetaan (Devinfo, ArcGIS)	Sistem database yang dapat digunakan untuk kompilasi dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta geografis dengan cakupan wilayah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota	
33.	SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kemendagri	Aplikasi yang dikembangkan oleh Instansi Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menganalisa pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan pendataan perencanaan pembangunan daerah	
34.	SDKI	Aplikasi untuk mengetahui jumlah wilayah yang baru dan pembagian wilayah pelayanan KB dan update wilayah baru	
35.	Google Form	Aplikasi Umum Publik	Direktorat: Kerjasama Pendidikan Kependudukan

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
36.	E-Monev	Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menilai capaian kinerja (BAPPENAS)	
37.	Youtube	Aplikasi umum publik	
38.	Instagram akun PopTalk	Aplikasi Umum Publik	
39.	CIS BKKBN	Aplikasi yang memuat tentang materi- materi BKKBN dalam Kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan dan sebagai pusat informasi BKKBN	
40.	E-Learning	Aplikasi untuk media pembelajaran mandiri dan Pendidikan serta pelatihan pengembangan kompetensi peserta BKKBN	
41.	SIDIKA	Aplikasi dalam pengelolaan sistem pelatihan dan Pendidikan di BKKBN yang terdapat modul Manajemen training dan pendidikan	
42.	Aplikasi Kampung KB	Memberikan panduan pelaporan kepada pengelola Kampung KB	Direktorat: Analisis Dampak Kependudukan
43.	Sipendu (Sistem Informasi Peringatan Dini Kependudukan)	Informasi peringatan dini dampak kependudukan merupakan serangkaian informasi tentang kondisi kependudukan pada suatu wilayah dengan dampak yang ditimbulkannya beserta dengan alternatif kebijakan . Isu atau masalah kependudukan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat dinamis	
44.	SILILI (Sistem Informasi Lini Lapangan)	Aplikasi yang menampilkan informasi kondisi lapangan pelayanan KB dan sebagai pelaporan aktivitas dan informasi dilapangan	
45.	SIGA	aplikasi yang dibangun berbasis Teknologi Informasi guna memberikan kemudahan kepada pengelola data dan informasi dan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan data pelaporan dan statistik rutin (input- proses-output) maupun	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
		pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	
46.	Statistik Rutin	Aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai Perka No. 255/PER/G4/2011. Berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	
47.	MONIKA	Aplikasi ini bertujuan untuk mendata ulang dokter dan bidan yang telah dilatih, memetakan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan apabila belum memiliki sertifikat dapat melakukan proses sertifikasi kompetensi melalui website Monika di www.monika.bkkbn.go.id	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB
48.	Aplikasi Konsultasi Pelayanan KB pada Klik-KB yang berfokus pada PMB	Aplikasi ini akan menghubungkan secara langsung antara akseptor KB dengan bidan dan memungkinkan akseptor mendapatkan informasi secara interaktif atau konseling dalam aplikasi Klik-KB	
49.	R/R (statistik Rutin) (Pelkon /Pelayanan Kontrasepsi)	Aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai Perka No. 255/PER/G4/2011. Berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi
50.	SIHA Kemenkes	Aplikasi pelaporan data dan dokumentasi HIV dan AIDS serta informasi mengenai HIV dan AIDS (Kemenkes)	
51.	Sobar Model Versi 2	Untuk mengetahui tingkat risiko akan kanker serviks terhadap perempuan untuk pencegahan secara dini (Stikes Indonesia Maju)	
52.	Aplikasi IKO, RSCM	Aplikasi Indonesian Kalkulator Oocyte (IKO) yang dikembangkan Prof. Iko untuk membantu pelayanan bidang fertilitas (kesuburan) untuk mengetahui umur biologis seorang perempuan, dosis obat yang dibutuhkan untuk mengatasi gangguan kesuburan (IKO)	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
53.	Kampung KB	Aplikasi yang dibangun untuk mengumpulkan informasi dari kampung KB yang bersangkutan (daerah tertinggal)	
54.	SIGA	aplikasi yang dibangun berbasis Teknologi Informasi guna memberikan kemudahan kepada pengelola data dan informasi dan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan data pelaporan dan statistik rutin (input- proses-output) maupun pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah khusus
55.	Pendataan Keluarga (PK)	melakukan penjadwalan ulang untuk setiap wilayah dan terkait dengan aplikasi SIGA	
56.	Statistik Rutin	Aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai Perka No. 255/PER/G4/2011. Berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	
57.	Kampung KB	Aplikasi yang dibangun untuk mengumpulkan informasi dari kampung KB yang bersangkutan (daerah tertinggal)	
58.	SDKI	Aplikasi untuk mengetahui jumlah wilayah yang baru dan pembagian wilayah pelayanan KB dan update wilayah baru	
59.	Web BKKBN	untuk memberitahukan informasi publik tentang dokumentasi KB	Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak
60.	SIGA	aplikasi yang dibangun berbasis Teknologi Informasi guna memberikan kemudahan kepada pengelola data dan informasi dan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan data pelaporan dan statistik rutin (input- proses-output) maupun pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
61.	Website siap nikah.org	Aplikasi ini adalah informasi untuk mengukur kesiapan remaja sebelum menikah termasuk kesiapan diri dalam pengasuhan anak untuk keluarga berkualitas	Direktorat Bina Ketahanan Remaja
62.	Media Sosial (Instagram, Youtube, dan facebook) GenreIndonesia	Aplikasi umum publik	
63.	Aplikasi Golantang	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan rutbrik bagi lansia dan keluarga lansia dalam mencapai lansia Tangguh dan berkualitas. Aplikasi ini berfungsi untuk sarana sosialisasi Program Bina Keluarga Lansia	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
64.	Aplikasi Satya Gatra	Aplikasi ini merupakan platform untuk sarana konsultasi mengenai persoalan keluarga berencana (KB)	
65.	SISKA (Sistem Informasi Advokasi Kemitraan)	Aplikasi ini dibuat sebagai media komunikasi dan informasi antara BKKBN dengan para stakeholder dan mitra kerja dalam rangka meningkatkan komitmen keduanya dalam program Bangsa Kencana	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga
66.	ARKANA (Arsip Digital Kemitraan)	Aplikasi untuk media penyimpanan dokumen- dokumen yang disimpan dalam bentuk media digital dengan para stakeholder dan mitra kerja	
67.	Aplikasi Arsip (http://srikandi.bkkbn.go.id/)	Aplikasi dari lembaga ANDRI (Arsip Nasional Indonesia) Modul Kearsipan (ANRI/Arsip Nasional Indonesia)	
68.	JDIH (http://JDIH.bkkbn.go.id)	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Aplikasi ini bertujuan untuk produk hukum dan berita hukum dan pendataan dalam bentuk dokumentasi payung hukum	
69.	Pustaka	Aplikasi untuk pengelolaan perpustakaan dalam digital perpustakaan	Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
70.	Media Monitoring (HUMAS)	Aplikasi pemantuan untuk mengukur dan mengevaluasi berita secara akurat	
71.	SIGA	aplikasi yang dibangun berbasis Teknologi Informasi guna memberikan kemudahan kepada pengelola data dan informasi dan pemangku	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
		kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan data pelaporan dan statistik rutin (input- proses-output) maupun pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	Direktorat Pelaporan dan Statistik
72.	SR	Aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai Perka No. 255/PER/G4/2011. Berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	
73.	Pendataan Keluarga	melakukan penjadwalan ulang untuk setiap wilayah dan terkait dengan aplikasi SIGA	
74.	Aplikasi Dekstop (MS- Office)	Aplikasi umum dan aplikasi standar dalam operasional kerja	
75.	SPSS (Pengelolaan Data Statistik)	Aplikasi yang digunakan sebagai pengukuran nilai dari pelaporan pelayanan Keluarga Berencana dan pengendalian Lapangan dan sebagai sarana dalam menyediakan library dan perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif sebagai software analisis data	
76.	Model Tablu (open Source)	Aplikasi business intelligence yang digunakan sebagai visualisasi data dalam penentuan pengambilan keputusan	
77.	Dashboard	Aplikasi untuk memonitor dan memantau pelayanan KB	
78.	EVISUM	Aplikasi pelaporan kinerja harian untuk Petugas Lapangan KB (PLKB)	Direktorat: Bina Lapangan
79.	SILILI	Aplikasi yang menampilkan informasi kondisi lapangan pelayanan KB dan sebagai pelaporan aktivitas dan informasi dilapangan	Penggerakan Lini Lapangan
80.	Sistem Kinerja PLKB Non PNS (EKLOP)	Aplikasi untuk membantu memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina, memantau dan mengukur kinerja PLKB Non PNS.	
81.	Aplikasi presensi penyuluh KB/PLKB	Aplikasi dalam pengukuran nilai performance untuk data kehadiran bagi kinerja penyuluh KB/PLKB	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
82.	Aplikasi Monalisa	Aplikasi yang digunakan dalam kegiatan operasional di lapangan dalam pelayanan KB dan aktivitas yang dilakukan di lapangan	
83.	SDKI	Aplikasi untuk mengetahui jumlah wilayah yang baru dan pembagian wilayah pelayanan KB dan update wilayah baru	
84.	Kampung KB	Aplikasi yang dibangun untuk mengumpulkan informasi dari kampung KB yang bersangkutan (daerah tertinggal)	
85.	Blanded Learning	Aplikasi belajar mengajar yang menggabungkan, mengkombinasikan dan memadukan sistem pendidikan konvensional dengan sistem yang serba digital. Aplikasi ini bertujuan untuk interaksi secara langsung berupa diskusi langsung dalam proses Pendidikan dan pelatihan	Direktorat: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
86.	E-Learning	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola sistem pembelajaran mandiri dan membantu peserta dalam memahami materi pelatihan	
87.	Media Virtual Meeting	Aplikasi yang bertujuan membantu kegiatan diskusi selama pelatihan dan Pendidikan	
88.	SIDIKA	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola sistem pengelolaan pelatihan dan pendidikan di bkkbn	
89.	CITC (Center For International Training And Collaboration)	Aplikasi yang digunakan untuk membantu memperoleh informasi pelatihan dan kerjasama program kb dengan pihak internasional	Direktorat: Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
90.	Webmail	Aplikasi Surat elektronik untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan Kerjasama internasional	
91.	Aplikasi Monitoring Kerja Sama Luar Negeri	Aplikasi untuk melakukan pemantauan dalam program Kerjasama luar negeri dan pertukaran informasi dengan pihak internasional	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
92.	Aplikasi Monitoring Kegiatan	Aplikasi untuk membantu kegiatan sarana belajar dan informasi untuk meningkatkan keterampilan peserta BKKBN	
93.	SDKI	Aplikasi untuk mengetahui jumlah wilayah yang baru dan pembagian wilayah pelayanan KB dan update wilayah baru	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Penduduk
94.	puslitbang.bkkbn.go.id	Aplikasi pengelolaan penelitian dan pengembangan kependudukan untuk sebagai pusat informasi dan aktivitas pelatihan dan pendidikan	
95.	E-Journal	Aplikasi untuk digunakan sebagai media untuk penyimpanan jurnal-jurnal BKKBN dengan dapat diakses menggunakan webmail BKKBN	
96.	SPSS	Aplikasi yang digunakan sebagai pengukuran nilai dari pelaporan pelayanan Keluarga Berencana dan pengendalian Lapangan dan sebagai sarana dalam menyediakan library dan perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif sebagai software analisis data	
97.	Aplikasi desktop (MS-Office)	Aplikasi standar umum yang digunakan untuk operasional perusahaan	
98.	STATA	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola, menganalisis data SDKI dan mengukur serta pengambilan keputusan dalam program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah atau di lokasi	
99.	NVIVO	Aplikasi untuk pengelolaan dan Analisa data kualitatif dalam penentuan data statistik diwilayah dan daerah provinsi	
100.	E-Journal	Aplikasi untuk digunakan sebagai media untuk penyimpanan jurnal-jurnal BKKBN dengan dapat diakses menggunakan webmail BKKBN	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
101.	MOCO untuk SKAP (Survei Akinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan KB)	Aplikasi untuk media pengumpulan data survei RB, pelyanan publik, dan persepsi anti korupsi	
102.	Google Form	Aplikasi survei umum publik	
103.	Cis.bkkbn.go.id/latbang	Aplikasi untuk sarana dalam media penyimpanan data dan informasi internal BKKBN	

NO	Nama Aplikasi	Deskripsi Umum	Unit Kerja Terkait
104.	Pusdiklat (http://pusdiklat.bkkbn.go.id)	Aplikasi untuk membantu kegiatan sarana Pendidikan dan pelatihan BKKBN	
105.	SIDIKA	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola sistem pengelolaan pelatihan dan pendidikan di bkkbn	
106.	Sistem Informasi Pengawasan (SIP)	Aplikasi untuk pencatatan hasil temuan dan rekomendasi tindak lanjut temuan	
107.	Sakura	Informasi pengelolaan anggaran dan standarisasi SPJ setiap kegiatan (Rapat, dan surat perjalanan kegiatan)	
108.	Yo-Sakurga	Aplikasi produk usaha ekonomi (marketplace)	
109.	E-Monev	Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menilai capaian kinerja (BAPPENAS)	Direktorat: Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
110.	SIGA	aplikasi yang dibangun berbasis Teknologi Informasi guna memberikan kemudahan kepada pengelola data dan informasi dan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah dalam hal pengelolaan data pelaporan dan statistik rutin (input- proses-output) maupun pengambilan keputusan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	

3.5. Arsitektur Infrastruktur Saat Ini

Pembahasan infrastruktur ini disusun berdasarkan assessment beserta dokumen yang melengkapi assessment tersebut. Aspek-aspek yang dibahas adalah jaringan komputer, layanan server aplikasi dan data, End User Infrastructure, Data Center dan Disaster Recovery Center, dan keamanan infrastruktur.

3.5.1. Arsitektur Jaringan

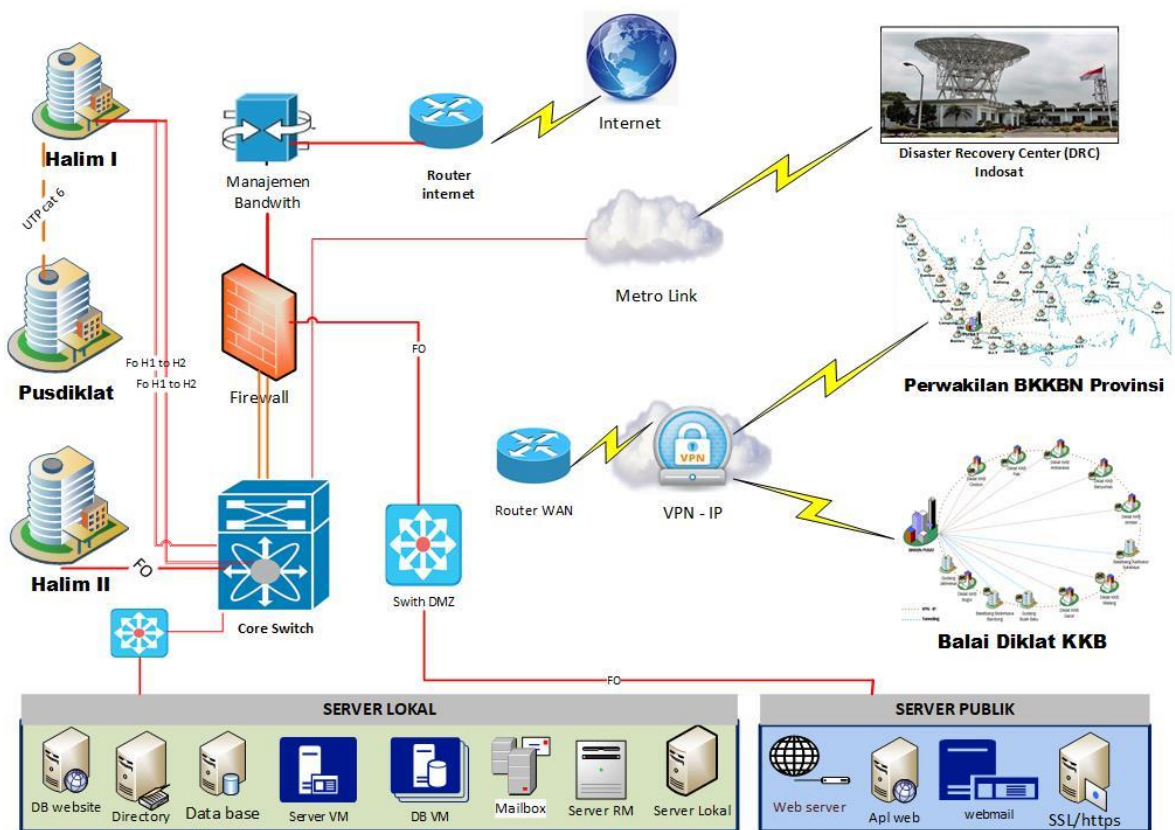
Jaringan Komputer terdiri dari:

- a. Arsitektur zonasi jaringan internal dan eksternal di BKKBN
- b. Wide Area Network, merupakan segmen akses ke luar network internal

Aspek-aspek yang dibahas merupakan fungsi dasar kelengkapan jaringan, yaitu:

- a. Arsitektur jaringan merupakan model yang digunakan sebagai acuan analisis dari model topologi eksisting. Secara ringkas, model ini merupakan Campus Network Model, dengan kelengkapan dari sisi eksternal dan internal.
- b. Kelengkapan elemen merupakan rincian dari arsitektur acuan tersebut, yaitu core layer, distribution layer, access layer, Internet dan Internet Edge
- c. Hierarki dan sistematika merupakan urutan keterkaitan fungsi antar elemen
- d. Redundansi merupakan fungsi ketersediaan fungsi elemen jaringan
- e. Skalabilitas merupakan fungsi kapasitas dari elemen jaringan

TOPOLOGY JARINGAN KOMPUTER BKKBN



Gambar 4 Topologi Jaringan Komputer

Pada gambar di atas dapat dilihat kondisi topologi jaringan BKKBN dimana segmentasi sudah terbagi menjadi internal campus LAN, core application data center. Pada Campus LAN sudah terbagi menjadi access, distribution dan core.

Topologi jaringan campus network kantor pusat BKKBN terdiri dari Gedung Halim 2 dan Gedung halim 1 yang terkoneksi menggunakan backbone fiber optic 8-core dengan kecepatan 1 Gbps yang terhubung ke core switch yang terdapat di lantai 3 yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1, lantai dasar dan Gedung PUSDIKLAT.

Infrastruktur jaringan computer BKKBN memiliki kemampuan untuk terkoneksi ke internet yang di provide oleh Diginet dengan kecepatan koneksi IIX 300 Mbps dan IX 200 Mbps, koneksi ke disaster recovery center menggunakan metrolink indosat berkecepatan 50 Mbps, dan MPLS VPN dengan kecepatan 100 Mbps untuk menghubungkan BKKBN dengan perwakilan BKKBN provinsi dan bali-balai Diklat KKB.

Berikut merupakan daftar perangkat jaringan komputer milik BKKBN:

Tabel 5 Daftar Perangkat Jaringan

No	Nama Perangkat	Merk dan Type	Fungsi dan Lokasi	Tahun Pembelian
1.	Router	Cisco 3845	DC	2008
2.	Router	Cisco 2801	DC	2008
3.	Firewall	Cisco ASA 5525X	DC	2015
4.	L2 Switch	Cisco 2960X	DC	2015
5.	Router	Cisco Router 3945	DC	2015
6.	L2 Switch	Cisco Catalyst 2960S	DC	2015
7.	NAC	Bluecoat S200	DC	2015
8.	DDos Protection	Cisco Firepower	DC	2017
9.	DDos Protection	Cisco UCS 220M4	DC	2017
10.	L3 Switch	Cisco catalyst 4507-RE	DC	2008
11.	L3 Switch	Cisco Nexus 7000	DC	2018
12.	L3 Switch	Cisco Catalyst 4503-E	DC	2012
13.	NAC	Bluecoat S200	DC	2015
14.	TelePresence	Cisco MCU 4220	DC	2008
15.	TelePresence	Cisco MCU 4210	DC	2008
16.	ADC	Alteon 5208	DC	2017
17.	Wireless equipment	Cisco 5500	DC	2019
18.	L3 Switch	Cisco Catalyst 3560	Backup DC	2008
19.	L3 Switch	Cisco Catalyst 3560	Backup DC	2008
20.	L3 Switch	Cisco 2801	Backup DC	2008
21.	L2 Switch	Catalyst 3200	DC	2018
22.	L2 Switch	Catalyst 3200	Backup DC	2015

3.5.2. Arsitektur Server dan Storage

BKKBN memiliki perangkat server yang berada di data center dan disaster recovery center. Server yang digunakan BKKBN menggunakan teknologi hyper-v, dimana terdapat beberapa server milik BKKBN yang sudah menggunakan teknologi hyperconverged infrastructure dan dimanfaatkan untuk layanan private cloud infrastructure as a service (IAS).

Pada Sisi media penyimpanan digital/storage, saat ini BKKBN menggunakan 3 jenis Storage yaitu:

- Storage Area Network (SAN) untuk kebutuhan hyper-v
- Network Attached Storage (NAS) untuk penyimpanan virtual machine hyper-v
- Flash yang digunakan untuk kebutuhan data SIGA, SMSDM, SIPAD, dan data lainnya

Berikut merupakan list server dan perangkat storage yang dimiliki oleh BKKBN:

Tabel 6 List Server

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
1.	JKTDHCP	HP PROLIANT DL 180 G6	852 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5504	DHCP Server windows	2011	Digunakan
2.	JKTOJS01	HP Proliant DL 380 Gen 9	1 TB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5 2603 V3	Open Jurnal Sistem Lipi	2016	Tidak Digunakan
3.	JKTSTRM01	DELL POWEREDGE R420	300 GB	16 GB	Intel (R) Xeon (R) E5-2430	Adobe media server	2015	Digunakan
4.	KVM	ATTEN	N/A	N/A	N/A	N/A	2011	Tidak Digunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
5.	KVM	MASTerviewIEW MAX	N/A	N/A	N/A	N/A	2008	Digunakan
6.	JKTFTP DATA01	HP PROLIANT DL 380 G7	146 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	php dan sql	2011	Digunakan
7.	JKTFTP02	HP PROLIANT DL 380 G7	500 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	N/A	2011	Tidak Digunakan
8.	SMSGATEWAY	HP PROLIANT DL 380 G7	146 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	N/A	2011	Tidak Digunakan
9.	PUSTAKA-BKKBN	HP PROLIANT DL 380 G7	146 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	N/A	2011	Tidak Digunakan
10.	ALLOT	HP PROLIANT DL 380 G7	146 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	N/A	2011	Tidak Digunakan
11.	DHCP02	HP PROLIANT DL 380 G7	146 GB	4 GB	Intel (R) Xeon (R) E5506	N/A	2011	Tidak Digunakan
12.	Storage	Fujitsu Ethernus DX 80 S2	6 TB	48 GB	N/A	Media Penyimpanan JKTHVSV02	2011	Dipergunakan
13.	JKTSIDUGA01	Fujitsu Primergy RX300 S5	600 GB	48 GB	2x Intel (R) Xeon (R) E5520	DNS External	2010	Dipergunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
14.	JKTEXMB02	Fujitsu Primergy RX300 S6	2.4 TB	96 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Email BKKBN	2011	Tidak Dipergunakan
15.	JKTLAB02	Fujitsu Primergy RX300 S6	1.2TB	128 GB	2x Intel (R) Xeon (R) E5620	N/A	2011	Dipergunakan
16.	KVM	Fujitsu S316.01	N/A	N/A	N/A	N/A	2011	Dipergunakan
17.	JKTFJHVS01	Fujitsu Primergy RX300 S6	1.9 TB	96 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Virtual Server Hyper V	2011	Dipergunakan
18.	JKTADDS01	VM-JKTFJHVS01	250 GB	8 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	DNS Internal	2011	Dipergunakan
19.	JKTAPSR01-SR	VM-JKTFJHVS01	555 GB	8 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Statistik Rutin (SR), FIIKB, FV Gudang (Logistik)	2011	Dipergunakan
20.	JKTFTPBIKUB01	VM-JKTFJHVS01	300 TB	8 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	FTP Sakura BIKUB	2011	Dipergunakan
21.	JKTPRESENSI01	VM-JKTFJHVS01	127 GB	4 GB	Intel(R) Xeon(R)	API Presensi	2011	Dipergunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
					CPU E5620			
22.	JKTWEBAUTH01	VM-JKTFJHVS01	300 GB	4 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Web Authentication	2011	Dipergunakan
23.	Nutanix	NX-6035	112,42 TiB	3.2 TiB	336 Ghz core	Virtual Server Hyper V	2017	Dipergunakan
24.	Nutanix	NX-6035					2017	Dipergunakan
25.	Nutanix	NX-6035					2017	Dipergunakan
26.	Nutanix	NX-1065					2016	Dipergunakan
27.	JKTCONFIG	Fujitsu Primergy RX300 S6	1.8 TB	24 GB	N/A	Konfigurasi Jaringan	2011	Dipergunakan
28.	PROXMOX	Fujitsu Primergy RX300 S6	1.5 TB	48 GB	2x Intel (R) Xeon (R) E5520	Virtual Server Proxmox Linux	2011	Dipergunakan
29.	JKTPUSNA01	Fujitsu Primergy RX300 S6	2.4 TB	48 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	SKAP PUSNA (Mocco)	2011	Dipergunakan
30.	JKTLPSE01	Fujitsu Primergy RX300 S7	1.2TB	32 GB	2x Intel (R) Xeon (R) E5620	LPSE (Lama) ex dari SBP	2013	Tidak Dipergunakan
31.	JKTSIDUGA02	Fujitsu Primergy RX300 S7	600 GB	16 GB	2x Intel (R) Xeon	DNS External	2013	Dipergunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
					(R) E5620			
32.	JKTPUSNA02	Fujitsu Primergy RX300 S6	N/A	N/A	N/A	N/A	2011	Dipergunakan
33.	JKTPUSNA03	Fujitsu Primergy RX300 S6	N/A	N/A	N/A	N/A	2011	Dipergunakan
34.	JKTDYRM01	Fujitsu Primergy RX300 S6	600 GB	64 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	SIMSDM Lama (Microsoft Integrasi SIDIKA)	2011	Dipergunakan
35.	KVM	Fujitsu RC25	N/A	N/A	N/A	N/A	2011	Dipergunakan
36.	JKTHVSV02	Fujitsu Primergy RX300 S7	600 GB (2 TB ke Eternus DX 80)	128 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Storage Hyper V	2013	Dipergunakan
37.	JKTADDS02	VM-JKTHVSV02	300 GB	8 GB	4 Core V CPU	DNS Internal (Secondary)	2013	Dipergunakan
38.	JKTAPRS01	VM-JKTHVSV02	300 GB	10 GB	4 Core V CPU	Server Share Point	2013	Dipergunakan
39.	JKTAVKS01	VM-JKTHVSV02	136 GB	16 GB	16 Core V CPU	Antivirus Kaspersky	2013	Dipergunakan
40.	JKTLINLAP10	VM-JKTHVSV02	60 GB	4 GB	4 Core V CPU	Materi Penyuluhan PKB Linlap	2013	Dipergunakan
41.	JKTTELADANWIN	VM-JKTHVSV02	127 GB	8 GB	4 Core V CPU	Aplikasi Teladan	2013	Dipergunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
42.	JKTVM02	Fujitsu Primergy RX300 S6	2.4 TB	128 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Virtual Server VM ware	2011	Dipergunakan
43.	JKTSPDB01	Fujitsu Primergy RX300 S7	2.4 TB	272 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	Data Base Web Pusat Provinsi.Net Microsoft (Lama)	2013	Tidak Dipergunakan
44.	JKTAPDB01	Fujitsu Primergy RX300 S7	1.2 TB	128 GB	Intel(R) Xeon(R) CPU E5620	SQL Server	2013	Dipergunakan
45.	JKTVM01	Fujitsu Primergy RX500 S7	2.4 TB	128 GB	4x E5 4620	Virtual Server VM ware	2013	Dipergunakan
46.	JKTAPDB03	Fujitsu Primergy RX500 S7	2.4 TB	160 GB	4x E5 4620	Database Sharepoint Aplikasi	2013	Dipergunakan
47.	JKTSPDB04	POWEREDGE DELL R930	600 GB	64 GB	Intel (R) Xeon (R) E7-4830 v3	N/A	2015	Digunakan
48.	PROXMOX	FUJITSURX2540M1	1.2 TB	128 GB	2x E5 2630	N/A	2015	Tidak Digunakan
49.	JKTCPANEL01	FUJITSURX2540M1	1.2 TB	128 GB	2x E5 2630	cpanel dan WHM, SSL	2015	Digunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
50.	BACKUP CONFIG	FUJITSURX4770M2	4.8 TB	250 GB	2x E5 2630	N/A	2015	Digunakan

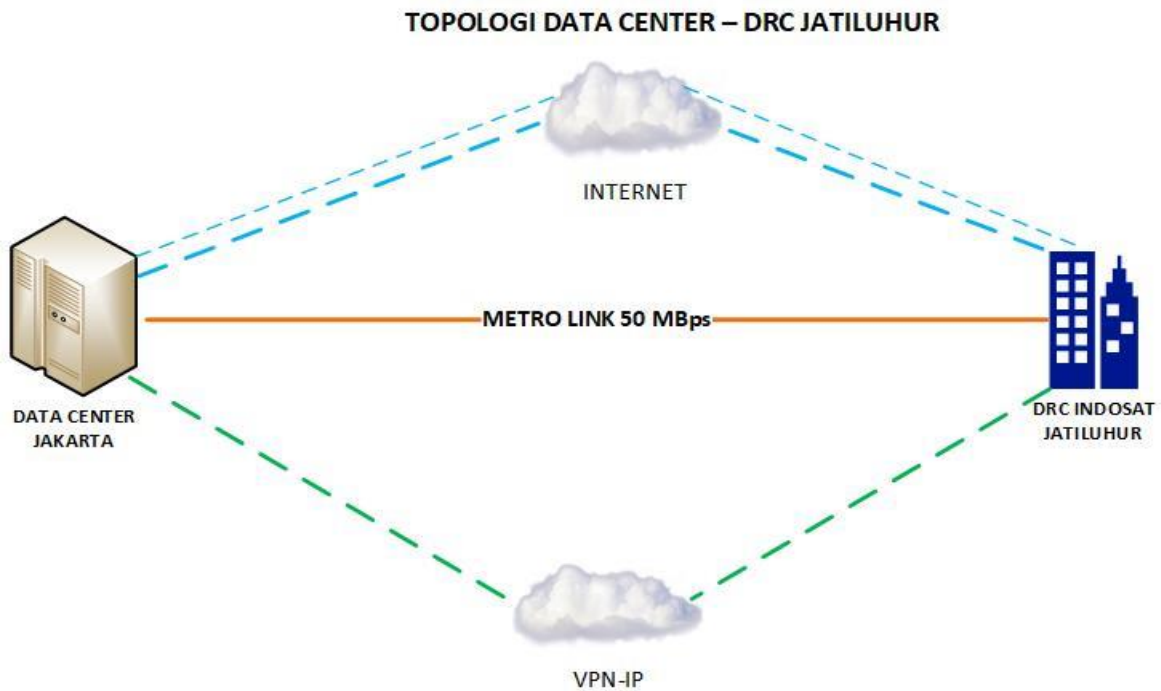
Tabel 7 List Storage

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
1.	DRDWDB01	Dell	4.3 TB	128 GB	2 x E5-2667 v3 3.2GHz 8 Cores	Datawarehouse Server	2015	Digunakan
2.	DRAPDB04	Dell	1.4 TB	96 GB	2 x E5-2690 v3 2.6GHz 12 Cores	Database Keluarga Nasional	2015	Digunakan
3.	DRETDB01	Dell	300 GB	32 GB	2 x E5-2637 v3 3.5GHz 4 Cores	ETL Engine	2015	Digunakan
4.	DROLDB01	Dell	1.5 TB	96 GB	2 x E5-2620 v3 2.4GHz 6 Cores	OLAP - Cube	2015	Digunakan
5.	DRSPFE04	Dell	300 GB	32 GB	2 x E5-2620 v3 2.4GHz 6 Cores	Aplikasi/Portal	2015	Digunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
6.	DRSPRS01	Dell	1.2 TB	48 GB	2 x E5-2620 v3 2.4GHz 6 Cores	Reporting Service	2015	Digunakan
7.	DRAPDB02	Fujitsu RX300 S7			N/A	Generate pdf report	2015	Digunakan
8.	STORAGE1	Dell	N/A	N/A	N/A	STORAGE DATA WAREHOUSE	2015	Digunakan
9.	STORAGE2	Dell	N/A	N/A	N/A	STORAGE DATA WAREHOUSE	2015	Digunakan
10.	STORAGE3	Dell	N/A	N/A	N/A	STORAGE DATA WAREHOUSE	2013	Digunakan
11.	DRNTNX01	NUTANIX NX-1465- G5-2620V4	35 TB	1.24 TB	Broadwell E5- 2620 V4	Virtual Cloud Computing	2017	Digunakan
12.	DRNTNX02	NUTANIX NX-1365S- G5-2620V4	14 TB	384 GB	Broadwell E5- 2620 V4	Virtual Cloud Computing	2017	Digunakan

No	Nama Server	Type	HDD	Memory	CPU	Fungsi/Aplikasi	Tahun Pembelian	Status
13.	JKTSIDUGA01	Fujitsu RX200S5	300GB	16	intel xeon E5	DNS External Backup	2011	Digunakan
14.	ESA	Sophos appliance ES1100	N/A	N/A	N/A	front End Mail Backup	N/A	Digunakan
15.	DREXMB01	Fujitsu RX300S6	2TB	N/A	N/A	Mailbox Backup Pusat	2009	Digunakan
16.	DRDNS01	HP DL 180 G6	146 GB	N/A	N/A	DNS Internal Primary	2011	Digunakan
17.	SIDUGA 1	HP DL 180 G6	146 GB	N/A	N/A	DNS External	2009	Digunakan
18.	DRHVS02	Fujitsu RX500 S7	600 GB	N/A	N/A	DNS Internal Secondary, Frontend BDKI	2013	Digunakan
19.	STORAGE	Fujitsu Eternus DX80 S2	4 TB	N/A	N/A	Storage 4 TB	2013	Digunakan

3.5.3. Arsitektur DC-DRC



Gambar di atas merupakan konektivitas yang menghubungkan antara data center utama milik BKKBN dengan disaster recovery center (DRC) yang berada di Jatiluhur, DC dan DRC dihubungkan dengan metro link berkecepatan 50 Mbps konektivitas tersebut telah didukung dengan VPN yang berfungsi untuk mengamankan komunikasi antara 2 site. Disaster Recovery Center BKKBN memungkinkan untuk melakukan replikasi data dan mengambil alih fungsi pada saat terjadi gangguan serius pada data center.

3.5.4. Fasilitas Fisik

Saat ini layanan infrastruktur disediakan oleh dua Data Center yaitu DC kantor pusat yang berada di Gedung Halim 2 dan Disaster Recovery Center (DRC) yang berada di site berbeda menggunakan jasa co-location yang berada di Jatiluhur.

Adapun fasilitas data center yang di dapatkan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Fasilitas Data Center

Parameter	DC
AC Power	PLN 1 Gardu
DC Power (Genset)	Bergabung dengan main building Gedung Halim 2 dengan kapasitas 700 kVA, aktif 20 detik setelah power mati dan dengan daya tahan 24 jam
Access Door Data Center	Sudah terdapat access door , fingerprint access door
Access Door NOC	sudah terdapat network operation center (NOC) access door.
Access Door Server	Terdapat access door untuk keruangan server.
CCTV Luar	Sudah terdapat CCTV di luar data center
CCTV Dalam	Sudah terdapat CCTV di dalam data center
Precision Air Conditioning (PAC)	AC presisi 3 Unit yang sudah termasuk humidifier, always on dan akan standby otomatis ketika target suhu sudah tercapai
Raised Floor	Yes
Fire Detection	Sudah memiliki fire suppression system menggunakan karbon (CO2) fire suppression, smoke detector, dan fire alarm.
UPS	1 lapis dengan kapasitas 60 kVA, yang dapat digunakan sebagai backup selama 4 jam 22 menit
Redundant Power Cabling	Sudah redundant
Jumlah rack yang terpasang	Jumlah rack yang terpasang 9 rack, dengan total 45U sedangkan rack yang digunakan 7
Kondisi umum	Fasilitas sudah memadai
Sistem Cabling	Sistem cabling sudah dipisah antara network dan power , power lewat bawah UTP (network) lewat atas
Sistem Monitoring	Menggunakan NMS yang digunakan untuk memonitor perangkat network dan server

BKKBN sudah pernah melakukan assessment standarisasi data center namun belum memenuhi standar tier-2 Uptime Institute karena belum memiliki backup UPS (UPS hanya 1 lapis) dan hanya memiliki 1 kabel induk dari Gedung kearah data center.

3.6. Arsitektur Keamanan Saat Ini

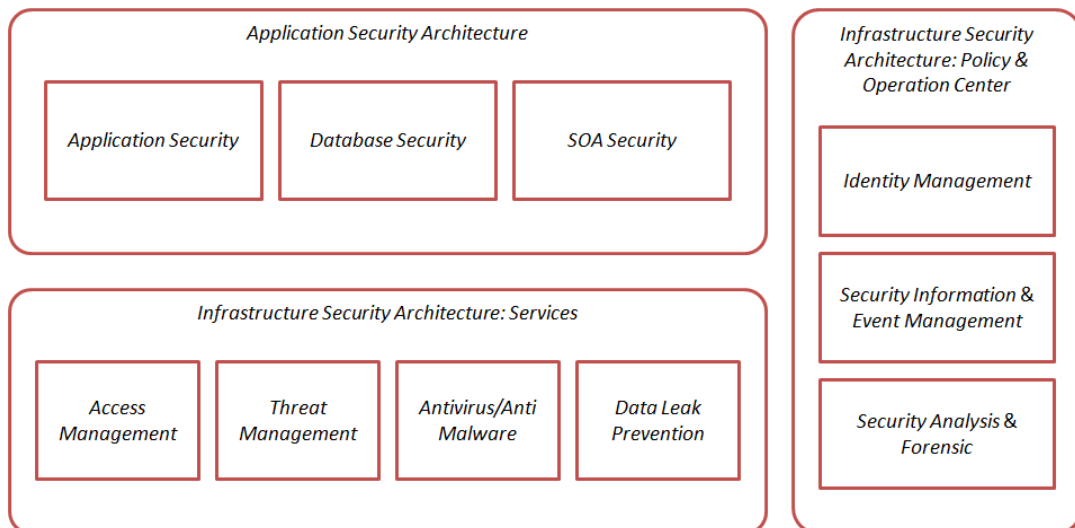
Penyusunan arsitektur keamanan ini mengacu kepada framework dan standar berikut ini:

1. Open Group Enterprise Security Architecture
2. SNI ISO/IEC 27033:2017 series tentang Keamanan Jaringan
3. SNI ISO/IEC 27034:2016 series tentang Keamanan Aplikasi

Dimana ke 3 framework tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi keamanan di infrastruktur BKKBN.

Assesmen kemandirian infrastruktur terbagi menjadi 3 bagian penting yang akan digunakan sebagai acuan untuk arsitektur keamanan yaitu arsitektur keamanan aplikasi (Application Security Architecture), arsitektur keamanan layanan (Infrastructure Security Architecture: Services), dan arsitektur keamanan regulasi dan operasional (Infrastructure Security Architecture: Policy & Operation Center).

Tabel 9 Arsitektur Keamanan Saat Ini



Tabel 10 Deskripsi Arsitektur Keamanan

No	Komponen	Deskripsi	Kondisi Eksisting
1	Application, Database and Service Oriented Architecture Security	Panduan Pattern dan Non-Pattern terkait keamanan aplikasi berbasis web (best practices biasanya menggunakan framework OWASP, Open Web Application Security Project)	Vulnerability assessment menggunakan pihak ketiga namun belum dilakukan secara berkala pertahun
2	Access management	Merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap user untuk dapat melihat, menggunakan, mengubah atau menghapus aplikasi atau sumberdaya lainnya, atau mengakses sistem atau fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. Kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan perusahaan. Layanan ini akan terintegrasi dengan Identity Management.	Active directory hanya digunakan untuk login wifi, email dan mengakses beberapa domain. Dan akses ke F5 NIP terintegrasi dengan database SIMSDM dan yang berkaitan dengan management tools
3	Threat Management	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan pencegahan dan proteksi dini terhadap berbagai threat yang masuk ke dalam lingkungan jaringan. Sebagai pertahanan pertama menghadapi lingkungan di luar jaringan internal perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan layanan ini dapat diimplementasikan akusisi produk dengan signature yang selalu terjaga updatenya atau memiliki rule inteligent untuk mendeteksi threat baru.	UTM F5 (antispam, anti ddos), dan firewall
4	Antivirus	Layanan anti virus/malware management ditujukan untuk merealisasikan perlindungan aset informasi yang tersimpan baik di server maupundesktop/laptop pengguna dan perangkat mobile.	Sophos antivirus, untuk server dan client (cloud) untuk 500 ~ 700 license di renewal setiap tahun
5	Data Leak Prevention	Data Leak Prevention ditujukan untuk melindungi data-data perusahaan sensitif yang ada di storage (file server), ketika transit (ke internet, via email, web, instant messaging, ftp) dan saat di endpoint (misalnya terhadap duplikasi mobile storage), merujuk	Belum terdapat data leak prevention system

No	Komponen	Deskripsi	Kondisi Eksisting
		kepada kebijakan keamanan informasi organisasi.	
6	Identity Management	Identity Management Service memungkinkan untuk pengelolaan secara terpusat seluruh identitas pada sumberdaya atau aset TI.	Active directory namun belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian.
7	Security Information & Event Management	SIEM melakukan logging atas seluruh informasi dan aktivitas yang terjadi di dalam infrastruktur, untuk kemudian diolah dan dikorelasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelola terkait status terkini keamanan informasi.	Event logging menggunakan fitur bawaan perangkat. Menggunakan fitur yang terdapat pada F5
8	Security Analysis & Forensic	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan untuk melakukan analisa lebih mendalam atas log yang telah dikelola di SIEM, untuk kepentingan security forensic.	Sudah terdapat analisis terhadap logging yan dihasilkan oleh SIEM. dan sudah terdapat tindak lanjut terhadap insiden keamanan

3.7. Tata Kelola TI Saat Ini

Berikut maturity level yang sudah dilakukan assessment

Proses	COBIT 4.1 Processes	Maturity Level
PO1	Define a strategic IT plan	2,58
PO2	Define the information architecture	2,00
PO3	Determine technological direction	2,25
PO4	Define the IT processes, organisation and relationships	2,25
PO5	Manage the IT investment	3,33
PO6	Communicate management aims and direction	2,58
PO7	Manage IT Human resources	3,17
PO8	Manage quality	2,08
PO9	Assess and manage IT risks	2,92
PO10	Manage projects	1,92
AI1	Identify automated solutions	2,33
AI2	Acquire and maintain application software	3,08
AI3	Acquire and maintain technology infrastructure	2,58
AI4	Enable operation and use	2,25
AI5	Procure IT resources	3,25
AI6	Manage changes	1,92
AI7	Install and accredit solutions and changes	1,92
DS1	Define and manage service levels	2,92
DS2	Manage third-party services	3,08
DS3	Manage performance and capacity	3,17
DS4	Ensure continuous service	2,92
DS5	Ensure systems security	2,92
DS6	Identify and allocate costs	3,25
DS7	Educate and train users	3,17
DS8	Manage service desk and incidents	2,25
DS9	Manage the configuration	2,58
DS10	Manage problems	2,75
DS11	Manage data	2,92
DS12	Manage the physical environment	2,92
DS13	Manage operations	3,08
ME1	Monitor and evaluate IT performance	2,92
ME2	Monitor and evaluate internal control	2,92

Proses	COBIT 4.1 Processes	Maturity Level
ME3	Ensure compliance with external requirements	2,58
ME4	Provide IT governance	2,92
Rata-Rata		2,70

4. SPBE BKKBN Target

4.1. Arsitektur Bisnis

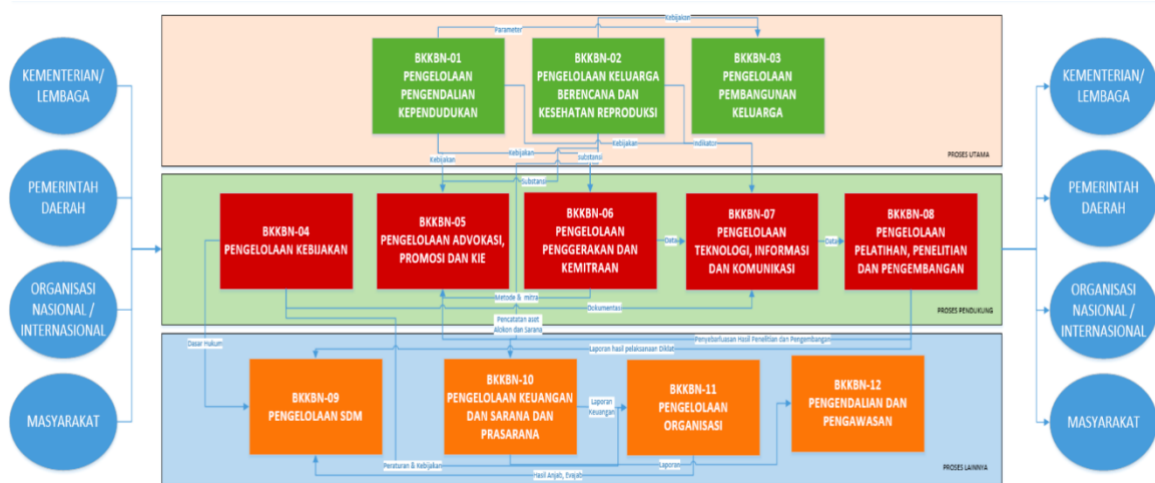
4.1.1. Model Bisnis BKKBN

BKKBN sudah memodelkan Peta Proses Bisnis, yang telah ditetapkan melalui: KEPKA PROBIS Nomor 237 Tahun 2019. Pemetaan Proses Bisnis tersebut ditetapkan berdasarkan kegiatan atau fungsi yang dilakukan organisasi. Peta proses bisnis yang disampaikan adalah peta proses bisnis level 0. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Peta proses bisnis level 0 memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Proses bisnis utama, merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama.
- 2) Proses bisnis pendukung, merupakan proses yang mendukung proses bisnis utama.
- 3) Proses bisnis lainnya, merupakan proses yang mendukung proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung.

Peta Proses Bisnis BKKBN level 0 adalah sebagai berikut.

Tabel 11 Model Bisnis BKKBN Target



4.1.2. Dekomposisi Fungsi Bisnis

Tabel 12 Dekomposisi Fungsi Bisnis BKKBN Target

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
Inspectorat Utama	Inspectorat Wilayah I/II/IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Audit 2. Pelaksanaan Audit Internal (Audit Kerja, Keuangan, Evaluasi) 3. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu 4. Pelaksanaan Review (Laporan Keuangan, RKAK/L, SAKIP, RKBMN, PIPK, Penyerapan Anggaran, Revisi Anggaran, Penerimaan Pajak) 5. Pelaksanaan Review Khusus 6. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 7. Pelaksanaan Pemantauan Gratifikasi 8. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan 9. Penilaian ZI-WBK
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tahunan 2. Penanggaran Tahunan 3. Penyusunan Rencana Strategi 5 Tahun
	Biro Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan SDM 2. Pengangkatan SDM 3. Pemberhentian SDM 4. Mutasi SDM 5. Pengembangan Pegawai 6. Pemantauan Disiplin 7. Kinerja Individu Pegawai 8. Tunjangan Kinerja
	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah ketersediaan Alokasi 2. Jumlah ketersediaan Sarana KB 3. Pendelegasian wewenang pelaksanaan anggaran 4. pelaporan keuangan 5. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker 6. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat di Level Kementerian/Lembaga

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Rekonsiliasi Laporan Keuangan 8. Penatausahaan Keuangan 9. Perencanaan Kebutuhan BMN 10. Penatausahaan BMN 11. Evaluasi BMN 12. Pemantauan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 13. Pelaporan DAK Subbidang KB 14. Penyelenggaraan SPIP 15. Evaluasi SPIP
	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Undang-undang Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Harmonisasi rancangan undang-undang 3. Perancangan peraturan Pemerintah dan Presiden 4. Perancangan Peraturan Kepala Badan 5. Perencanaan Pembentukan Perundang-undangan terkait dengan Kependudukan dan keluarga berencana 6. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan 7. Penyebarluasan informasi hukum 8. Pembentukan keputusan kepala Badan/Eselon I 9. Penjatuhan Hukuman Disiplin berat 10. Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Jabatan 11. Pengelolaan Bisnis Proses dan SOP 12. Pengelolaan Reformasi Birokrasi 13. Pengelolaan Penyusunan Standar Pelayanan 14. Penanganan Masalah Hukum 15. Pendampingan Saksi/Ahli 16. Pertimbangan atau pendapat hukum 17. Pengelolaan Evaluasi Kelembagaan

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keamanan 2. Ketertiban lingkungan BKKBN 3. Pengelolaan Sistem Kearsipan 4. Pengelolaan Sistem persuratan 5. Pengelolaan Pelayanan Keprotokolan 6. Penggajian Pegawai 7. Pengadaan Barang dan Jasa 8. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 9. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat
Deputi Pengendalian Penduduk	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) 3. Pengelolaan pokja Bangga Kencana Efektif
	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Parameter/Proyeksi Pengendalian Penduduk 2. Pengelolaan Profil Kependudukan 3. Evaluasi dokumen perencanaan daerah (RPJMD) (Kegiatan evaluasi RPJMD)
	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan 2. Penyediaan Materi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal, Informal, dan Non Formal
	Direktorat: Analisis Dampak Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Analisis/Kajian Dampak Kependudukan 2. Pengelolaan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Faskes untuk pelayanan KB dalam standarisasi

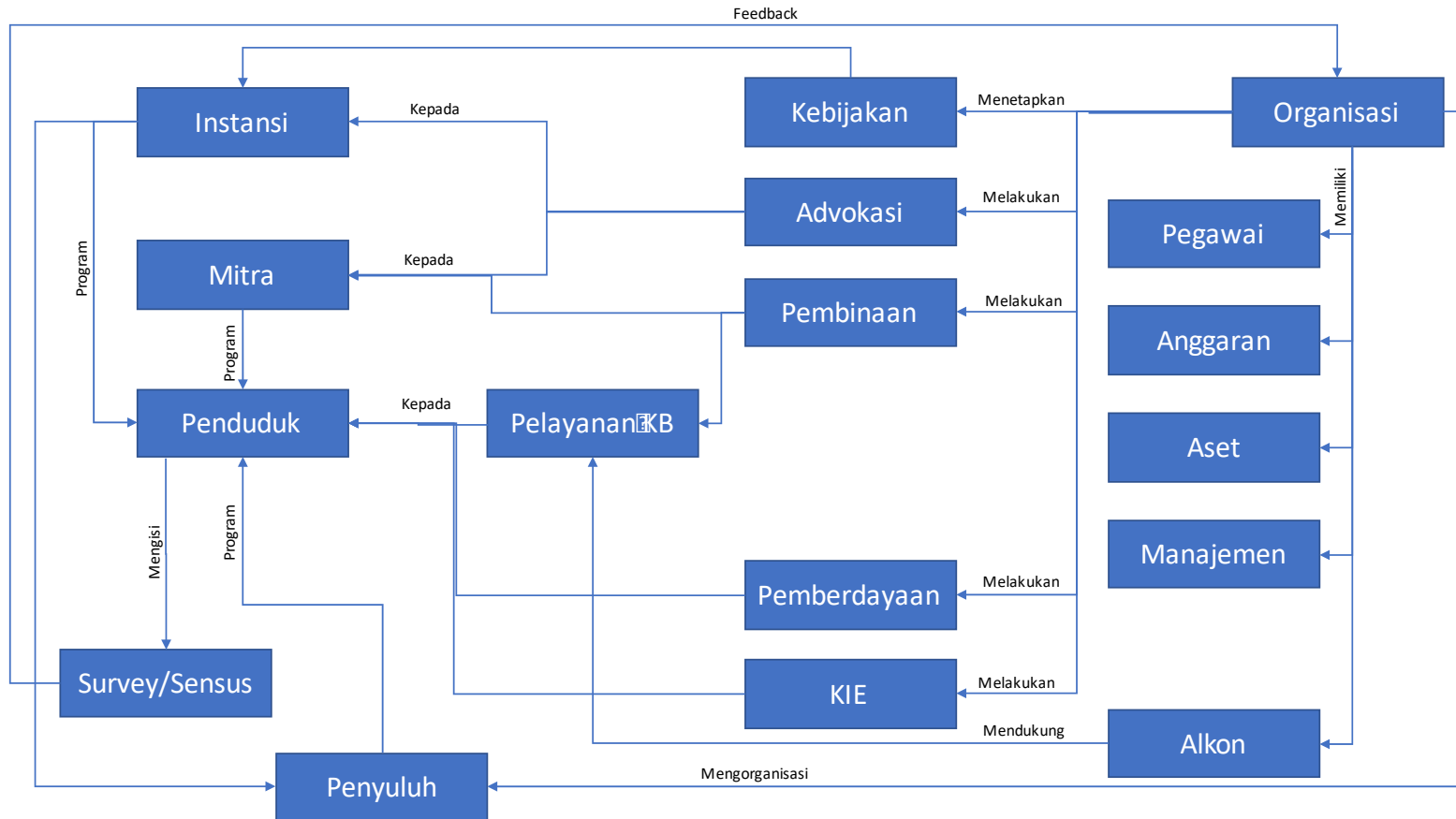
Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
Kesehatan Reproduksi	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Pelayanan KB-KR 2. Pembinaan Faskes Pelayanan KB 3. Peningkatan akses pelayanan KB di Faskes 4. Peningkatan kualitas pelayanan KB di Faskes
	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelangsungan hidup Ibu dan Anak 2. Pembinaan Pencegahan PMS dan HIV/AIDS 3. Pembinaan Pencegahan Kanker Alat Reproduksi 4. Pebinanaan Penanggulangan Fertilitas
	Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesertaan KB di 100 Kab/kota dengan kesertaan rendah (12 Prov) 2. Peningkatan Kesertaa KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 3. Peningkatan Kesertaan KB Pria
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita dan Anak 2. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak melalui Bina Keluarga Balita dan anak
	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja 2. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja Melalui Bina Keluarga Remaja 3. Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat
	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Melalui Bina Keluarga Lansia 2. Program Kelanjut usiaan
	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi 2. Kemitraan Dalam Negeri 3. Kemitraan Luar Negeri
	Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi/KIE 2. Berita Melalui Media Massa
	Direktorat Pelaporan dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Informasi (Pengelolaan Data Program) 2. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi 3. Pemanfaatan Data dan Informasi Program KKBPK
	Direktorat Penggerakan Lapangan Bina Lini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penggerakan Program KKBPK di Bina Lini Lapangan melalui Tenaga Lini Lapangan, Institusi Masyarakat Pendesaan 2. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	Direktorat: Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat dalam negeri (Pendidikan jangka Panjang) 2. Diklat Dalam Negeri (Diklat Teknis/Fungsional/Kepemimpinan)
	Direktorat: Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Panjang) 2. Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Pendek/OST) 3. Pelatihan/Konferensi Internasional 4. Partisipasi dalam Konferensi/Pertemuan/Sidang Internasional 5. Kerjasama luar negeri 6. Pengelolaan Administrasi Dinas Peserta

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Penelitian 2. Penyelenggaraan Pengembangan Kependudukan 3. Diseminasi hasil penelitian 4. Diseminasi pengembangan kependudukan 5. Kemitraan dan 6. Pengelolaan Administrasi Puslitbang Kependudukan
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian program Kependudukan, KB dan KS 2. pengembangan program Kependudukan, KB dan KS 3. Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Program KKBPK dengan mitra

4.2. Arsitektur Data Target

Subject area diagram data target sebagai berikut.



Berikut arsitektur data target di BKKBN.

Tabel 13 Tabel Arsitektur Data Target

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
Inspectorat Utama	Inspectorat Wilayah I /II/III	Perencanaan Audit	1. Kebijakan Pengawasan 2. Program Pengawasan	1. Rencana Pengawasan
		Pelaksanaan Audit Internal (Audit Kerja, Kuangan, Evaluasi)	1. Laporan Keuangan 2. Evidence	1. Laporan Pengawasan Hasil
		Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu	1. Evidence	1. Laporan Pengawasan Hasil
		Pelaksanaan Review (Laporan Keuangan, RKAK/L, SAKIP, RKBMN, PIPK, Penyerapan Anggaran, Revisi Anggaran, Penerimaan Pajak)	1. Laporan Keuangan 2. RKAK/L 3. Penyerapan Anggaran 4. Revisi Anggaran	1. Laporan Hasil Review
		Pelaksanaan Review Khusus	5. Evidence	1. Laporan Hasil Review
		Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Laporan Pengawasan Hasil 2. Tindak lanjut hasil Pengawasan	1. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
		Pelaksanaan Pemantauan Gratifikasi	3. Laporan Gratifikasi	2. Laporan Pemantauan Gratifikasi
		Penanganan Situasi Benturan Kepentingan	1. Laporan benturan kepentingan 2. Evidence	3. Penanganan benturan kepentingan
		Penilaian ZI-WBK	1. Laporan Keuangan 2. Evidence	1. Laporan hasil pemantauan ZI WBK

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan	Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Basis perencanaan 2. Usulan struktur program dan anggaran (SPA) 3. Dokumen Trilateral Meeting 4. Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran I 5. Kegiatan dan Anggaran kepada Eselon I, Kepala BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi 6. Diseminasi kepada Eselon I, Eselon II dan Perwakilan 7. Hasil RKKAL 8. Perjanjian Kinerja dan rencana penarikan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Basis Perencanaan 2. SPA Pusat dan Provinsi 3. Dokumen Trilateral Meeting 4. Penyelenggaraan KOREN I dan II 5. RKAKL 6. Perjanjian Kinerja 7. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
		Penyusunan Rencana Strategi 5 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi tengah tahun RPJM/Renstra 2. Kajian (background study) dan Hasil Evaluasi Renstra (Program Bangga Kencana) 3. Hasil Evaluasi Renstra 4. Rekomendasi Kebijakan Program dan indikator Renstra baru serta RPJMN 5. Balanced Scorecard 6. Rancangan Dokumen Renstra BKKBN 7. Rancangan Dokumen Renstra melalui Rapat Pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra BKKBN 2. Dokumen Balanced Scorecard BKKBN 3. Perban Renstra 4. Perban BSC 5. Kepka peta Strategi dan IKU

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output	
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Badan penetapan Renstra 9. Peraturan Badan penetapan BSC 10. Sosialisasi Renstra 11. Review Renstra 		
	Biro Sumber Daya Manusia	Perencanaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peta Jabatan 2. Kondisi Eksisting Pegawai 3. Proyeksi Pensiun/Mutasi 4. Data ABK 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Pegawai 2. Usulan Informasi 	
		Layanan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data basis kepegawaian 2. Dokumen digital kepegawaian 3. Data ABK 	SK Pengangkatan, pemberhentian, serta mutasi	
		Pengembangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Basis Kepegawaian 2. Data Basis Kompetensi pegawai 	Rekomendasi pengembangan pegawai	
		Pemantauan Disiplin, Kinerja Individu Pegawai dan tunjangan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data Perjanjian Kinerja 2. Data SKP Tahunan dan Bulanan 3. Data capaian kinerja pegawai tahunan dan bulanan 4. Data presensi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil Evaluasi kinerja 2. Hasil evaluasi kedisiplinan 3. Hasil penghitungan tunjangan kinerja 	
	Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah ketersediaan Alokasi dan Sarana KB		Data Stock Alkon	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stock Alkon 2. Laporan F/V Gudang 3. Laporan Stock Opname
		Pengelolaan BMN; Penatausahaan BMN		<ul style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Pengelolaan BMN 2. Usulan persetujuan penghapusan dan pemusnahan BMN 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat-surat persetujuan dan keputusan dibidang pengelolaan BMN 2. Data labelisasi BMN

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Usulan persetujuan hibah BMN 4. Usulan surat keputusan (SK) penghapusan BMN, penetapan status penggunaan BMN, SK, penetapan Sewa BMN 5. Labelisasi BMN 	
		Pendelegasian wewenang pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan penggunaan anggaran/barang pada PA. 2. Pelaporan keuangan, mekanisme dan tata cara pelaporan keuangan sudah diatur oleh PMK 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SK penetapan KPA yang di tandatangani oleh PA 2. LKKL
		Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker	Data keuangan dan BMN setiap Satuan Kerja (42 Satker)	Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja (42 Satker)
		Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data konsolidasi keuangan dan BMN seluruh satuan kerja (42 satker) yang telah dilakukan rekonsiliasi secara intern maupun ekstern; 2. Laporan keuangan disusun selama tiga kali dalam satu tahun anggaran yaitu Laporan Keuangan Periode Semester I, periode Tahunan Unaudited, dan Laporan keuangan Audited 	Laporan Keuangan BKKBN

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Data Keuangan dan BMN seluruh satuan kerja (42 Satker)	Berita Acara Rekonsiliasi
		Penatausahaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban LPJ Bendahara melalui Tarik data dari aplikasi SPRINT-Kemenkeu; 2. Dokumentasi data sertifikasi bendahara 3. Pantauan rekening pengeluaran di lingkungan BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Monitoring LPJ bendahara, Monitoring Rekening pengeluaran di BKKBN, 2. Dokumentasi sertifikat bendahara di BKKBN yang mengikuti sertifikasi melalui BKKBN Pusat
		Pengelolaan BMN; Perencanaan Kebutuhan BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan BMN dari satuan kerja 2. Kebutuhan BMN di level penggunaan barang yang merupakan konsolidasi dari data usulan satuan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana kebutuhan BMN Level Satuan Kerja 2. Dokumen rencana kebutuhan BMN Level Lembaga
		Pengelolaan BMN; Evaluasi BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi data BMN 2. Laporan BMN level pengguna barang 3. Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) BMN 4. Investarisasi BMN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Rekonsiliasi BMN di level Lembaga dan satuan kerja 2. Laporan BMN 3. Laporan wasdal BMN 4. Laporan hasil investarisasi BMN
		Pemantauan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 2. Realisasi Anggaran 3. Form SPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai KPA 2. Materi Pembinaan Satker 3. Form SPJ 4. Realisasi Anggaran Detail

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pelaporan DAK Subbidang KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Anggaran DAK kab/kota 2. Realisasi barang dari DAK pada kab/kota 	Laporan realisasi DAK
		Penyelenggaraan dan evaluasi SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen persiapan SPIP 2. Kegiatan sesuai Renstra 3. Kebijakan/SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPIP 2. Manajemen Risiko 3. Maturitas SPIP
	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Pembentukan undang-undang Bidang Kependudukan dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan Naskah Akademik 2. usulan BKKBN dalam program legislasi nasional 	Undang-Undang
		Keikutsertaan Pembahasan Harmonisasi undang-undang	Rancangan Undang-Undang	Rancangan Undang-Undang yang sudah diharmonisasi
		Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan RPP dan Ran Perpres dalam program RPP dan Perpres 2. Susunan Naskah Akademik RPP dan Ranperpres 	Naskah Akademik RPP dan Ranperpres
		Pembentukan Peraturan Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar program Legislasi BKKBN 2. Rancangan Peraturan BKKBN 3. Harmonisasi Rancangan Peraturan BKKBN 4. Ketetapan Rancangan Peraturan BKKBN 	Peraturan BKKBN
		Perencanaan Pembentukan Perundang-undangan terkait dengan kependudukan dan Keluarga Berencana	Usulan Rancangan dari pemrakarsa	Keputusan daftar program legislasi BKKBN

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output	
		Pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan	1. Peraturan BKKBN 2. Keputusan BKKBN 3. Surat Edaran BKKBN 4. Informasi hukum lainnya	1. Publikasi melalui aplikasi JDIH 2. Publikasi melalui buku	
		Pembentukan Keputusan Kepala Badan /Eselon 1	konsep/rancangan keputusan kepala	Keputusan Kepala/Keputusan eselon 1	
		Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat	Permasalahan kepegawaian	penetapan penjatuhan hukuman disiplin	
			Pengelolaan Analisis dan Evaluasi Jabatan	1. Jabatan 2. Urutan Fungsi dan Kegiatan	Informasi Faktor Jabatan dan Uraian Pekerjaan.
			Pengelolaan Bisnis Proses dan SOP	1. Peta Strategi 2. Tugas dan Fungsi	Peta Bispro leven 0-n
			Pengelolaan Reformasi Birokrasi	1. Roadmap RB 2. Rencana Aksi RB 3. Tim RB	Capaian Pelaksanaan RB
			Pengelolaan Penyusunan Standar Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Publik	Kepuasan Masyarakat atas hasil pelayanan publik
			Penanganan Masalah Hukum	permasalahan hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara	fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara
			Pendampingan Saksi/Ahli	1. Permohonan/permintaan sebagai saksi	tersedianya saksi/ahli Didampingi saksi/ahli.

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			2. Permohonan/permintaan sebagai ahli	
		Pertimbangan atau Pendapat Hukum	1. Peristiwa/permasalahan hukum 2. peraturan perundang undangan	Kajian/telaahan permasalahan hukum
		Pengelolaan Evaluasi Kelembagaan	1. Proses Bisnis Organisasi 2. Renstra 3. struktur organisasi	Indeks Efektifitas Organisasi
	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Keamanan dan ketertiban lingkungan BKKBN	1. Surat permintaan fasilitasi protokoler (keamanan mengikuti) 2. Jadwal piket, informasi kejadian, informasi kehilangan barang	1. Laporan fasilitasi keamanan yang mengikuti kegiatan protokoler 2. Laporan jadwal petugas keamanan 3. Laporan kejadian dan kehilangan barang
		Pengelolaan sistem kearsiapan dan persuratan	Arsip/dokumen dari komponen/unit kearsiapan (UK) 2 berupa arsip statis	1. Penyimpanan arsip statis dari UK 2 ke UK 1 2. Penyimpanan arsip statis UK 1 yang tidak dimusnahkan ke ANRI
		Pengelolaan Pelayanan Keprotokolan	1. Surat permohonan fasilitasi keprotokolan 2. Data jadwal pimpinan	Laporan fasilitasi kegiatan keprotokolan
		Penggajian Pegawai	1. Data terkait perhitungan gaji dari Biro SDM 2. Data mutase 1. Data absensi	Pembayaran gaji tunjangan, uang makan, kekurangan-kekurangan (gaji berkala, uang makan, dan lain-lain)

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAKL 2. Dokumen pengadaan 3. Permohonan Pokja dari komponen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana pengadaan 2. Pemilihan penyedia/vendor 3. Surat tugas Pokja 4. Forum diskusi
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pelayanan sarana dan prasarana dari unit kerja	Laporan pelayanan sarana dan prasarana ke unit kerja
		Pelaksanaan hubungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita BKKBN di Media Online 2. Program dan kegiatan Bangga Kencana BKKBN 3. Kegiatan Kepala BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa berita di media online secara harian, mingguan, dan bulanan 2. Press Realease di media online dan website
Deputi Pengendalian Penduduk	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Perhitungan indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK). Fasilitasi data penduduk melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk usia anak - Penduduk usia produktif dan reproduktif - Penduduk lanjut usia rentan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan IPBK Bersama BPS 2. Capaian IPBK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data IPBK terimplementasi 2. Data PBK 3. Data penduduk usia anak, usia produktif, usia lanjut, dan rentan
		Pengelolaan pokja Bangga Kencana Efektif. Fasilitas data penduduk melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Usia anak-anak - Reproduksi Lanjut usia dan rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pokja Bangga Kencana Efektif 2. Data capaian pokja Bangga Kencana efektif di Kab/kota 	Hasil Pokja Bangga Kencana Efektif

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	Pengelolaan Penetapan Parameter/Proyeksi Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari sensus/ Survei 2. Laporan kesepakatan penentuan asumsi proyeksi untuk perhitungan proyeksi 3. Dokumentasi hasil kesepakatan terkait variabel yang akan diperhitungkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter program bangga kencana (Laporan/Buku) 2. Proyeksi parameter program bangga kencana dalam dokumen perencanaan daerah 3. Proyeksi perencanaan kebutuhan alkon
		Pengelolaan Profil Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dari sensus/ survei 2. Data Lintas sektor 	Buku dengan konten/ tematik terkait kondisi tertentu dari level nasional sampai provinsi (lansia, balita, usia subur, dan lain-lain)
		Evaluasi dokumen perencanaan daerah (RPJMD) (Kegiatan evaluasi RPJMD sudah dilaksanakan secara konsisten namun belum terdapat dokumentasi resmi)	RPJMD dari masing-masing daerah	Laporan evaluasi dokumen perencanaan daerah
	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Data Capaian Program DITPENDUK Formal, Non Formal, dan Informal	Hasil Capaian program Ditpenduk 3 jalur Formal, Non Formal, dan Informal
		Penyediaan Materi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal, Informal, dan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten Materi penduk Formal, Non Formal, dan Informal 2. Kegiatan pengelolaan dan implementasi ditpenduk di 3 jalur: Formal, Non Formal, dan Informal 	Materi Penduk Formal, Non Formal, dan Informal

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat: Analisis Dampak Kependudukan	Pengelolaan Analisis/Kajian Dampak Kependudukan	1. Data Profil 2. Data PK	1. Kajian 2. Model
		Pengelolaan Model Solusi Strategis Pnendalian Dampak Kependudukan	1. Data SDKI 2. SUSENAS	1. Kajian 2. Model
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Direktorat Bina Akses Pelayanan KB	Pembinaan Faskes untuk pelayanan KB yang terstandarisasi	1. Tenaga dokter/Bidan yang kompeten memberikan pelayanan KB MKJP 2. Sarana pelayanan KB MKJP 3. Alat dan Obat Kontrasepsi	1. Tenaga dokter/bidan yang terlatih dalam memberikan pelayanan KB MKJP 2. Sarana pelayanan KB di Faskes 3. Alat dan obat kontrasepsi di faskes dan tidak terjadinya stok out alokon MKJP selama lebih dari 2 bulan dalam 1 tahun
	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB	Pembinaan Faskes Pelayanan KB yang terstandarisasi	Standar Kompetensi (Pelatihan BKKBN)	Tenaga provider yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi
		Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan pelayanan KB-KR	Standar kompetensi (Pelatihan BKKBN)	Tenaga Provider yang berkompeten dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di faskes	1. Akseptor/masyarakat ingin mendapatkan pelayanan/konsultasi KB 2. Data direktori faskes (klinik, PMB (Praktek Mandiri Bidan), puskesmas, rumah sakit, Pustu, dan lain-lain 3. Karakteristik akseptor	1. Drop out dengan platform KLIK-KB dengan fitur reminder pada akseptor 2. Modern CPR (Contraception Prevalensi Rate) 3. Karakteristik akseptor 4. Data provider (dokter dan bidan)

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output	
			<ul style="list-style-type: none"> 4. Data provider (dokter dan bidan) 5. Data konsultasi pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi 	5. Data rekam medis, hasil konsultasi akseptor/masyarakat oleh bidan konsultasi	
	Direktorat Kesehatan Reproduksi	Bina	Pembinaan Kelangsungan hidup Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data pelayanan KBPP 2. Data Persalinan 	Peningkatan cakupan persentase KBPP
			Pembinaan Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Data PMS dan HIV	Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang PMS dan HIV AIDS bagi remaja dan keluarga
			Pembinaan Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Fertilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data WUS yang melakukan penilaian mandiri risiko kanker serviks 2. Data perhitungan usia biologis perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang Kesehatan reproduksi wanita khususnya risiko kanker serviks 2. Peningkatan pengetahuan mengenai masa subur untuk perencanaan kehamilan
	Direktorat Pelayanan Wilayah khusus	Bina KB	Peningkatan Kesertaan KB di 100 Kab/kota dengan kesertaan rendah (12 Prov)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data peserta KB baru dan Peserta KB aktif di 100 Kab/kota 2. Data unmet need di 100 Kab/kota 3. Data kesertaan KB (CPR) di 100 Kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kesertaan KB (CPR) di 100 Kab/kota 2. Persentase Unmet need Kab/kota 3. Potensi/persebaran tenaga pelayanan KB di lapangan (100 Kab/kota)
		Peningkatan Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Data kesertaan KB keluarga PBI 2. Data kesertaan KB keluarga Non PBI 	Data jumlah keluarga PBI dan Non PBI yang mendapatkan pelayanan KB	

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data peserta aktif dan peserta KB baru KB Pria (MOP/Vaksetomi dan kondom) 2. Data tenaga provider yang telah mendapatkan pelatihan MOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kesertaan KB Pria (MOP/Vaksetomi dan kondom) 2. Persebaran tenaga provider yang telah dilatih MOP/Vaksetomi di seluruh provinsi
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Konsep/desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita dan Anak 2. perbaikan konsep/desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina keluarga Balita dan anak 3. Uji coba desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 4. Perbaikan desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga Balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Diseminasi desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 6. Finalisasi desain Program Pembinaan Ketahanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain Program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 2. Perbaikan konsep/desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 3. Hasil uji coba desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 4. Desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Laporan kegiatan diseminasi desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 6. Hasil final desain program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			keluarga melalui bina keluarga balita dan anak 7. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak	7. Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita dan anak
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak melalui Bina Keluarga Balita dan anak	1. Rancangan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 2. Perbaikan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 3. Uji coba desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 4. Perbaikan desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Diseminasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak	1. Draft konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 2. Perbaikan konsep/desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 3. Hasil uji coba desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak 4. Desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak berdasarkan hasil uji coba 5. Laporan diseminasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<p>melalui bina keluarga balita dan anak</p> <p>6. Finalisasi desain program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak</p> <p>7. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak</p>	<p>6. Rancangan finalisasi program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak</p> <p>7. Hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui bina keluarga balita dan anak</p>
	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja	<p>1. Sasaran program keluarga yang memiliki remaja</p> <p>2. Kelompok kegiatan (Poktan) BKR (Bina Keluarga Remaja)</p>	Buku perencanaan masa depan remaja
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja Melalui Bina Keluarga Remaja	<p>1. Sasaran program keluarga yang memiliki remaja</p> <p>2. Kelompok kegiatan (POKTAN) BKR (Bina Keluarga Remaja)</p>	<p>1. Buku 1001 cara bicara orangtua dengan remaja</p> <p>2. Buku jurnal 1001 cara bicara</p> <p>3. Kartu bermain 1001 cara bicara</p>
		Pembinaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	<p>1. Sasaran program remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah</p> <p>2. Kelompok kegiatan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)</p>	<p>1. Buku Perencanaan Masa Depanmu</p> <p>2. Modul tentang kita</p>
	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Melalui Bina Keluarga Lansia	1. Sosialisasi 7 dimensi Lansia Tangguh	<p>1. 7 Dimensi Lansia Tangguh</p> <p>2. Keterampilan keluarga dalam pendampingan PJP</p>

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			2. Orientasi pendampingan perawatan jangka Panjang (PJP)	
		Pengelolaan Program Kelanjut usiaan	Sosialisasi persiapan bagi pra lansia menjadi lansia tangguh	Keterampilan pra lansia menjadi lansia Tangguh
	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	1. Kegiatan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga 2. Data pencapaian program DITPEMKON	1. Data implementasi kegiatan pengelolaan keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga 2. Hasil pencapaian program DITPEMKON
	Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga	Pengelolaan Advokasi	1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir)	1. Komitmen (Pergub, Perwal, dan lain-lain) 2. Dokumen MoU 3. Dokumen PKS
		Pengelolaan Kemitraan Dalam Negeri	1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir)	1. Dokumen MoU 2. Dokumen PKS 3. Rencana Aksi
		Pengelolaan Kemitraan Luar Negeri	1. Pengajuan MoU (Formulir) 2. Pengajuan PKS (Formulir)	1. Dokumen MoU 2. Dokumen PKS 3. Rencana Aksi
	Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Pengelolaan Promosi/KIE	1. Ketetapan strategi komunikasi yang ditentukan ditingkat pusat dapat dipertajam dan dikembangkan di tingkat provinsi atau kab/kota 2. Rancangan narasi, talking point bersama para pakar	1. Materi KIE sesuai kebutuhan khalayak 2. Proses promosi/sosialisasi yang efektif dan efisien 3. Pengelola KIE yang kompeten

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Desain/protoype/template isi pesan Bersama direktorat pengampu/wali pesan 4. Distribusi desain/prototype kepada pengelola KIE sub Nasional dan mitra kerja 5. Kegiatan KIE/promosi melalui berbagai media (channeling) berdasarkan segmentasi (wilayah, kelompok umur, dan seterusnya) 6. Rancangan Media KIE (lini atas, lini tengah, dan lini bawah) serta upaya menjaga keterlibatan audience 7. Evaluasi, monitoring dasar pelaksanaan program KIE 8. Tingkatan kapasitas pengelola KIE tingkat pusat Provinsi/Kabupaten/Kota sampai lini lapangan 	
		Pengelolaan Berita Melalui Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan agenda setting berdasarkan isu media maupun isu khalayak 2. Isu redaksi media 3. Pesan/berita dari narasumber melalui media massa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi / berita bersifat promosi produk atau program maupun pencitraan dan advokasi 2. Isu-isu strategis

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat Pelaporan dan Statistik	Pengelolaan Data Informasi (Pengelolaan Data Program)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rutin (perubahan kebijakan, aturan main, rencana strategis) dan non rutin 2. Data dasar kader, Faskes, keluarga, kelompok kegiatan (balita, remaja, lansia), keluarga sejahtera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar data, standar template (collect data) dalam bentuk form data 2. Pelaporan pengelolaan data
		Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi 2. Informasi dan kebutuhan komponen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pencatatan (prototype) 2. Sistem pelaporan (prototype)
		Pemanfaatan data dan informasi Program KKBPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan keputusan (stakeholder meliputi : gubernur, walikota, dan jajaran lainnya) 2. Data operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data analytic
	Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan	Pengelolaan Penggerak Program KKBPK di Bina Lini Lapangan melalui Tenaga Lini Lapangan, Institusi Masyarakat Pedesaan, melalui mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pencatatan dan Pemantauan Kegiatan Penyuluh KB/PLKB Kinerja Penyuluh KB sesuai dengan wilayah kerja/desa binaan (Evisum) 2. Kompetensi Penyuluh KB/PLKB untuk menduduki jenjang jabatan di atasnya (sertifikasi). 3. Media sistem informasi lini lapangan (SILILI) 4. Dokumentasi Pencatatan dan pemantauan kegiatan PLKB Non PNS sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kinerja penyuluh KB/PLKB 2. Tenaga penyuluh KB/PLKB yang kompeten 3. Pengetahuan tenaga lini lapangan (penyuluh KB/PLKB PNS dan Non PNS) kader PPKBD/Sub PPKBD

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			<p>wilayah kerja/desa binaan (desktop)</p> <p>5. Dokumentasi Pencatatan dan pelaporan kegiatan mekanisme operasional di tingkat desa/kelurahan</p>	
		Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPB Berbasis Teknologi Informasi	<p>1. Laporan Kegiatan penyuluh KB/PLKB</p> <p>2. Laporan kegiatan PLKB Non PNS setiap bulan</p> <p>3. Materi dan media informasi terupdate dan terkini secara langsung kepada 1,2 juta pengakses SILILI</p>	<p>1. Data pencapaian kinerja penyuluh yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja penyuluh KB/PLKB PNS</p> <p>2. Data pencapaian kinerja PLKB Non PNS</p> <p>3. Data desa/kelurahan kegiatan mekanisme operasional lini lapangan</p> <p>4. Tingkatan pengetahuan pengelola dan pelaksana program lini lapangan dan tenaga lini lapangan (penyuluh KB/PLKB PNS dan Non PNS) kader PPKBD/Sub PPKBD</p> <p>5. Data presensi/kehadiran penyuluh KB/PLKB</p>
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan	Direktorat: Pusat dan Pendidikan Pelatihan	Penyelenggaraan diklat dalam negeri (Pendidikan jangka Panjang)	<p>1. Pemberian Pendidikan jangka panjang</p> <p>2. Pelaksanaan seleksi bagi calon peserta pendidikan jangka Panjang</p>	<p>1. Hasil keluaran ASN yang kompeten sesuai dengan bidang ilmu dengan unit kerja</p>

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
Pengembangan	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Diklat Dalam Negeri (Diklat Teknis/Fungsional/Kepemimpinan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural BKKBN 2. Pelatihan teknis bagi ASN BKKBN 3. Pelatihan bagi ASN BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pelatihan ASN minimal 20 JP tiap tahun terpenuhi 2. Pencapaian karir dalam persyaratan bagi ASN
	Direktorat: Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Panjang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa jangka panjang dari Pulin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan jangka panjang diluar negeri untuk Orang/ pegawai
		Penyelenggaraan Diklat Luar Negeri (Pendidikan Jangka Pendek/OST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Jangka Pendek dari LN (Luar Negeri) 2. Studi jangka pendek bagi Pegawai yang bekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan jangka pendek diluar negeri untuk Orang/ pegawai
		Penyelenggaraan Pelatihan/Konferensi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinat dengan mitra KL terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta pelatihan dari luar negeri yang datang ke Indonesia dalam kerangka program Bangsa Kencana
		Partisipasi dalam Konferensi/Pertemuan/Sidang Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan kepada BKKBN 2. Statement BKKBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan/Pejabat BKKBN yang mengikuti pertemuan tingkat internasional 2. Statement BKKBN dalam forum internasional
		Kerja sama luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi proses pengajuan kerja sama (data nama, kontak, bidang kerja sama), hasil penjajagan, informasi proses MOU, rencana induk kerja kegiatan 2. Road Map Kegiatan dan Input kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi sejarah kerja sama dan monitoring kerja sama 2. Dokumentasi dan informasi proses kegiatan 3. Mapping kerja sama luar negeri

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
			3. Nama direktorat dan nama perwakilan BKKBN Provinsi, kebutuhan program, dan kemampuan/kelebihan program yang dimiliki untuk dikerjasamakan	
		Pengelolaan Administrasi Dinas Peserta	1. file penting, spj scanan 2. data SBU/SBM Pemerintah	1. Dokumentasi file yang aman dalam jaringan internal BKKBN 2. SPJ otomatis
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	1. Data Processing 2. Referensi untuk memperkaya hasil penelitian	1. Karya Hasil Penelitian
		Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1. Materi Diseminasi 2. Hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan untuk digunakan sebagai input kebijakan/referensi untuk penelitian selanjutnya
		Kemitraan dan Pengelolaan Administrasi Puslitbang Kependudukan	1. Tata Kelola administrasi anggaran 2. Tata Kelola persuratan dan kearsipan 3. Database mitrakerja	1. Tata Kelola administrasi keuangan Puslitbang kependudukan yang accountable 2. Tata Kelola persuratan dan kearsipan puslitbang kependudukan. 3. Kerjasama kemitraan dengan Lembaga penelitian atau pusat studi lainnya

Domain	Sub-Domain	Deskripsi Umum (Proses Bisnis yang dijalankan)	Data Input	Data Output
	Direktorat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Program KKBPk dengan mitra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang Kerjasama kemitraan 2. Kapasitas dan kompetensi SDM peneliti, 3. panduan Kerjasama penelitian dan pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama kemitraan 2. Artikel ilmiah, research brief, policy brief
		Pelaksanaan penelitian dan pengembangan program Kependudukan, KB dan KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga. 2. Hasil karya tulis ilmiah (jurnal) berskala nasional dan internasional. 3. Peningkatan pelatihan fungsi penelitian dan pengembangan 4. Tim etika penelitian yang terdiri dari para pakar. 5. Pengesahan Tim etika dengan SK Kepala BKKBN 6. Majelis assessor peneliti 7. SOP Puslitbang KB dan KS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan program

4.3. Arsitektur Layanan Target

Arsitektur layanan target sebagai berikut.



4.3.1. Layanan Administrasi Pemerintahan Target

4.3.1.1. Layanan Naskah Dinas

Target layanan pengelolaan naskah dinas di BKKBN didukung oleh aplikasi sebagai berikut:

1. E-Arsip
2. Fitur Naskah Dinas pada e-Office

Layanan naskah dinas elektronik ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik dilaksanakan secara otomatis seperti menggugah e-dokumen dan memasukkan informasi kedalam sistem, serta sistem dapat merespon kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima di internal instansi.

Untuk pengembangan kedepan di BKKBN, perlu pengembangan aplikasi pendukung pengelolaan naskah dinas yang seragam yang bersifat umum dan generik yang dapat digunakan berbagi pakai oleh semua unit kerja yang ada. Fitur pengelolaan Naskah Dinas sebaiknya terintegrasi dalam fitur layanan pada e-Office BKKBN.

4.3.1.2. Layanan Manajemen Kepegawaian

Saat ini untuk layanan manajemen kepegawaian di BKKBN didukung oleh aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi Kepegawaian SPBE
2. SIMSDM (Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia)
3. SIVIKA
4. SIMPAK
5. SIDIKA
6. SIPP
7. Presensi Pegawai

Sistem informasi kepegawaian tersebut, selain SIMSDDM dikembangkan secara internal di BKKBN. SAPK merupakan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Layanan

manajemen kepegawaian ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/ diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis didalam maupun antar instansi.

Terdapat 2 (dua) opsi implementasi layanan manajemen kepegawaian BKKBN kedepan yaitu:

1. Pemanfaatan aplikasi umum kepegawaian berbagi pakai dari pusat;
2. Pemanfaatan secara bersama-sama aplikasi Kepegawaian SPBE dan aplikasi kepegawaian dari internal.

Sesuai dengan rencana percepatan SPBE dimana akan dikembangkan aplikasi umum berbagi pakai nasional terkait kepegawaian yang terintegrasi sesuai dengan arsitektur SPBE Nasional, maka kedepan apabila sistem kepegawaian ini sudah tersedia, kemungkinan setelah tahun 2020 sesuai dengan arahan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, dapat menjadi opsi pilihan bagi BKKBN untuk digunakan.

4.3.1.3. Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Saat ini untuk layanan manajemen perencanaan dan penganggaran di BKKBN didukung oleh aplikasi sebagai berikut:

1. SPA Online
2. Morena DAK
3. SIPPUJA
4. E-KOREN

Layanan manajemen perencanaan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses-proses pada manajemen perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomatis seperti tindakan persetujuan, verifikasi, validasi analitik data perencanaan dan lain sebagainya. Untuk pengembangan kedepan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebijakan arsitektur SPBE nasional, maka diarahkan untuk menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan rencana percepatan SPBE dalam bidang ini.

Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE tersebut dilakukan melalui:

1. Berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
2. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

4.3.1.4. Layanan Manajemen Keuangan

Saat ini untuk layanan manajemen keuangan di BKKBN didukung oleh beberapa aplikasi sebagai berikut:

1. SAIBA
2. Persediaan

3. E-REKON
4. CaLK SATKER
5. SIMAK BMN
6. SIMAN
7. SAKURA

Umumnya aplikasi yang digunakan tersebut merupakan aplikasi yang berasal dari instansi pusat yaitu kementerian keuangan.

Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen keuangan dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi keuangan dan sistem dapat merespon kepada pengguna untuk mekanisme persetujuan, verifikasi, validasi dan analitik data keuangan. Untuk pengembangan kedepan layanan manajemen keuangan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebijakan arsitektur SPBE nasional, maka diarahkan untuk menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan rencana percepatan SPBE dalam bidang ini.

4.3.1.5. Layanan Manajemen Kinerja

Saat ini untuk layanan manajemen kinerja di BKKBN didukung oleh beberapa aplikasi sebagai berikut:

1. e-Monev, Aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional, disediakan oleh Bappenas
2. SMART Kemenkeu, Sistem Monitoring Kinerja Terpadu Anggaran dan Keuangan

Aplikasi yang digunakan menggunakan kombinasi antara aplikasi yang disediakan oleh pusat yaitu e-Monev dari Bappenas dan SMART DJA. Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE tersebut dilakukan melalui:

1. Berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
2. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

4.3.1.6. Layanan Manajemen Pengadaan

Saat ini untuk layanan manajemen pengadaan di BKKBN didukung oleh beberapa aplikasi sebagai berikut:

1. SPSE, merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia
2. SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP

Aplikasi yang digunakan menggunakan kombinasi antara aplikasi yang disediakan oleh pusat yaitu SPSE dan SIRUP yang disediakan oleh LKPP.

Untuk pengembangan kedepan layanan manajemen pengadaan, melanjutkan kondisi eksisting yang sudah cukup baik serta menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat

dan kebijakan arsitektur SPBE nasional, maka diarahkan untuk menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan rencana percepatan SPBE dalam bidang ini.

Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE tersebut dilakukan melalui:

1. Berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
2. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

4.3.1.7. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Saat ini untuk layanan dokumentasi dan informasi di BKKBN didukung oleh aplikasi JDIH BKKBN, Aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum BKKBN. JDIH BKKBN sudah dapat diakses melalui website BKKBN pada Layanan Satu BKKBN.

Layanan dokumentasi dan informasi hukum sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/ diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi. Untuk mewujudkan kolaborasi JDIH BKKBN dapat diintegrasikan dan dikolaborasikan dengan JDIHN.

4.3.1.8. Layanan Pengaduan Publik

Layanan dokumentasi dan informasi di BKKBN didukung oleh Pengaduan Publik. Layanan Pengaduan Publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/ diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar instansi. Untuk mewujudkan kolaborasi Pengaduan Publik BKKBN dapat diintegrasikan dengan aplikasi internal lainnya, misalnya tindak lanjut pengaduan internal BKKBN, sehingga seluruh pengaduan dapat ditindaklanjuti dan dimonitor progress dan statusnya dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi sampai ke level unit kerja. Selain itu LAPOR BKKBN juga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi pihak instansi lain yang terkait.

4.3.1.9. Layanan Whistle Blowing System (WBS)

Saat ini untuk layanan dokumentasi dan informasi di BKKBN didukung oleh aplikasi WBS internal yang dikelola oleh bagian Inspektorat. Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomatis seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespin kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progress dari penyelesaian pengaduan tersebut.

4.3.1.10. Daftar Layanan Administrasi Pemerintahan Target

Tabel 14 Daftar Layanan Administrasi Pemerintahan BKKBN Target

No.	Layanan	Sistem Informasi Pendukung	Keterangan
1	Perencanaan dan Penganggaran	RKAKL	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
2		KRISNA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu, KemenPAN-RB, dan Bappenas
3	Keuangan	SAIBA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
4		Persediaan	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
		E-Rekon	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
5		CaLK SATKER	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
10	Pengelolaan BMN	SIMAK BMN	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
12		SIMAN	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
13	Pengadaan Barang dan Jasa	SIRUP	Aplikasi disediakan oleh LKPP
15		LPSE	Aplikasi disediakan oleh LKPP
16	Kepegawaian	Layanan Manajemen Kepegawaian BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
17		SAPK	Aplikasi disediakan oleh BKN
18		Layanan Absensi Pegawai	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
19		SKP Online	Aplikasi disediakan oleh BKN
20	Manajemen Kinerja	E-SAKIP	Aplikasi disediakan oleh KemenPAN-RB
21	Monitoring dan Evaluasi	Layanan Manajemen Kinerja BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
22		SMART DJA	Aplikasi disediakan oleh Kemenkeu
23		E-Monev	Aplikasi disediakan oleh Bappenas
24	Hukum	Layanan JDIH BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN

No.	Layanan	Sistem Informasi Pendukung	Keterangan
25	Pengawasan Pengaduan –	Pengaduan Publik	Aplikasi disediakan oleh KemenPAN-RB
26		Layanan Pengawasan Internal BKKBN	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
27		SIMWAS	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
28		Whistle Blower	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN
29	Perpustakaan	E-Library	Aplikasi dikembangkan sendiri oleh BKKBN

4.3.2. Layanan Publik Target

Layanan Publik BKKBN ini merupakan layanan publik yang bersifat khusus sesuai dengan fungsi spesifik BKKBN yang meliputi:

1. Pengelolaan Peta Bangga Kencana
2. Penyampaian Informasi Bangga Kencana
3. Pengelolaan Pembinaan Keluarga Sejahtera
4. Pengelolaan Pemberdayaan Keluarga
5. Pengelolaan Kerjasama
6. Pengelolaan Kebijakan
7. Pengelolaan Penyuluh
8. Pengelolaan Layanan KB
9. Pengelolaan Data Keluarga
10. Analisis Data Bangga Kencana
11. Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan
12. Pengelolaan KIE

4.4. Arsitektur Aplikasi Target

Untuk mendukung Layanan SPBE, digunakan aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Secara umum aplikasi SPBE terbagi kedalam 2 (dua) jenis aplikasi yaitu:

1. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilakukan untuk mendukung Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
2. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan untuk mendukung Layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya.

Aplikasi umum dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis instansi yang bersifat umum atau pendukung seperti berikut.

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. Akuntabilitas kinerja;
5. Pemantauan dan evaluasi;
6. Kearsipan;
7. Kepegawaian; dan
8. Pengaduan pelayanan publik.

SPBE mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai. Arahan aplikasi umum berbagi pakai nasional dituangkan kedalam Arsitektur SPBE Nasional yang disusun dengan koordinasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE salah satu langkahnya dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum berbagi pakai untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi umum berbagi pakai dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang bersifat umum pada instansi pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum tersebut akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai berlaku atau setelah tahun 2020. Terkait hal tersebut, maka setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah harus mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dijelaskan diatas, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

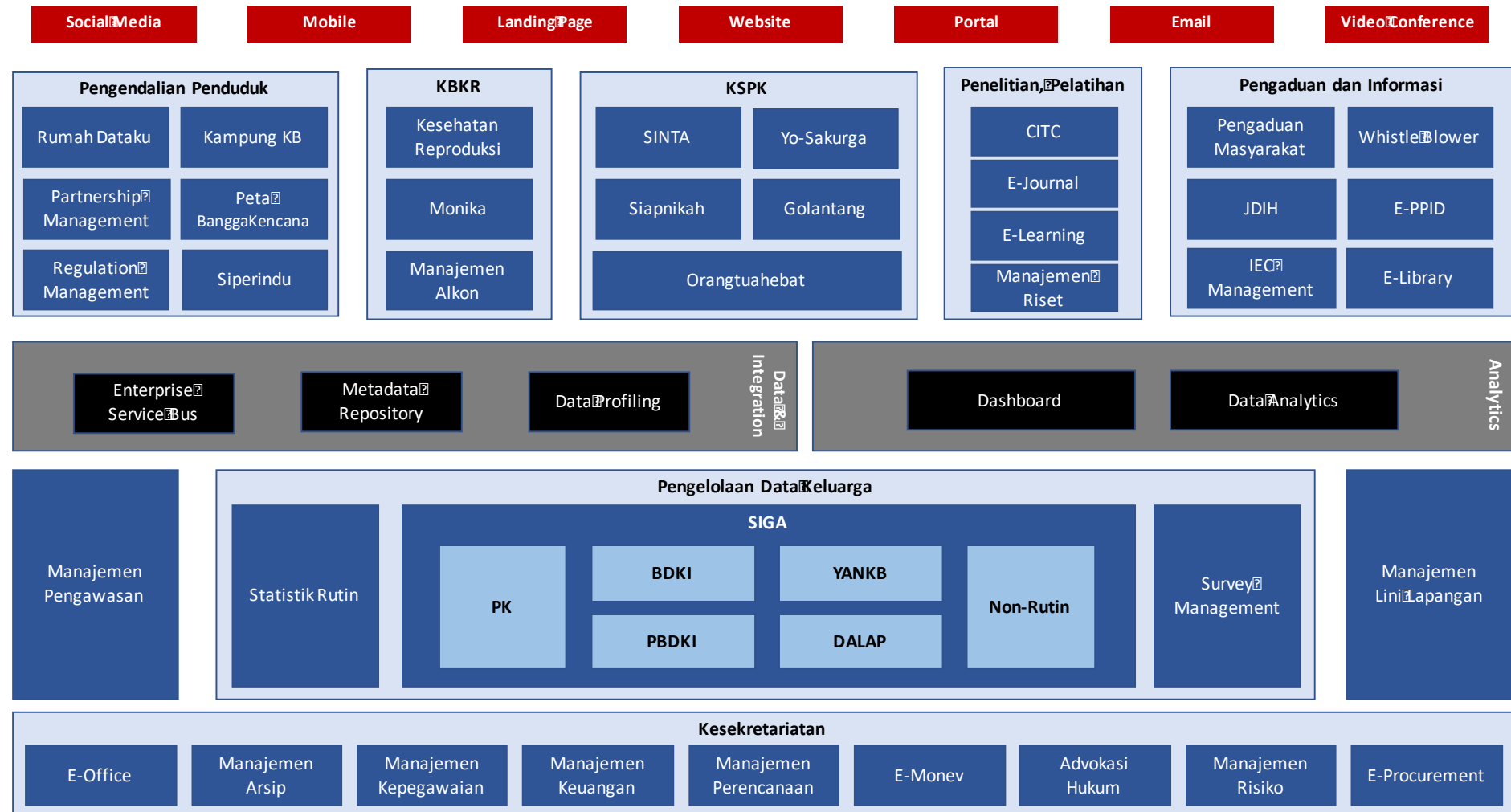
1. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
2. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;

3. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
4. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mendukung percepatan implementasi SPBE, maka diupayakan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah di republic Indonesia. Kegiatan percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi
2. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian
3. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan
4. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik
5. Pengembangan Portal Pelayanan Administrasi Pemerintah

4.4.1. Peta Aplikasi Target



Gambar 5 Peta Aplikasi BKKBN Target

4.4.2. Katalog Aplikasi Target Matriks Aplikasi VS Kategori

Berikut deskripsi aplikasi target.

Tabel 15 Katalog Aplikasi Target Matriks Aplikasi VS Kategori

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
1.	Pengendalian Penduduk			
1.1		Rumah Dataku		<p>Aplikasi Rumah Dataku merupakan aplikasi untuk menampilkan, melakukan perbaikan profil Bangga Kencana wilayah provinsi sampai tingkat RW. Informasi yang ditampilkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data penduduk; 2. Peta wilayah 3. Peta pembangunan lintas sektoral 4. Peta potensi wilayah 5. Data PUS dan peserta KB beserta grafiknya 6. Grafik akseptor KB baru 7. Daftar peserta KB MKJP 8. Tahapan keluarga sejahtera 9. Capaian KB <p>Rumah Dataku diimplementasikan untuk wilayah yang tidak termasuk dalam kampung KB.</p>
1.2		Kampung KB		<p>Aplikasi kampung KB merupakan aplikasi untuk mendukung pengembangan kampung KB dengan mengumpulkan, menampilkan informasi terkait kampung KB tersebut. Informasi yang ditampilkan adalah Informasi Rumah Dataku ditambah dengan informasi mengenai program KB di daerah tersebut.</p>

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<p>Informasi di Kampung KB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi Pengurus Kampung KB 2. Peta Kampung KB 3. Peta pembangunan lintas sektoral Kampung KB 4. Peta Potensi Wilayah 5. Roadmap Kampung KB 6. Jadwal pelaksanaan program kegiatan kampung KB 7. Data PUS dan peserta KB beserta grafiknya 8. Grafik Akseptor KB Baru 9. Daftar peserta KB MKJP 10. Data penduduk dan tahapan Keluarga Sejahtera 11. Capaian KB 12. Foto-foto dokumentasi kegiatan Kampung KB Baper
1.3		Partnership Management		<p>Partnership Management merupakan portal untuk mengelola kerjasama dengan mitra. Portal tersebut berbasis web dengan fitur sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi layanan BKKBN yang bisa dikerjasamakan; 2. Pengajuan kerjasama oleh mitra; 3. Seleksi pengajuan kerjasama oleh mitra; 4. Monitoring pengajuan kerjasama oleh mitra; 5. Pengelolaan profil mitra; 6. Pengelolaan kontrak kerjasama mitra; 7. Akses layanan kepada mitra sesuai dengan kewenangan masing-masing mitra. Misal layanan e-learning, e-journal.
1.4		Peta Bangga Kencana		<p>Peta Bangga Kencana merupakan peta berbasis GIS untuk menampilkan data-data Bangga Kencana dalam bentuk peta. Informasi yang ditampilkan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil penduduk; 2. Profil keluarga;

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Profil keluarga berencana; 4. Profil Pemberdayaan Keluarga; 5. Profil tenaga program.
1.5		Regulation Management		<p>Aplikasi Regulation Management berbasis web membantu dalam penyusunan regulasi, perubahan regulasi maupun pengelolaan kepatuhan atas regulasi yang sudah ditetapkan. Fitur Regulation Management sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan standar dan persyaratan regulasi; 2. Penyusunan draft regulasi; 3. Pengelolaan workflow persetujuan regulasi; 4. Pengelolaan perubahan regulasi; 5. Pemetaan regulasi; 6. Assessment regulasi internal terhadap regulasi yang harus dilaksanakan oleh BKKBN; 7. Assessment kepatuhan stakeholder terhadap regulasi BKKBN; 8. Profil kepatuhan regulasi BKKBN oleh stakeholder.
1.6		Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu)		Sistem yang memberikan informasi kepada masing-masing wilayah akan timbulnya kejadian, dapat berupa masalah maupun tanda-tanda lainnya yang terkait dengan Pengendalian Penduduk.
2.	KBKR			
2.1			Monika	Monika (Monitoring berkualitas) adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk menjawab permasalahan kompetensi bagi dokter dan bidan yang telah dilatih CTU (contraceptive technology update) IUD (alat kontrasepsi berbentuk spiral) sejak tahun 2011-2016.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<p>Fitur aplikasi monika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visualisasi Data 2. Sertifikasi 3. Monika Info 4. Monika Galeri 5. Profil 6. Tempat Kerja Tambahan 7. Berkas Sertifikat 8. Authorisasi JNPK 9. Upload sertifikat kompetensi
2.2			Manajemen Alkon	<p>Manajemen Alkon adalah aplikasi untuk mengelola alat kontrasepsi dari gudang, fasilitas kesehatan sampai pengelolaan ketersediaan di setiap provinsi dan nasional.</p> <p>Fitur aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alkon sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi alkon 2. Status Persediaan 3. Rerata Konsumsi 4. Proses Transaksi 5. Data Historis 6. Pencatatan transaksi 7. Analisa tingkat ketersediaan 8. Notifikasi transaksi penerimaan 9. Fasilitas kesehatan
2.3			Kesehatan Reproduksi	<p>Kesehatan reproduksi adalah portal mengenai kesehatan reproduksi dalam rangka edukasi, pemberian informasi kepada</p>

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<p>PLBK/PKB, tenaga kesehatan dan masyarakat. Fitur Kesehatan Reproduksi sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kesehatan reproduksi; 2. Materi edukasi kesehatan reproduksi; 3. Konseling tenaga kesehatan; 4. Informasi fasilitas kesehatan; 5. Informasi layanan kesehatan reproduksi; 6. Konseling tenaga kesehatan mengenai kesehatan reproduksi; 7. Forum tenaga kesehatan, PKB/PLKB; 8. Akses e-learning oleh tenaga kesehatan; 9. Personilasi layanan sesuai dengan peran dan tanggung jawab.
3.	KSPK			
3.1			SINTA	<p>SINTA adalah portal dan aplikasi mobile untuk membantu dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu-ibu dalam tumbuh kembang anak.</p> <p>Fitur aplikasi SINTA sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi; 2. Informasi tumbuh kembang anak; 3. Materi edukasi tumbuh kembang anak; 4. KKA Online; 5. Kalender Pengasuhan; 6. Konsultasi Online; 7. Forum tumbuh kembang anak; 8. QnA tumbuh kembang anak.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
3.2			SiapNikah	<p>SiapNikah adalah portal untuk mengukur kesiapan remaja sebelum menikah termasuk kesiapan diri dalam pengasuhan anak untuk keluarga berkualitas.</p> <p>Fitur aplikasi SiapNikah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi remaja siap nikah; 2. Informasi mengenai pernikahan; 3. Materi edukasi pernikahan; 4. Siap Finansial; 5. Parenting; 6. HitungKesiapanmu; 7. Konsultasi Online; 8. Forum pernikahan; 9. QnA pernikahan.
3.3			Yo-Sakurga	<p>Yo-Sakurga adalah aplikasi mobile untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi produk serta kerjasama dengan mitra-mitra lain dalam pelayanan KB</p> <p>Fitur aplikasi Yo-Sakurga sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi UPPKS 2. Inspirasi (Publikasi dan Program) 3. Basis Data UPPKS 4. produk UPPKS (Rekomendasi & produk terbaru) 5. Kemitraan (list mitra kerjasama BKKBN) 6. Kalkulator (menghitung harga produk & pengelolaan Keuangan Keluarga) 7. Forum UPPKS

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
3.4			Golantang	<p>Golantang adalah portal lansia dan keluarga lansia sehingga dapat mewujudkan lansia tangguh yang sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bermartabat. Fitur aplikasi Golantang sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi lansia tangguh; 2. Informasi lansia tangguh; 3. Media edukasi lansia tangguh; 4. Tujuh Dimensi Lantang; 5. Temukan lokasi (bina keluarga lansia(BKL), panti Wreda, sekolah lansia, posyandu lansia, apotek, rumah sakit, puskesmas); 6. Kalkulator Kesehatan (Indeks Kebahagiaan, ADL (Activity Daily Living), IADL (Instrumental Activities of Daily Living, indeks kebahagiaan, indeks lansia tangguh, tingkat difabel, tingkat demensia); 7. Infografis seputar kelanjutusiaan; 8. Forum lansia tangguh; 9. Konseling online; 10. QnA lansia tangguh.
3.5			OrangtuaHebat	<p>Orangtuahebat merupakan portal untuk panduan orangtua untuk membangun karakter anak dan pengasuhan orangtua kepada anak. Fitur Aplikasi OrangtuaHebat sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi orang tua; 2. Informasi pengasuhan anak; 3. Media edukasi orang tua; 4. Kalender pengasuhan online; 5. Basis data Keluarga Baduta; 6. Konseling online; 7. Forum; 8. QnA orang tua.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
4.	Penelitian dan Pengembangan			
4.1		E-Learning		<p>E-Learning merupakan portal media pembelajaran mandiri dan Pendidikan serta pelatihan pengembangan kompetensi peserta BKKBN. Fitur aplikasi E-Learning sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi; 2. Dashboard; 3. News; 4. Materi Pembelajaran berjenjang 5. Ujian; 6. Bank soal; 7. Sertifikat; 8. Monitoring proses pembelajaran; 9. Forum; 10. Pengelolaan blended learning; 11. Akses ke layanan BKKBN seperti video conference, e-library; 12. Survei Kepuasan.
4.2		CITC		<p>CITC merupakan portal informasi pelatihan dan kerjasama program KB dengan pihak internasional. Fitur aplikasi CITC sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil; 2. Informasi pelatihan; 3. Registrasi; 4. informasi dan kegiatan; 5. Library; 6. Personalisasi layanan; 7. Akses ke partnership management.
4.3		E-Journal		<p>E-journal adalah portal untuk membantu dalam melakukan publikasi dan seleksi jurnal mengenai layanan kependudukan</p>

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<p>dan keluarga berencana. Fitur aplikasi e-journal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman (berita); 2. Archieve (daftar jurnal); 3. Ethical publication (publikasi jurnal); 4. pencarian; 5. Register; 6. Pengajuan jurnal; 7. Seleksi jurnal; 8. Akses jurnal eksternal.
4.4			Manajemen Riset	<p>Manajemen riset adalah aplikasi mobile untuk membantu proses penelitian. Fitur manajemen riset sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi; 2. Informasi riset; 3. Pengajuan riset; 4. Seleksi pengajuan riset; 5. Manajemen program riset; 6. Task management riset; 7. Kolaborasi riset; 8. Forum riset; 9. Logbook riset; 10. Monitoring riset; 11. Upload hasil riset; 12. Akses ke e-library.
5.	Pengawasan			
5.1		Manajemen Pengawasan	E- Evaluasi SAKIP	<p>aplikasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut untuk melakukan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/satuan kerja pemerintah. Fitur aplikasi E-SAKIP sebagai berikut.</p>

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi SAKIP; 2. Lembar evaluasi SAKIP; 3. Upload bukti pelaksanaan SAKIP; 4. Evaluasi SAKIP; 5. Laporan SAKIP; 6. Rekomendasi perbaikan SAKIP; 7. Pemantauan Tindaklanjut hasil evaluasi.
5.2			Audit Repository	Audit repository adalah storage yang digunakan untuk menyimpan replikasi data yang digunakan untuk kebutuhan audit. Data tersebut dipastikan sama dengan data operasional.
5.3			Sistem Manajemen Audit	<p>Aplikasi Audit Manajemen sistem untuk digunakan audit internal dan melakukan approve surat tugas hasil audit</p> <p>Fitur-fitur aplikasi AMS (Audit Management System) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Audit <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Program Pemeriksaan b. Pengelolaan Persiapan Audit c. Pengelolaan program audit d. Penyusunan kertas kerja 2. Pencatatan / Dokumentasi Kegiatan Audit <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi pelaksanaan audit b. Dokumentasi hasil Pelaksanaan Audit 3. Penelusuran temuan audit <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Bukti Audit b. Administrasi Kertas Kerja Pemeriksaan 4. Penyusunan Laporan Hasil Audit

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				5. Monitoring tindak lanjut a. Pemantauan tindak lanjut hasil audit Database Rekomendasi
5.4			Sistem Continuous Audit	Continuous audit adalah sistem untuk mengelola continuous audit. Fitur continuous audit sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring risiko secara kontinyu; 2. Monitoring kendali secara kontinyu; 3. Monitoring aktivitas/transaksi secara kontinyu; 4. Investigasi ketika terjadi ketidaksesuaian; 5. Pelaporan continuous audit.
5.5			Penilaian ZI-WBK	Aplikasi Penilaian ZI-WBK adalah aplikasi zona integritas untuk membantu penilaian risiko dan audit serta menentukan kritikalitas dan aktivitas audit yang dilakukan. Fitur aplikasi penilaian ZI-WBK sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi ZI-WBK; 2. Lembar penilaian ZI-WBK; 3. Upload bukti pelaksanaan ZI-WBK; 4. Evaluasi ZI-WBK; 5. Laporan ZI-WBK; 6. Rekomendasi perbaikan ZI-WBK; 7. Pemantauan tindak lanjut ZI-WBK; 8. Forum ZI-WBK.
6.	Pengelolaan Data Keluarga			
6.1		Survey Management		Survey Management merupakan aplikasi berbasis web untuk mengelola survey di BKKBN. Fitur survey management sebagai berikut.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan program survey; 2. Pembuatan form survey dengan template yang mudah untuk dikutomisasi; 3. Library pertanyaan, file, theme dan survey; 4. Pengorganisasian pelaksanaan survey ; 5. Manajemen respon survey ; 6. Analisis survey ; 7. Pelaporan survey;
6.2		Statistik Rutin		<p>Aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang pencapaian program kependudukan dan keluarga berencana nasional sesuai Perka No. 255/PER/G4/2011. Berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Fitur Aplikasi Statistik Rutin sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Pengendalian Lapangan 2. Pelayanan Kontrasepsi 3. Grafik Perkembangan Pencapaian Peserta KB
6.3.		SIGA	PK	<p>Aplikasi dalam penjadwalan keluarga berencana di SIGA. Fitur aplikasi PK sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan 2. Periode 3. Indikator KS 4. Data Keluarga 5. R/I/KS 6. Peralatan 7. Pencarian Individu
6.4			Non-Rutin	<p>Aplikasi Pencatatan data Non Rutin (non regular). Fitur aplikasi Statistik Non Rutin sebagai berikut.</p>

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan 2. Grafik Perkembangan Pencapaian Peserta KB 3. Data Khusus 4. Data Luar Biasa
6.5			DALAP	<p>Data yang tersimpan didalam data staging (sementara) bisa dilihat dalam menu laporan bulanan data individu untuk hasil Pengendalian Lapangan Fitur modul DALLAP sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil/identitas 2. Validasi data 3. Wilayah demografis 4. Pengurus Bina Lapangan
6.6			YANKB	<p>data yang tersimpan didalam data staging (sementara) bisa dilihat dalam menu laporan bulanan data individu untuk hasil pelayanan KB. Fitur-fitur modul pelayanan KB (YanKb) sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login Operator YanKB 2. Entry 3. Identitas tempat pelayanan KB 4. Tenaga pelayanan KB 5. Register 6. Pencarian 7. Mutasi Alokon
6.7			BDKI	<p>BDKI adalah Basis Data Keluarga Indonesia (untuk dasar dalam pemukthiran peserta KB oleh PKB dan PLKB. Fitur BDKI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login; 2. Pelaporan; 3. pencarian; 4. tambah;

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				5. data.
6.8			PBDKI	<p>PBDKI adalah pelaporan data dan informasi keluarga by name by address yang dapat diakses secara bersama serta dapat diupdate secara real-time. Fitur BDKI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login 2. Pelaporan Pencarian 3. Tambah 4. Update 5. Wilayah 6. Nama
7.	Lini Lapangan			
7.1		Manajemen Penyuluh/Lini Lapangan	SILILI	<p>SILILI merupakan portal dan aplikasi mobile untuk penyuluh yang menampilkan informasi kondisi lapangan pelayanan KB dan sebagai pelaporan aktivitas dan informasi dilapangan. Fitur aplikasi SILILI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi 2. Profil penyuluh 3. Database penyuluh 4. Persebaran Penyuluh 5. Job profile penyuluh 6. Laporan aktivitas penyuluh 7. Informasi Karir 8. Manajemen kompetensi penyuluh 9. Learning plan penyuluh 10. Forum 11. Chatting 1. 12.Statistik 12. Personalisasi layanan

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				13. Akses E-Office, Video conference, IEC Management, EVISUM, EKLOP, SIDIKA, SIMSDM, E-Learning, Rumah Dataku.
7.2			EVISUM	Aplikasi pelaporan kinerja harian untuk Petugas Lapangan KB (PLKB). Fitur E-Visum sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kinerja 2. Visum harian Kegiatan penyuluhan dan non-penyuluhan 3. Kinerja output penyuluh 4. Pencapaian target bulanan 5. Rekap hasil visum bulanan (lapangan)PLKB
7.3			EKLOP	Aplikasi untuk membantu memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina, memantau dan mengukur kinerja PLKB Non PNS. Fitur E-Klop sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kinerja 2. Visum harian Kegiatan 3. Pencapaian target bulanan 4. Rekap hasil visum bulanan (lapangan)PLKB
7.4			MONALISA	Aplikasi yang digunakan dalam kegiatan operasional di lapangan dalam pelayanan KB dan aktivitas yang dilakukan di lapangan. Fitur Monalisa sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan mekanisme perasional 2. Pelaporan mekanisme operasional 3. Monitoring mekanisme operasional per wilayah

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
7.5			E-Sertifikasi	<p>Aplikasi yang digunakan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi serta aktivitas yang dilakukan dilapangan dalam pelayanan KB. Fitur aplikasi E-Sertifikasi sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi online 2. Manajemen peserta sertifikasi 3. Bank soal sertifikasi 4. Pengelolaan ujian sertifikasi 5. Manajemen sertifikat 6. Kehadiran 7. Materi-materi kursus
7.6			E-Dupak	<p>Aplikasi E-Dupak (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) yang dikembangkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk mempermudah proses pengajuan usul serta penilaian angka kredit. Fitur aplikasi E-Dupak sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Dupak 2. Histori 3. Monitoring Penilaian
7.7			Presensi Penyuluh	<p>Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan presensi secara online dan real-time untuk memudahkan pelayanan KB. Fitur Aplikasi Presensi Penyuluh sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi 2. Clock-in/clock-out 3. Maps 4. Foto 5. History
8.	Data & Integration			
8.1		Enterprise Service Bus		Enterprise service bus merupakan infrastruktur untuk mengintegrasikan aplikasi sehingga aplikasi tidak

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				berkomunikasi langsung antar aplikasi tetapi melalui enterprise service bus tersebut.
8.2		Metadata Repository		Metadata repository merupakan software untuk menyimpan metadata dari data eksisting termasuk model data, struktur data dan definisinya.
8.3		Data Profilling		Data profiling merupakan tool untuk memvalidasi data eksisting dengan metadata untuk mengidentifikasi kualitas data pada sistem.
9.	Analytic			
9.1			Data Analytics	Data analytics adalah sistem untuk menganalisis data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bersumber dari internal maupun eksternal. Analisis meliputi analisis deskriptif, diagnostic, predictive dan prescriptive.
9.2			Dashboard	Aplikasi berbasis web dan mobile untuk menampilkan hasil analisis.
10.	Kesekretariatan			
10.1		E-Office		<p>Aplikasi E-Office merupakan aplikasi untuk memudahkan pengelolaan aktivitas perkantoran pegawai BKKBN. Aplikasi tersebut berbasis web maupun mobile dengan fitur sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Single sign on (SSO) 2. News/Artikel 3. Agenda Kegiatan 4. Kolaborasi 5. Chat/Messaging 6. Forum Diskusi 7. Digital signature

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				8. Peminjaman ruangan 9. Akses Aplikasi Umum: Email, video conference, E-learning, manajemen kepegawaian, manajemen arsip. 10. Akses Layanan Khusus sesuai dengan kewenangan.
10.2		E-Monev		Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menilai capaian kinerja (BAPPENAS).
10.3		E-Procurement		SPSE adalah aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP dengan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh K/L/PD.
10.4		Manajemen Arsip		Manajemen Arsip menggunakan Aplikasi Srikandi yang merupakan hasil pengembangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
10.5		Manajemen Kepegawaian		
a.			SIM-SDM	Aplikasi SIMSDM Memberikan dukungan agar proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Modul-modul aplikasi SIMSDM diantaranya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Pegawai 2. Pengelolaan Cuti

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Penggajian 4. Mutasi 5. Digitalisasi 6. Pengukuran Kinerja 7. Hukuman dan Disiplin 8. Assestmen Pegawai 9. Penilaian 360 derajat (penilaian internal) 10. Pola karir 11. Manajemen talen.
b.			SAPK	<p>My SAPK BKN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian. Fitur Aplikasi SAPK sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Profil PNS 2. KPE Virtual 3. Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 4. E-Lapkin 5. Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya. <p>Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.</p>
c.			SIVIKA	<p>Memonitor hasil kinerja masing masing pegawai dengan atasan masing masing. Modul SIVIKA sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai 2. Pengelolaan Laporan Progress Bulanan
d.			SIMPAK	<p>Memonitor hasil kinerja pranata komputer. Modul SIMPAK sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sasaran Kinerja Prakom 2. Pengelolaan Laporan Progress Bulanan

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
e.			SIDIKA	<p>Aplikasi dalam pengelolaan sistem pelatihan dan Pendidikan di BKKBN yang terdapat modul Manajemen training dan pendidikan. Modul SIDIKA sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Training 2. Pengelolaan Data Diklat 3. Pengelolaan pendidikan 4. Pelatihan pegawai 5. Monitoring hasil dan evaluasi diklat 6. Pengelolaan pendidikan jangka panjang
f.			SIPP	<p>Aplikasi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan terlaksananya pembayaran gaji pegawai secara cepat dan tepat & Tunjangan Pegawai . Fitur aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penghasilan Pegawai) sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Pegawai 2. Tunjangan kinerja 3. Kehadiran pegawai
g.			Presensi Pegawai	<p>Sistem untuk mengelola presensi pegawai. Fitur aplikasinya sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presensi pegawai menggunakan finger scan 2. Database pegawai 3. Laporan presensi pegawai
h.			Kepegawaian	<p>Aplikasi kepegawaian merupakan aplikasi umum SPBE yang dalam pengembangannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan digunakan oleh semua Kementerian Lembaga.</p>
10.6		Manajemen Perencanaan		

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
a.			SPA Online	<p>Aplikasi SPA online adalah pengembangan sub domain e-koren yang dirancang untuk mengefektifkan proses perencanaan dan penganggaran program KKBPK oleh BKKBN</p> <p>Aplikasi SPA online, saat ini masih dalam bentuk dummy/prototype, dan masih belum digunakan masih dalam tahap penyempurnaan & Aplikasi ini berfungsi untuk mengakomodir usulan perencanaan program. Fitur Aplikasi SPA online sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Struktur Program & Anggaran 2. Pelaporan berdasarkan tahun 3. Beranda 4. Pemantauan 5. Administrator
b.			MORENA DAK	<p>MORENA DAK yang digunakan untuk Perencanaan Kegiatan dan pelaksanaan/realisasi Dana Alokasi Khusus dan membantu pendanaan untuk kegiatan di wilayah Provinsi Kabupaten. Fitur Aplikasi MORENA sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi 2. DAK Fisik dan DAK Non fisik 3. Filter Pelaporan Berdasar tahun, twiwulan, provinsi, dan KAB/Kota 4. Manajemen Data 5. Beranda 6. Master Data 7. Profile
c.			SIPPUJA	<p>SIPPUJA merupakan aplikasi yang membantu dalam perencanaan dan pengukuran kinerja. Fitur SIPPUJA tersebut sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Perjanjian kinerja 3. Pengukuran kinerja 4. Pelaporan kinerja 5. Evaluasi kinerja
d.			E-KOREN	<p>E-KOREN merupakan portal untuk memfasilitasi proses pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Fitur E-Koren yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi konsolidasi perencanaan 2. Data basis perencanaan 3. Upload hasil perencanaan 4. Download aplikasi perencanaan 5. Forum kinerja
10.7		Manajemen Keuangan		
a.			SAIBA	<p>aplikasi yg dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat instansi. Fitur SAKTI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran 2. Komitmen 3. Pembayaran 4. Bendahara 5. Persediaan 6. Aset tetap 7. Akuntansi 8. Pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
b.			Persediaan	Aplikasi Persediaan digunakan untuk mengelola barang-barang persediaan. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Keuangan.
c.			E-Rekon	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
d.			CaLK SATKER	CaLK SATKER adalah aplikasi untuk membantu melakukan Catatan atas Laporan Keuangan. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk Satker Instansi Pusat.
e.			SIMAK BMN	SIMAK BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
f.			SIMAN	SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) merupakan aplikasi serbaguna pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan dan penghapusannya.
g.			SAKURA	Informasi pengelolaan anggaran dan standarisasi SPJ setiap kegiatan (Rapat, dan surat perjalanan kegiatan). Fitur Aplikasi Sakura : <ul style="list-style-type: none"> 1. Realisasi anggaran 2. Pengelolaan Anggaran 3. Forum Diskusi

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
10.8		Advokasi Hukum		<p>Aplikasi Advokasi hukum merupakan aplikasi kasus pegawai yang ditindaklanjuti secara internal maupun bantuan untuk perkara hukum yang melibatkan pihak berwenang. Aplikasi tersebut berbasis web. Fitur advokasi hukum yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen kasus pegawai <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kasus pegawai • Database kasus pegawai 2. Manajemen Bantuan Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan bantuan hukum • Administrasi perkara hukum • Pengelolaan telaahan perkara hukum • Pengelolaan kasus jalur litigasi • Pelaporan Penanganan Perkara Hukum 3. Konsultasi hukum 4. Forum hukum
10.9			Manajemen Risiko	<p>Aplikasi manajemen risiko untuk membantu pengelolaan risiko di perusahaan. Aplikasi ini berbasis web. Fitur aplikasi manajemen risiko sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian risk register oleh masing-masing unit kerja; 2. Konsolidasi risk register di level BKKBN; 3. Pengelolaan tindak lanjut untuk merepon risiko; 4. Alert pelaksanaan tindak lanjut yang mendekati/melewati batas yang telah ditetapkan; 5. Evaluasi atas tindakan respon yang sudah dilakukan; 6. Monitoring risiko keseluruhan sesuai dengan status masing-masing risiko.

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
11.	Pengaduan dan Informasi			
11.1		JDIH		<p>Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Aplikasi ini bertujuan untuk produk hukum dan berita hukum dan pendataan dalam bentuk dokumentasi payung hukum. Fitur aplikasi JDIH sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi hukum 2. Referensi hukum 3. Produk hukum 4. Pencarian referensi hukum
11.2		IEC Management		<p>Aplikasi IEC management untuk membantu promosi, kampanye, informasi dan edukasi program Bangga Kencana kepada masyarakat. Aplikasi IEC management berbasis web. Fitur IEC management sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repositori konten multimedia; 2. Manajemen media publikasi; 3. Manajemen cross platform social media; 4. Analisis social media; 5. Desain promosi/kampanye multistage; 6. Desain interaksi multichannel; 7. Mengelola penjadwalan kampanye/promosi; 8. Analisis hasil kampanye/promosi.
11.3		Pengaduan Masyarakat		<p>aplikasi pengaduan masyarakat bisa dilihat dari website ini https://lapor.bkkbn.go.id/# dengan masyarakat bisa melakukan laporan pengaduan dan akan diproses oleh BKKBN. Fitur aplikasi Pengaduan masyarakat sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Dumas 2. Tentang DUMAS (Pengaduan Masyarakat) 3. Laporan

No.	Kategori	Aplikasi	Sub Aplikasi	Deskripsi
				<ol style="list-style-type: none"> 4. Kontak Kami 5. Pencarian
11.4		Whistler Blower		<p>Aplikasi ini bisa digunakan untuk informasi dan melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan BKKBN. Fitur aplikasi Whistle Blower sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi 2. Laporan 3. FAQ 4. Kontak Kami 5. Panduan Melapor
11.5		E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)		<p>Aplikasi E-PPID adalah aplikasi berbasis mobile dan web-based untuk menjaga informasi dan kerahasiaan data serta melakukan filterisasi informasi publik. Fitur aplikasi E-PPID sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil 2. Layanan Informasi 3. Standar Layanan 4. Laporan 5. FAQ 6. Survei 7. Sosial Media (tautan) 8. Pencarian 9. Registrasi

4.4.3. Integrasi Aplikasi

Sesuai dengan Perpres 95 tentang SPBE, untuk melakukan integrasi sistem aplikasi pada SPBE digunakan sistem penghubung. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah Instansi harus:

- 1) Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
- 2) Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
- 3) Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- 4) Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Berdasarkan rencana pengembangan sistem informasi internal kedepan yang akan menggunakan arsitektur monolitik, maka untuk integrasi aplikasi di internal BKKBN, akan menggunakan middleware atau GSB (Government Service Bus). Begitu juga integrasi aplikasi internal BKKBN dengan aplikasi eksternal lain, dimana sesuai Perpres 95 mengenai SPBE yang arahnya akan menggunakan sistem penghubung atau GSB (Government Service Bus).

4.4.4. Data Analytics

Data analytics adalah sistem untuk menganalisis data-data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bersumber dari internal maupun eksternal sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Data analytics bermanfaat dalam membantu mengambil keputusan, penelitian maupun untuk melakukan optimasi operasional.

Analisis pada data analytics terdiri dari beberapa level yaitu:

- a. Descriptive analysis merupakan interpretasi data untuk menggambarkan apa yang telah terjadi;
- b. Diagnostic analysis merupakan interpretasi data untuk mengidentifikasi anomali, menganalisis pattern dan polahubungannya.
- c. Predictive analysis merupakan analisis data untuk memprediksi kemungkinan outcome yang terjadi pada masa mendatang menggunakan data mining, metode forecasting, model predictive maupun teknik analisis tertentu.
- d. Prescriptive analysis merupakan analisis data menggunakan model matematika, business rules untuk membuat kesimpulan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan outcome yang diharapkan.
- e. Cognitive analysis merupakan analisis data menggunakan semantik, artificial intelligence, deep learning, machine learning untuk membuat kesimpulan tindakan apa yang dilakukan, bagaimana dan mengapa tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan outcome yang diharapkan.

4.4.4.1. Data Warehouse

Data Warehouse merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen data operasional, data staging, data presentasi, dan query tool, di mana data staging mengambil data historikal dari berbagai data operasional internal atau data eksternal organisasi, yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk data dimensional sehingga dapat disajikan ke pengguna (manajemen) dalam bentuk database multidimensi yang sangat bermanfaat untuk membantu mendukung sistem pengambilan keputusan.

Konsep utama data warehouse adalah data yang disimpan untuk keperluan analisis akan lebih efektif untuk diakses apabila memisahkannya dengan data untuk keperluan sistem operasional. Teknologi untuk pemisahan ini terus berkembang. Pada awal perkembangan manajemen data, analisis data dilakukan dengan mengambil data dari legacy system dan meletakkan dalam perangkat tape yang inaktif dan laporan analisis dijalankan dari tape ini, atau dengan membuat mirror data untuk meminimalkan dampak penurunan kinerja dari sistem operasional. Alasan terpenting untuk memisahkan data untuk keperluan analisis proses kerja dari data operasional karena akan menjadi potensi untuk menurunkan kinerja dari sistem operasional apabila dilakukan proses analisis pada sistem operasional. Prioritas yang diutamakan dari sumber data operasional adalah kinerja pemrosesan tinggi, waktu respon cepat, dan ketersediaan data.

Sumber data sistem operasional pada umumnya memelihara data masa lalu dalam jumlah yang sedikit, sedangkan data warehouse akan menyimpan data masa lalu dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini karena data warehouse digunakan untuk menganalisis bisnis atau proses kerja berdasarkan data masa lalu. Identifikasi sumber data sebagai masukan untuk data warehouse dapat dilihat pada Peta Aplikasi Target

Tabel 16 Spesifikasi Tool Data Warehouse

Spesifikasi Umum		- Keterangan
Spesifikasi Fungsional		
▪	Data Staging Area	- Merupakan area penyimpanan dan juga untuk serangkaian proses ETL (Extract-Transform-Load). Hasil dari data staging ini adalah data referensi yang direpresentasikan dalam common database dan metadata
▪	Extract, Transform, dan loading (ETL)	- Ekstraksi data untuk membaca data sumber dan menduplikat data yang dibutuhkan data warehouse untuk dimasukkan ke dalam staging area agar dapat dilakukan manipulasi lebih lanjut. Tahap selanjutnya setelah data dimasukkan ke dalam staging area adalah proses transformasi. - Tranformasi melakukan proses sbb <ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan dan menstandarisasi data • Mengkombinasi data dari berbagai macam sumber. • Menduplikasi ulang data. • Memberikan warehouse key. - Loading dilakukan setelah transformasi pada tabel dimensi dengan melakukan indexing
▪	Data Presentation Area	- Data presentation area adalah tempat di mana data diorganisasi, disimpan, dan telah tersedia untuk di-query langsung oleh pengguna, penulis laporan, dan aplikasi

Spesifikasi Umum		- Keterangan
Spesifikasi Fungsional		
		analisis lainnya. Presentation area seringkali disebut juga sebagai serangkaian dari gabungan data mart. Data mart sendiri adalah tempat menampilkan data dari sebuah proses kerja di mana proses kerja ini melintasi batasan-batasan dari fungsi organisasi.
▪	Data Access Tool	- Mengakses data warehouse menggunakan tool akan lebih baik karena memiliki keunggulan meningkatkan presentation area untuk keperluan pembuatan analisis keputusan
▪	Online Analytical Processing (OLAP)	- OLAP adalah suatu teknologi yang memberikan pengguna kemampuan lebih untuk mendapatkan ke dalam data yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Penggalan data dapat dilakukan dengan cepat, konsisten, mudah digunakan, dan tampilan interaktif pada berbagai jenis ragam informasi. OLAP juga memberikan pengguna kemampuan lebih untuk menganalisis proses kerja secara lebih dalam. - Memiliki kemampuan untuk menggali data lebih dalam dari berbagai sudut yang baru dan memberikan pengetahuan untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Fitur yang didapatkan dari alat OLAP adalah tampilan multidimensional, drill-down, slice and dice, dan multiple view mode

4.4.4.2. Business Intelligence

Business Intelligence (BI) adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi BI dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Tujuan dari BI yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut. Mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Business Intelligence di BKKBN dapat digunakan untuk mendukung Dashboard, merupakan aplikasi yang digunakan oleh pihak manajemen atau jajaran pimpinan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan secara komprehensif dan terintegrasi. Aplikasi ini dikembangkan secara customized.

Tabel 17 Spesifikasi Business Intelligence

Spesifikasi Umum		Keterangan
Spesifikasi Fungsional		
1.	Modul Sumber Data	- Mengelola interkoneksi dengan sumber data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis di lingkungan BKKBN, baik sumber data dari aplikasi eksisting maupun sumber data yang berasal dari sumber lainnya
2.	Modul Analisis Data	- Modul untuk melakukan analisis data dengan kemampuan untuk menggali data lebih dalam dari berbagai sudut yang baru dan memberikan pengetahuan untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Fitur yang didapatkan misalnya tampilan multidimensional, drill-down, slice and dice, dan multiple view mode
3.	Modul Pelaporan dan Statistik	- Mengelola berbagai jenis pelaporan (report) berdasarkan pengolahan dan analisis data baik generik maupun custom report - Mengelola berbagai macam statistik beserta grafiknya berdasarkan pengolahan dan analisis data
4.	Modul Dashboard	- Menampilkan display hasil analisis dalam berbagai macam display tampilan baik tabel, deskriptif, diagram, grafik, gambardan lainnya untuk memudahkan visualisasi data

4.4.4.3. Big Data Analytic

Big data analytics mengacu pada proses mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis sekumpulan besar data (big data) untuk mendapatkan pola-pola dan informasi yang berguna. Big data analytics tidak hanya membantu untuk memahami informasi yang terkandung di dalam data tapi juga membantu untuk mengidentifikasi data yang paling penting untuk keputusan bisnis instansi saat ini dan masa datang. Big data analytics pada dasarnya ingin untuk menghasilkan pengetahuan (knowledge) dari hasil analisis data.

Pada konteks BKKBN, pemanfaatan sistem big data diperlukan untuk dapat menangani data yang berjumlah sangat besar yang merupakan berbagai macam data yang diperoleh dari berbagai sumber data baik. Informasi ini sebagian besar belum dimanfaatkan sistem business intelligence yang ada saat ini, tapi organisasi mulai mengenali terdapat nilai lebih dari perluasan dan pemanfaatan secara maksimal lingkungan business intelligence dan data warehousing untuk mengintegrasikan, mengelola dan menganalisa informasi. Untuk peningkatan kualitas layanan kedepan khususnya untuk layanan utama (core) BKKBN, pemanfaatan teknologi big data analytic ini sangat dibutuhkan.

Melihat kondisi di BKKBN, mengembangkan big data analytics merupakan suatu tantangan besar. Tantangan ini dikarenakan oleh jumlah data yang besar, format data yang beragam (baik pada structured atau unstructured data) dan berasal dari seluruh bagian yang ada di organisasi serta beragam cara yang digunakan untuk mengkombinasikan, membangun dan menganalisa data untuk mendapatkan pola (pattern) tersembunyi dari data dan mendapatkan informasi yang berguna bagi pengguna. Tantangan pertama dalam mengembangkan big data analytics adalah bagaimana memecah data untuk dapat memungkinkan mengakses semua data organisasi yang disimpan di tempat penyimpanan yang berbeda dan bahkan juga disimpan pada sistem yang berbeda. Tantangan besar

kedua adalah Membuat platform yang dapat menarik unstructured data semudah menarik structured data. Volume data ini begitu besar sehingga sulit untuk memprosesnya menggunakan database dan metode perancangan software yang tradisional.

Terdapat dua teknik utama untuk menganalisis big data: the store and analyze approach, dan the analyze and store approach.

1. The Store and Analyze Approach

The store and analyze approach, mengintegrasikan sumber data ke dalam consolidated data store sebelum data dianalisa. Pendekatan ini digunakan oleh sistem data warehouse tradisional untuk menghasilkan data analytics. Pada data warehousing system, consolidated data store biasanya berupa enterprise data warehouse atau data mart yang dikelola oleh relational DBMS atau multidimensional DBMS. Dua trend big data yang penting untuk mendukung Store and analyze approach adalah:

- a. Relational DBMS yang dioptimalkan untuk menganalisis data (sering disebut juga dengan Analytic RDBMS atau ARDBMS)
- b. Non-relational system (kadang disebut dengan NoSQL systems) yang digunakan untuk memproses multi-structured data.

Non-relational system dapat digunakan untuk menghasilkan suatu analisis dari big data, atau untuk pra-proses big data sebelum dikonsolidasikan ke dalam data warehouse. Beberapa pilihan alternative Non-relational system ini misalnya Cassandra, Mongo-DB.

2. The Analyze and Store Approach

Analyze and Store Approach menganalisis data yang mengalir pada proses bisnis, yang ada di antara network dan systems. Hasil analisis kemudian dapat dipublikasikan pada interactive dashboards dan/atau dipublikasikan ke dalam data store (seperti data warehouse) untuk diakses pengguna, menghasilkan historical reporting dan analisis tambahan lainnya. Pendekatan ini dapat juga digunakan untuk menyaring dan mengagregasi big data sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Framework yang dapat digunakan misalnya Apache Hadoop

4.4.5. Portal Internal BKKBN

4.4.5.1. Web Portal Internal BKKBN

Portal internal BKKBN merupakan portal yang memberikan akses terhadap konten dan layanan system informasi yang bersifat internal. Untuk bisa mengakses portal internal maka user harus memiliki hak akses tertentu dan terdaftar sebagai user internal untuk dilakukan user authentication dan user authorization. Konsep idealnya kedepan, portal internal ini digunakan sebagai media satu pintu untuk mengakses seluruh layanan BKKBN sesuai dengan hak akses masing-masing pegawai. Portal internal BKKBN mestinya juga dapat diakses melalui jaringan internet namun diberlakukan mekanisme keamanan khusus untuk aksesnya, misalnya dengan menggunakan secure web services (https) atau melalui akses secure VPN (Virtual Private Network).

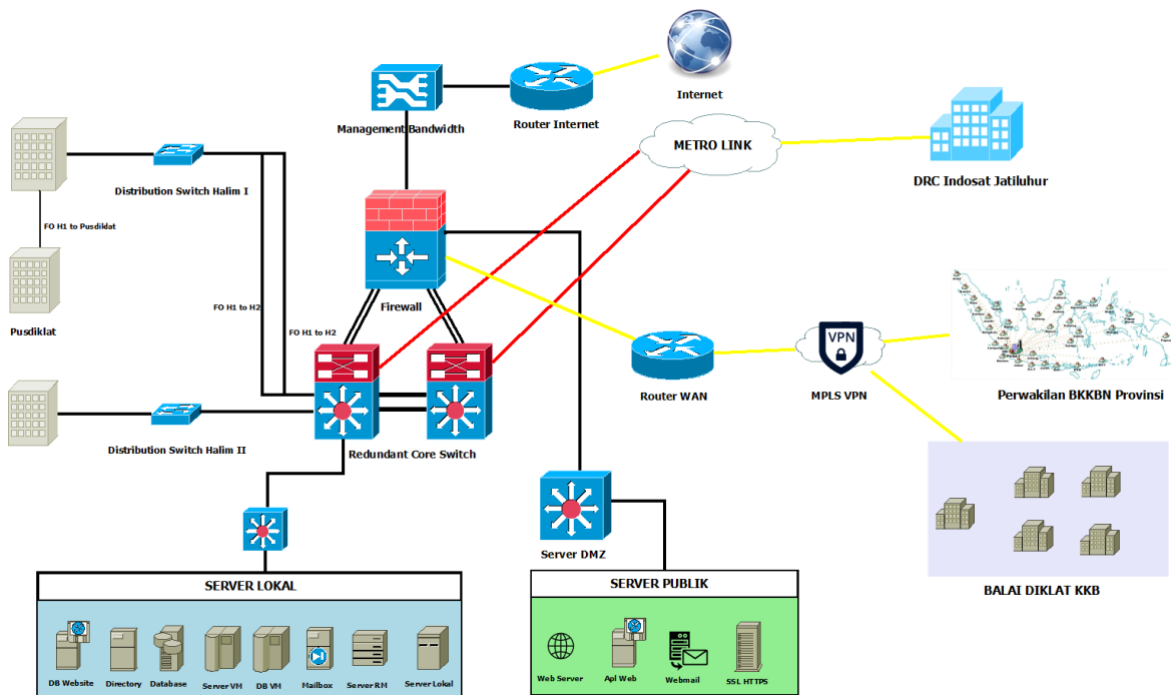
4.4.5.2. Mobile Portal Internal BKKBN

Mobile Portal BKKBN merupakan portal mobile yang memberikan akses terhadap konten dan layanan informasi melalui media smartphone baik Android maupun IOS yang dapat diakses melalui jaringan Mobile. Secara garis besar konten pada mobile portal ini mirip dengan konten/ fitur yang juga dapat diakses via web portal. Informasi yang disajikan pada mobile portal ini disesuaikan dengan user yang mengaksesnya.

4.5. Arsitektur Infrastruktur Target

4.5.1. Arsitektur Jaringan

Target model konseptual jaringan komputer BKKBN secara umum masih mempertahankan kondisi eksisting dari infrastruktur jaringan komputer BKKBN yang diperkuat dengan peningkatan di sisi koneksi dan redundansi. Adapun bentuk dari topologi jaringan komputer target dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 6 Arsitektur Jaringan

Pada gambar di atas dapat dilihat topologi jaringan computer BKKBN kedepan dimana sudah terdapat redundansi pada bagian core switch yang dapat meningkatkan kehandalan dari infrastruktur jaringan BKKBN. Adapun peningkatan kualitas konektivitas antara Gedung Halim 1 dan Gedung Pusdiklat yang semula masih menggunakan kabel UTP menjadi kabel fiber optic.

Selain peningkatan kehandalan perangkat, diperlukan peremajaan untuk beberapa perangkat infrastruktur didasari atas masa end of life dari perangkat yang hingga saat ini masih digunakan dengan referensi, data existing mengenai kondisi perangkat infrastruktur jaringan komputer milik BKKBN. Berikut merupakan data perangkat berikut usulan peremajaan perangkat:

Tabel 18 Daftar Perangkat

No	Nama Perangkat	Merk dan Type	Tahun Pembelian	End of Life	Rekomendasi
1.	Router	Cisco 3845	2008	2016	Diremajakan
2.	Router	Cisco 2801	2008	2016	Diremajakan
3.	Firewall	Cisco ASA 5525X	2015	2025	-
4.	L2 Switch	Cisco 2960X	2015	2026	-

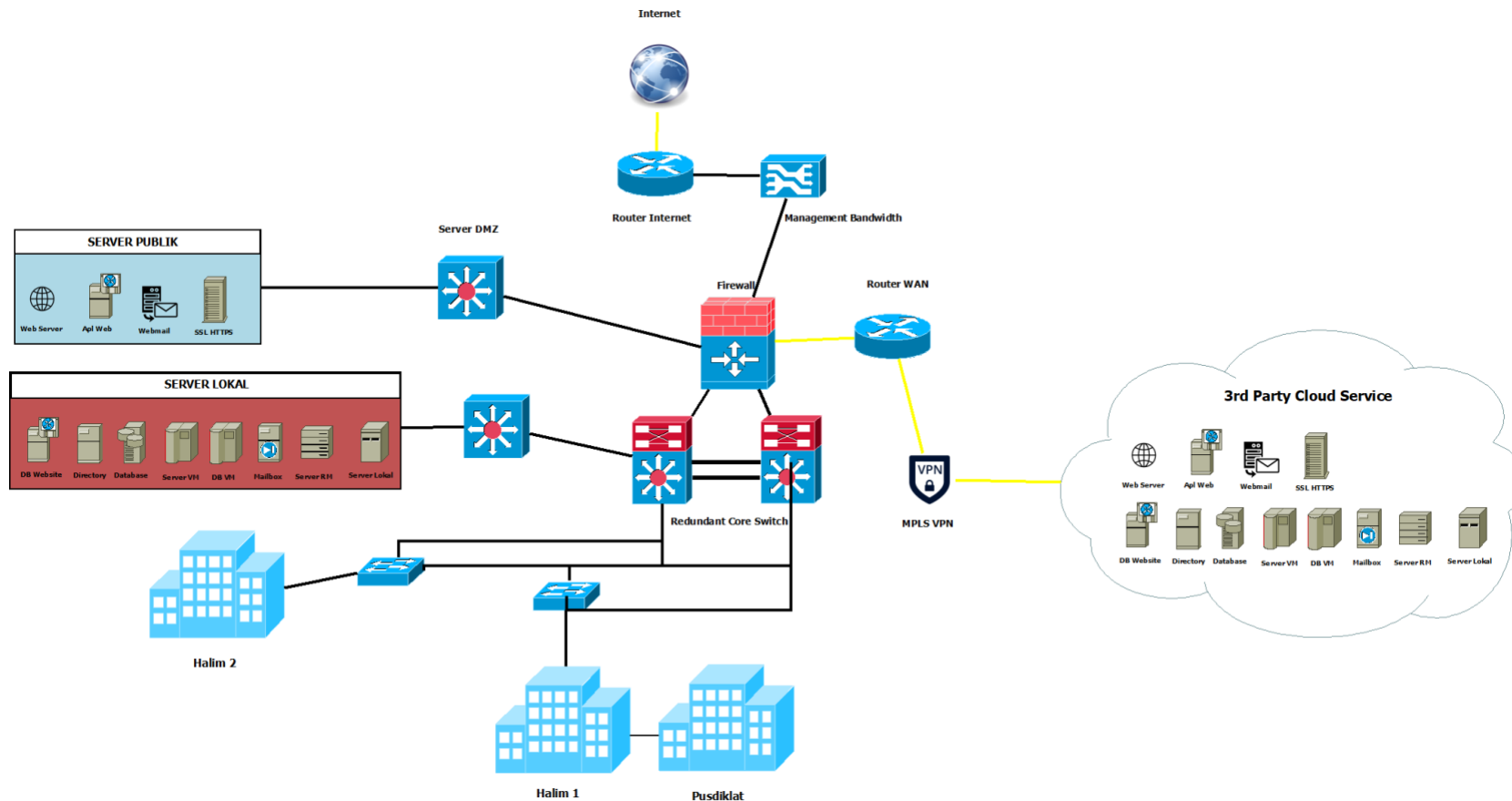
No	Nama Perangkat	Merk dan Type	Tahun Pembelian	End of Life	Rekomendasi
5.	Router	Cisco Router 3945	2015	2023	Diremajakan
6.	L2 Switch	Cisco Catalyst 2960S	2015	2021	Diremajakan
7.	NAC	Bluecoat S200	2015	N/A	-
8.	DDos Protection	Cisco Firepower	2017	N/A	-
9.	DDos Protection	Cisco UCS 220M4	2017	2025	-
10.	L3 Switch	Cisco catalyst 4507-RE	2008	2018	Diremajakan
11.	L3 Switch	Cisco Nexus 7000	2018	2026	-
12.	L3 Switch	Cisco Catalyst 4503-E	2012	2018	Diremajakan
13.	NAC	Bluecoat S200	2015	N/A	-
14.	TelePresence	Cisco MCU 4220	2008	2018	Diremajakan
15.	TelePresence	Cisco MCU 4210	2008	2018	Diremajakan
16.	ADC	Alteon 5208	2017	N/A	-
17.	Wireless equipment	Cisco 5500	2019	N/A	-
18.	L3 Switch	Cisco Catalyst 3560	2008	2018	Diremajakan
19.	L3 Switch	Cisco Catalyst 3560	2008	2018	Diremajakan
20.	L3 Switch	Cisco 2801	2008	2016	Diremajakan
21.	L2Switch	Catalyst 3200	2018	N/A	-
22.	L2 Switch	Catalyst 3200	2015	N/A	-

4.5.2. Arsitektur Server dan Storage

Peremajaan dan penambahan kapasitas perangkat server dan storage milik BKKBN didasari atas kemampuan compute dan usia perangkat, usia perangkat menjadi salah satu faktor yang berdampak timbulnya risiko kontinuitas, sehingga perlu untuk diperhatikan kapan suatu perangkat server perlu untuk melakukan peremajaan. Disisi lain Central Processing Unit (CPU) merupakan komponen yang memungkinkan di-oversubscribe serta throughput lintas generasi CPU cukup berbeda secara signifikan sehingga CPU tidak dapat diperbandingkan satu dengan lainnya secara langsung (misalnya berdasarkan core, clock cache, dll).

Karenanya diperlukan suatu model perbandingan CPU lintas generasi dan lintas model yang salah satunya berbasis benchmark SPECint2006 Rate. SPECint2006 Rate merupakan benchmark throughput CPU yang menggunakan model komputasi integer. Model komputasi integer dipilih karena aplikasi enterprise pada umumnya bersifat komputasi logika dan aritmatik integer. Jika pun ada, komputasi floating point pada aplikasi enterprise bersifat sederhana dan dengan presisi numerik yang relatif rendah. Dilihat dari trend teknologi infrastruktur dan aplikasi ke depan yang bersifat horizontally scale-out, dimana pada layer infrastruktur kuncinya adalah implementasi cloud.

Dilihat dari data spesifikasi dan penggunaan perangkat server dan storage yang ada di BKKBN, maka stragey peremajaan dapat dilakukan dengan menambah kapasitas hardware hyperconverge infrastructure yang telah dimiliki oleh BKKBN namun dengan adanya peraturan SPBE dan mempertimbangkan kemungkinan migrasi sistem menuju pusat data nasional maka peremajaan perangkat dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan komputasi awan pihak ke 3. Adapun skenario tersebut dapat di lihat pada gambar dibawah ini:



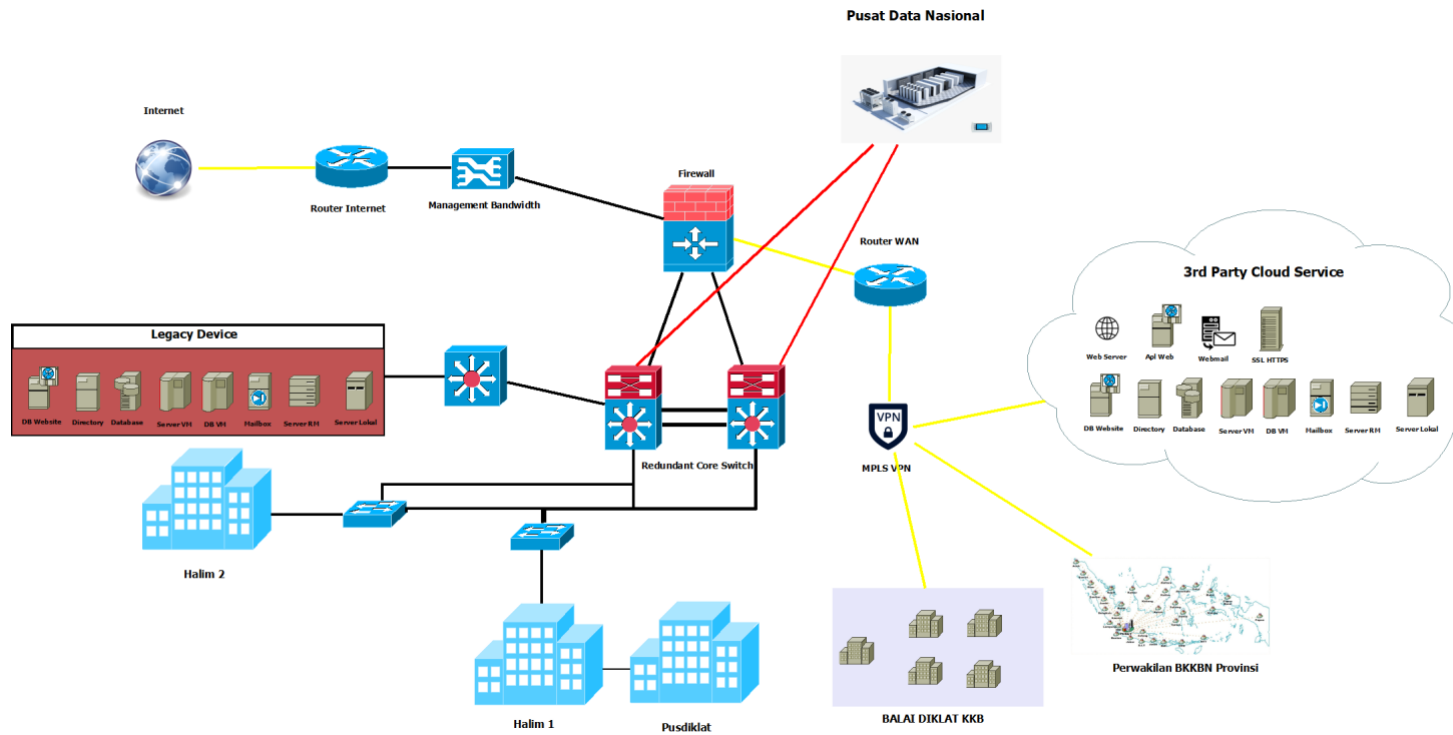
Gambar 7 Arsitektur Server dan Storage

Kondisi diatas menggambarkan penggunaan 3rd party cloud service untuk menggantikan peremajaan perangkat server milik BKKBN yang secara kemampuan komputasi, performansi dan efisiensi dinilai sudah buruk dan memiliki usia yang sudah lebih dari 5 tahun. Adapun hal yang perlu dilakukan sebelum menggunakan jasa cloud pihak ke 3 yaitu melakukan pengukuran kapasitas (computer, memory, dan storage) yang diperlukan untuk sistem informasi yang akan dimigrasikan pada cloud service tersebut.

4.5.3. Arsitektur Jaringan SPBE

Dengan adanya kemungkinan diperlukannya pemindahan sistem informasi BKKBN saat ini menuju ke pusat data nasional, diperlukan adanya feasibility study terkait migrasi tersebut.

Adapun rancangan topologi infrastruktur jaringan kedepan BKKBN pasca pembangunan pusat data nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 8 Arsitektur Jaringan SPBE

Model ini masih mempertahankan model topologi jaringan komputer BKKBN eksisting namun berpotensi adanya dampak dari pemindahan sistem data center Halim II menuju pusat data nasional yang memungkinkan hilangnya kebutuhan BKKBN atas penggunaan jasa DRC.

4.5.4. Fasilitas Fisik

Berdasarkan data mengenai kondisi fasilitas data center Gedung Halim 2 saat ini, terdapat beberapa fasilitas yang dapat di kembangkan untuk meningkatkan reliabilitas dan aspek keamanan, selain itu peningkatan ini diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi standar data center. Peningkatan fasilitas data dilihat pada table berikut:

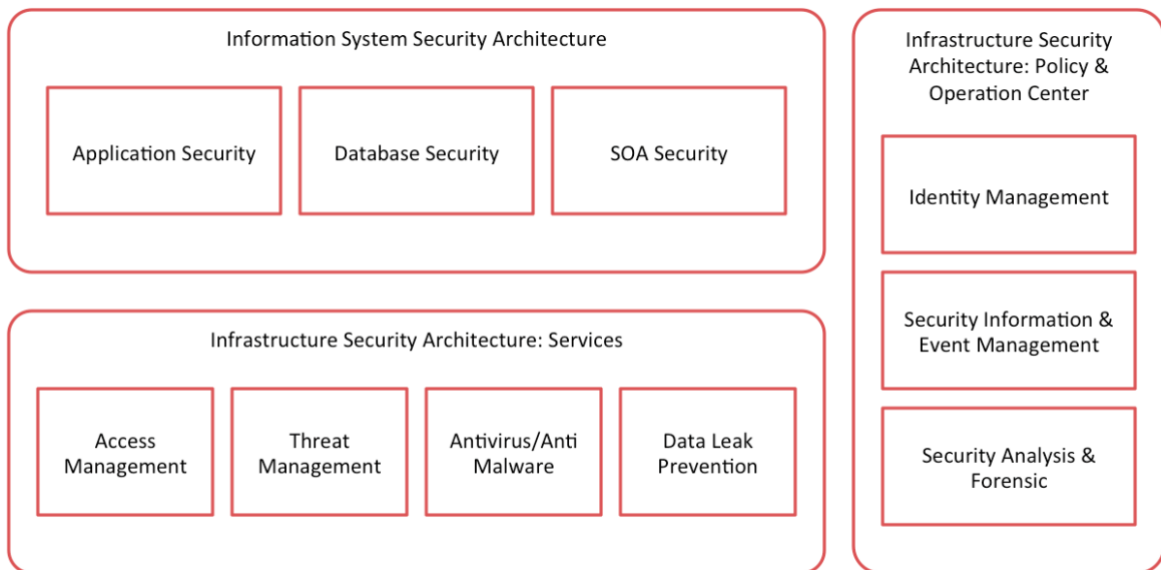
Tabel 19 Fasilitas Data Center

Parameter	DC	Improvement
Sistem Kelistrikan		
AC Power	PLN 1 Gardu	2 Gardu listrik, diperlukan penambahan satu kabel induk yang kearah data center untuk kebutuhan sertifikasi tier 2 Uptime
DC Power (Genset)	Bergabung dengan main building Gedung Halim 2 dengan kapasitas 700 kVA, aktif 20 detik setelah power mati dan dengan daya tahan 24 jam	Sudah memadai
UPS	1 lapis dengan kapasitas 60 kVA, yang dapat digunakan sebagai backup selama 4 jam 22 menit	2 Lapis UPS, selain meningkatkan kapasitas UPS, hal ini diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi tier 2 Uptime
Fasilitas Ruangan		
Access Door Data Center	Sudah terdapat access door , fingerprint access door	Sudah memadai
Access Door NOC	sudah terdapat network operation center (NOC) access door.	Sudah memadai
Access Door Server	Terdapat access door untuk keruangan server.	Sudah memadai
CCTV Luar	Sudah terdapat CCTV di luar data center	Sudah memadai
CCTV Dalam	Sudah terdapat CCTV di dalam data center	Sudah memadai
Precision Air Conditioning (PAC)	AC presisi 3 Unit yang sudah termasuk humidifier, always on dan akan standby otomatis ketika target suhu sudah tercapai	Sudah memadai, perlu dilakukan maintenance secara berkala
Raised Floor	Yes	Sudah memadai
Fire Detection	Sudah memiliki fire suppression system menggunakan karbon (CO2) fire suppression, smoke detector, dan fire alarm.	Di rekomendasikan untuk mengganti fire suppression system berbahan karbon menuju system yang lebih aman

Parameter	DC	Improvement
		bagi manusia (contoh: FM200)
Redundant Power Cabling	Sudah redundant	Sudah memadai
Jumlah rack yang terpasang	Jumlah rack yang terpasang 9 rack, dengan total 45U sedangkan rack yang digunakan 7	Sudah memadai
Sistem Cabling	Sistem cabling sudah dipisah antara network dan power , power lewat bawah UTP (network) lewat atas	Sudah memadai
Sistem Monitoring	Menggunakan NMS yang digunakan untuk memonitor perangkat network dan server	Sudah memadai

4.5.5. Arsitektur Keamanan

Bagian ini membahas arsitektur keamanan untuk layer sistem informasi dan infrastruktur. Arsitektur keamanan untuk sistem informasi merujuk kepada implementasi platform berbasis web.



Gambar 9 Arsitektur Keamanan

Berikut ini adalah penjelasan naratif untuk setiap blok arsitektur keamanan yang direkomendasikan. Penjelasan lebih detail untuk setiap arsitektur dapat dilihat di Lampiran.

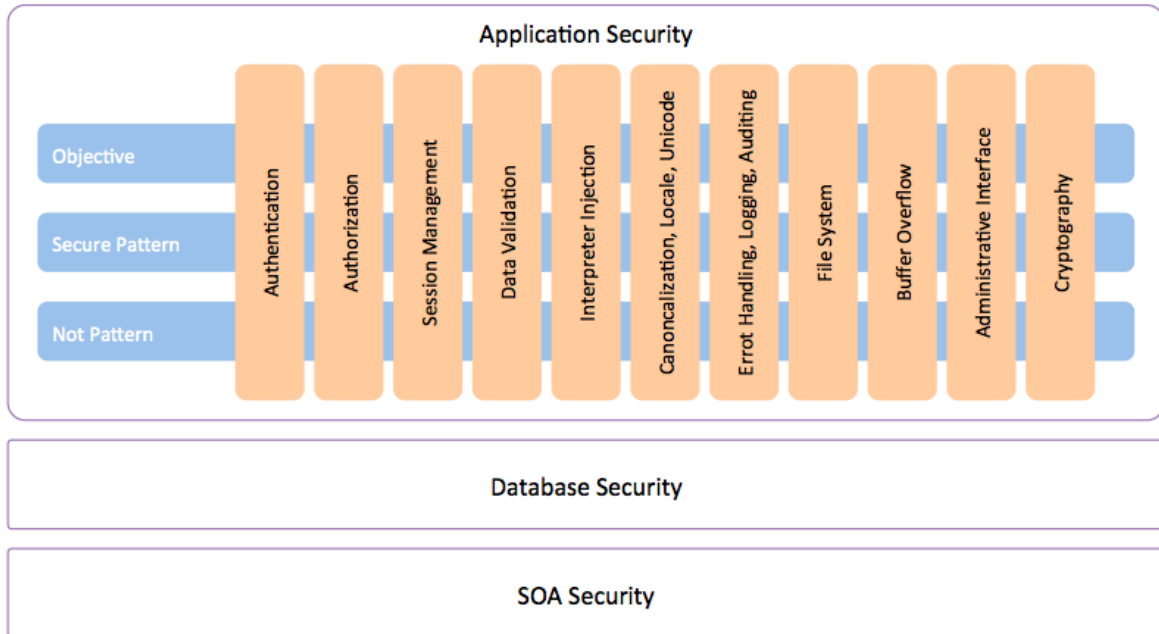
Tabel 20 Deskripsi Naratif Blok Arsitektur Keamanan

NO	ITEM	DESKRIPSI
A.	Arsitektur Keamanan Sistem Informasi	
1.	Application Security	<p>Panduan Pattern dan Non-Pattern terkait keamanan aplikasi berbasis web yang mengadopsi OWASP (Open Web Application Security Project), di antaranya terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Authentication ▪ Authorization ▪ Session Management ▪ Data Validation ▪ Interpreter Injection ▪ Canoncalization, Locale, Unicode ▪ Errot Handling, Logging, Auditing ▪ File System ▪ Buffer Overflow ▪ Administrative Interface ▪ Cryptography
2.	Database Security	<p>Pattern yang ditujukan untuk memitigasi risiko umum terkait dengan keamanan database berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memitigasi bypass atas database ▪ Memitigasi bypass aplikasi ▪ Mengkonsolidasikan auditing & compliance reporting ▪ Memonitor database traffic dan memblok ancaman terkait dengannya ▪ Melindungi semua lingkungan database
3.	SOA Security	<p>Pattern generik terkait dengan SOA Security di antaranya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemungkinan pemisahan security sebagai komponen dan service ▪ Pengelolaan otentikasi dan identitas ▪ Pengelolaan kontrol akses
B.	Arsitektur Keamanan Infrastruktur	
4.	Access Management	<p>Merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap user untuk dapat melihat, menggunakan, mengubah atau menghapus aplikasi atau sumberdaya lainnya, atau mengakses sistem atau fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. Kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan</p>

NO	ITEM	DESKRIPSI
		fungsionalitas layanan kementerian. Layanan ini akan terintegrasi dengan Identity Management.
5.	Threat Management	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan pencegahan dan proteksi dini terhadap berbagai threat yang masuk ke dalam lingkungan jaringan. Sebagai pertahanan pertama menghadapi lingkungan di luar jaringan internal kementerian. Untuk memenuhi kebutuhan layanan ini dapat diimplementasikan akuisisi produk dengan signature yang selalu terjaga updatenya atau memiliki rule inteligent untuk mendeteksi threat baru.
6.	End Point Protection	layanan anti virus/malware management ditujukan untuk merealisasikan perlindungan aset informasi yang tersimpan baik di server maupun desktop/laptop pengguna dan perangkat mobile.
7.	Data Leak Prevention (DLP)	Data Leak Prevention ditujukan untuk melindungi data-data kementerian sensitif yang ada di storage (file server), ketika transit (ke internet, via email, web, instant messaging, ftp) dan saat di endpoint (misalnya terhadap duplikasi mobile storage), merujuk kepada kebijakan keamanan informasi organisasi.
8.	Identity Management (IdM)	Identity Management Service memungkinkan untuk pengelolaan secara terpusat seluruh identitas sumberdaya atau aset TI.
9.	Security Information & Event Management (SIEM)	SIEM melakukan logging atas seluruh informasi dan aktivitas yang terjadi di dalam infrastruktur, untuk kemudian diolah dan dikorelasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelola terkait status terkini keamanan informasi.
10.	Security Analysis & Forensic	Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih mendalam atas log yang telah dikelola di SIEM, untuk kepentingan security forensic.

4.6. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi

Model arsitektur keamanan sistem informasi, dengan layer-layer penyusunnya, ditunjukkan oleh ilustrasi sebagai berikut:




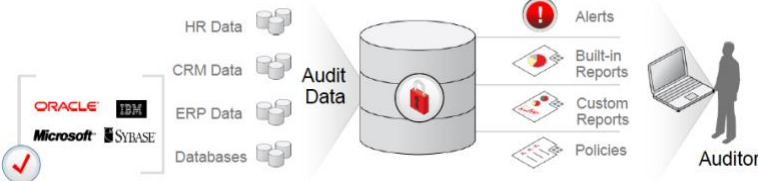

Gambar 10 Layer Arsitektur Keamanan

Untuk setiap kategori pada layer application security, terdapat pola yang disarankan dan tidak disarankan menurut OWASP (Open Web Application Security Project).

4.6.1. Database Security

Tabel 21 Database Security

No	Kontrol	Ilustrasi Dan Deskripsi Best Practices
1	Memitigasi bypass atas database	<p>The illustration shows an application (with logos for Oracle, Siebel, and PeopleSoft) connected to a database. Data is then shown being stored on various media: Disk, Backups, Exports, and Off-Site Facilities. A red arrow points from the database to these storage options, indicating the flow of data.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencegah akses ke data yang tersimpan di file database, tape dan media sejenisnya oleh staf TI atau OS Users Transparent data encryption ketika data tersimpan di database, transit atau tersimpan di media Separation of duties pada key management Implementasi strong authentication pada user database

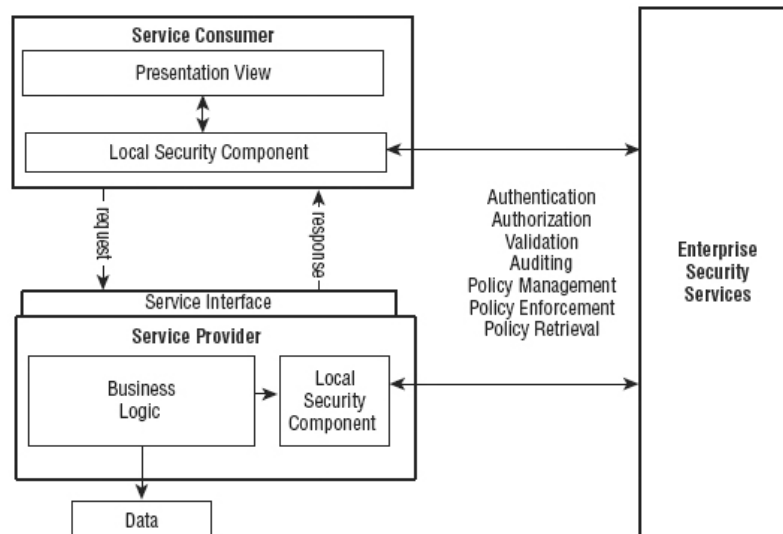
No	Kontrol	Ilustrasi Dan Deskripsi Best Practices
2	Memtigiasi bypass aplikasi	 <ol style="list-style-type: none"> Implementasi privileged user access control untuk membatasi akses ke data aplikasi Implementasi DBA Separation of Duties secara otomatis dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan Implementasi multi-factor authorization untuk memastikan kebijakan keamanan kementerian (least privilege) Memungkinkan enforcement kontrol akses sampai level row Klasifikasi user melalui Identify Management
3	Mengkonsolidasikan auditing & compliance reporting	 <ol style="list-style-type: none"> Mengkondolidasikan audit trail database pada centralized repository yang aman Deteksi dan pembangkitan alert atas aktifitas yang mencurigakan, termasuk atas privileged users Compliance report atas regulasi, misal terkait dengan audit privileged users, login gagal, perubahan data Tracking perubahan data
4	Memonitor database traffic dan memblok ancaman terkait dengannya	 <ol style="list-style-type: none"> Mem-blok akses tidak terotorisasi seperti SQL Injection Implementasi SQL Grammar Analysis untuk memastikan akurasi, policy enforcement dan skalabilitas Implementasi white lists dan black lists pada aktifitas aplikasi, dengan sebelumnya mengelimir false positive Melakukan monitoring atas aktifitas database
5		Perlindungan lingkungan: production

No	Kontrol	Ilustrasi Dan Deskripsi Best Practices
	Perlindungan lingkungan database	<p>a. Mengklasifikasikan database sesuai dengan security policy group</p> <p>b. Scan database secara rutin untuk membandingkan dengan best practices standards</p> <p>c. Deteksi dan pencegahan perubahan konfigurasi yang tidak terotorisasi</p> <p>d. Implementasi patching sesuai perkembangan teknologi</p>
		<p>Perlindungan lingkungan: Non Production</p> <p>a. Pencegahan developer dan tester untuk mengakses data production</p> <p>b. Data masking untuk development dan testing nonproduction</p>

4.6.2. SOA Security

Bagian ini menjelaskan tentang blueprint SOA Security yang akan diimplementasikan ke depan. Dijelaskan dalam prinsip-prinsip desain, yang kemudian akan ditutup dengan implementasinya dalam SOA Building Block serta integrasinya dengan yang lain.

1. Pemisahan security sebagai komponen dan service

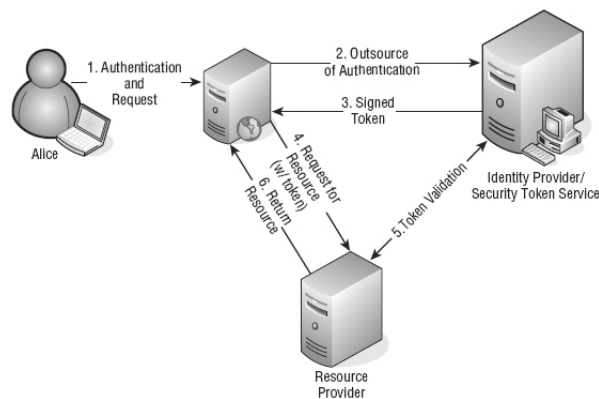


Gambar 11 Pemisahan Security sebagai komponen dan service

Layanan pendukung security services adalah sbb:

- Identification and authentication services – identifikasi subyek
- Attribute service – retrieve attribute credentials
- Access control policy management service – menyimpan access control policy
- Policy retrieval service – akses policy tersimpan
- Authorization decision service – pembuatan keputusan otorisasi
- Identity transformation service – transformasi identity antar aplikasi dan mendukung authentication credentials untuk pengguna yang sama
- Security token service (STS) – penerbitan trusted assertion of identity, security attribute & authorization decision
- Auditing service – mengelola log dan alert

4.6.3. Pengelolaan Otentikasi dan Identitas



Gambar 12 Pengelolaan Otentikasi dan Identitas

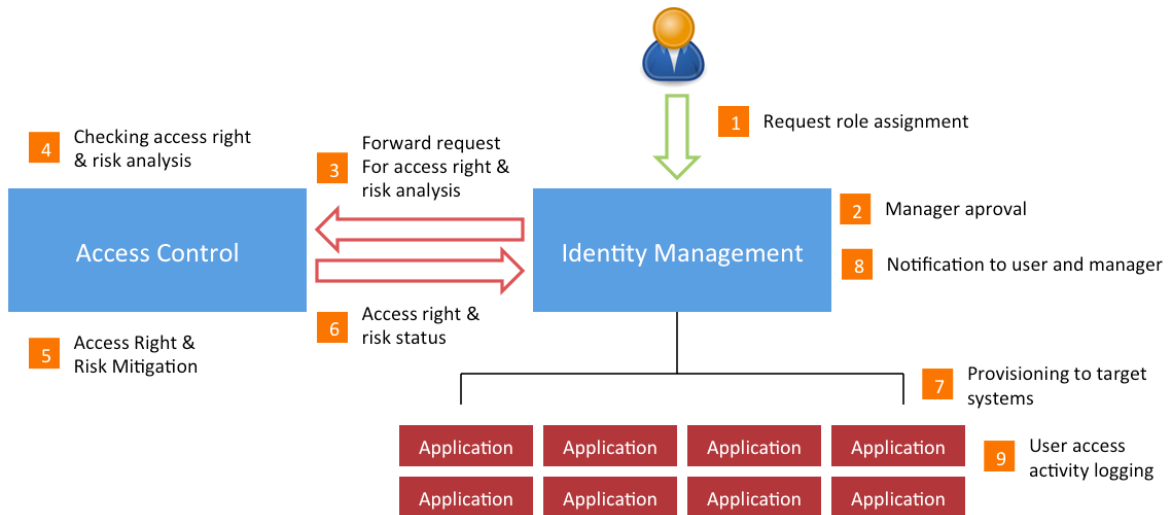
Walaupun secara arsitektur memungkinkan menggunakan ESB (Enterprise Service Bus) untuk propagasi identity, tetapi direkomendasikan pengelolaan otentikasi dan identity seluruh layanan berbasis SOA ke depan menggunakan Trusted Token Service. Ini selaras dengan rekomendasi untuk implementasi IDM (Identity Management).

Implementasi prinsip ini akan memungkinkan ke depan dapat mengelola identity dan akses secara terpusat. Hal ini penting untuk memastikan tingkat keamanan akses pada seluruh layanan yang disediakan oleh sistem informasi atau infrastruktur.

4.6.4. Arsitektur Keamanan Infrastruktur

4.6.4.1. Access Management

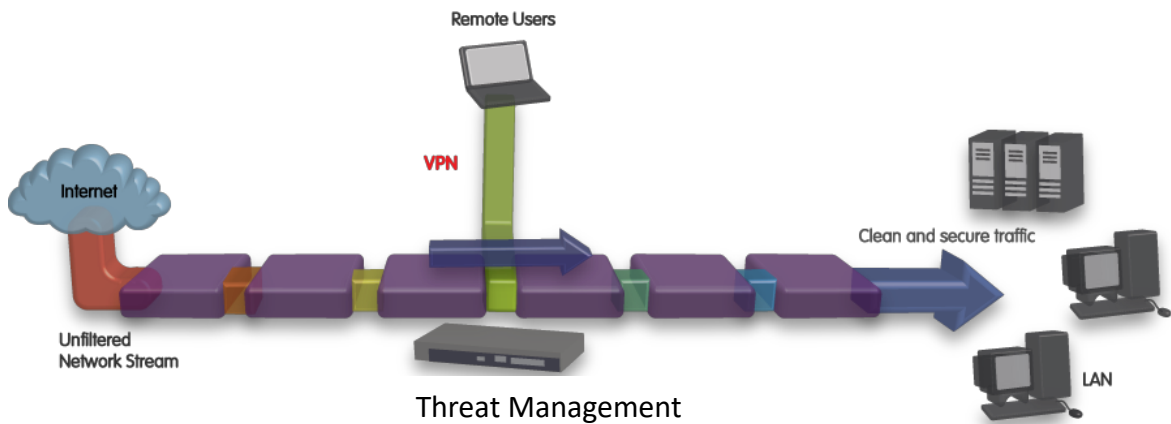
Merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap user untuk dapat melihat, menggunakan, mengubah atau menghapus aplikasi atau sumberdaya lainnya, atau mengakses sistem atau fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. Kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan pemerintahan. Layanan ini akan terintegrasi dengan Identity Management.



Gambar 13 Access Management

4.6.4.2. Threat Management

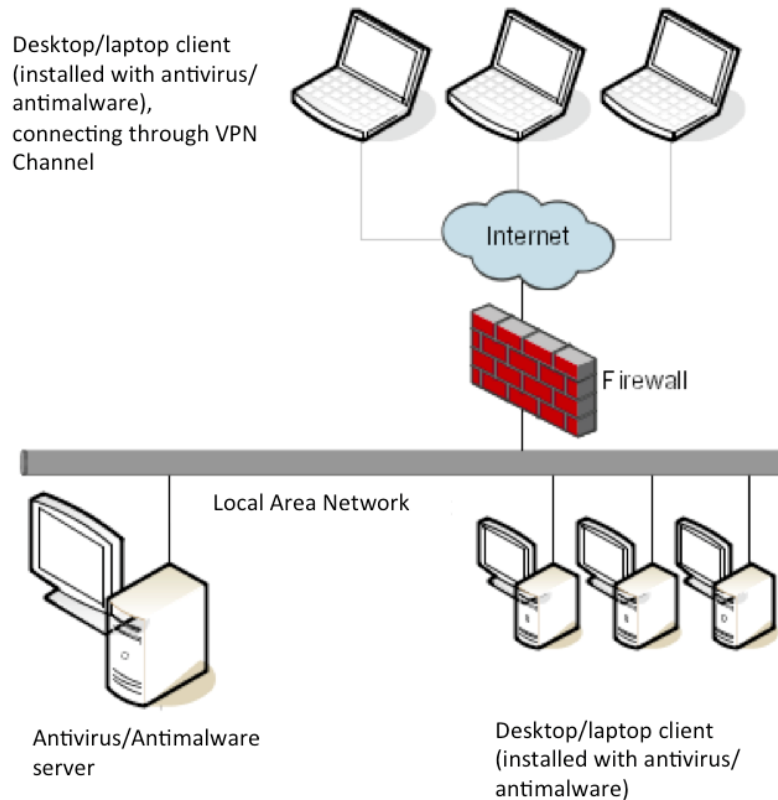
Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan pencegahan dan proteksi dini terhadap berbagai threat yang masuk ke dalam lingkungan jaringan. Sebagai pertahanan pertama menghadapi lingkungan di luar jaringan internal kementerian. Untuk memenuhi kebutuhan layanan ini dapat diimplementasikan akusisi produk dengan signature yang selalu terjaga updatenya atau memiliki rule inteligent untuk mendeteksi threat baru.



Gambar 14 Threat Management

4.6.4.3. Antivirus/Anti Malware

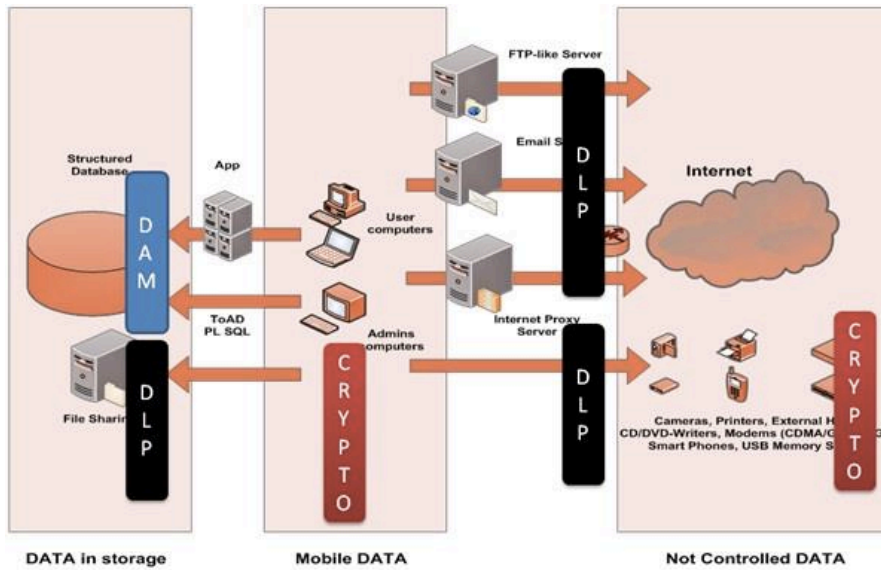
Komplementer dengan fungsi Threat Management, layanan anti virus/malware management ditujukan untuk merealisasikan perlindungan aset informasi yang tersimpan baik di server maupun desktop/laptop pengguna dan perangkat mobile. Untuk memastikan versi dan signature di setiap server, desktop/laptop atau perangkat mobile selalu terupdate, digunakan antivirus/anti malware server. Update database antivirus/antimalware yang dikontrol oleh server ditujukan untuk menghemat penggunaan sumberdaya bandwidth, dibandingkan jika seluruh client melakukan update sendiri-sendiri.



Gambar 15 Antivirus/Anti Malware

4.6.4.4. Data Leak Prevention

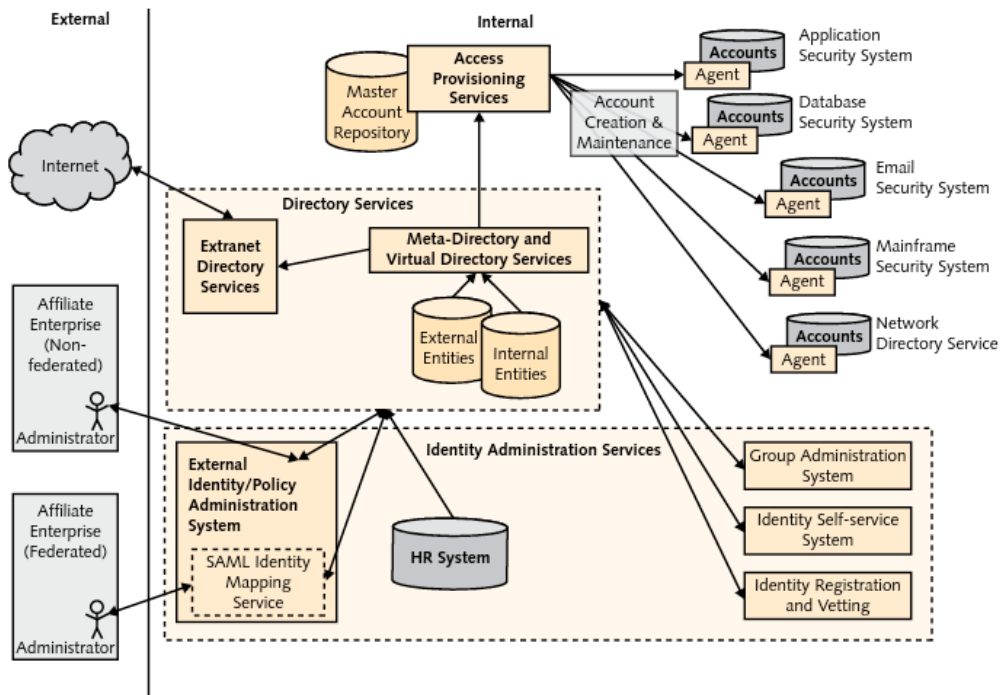
Data Leak Prevention ditujukan untuk melindungi data-data kementerian sensitif yang ada di storage (file server), ketika transit (ke internet, via email, web, instant messaging, ftp) dan saat di endpoint (misalnya terhadap duplikasi mobile storage), merujuk kepada kebijakan keamanan informasi kementerian.



Gambar 16 Data Leak Prevention

4.6.4.5. Identity Management

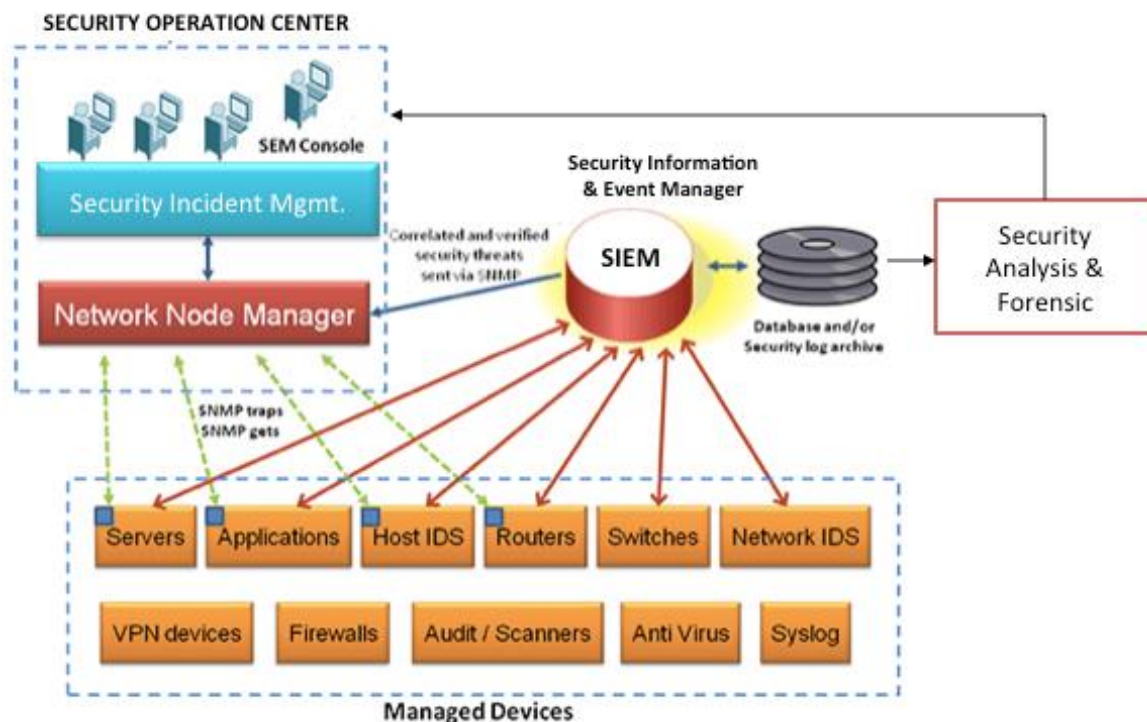
Identity Management Service memungkinkan untuk pengelolaan secara terpusat seluruh identitas sumberdaya atau aset TI. Informasi tentang aset-aset tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan akses yang diberikan kepada sebuah sumberdaya atau aset TI. Perubahan identitas pada sumberdaya terkait, dapat mengakibatkan perubahan setting akses yang diberikan.



Gambar 17 Identity Management

4.6.4.6. Security Information & Event Management

SIEM melakukan logging atas seluruh informasi dan aktivitas yang terjadi di dalam infrastruktur, untuk kemudian diolah dan dikorelasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengelola terkait status terkini keamanan informasi.



Gambar 18 Security Information & Event Management

4.6.4.7. Security Analysis & Forensic

Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih mendalam atas log yang telah dikelola di SIEM, untuk kepentingan security forensic. Tool ini meningkatkan fungsionalitas analisis yang secara terbatas sudah disediakan oleh SIEM, melalui:

1. Identifikasi, memungkinkan melakukan pencarian dengan berbagai kriteria secara cepat untuk jumlah data sangat besar
2. Analisis, memungkinkan melakukan analisis secara mendalam atas insiden keamanan yang telah terjadi, misalnya adalah asal serangan, pola penyebaran, dsj.

4.7. Tata Kelola TI

4.7.1. Model Operasi TI

Berdasarkan kondisi BKKBN saat ini menghasilkan model operasi Consolidate Centralize. Consolidate diartikan sebagai pemusatan sumber daya yang terpusat, sementara Deconsolidate adalah sumberdaya dikelola tersebar di masing-masing User. Centralize dapat diartikan sebagai segala peraturan perusahaan seperti Kebijakan, Standar dan peraturan perusahaan lainnya dikelola secara terpusat, sedangkan untuk Decentralize dapat diartikan sebagai segala peraturan perusahaan seperti Kebijakan, Standar dan peraturan perusahaan lainnya dikelola masing-masing User.

4.7.2. Level Strategis

Model Operasi adalah deskripsi tentang bagaimana BKKBN membagi kewenangan antara Pengelola TI dan Pemilik Proses Bisnis. Terdapat dua level model operasi yang diusulkan, yaitu level strategis dan level teknis. Model operasi akan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan SOP TI.

Terdapat empat (4) model pemetaan kewenangan antara Pengelola TI dan Pemilik Proses Bisnis seperti dijelaskan dalam Diagram di bawah ini.

Tabel 22 Pemetaan Kewenangan

Consolidated	2. Konsolidasi Sumber Daya dan Desentralisasi Pengendalian TI Sumber daya TI dikelola oleh Pengelola TI sedangkan Kebijakan dan SOP TI dikelola oleh masing-masing Pemilik Proses Bisnis.	4. Konsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI Baik sumber daya TI maupun Kebijakan dan SOP TI dikelola oleh Pengelola TI.
Deconsolidated	1. Dekonsolidasi Sumber Daya dan Desentralisasi Pengendalian TI Baik sumber daya TI maupun Kebijakan dan SOP TI dikelola oleh Pemilik Proses Bisnis.	3. Dekonsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI Sumber daya TI dikelola oleh Pemilik Proses Bisnis masing-masing sedangkan Kebijakan dan SOP TI dikelola oleh Pengelola TI.
	Decentralized	Centralized

Model operasi konsolidasi dan sentralisasi tersebut dituangkan dalam area tata Kelola turunan yaitu IT Plan, IT Portfolio and Investment, Policies and Standards, Operation and Monitoring.

Tabel 1 Model Operasi TI

	IT Plan	IT Portfolio & Investment	Policies & Standards	Operate	Monitor
Deconsolidate Decentralize	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja
Consolidate Decentralize	Unit Pengelola TI	Unit Pengelola TI	Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja
Deconsolidate Centralize	Unit Pengelola TI	Shared Services*	Unit Pengelola TI	Shared Services**	Unit Pengelola TI
Consolidate Centralize	Unit Pengelola TI	Unit Pengelola TI	Unit Pengelola TI	Unit Pengelola TI	Unit Pengelola TI

Keterangan:

*) Layanan shared services diinvestasikan oleh Unit Kerja Pengelola TI. Unit Kerja bisa mengimplementasikan solusi spesifik sesuai dengan kebutuhannya dengan sepersetujuan Unit Kerja Pengelola TI.

**) Layanan shared services dioperasikan oleh Unit Pengelola TI (baik secara mandiri atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya), sedangkan layanan spesifik yang dirasa perlu oleh Unit Kerja dapat dioperasikan sendiri oleh Pelaksana Unit Kerja.

Berdasarkan perbandingan kelebihan dan kekurangan model operasi TI pada tabel di atas maka yang direkomendasikan untuk BKKBN adalah model nomor 3 yaitu Dekonsolidasi Sumber Daya dan Sentralisasi Pengendalian TI.

4.7.3. Struktur Organisasi TI

Tabel 23 Struktur Organisasi

Unit	Tusi	Uraian Tusi	Tingkat Jabatan	Eselon/Kelas
Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem pelaporan dan pengembangan aplikasi, kerjasama teknologi informasi dan bank data, serta infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.	Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi serta kerjasama teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.	ES. II/14	
		Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga		
		penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang bank data, Pengelolaan Situs, Pengelolaan Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga		
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN KERJASAMA TI				
Koordinator		penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga		

Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi serta kerjasama teknologi Informasi (KLS JAB :11)	penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
	penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
Subkoordinator Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi (KLS JAB:9)	Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
Subkoordinator Kerjasama Teknologi Informasi (KLS JAB: 9)	Melakukan pengelolaan hubungan kerjasama Teknologi Informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TI SERTA MEDIA KONFEREN	
Koordinator Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen (KLS JAB 11)	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta pengelolaan Media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
	Berperan dan bertanggung jawab terkait Fungsi Operasional dan IT helpdesk di BKKBN

Subkoordinator Pengembangan Sarana Prasarana TI dan Pengelolaan media konferen (KLS JAB:9)	Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan media konferen pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
SubKoordinator Pemeliharaan sarana prasarana TI (KLS JAB:9)	Melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga Menangani proses dan aktivitas terkait manajemen permasalahan, manajemen service desk dan incident dan manajemen perubahan
BANK DATA, SITUS, INFORMASI PUBLIK DAN PERPUSTAKAAN SERTA ADMINISTRASI	
Koordinator Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan bank data, Situs BKKBN, Informasi Publik perpustakaan dan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan bank data, Situs BKKBN, Informasi Publik perpustakaan dan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
	Bidang pengelolaan bank data, Situs BKKBN, Informasi Publik, perpustakaan dan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
Subkoordinator Pengelolaan Bank Data dan Situs serta Administrasi (KLS JAB : 9)	Melakukan pengelolaan Bank Data dan Situs serta Administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
SubKoordinator Informasi Publik dan perpustakaan (KLS JAB : 9)	Melakukan pengelolaan Informasi Publik perpustakaan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Sub Koordinator administrasi	Melakukan pengelolaan Administrasi
	Mengelola dan memonitor terkait proses perencanaan sampai penutupan proyek TI

4.7.4. Kebijakan Tata Kelola TI

Kebijakan Tata Kelola TI memuat beberapa hal berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Sasaran, Dan Ruang Lingkup
3. Kebijakan Perencanaan Teknologi Informasi
4. Kebijakan Pengadaan, Pengembangan Dan Implementasi Ti
5. Kebijakan Operasional Teknologi Informasi
6. Kebijakan Pengamanan Informasi
7. Kebijakan Pengawasan Internal Dan Audit Teknologi Informasi
8. Ketentuan Penutup

Kebijakan Tata Kelola TI terlampir pada Lampiran Kebijakan Tata Kelola

4.7.5. Prosedur TI

Prosedur TI sebagai berikut.

1. Prosedur Manajemen Proyek TI:

- Prosedur ini mengatur detail aktivitas dan detail dokumentasi terkait manajemen proyek TI BKKBN

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 1.26

2. Prosedur Manajemen Mutu

- Bertujuan sebagai pedoman dalam memastikan penjaminan mutu proses tata kelola dan manajemen TI
- Prosedur ini mengatur detail aktivitas dan detail dokumentasi terkait manajemen Mutu TI BKKBN
- Prosedur ini berfungsi agar pengelola TI BKKBN dapat memastikan bahwa deliverables proyek akuisisi dan pengembangan maupun operasional asset TI sesuai dengan kualitas yang disepakati.

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

3. Prosedur Manajemen Permasalahan

- Bertujuan sebagai panduan kepada fungsi-fungsi TI dalam melakukan penanganan terhadap insiden yang sudah terjadi dan berulang.
- Prosedur ini memberikan pengaturan terkait dengan pengelolaan permasalahan TI BKKBN

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

4. Prosedur terkait Manajemen Perubahan TI

- Prosedur ini dibuat untuk membantu dalam pengelolaan Manajemen Perubahan TI yang terdapat di dalam lembaga sesuai dengan strategi lembaga yang akan memenuhi dari setiap kebutuhan untuk melakukan manajemen perubahan TI yang akan dilakukan
 - Prosedur ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan Manajemen Perubahan TI didalam lingkungan BKKBN

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

5. Prosedur terkait Instalasi Software

- Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk pengelolaan fungsi Teknologi Informasi dalam memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi di BKKBN melalui proses instalasi software sebagai bentuk dari pemilihan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

6. Prosedur Pengembangan Akuisisi dan Implementasi Sistem Aplikasi (Penyempurnaan)

- Prosedur ini mendukung terciptanya Teknologi Informasi yang handal dan berkualitas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menjamin tersedianya layanan Aplikasi untuk memenuhi kebutuhan user;
- Mendukung penyelesaian pengembangan dan atau pemeliharaan sistem secara tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengembangan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi;
- Meningkatkan keamanan informasi.

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

7. Prosedur terkait Manajemen Service Desk dan Incident

- Prosedur ini dibuat untuk membantu dalam pengelolaan Manajemen Service Desk dan Incident yang terdapat di dalam perusahaan sesuai dengan strategi perusahaan.
- Prosedur ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan Manajemen Service Desk didalam lingkungan lembaga BKKBN

Prosedur Manajemen Proyek TI terlampir pada lampiran poin 123

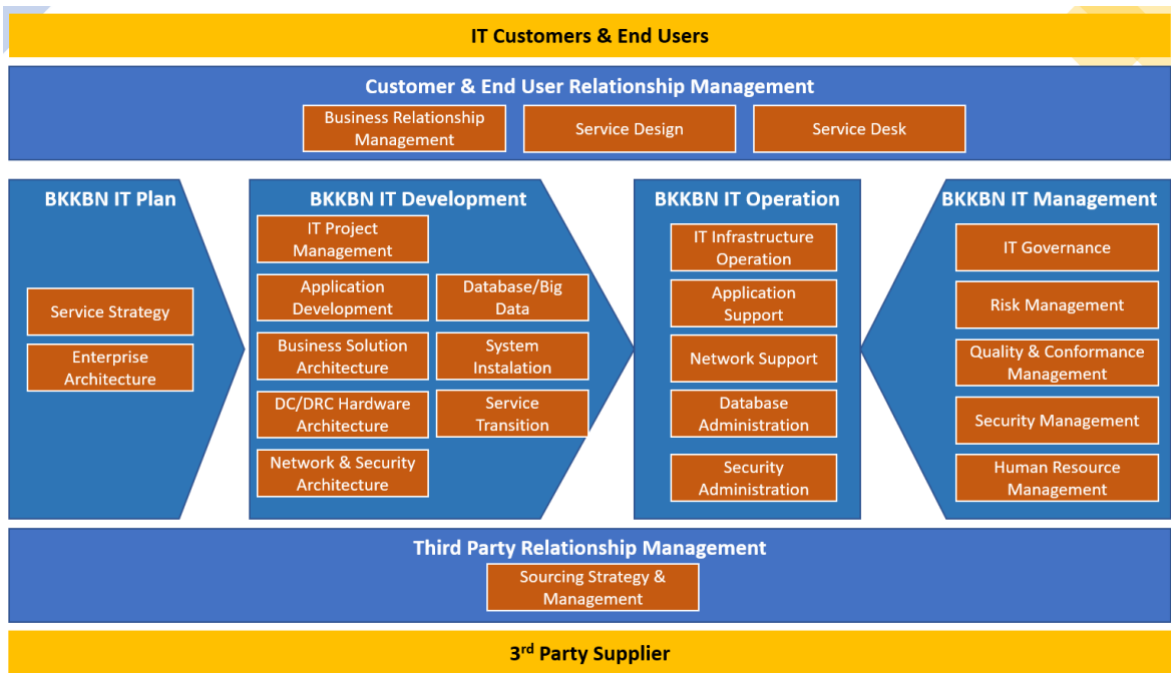
4.7.6. Kompetensi SDM TI

4.7.6.1. Model Kompetensi TI

Terdapat dua jenis terkait kompetensi TI yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk mengorganisasi sumberdaya dalam mencapai tujuan unit kerja atau organisasi. Sedangkan kompetensi teknis adalah kompetensi spesifik bidang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab spesifik bidang di unit bisnis atau organisasi.

Kompetensi manajerial bersifat umum dan berlaku untuk semua unit kerja. Kompetensi manajerial TI mengikuti kompetensi yang ditentukan oleh organisasi. Kompetensi yang diuraikan di sini adalah kompetensi teknis yang spesifik harus dimiliki TI.

Kompetensi TI terutama kompetensi teknis harus dapat mendukung pelaksanaan proses TI BKKBN. Oleh karena itu kompetensi TI harus sesuai dengan model operasi TI yang sudah disampaikan sebelumnya. Model kompetensi BKKBN sebagai berikut.



Model gambar tersebut menunjukkan model kompetensi yang diusulkan dalam dokumen tata kelola. Model tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan trend ke depan (baik teknologi maupun pendekatan pengelolaan TI). Berdasarkan model tersebut, disusun area kompetensi sebagai berikut:

No	Komptensi	Deskripsi & Lingkup Umum
Customer & End User Relationship Management		
1	Business Relationship Management	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman terhadap business requirement dan perubahan-perubahannya - Penerjemahan pemikiran strategis dan inovatif ke dalam kapabilitas-kapabilitas teknologi - Filterisasi demand (permintaan) dari bisnis - Memelihara ekspektasi pengembangan dan pemberian layanan TI
2	Service Design	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan kapasitas (Availability Management) 2) Pengelolaan ketersediaan (Availability Management) 3) Pengelolaan tingkat layanan (Service Level Management)
3	Service Desk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Problem Management 2) Service Desk & Incident Management
BKKBN IT Plan		
4	Service Strategy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi dan formulasi strategi TI 2) Identifikasi dan pengelolaan portfolio inisiatif TI

		3) Manajemen investasi dan belanja TI
5	Enterprise Architecture	1) Enterprise Architecture Vision 2) Enterprise Architecture Design 3) Enterprise Architecture Governance
BKKBN IT Development		
6	IT Project Management	1) Perencanaan proyek 2) Pengelolaan sumberdaya proyek 3) Monitoring dan control atas proyek (software aplikasi dan infrastruktur)
7	Application Development	1) Metodologi-metodologi pengembangan software aplikasi untuk level enterprise 2) Aspek-aspek Human dalam pengembangan 3) Integrasi sistem
8	Business Solution Architecture	1) Arsitektur sistem utama jaminan social dan trend perkembangannya 2) Arsitektur sistem pendukung dan trend perkembangannya 3) Service oriented architecture
9	DC/DRC Hardware Architecture	1) Arsitektur logical DC dan DRC 2) Arsitektur server dan perkembangannya 3) Arsitektur storage dan perkembangannya 4) Arsitektur jaringan untuk DC dan DRC
10	Network & Security Architecture	1) Arsitektur jaringan korporat 2) Arsitektur keamanan
11	Database/ Big Data	1) Arsitektur RDBMS untuk level korporat dan trend perkembangannya 2) Arsitektur Big Data dan implementasinya dalam peningkatan kualitas layanan dan prediksi pengambilan keputusan
12	System Instalation	1) Installation Planning 2) Component Testing 3) Implementation/Decommissioning 4) Installation Reporting 5) Change Management
13	Service Transition	1) Service acceptance 2) Configuration management 3) Asset management 4) Change management 5) Release & deployment
BKKBN IT Operation		
14	IT Infrastructure Operation	1) Infrastructure Configuration 2) Infrastructure Installation 3) Infrastructure Maintenance 4) Infrastructure Management Tools
15	Application Support	1) Service Delivery 2) Application Maintenance 3) Performance Monitoring

16	Network Support	<ol style="list-style-type: none"> 1) Network Maintenance 2) Support services
17	Database Administration	<ol style="list-style-type: none"> 1) Database administration 2) Database maintenance 3) Database automation
18	Security Administration	<ol style="list-style-type: none"> 1) Security administration & support 2) Security breach investigation 3) User access right definitions
19	IT Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi model operasi sebagai dasar desain IT Governance 2) Struktur tata kelola TI 3) Program tata kelola TI (kebijakan, standar dan prosedur TI) 4) Metrik kinerja terkait Tata Kelola TI 5) Pengembangan kapabilitas SDM TI 6) Teknologi pendukung Tata Kelola TI
20	Risk Management	<ol style="list-style-type: none"> 1) IT Risk Management 2) Risk Assessment pada proyek/operasi TI
21	Quality & Conformance Management	<ol style="list-style-type: none"> 1) Quality Management 2) Quality Assurance 3) Quality Measurement
22	Security Management	<ol style="list-style-type: none"> 1) Information security management 2) Security risk assessment 3) Vulnerability assessment 4) Security breach investigation 5) BIA
23	Human Resource Management	<ol style="list-style-type: none"> 1) Personnel resourcing 2) Personnel development 3) Performance management

4.7.6.2. Standar Tingkat Kompetensi

Standar kompetensi yang digunakan dalam kajian ini mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dalam Model, Kamus Profil dan Pedoman Pengelolaan Kompetensi BKKBN.

Tingkat Kemahiran		Indikator Perilaku	Kata Kunci
1	Awareness	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan/pemahaman dasar terhadap kompetensi 2. Aktifitas bersifat rutin dan sederhana 3. Pengalaman yang diperlukan untuk melakukan komeptensi sangat terbatas 4. Selalu memerlukan bimbingan dan pengawasan 	Paham
2	Basic Application	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan/mengimplementasikan kompetensi 2. Sebagian dari aktifitas sudah cukup kompleks dan bersifat non rutin 3. Pengalaman yang dimiliki masih terbatas pada sektor atau area yang sempit 4. Masih memerlukan bimbingan 	Aplikasi Implementasi
3	Skillful Application	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan analisa terhadap implementasi dari kompetensi 2) Memiliki pengalaman penerapan kompetensi yang mendalam termasuk pemahaman atas tingkat efektifitas dari penerapan kompetensi untuk lingkup kerjanya 3) Mampu melakukan perbaikan terhadap penerapan kompetensi di lingkup kerjanya untuk meningkatkan efektifitas. 	Monitor Interpretasi Analisa
4	Advance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas dari implementasi kompetensi 2. Menerapkan kompetensi secara sangat mahir dalam konteks yang kompleks dengan tingkat kesulitan yang tinggi 3. Mampu melakukan perbaikan terhadap penerapan kompetensi di organisasi untuk meningkatkan efektifitas 	Evaluasi Rekomendasi
5	Expert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang fundamental dalam penyusunan kebijakan/strategi bagi perkembangan organisasi dalam jangka panjang 2. Menjadi narasumber/role model dalam penerapan kompetensi 	Desain Improve Role Model

4.7.6.3. Profile Kompetensi

Berikut profil kompetensi Fungsi TI BKKBN

Tabel 24 Profil Kompetensi

NO	KODE	KOMPETENSI	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Koordinator Pengembangan dan Pengembangan Sistem aplikasi serta kerjasama teknologi Informasi	Subkoordinator Pengembangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Subkoordinator Kerjasama Teknologi Informasi	Koordinator Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media	Subkoordinator Pengembangan Sarana Prasarana TI dan Pengelolaan media konferensi	SubKoordinator Pemeliharaan sarana prasarana TI	Koordinator Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Subkoordinator Pengelolaan Bank Data dan Situs serta Administrasi	SubKoordinator Informasi Publik dan perpustakaan
1.	IFT01	Business Relationship Management	3	3	3	3						
2.	IFT02	Service Design	2	2	2		2	2	2			
3.	IFT03	Service Desk	1				1	1	1			
4.	IFT04	Service Strategy	3	3			3					
5.	IFT05	Enterprise Architecture	3									
6.	IFT06	IT Project Management	4	4	4	4	4			4	4	4
7.	IFT07	Application Development	4	4	4							
8.	IFT08	Business Solution Architecture	3	3	3		3					

NO	KODE	KOMPETENSI	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Koordinator Pengembangan dan Pengembangan Sistem aplikasi serta kerjasama teknologi Informasi	Subkoordinator Pengembangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Subkoordinator Kerjasama Teknologi Informasi	Koordinator Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media	Subkoordinator Pengembangan Sarana Prasarana TI dan Pengelolaan media konferensi	Subkoordinator Pemeliharaan sarana prasarana TI	Koordinator Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Subkoordinator Pengelolaan Bank Data dan Situs serta Administrasi	Subkoordinator Informasi Publik dan perpustakaan
9.	IFT09	DC/DRC Hardware Architecture	3				3	3	3			
10.	IFT10	Network & Security Architecture	4				4	4	4			
11.	IFT11	Database & Big Data										
12.	IFT12	System Installation		4	4		4	4				
13.	IFT13	Service Transition	3	3	3							
14.	IFT14	IT Infrastructure Operation					4	4	4			
15.	IFT15	Application Support		4	4							
16.	IFT16	Network Support					4	4	4			
17.	IFT17	Database Administration					3	3				
18.	IFT18	Security Administration					3	3				
19.	IFT19	IT Governance	2	2			2			2		
20.	IFT20	Risk management	2	2			2	2		2		

NO	KODE	KOMPETENSI	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Koordinator dan Pengembangan Sistem aplikasi serta kerjasama teknologi Informasi	Subkoordinator dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Subkoordinator Kerjasama Teknologi Informasi	Koordinator dan pengembangan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media	Subkoordinator Pengembangan Sarana Prasarana TI dan Pengelolaan media konferensi	SubKoordinator sarana pemeliharaan sarana prasarana TI	Koordinator Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Subkoordinator Pengelolaan Bank Data dan Situs serta Administrasi	SubKoordinator Informasi Publik dan perpustakaan
21.	IFT21	Quality Conformance Management &	2	2			2			2		
22.	IFT22	Security Management					3	3	3			
23.	IFT23	Human Resource Management	3	3			3			3		

4.7.6.4. Pemenuhan Kompetensi

Berikut matriks pemenuhan kompetensi menggunakan training sesuai dengan standar tingkat kompetensi.

Tabel 25 Tabel Pemenuhan Kompetensi

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
1.	IFT01	Business Relationship Management	Business Relationship Management	<ul style="list-style-type: none"> PO4 – Define the IT Processes, Organisation and Relationships 	Business Analyst Foundation	Business Analyst Foundation	1. Business Relationship Management 2. Professional Business Analyst Professional	1. Business Relationship Manager 2. Lead Business Analyst
2.	IFT02	Service Design	Service Design	<ul style="list-style-type: none"> DS3 – Manage Performance And Capacity 	ITIL Foundation	ITIL Foundation	ITIL Practitioner – Service Design	ITIL Intermediate – Service Design
3.	IFT03	Service Desk	Service Desk	<ul style="list-style-type: none"> DS13 - Manage Operation 	Service Desk Foundation	Service Desk Foundation	Service Desk Analyst	Service Desk Analyst
4.	IFT04	Service Strategy	Service Strategy	<ul style="list-style-type: none"> PO1 – Define IT Strategic Plan 	ITIL Foundation	ITIL Foundation	ITIL Practitioner – Service Strategy	ITIL Intermediate – Service Strategy
5.	IFT05	Enterprise Architecture	Enterprise Architecture	<ul style="list-style-type: none"> PO2 – Define the Information Architecture 	TOGAF Foundation (Level I)	TOGAF Certification (Level II)	TOGAF Certification (Level II)	Specialist Architect

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
6.	IFT06	IT Project Management	IT Project Management	<ul style="list-style-type: none"> • PO10 – Manage Project ▪ PO5 – Manage IT Investment 	Project Management Foundation	Project Management Associate	Project Management Professional	Project Management Professional
7.	IFT07	Application Development	Application Development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AI1 – Identify Automated Solution ▪ AI2 - Acquire and Maintain Application Software 	Introduction to Programming	<ul style="list-style-type: none"> 1. Basic Programming 2. Basic Testing 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Advanced Programming 2. Mobile Development 3. Software Performance Testing Software Security Testing 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agile Development 2. Advanced Testing
8.	IFT08	Business Solution Architecture	Business Solution Architecture	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AI2 – Acquire and Maintain Applicataion Software 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERP Introduction 2. SOA Introduction 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERP Associate 2. Basic Enterprise Integration 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERP Specialist 2. Enterprise Integration 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ERP Professional 2. Advanced SOA
9.	IFT09	DC/DRC Hardware Architecture	DC/DRC Hardware Architecture	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AI3 – Acquire and Maintain Technology Infrastructure ▪ DS4 – Ensure Continuity Service 	Server Fundamentals	Server Basic	Server Associate	Server Professional

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
10.	IFT10	Network & Security Architecture	Network & Security Architecture	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS4 – Ensure Continuity Service ▪ DS5 – Ensure Systems Security 	Network Fundamentals	Network Technician	Network Associate	Network Professional
11.	IFT11	Database & Big Data	Database & Big Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS11 – Manage Data 	Database Introduction	Database Associate	Database Professional	1. Database Professional 2. Big Data Specialist
12.	IFT12	System Installation	System Installation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS3 – Manage Performance and Capacity ▪ DS9 – Manage Configuration ▪ DS13 – Manage Operations 	ITIL Foundation	ITIL Foundation	ITIL Practitioner – Service Transition	ITIL Intermediate – Service Transition
13.	IFT13	Service Transition	Service Transition	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AI6 – Manage Change ▪ DS8 – Manage Service Desk 	ITIL Foundation	ITIL Foundation	ITIL Practitioner – Service Transition	ITIL Intermediate – Service Transition

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
14.	IFT14	IT Infrastructure Operation	IT Infrastructure Operation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS13 – Manage Operations ▪ AI4 – Enable Operation and Use ▪ AI3 – Acquire and Maintain Technology Infrastruktur 	ITIL Foundation	System Associate	System Administration	System Administration
15.	IFT15	Application Support	Application Support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS8 – Manage Service Desk 	Introduction to Programming	Basic Programming	Advanced Programming	Agile Development
16.	IFT16	Network Support	Network Support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS3 – Manage Performance and Capacity 	Network Fundamentals	Network Technician	Network Associate	Network Professional
17.	IFT17	Database Administration	Database Administration	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS9 – Manage Configuration ▪ DS13 – Manage Operations 	Database Introduction	Database Associate	Database Professional	Database Professional
18.	IFT18	Security Administration	Security Administration	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DS3 – Manage 	Security Fundamentals	Security Fundamentals	Security Practitioner	Security Professional

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
				Performance and Capacity				
19.	IFT19	IT Governance	IT Governance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO1 – Define A Strategic IT Plan ▪ PO3 – Determine Technological Direction ▪ PO4 – Define the IT Processes, Organisation and Relationship 	COBIT5 Foundation	COBIT5 Foundation	<ol style="list-style-type: none"> 1. COBIT5 Implementation 2. COBIT5 Assessor 	Certified in the Governance of Enterprise IT
20.	IFT20	Risk management	Risk management	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO9 – Assess and Manage IT Risks 	M_o_R Foundation	M_o_R Foundation	M_o_R Practitioner	Certified in Risk and Information Systems Control
21.	IFT21	Quality & Conformance Management	Quality & Conformance Management	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PO8 – Manage Quality ▪ PO6 – Communicate Management Aims and Direction 	Six Sigma Basics	Six Sigma Intermediate	Six Sigma – Green Belt	Six Sigma – Black Belt

NO	KODE	KOMPETENSI	Proses COBIT 4.1 Terkait	1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
22.	IFT22	Security Management	Security Management	<ul style="list-style-type: none"> DS5 – Ensure Systems Security 	Certified ISMS Foundation	Certified ISMS Foundation	1. Certified ISMS Lead Implementer 2. Certified ISMS Lead Auditor	Certified Information Security Manager
23.	IFT23	Human Resource Management	Human Resource Management	<ul style="list-style-type: none"> PO7 – Manage IT Human Resources 	Human Resource Management Basics	Human Resource Management Intermediate	3. Human Resource Professional	Human Resource Senior Professional

4.7.7. Indikator Kinerja TI

Rancangan KPI TI merupakan kriteria yang bersifat terukur dan dianggap sebagai parameter untuk menentukan keberhasilan dari Fungsi Direktorat Teknologi Informasi dan Data. Dengan mengacu kepada kerangka kerja COBIT 4.1 untuk pembentukan rancangan KPI.

Tabel 26 Indikator Kinerja

No	Proses Terkait	Indikator Kinerja	Satuan	Bobot
1	PO1	Kesesuaian Inisiatif TI dengan Strategis Bisnis	%	20
2	PO2	Kesesuaian aplikasi terhadap arsitektur informasi	%	15
3	PO3	Review/Update Rencana Infrastruktur Teknologi	Number	10
4	PO4	Presentase kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja TI	%	10
5	PO6	Peninjauan dan pembaharuan kebijakan TI	Number	10
7	PO10	Ketepatan waktu dan kesesuaian pendanaan proyek TI	%	15
8	AI1	Kepuasan pemangku kepentingan terhadap kesesuaian dari feasibility study.	%	10
9	AI4	Terintegrasinya aplikasi terhadap proses bisnis	%	10
10	AI6	Presentase dari setiap perubahan TI yang telah terdokumentasi secara otomatis	%	15
11	AI7	Kepuasan pemangku kepentingan terkait integritas data dari sistem yang baru	%	15

4.7.8. Teknologi Pendukung

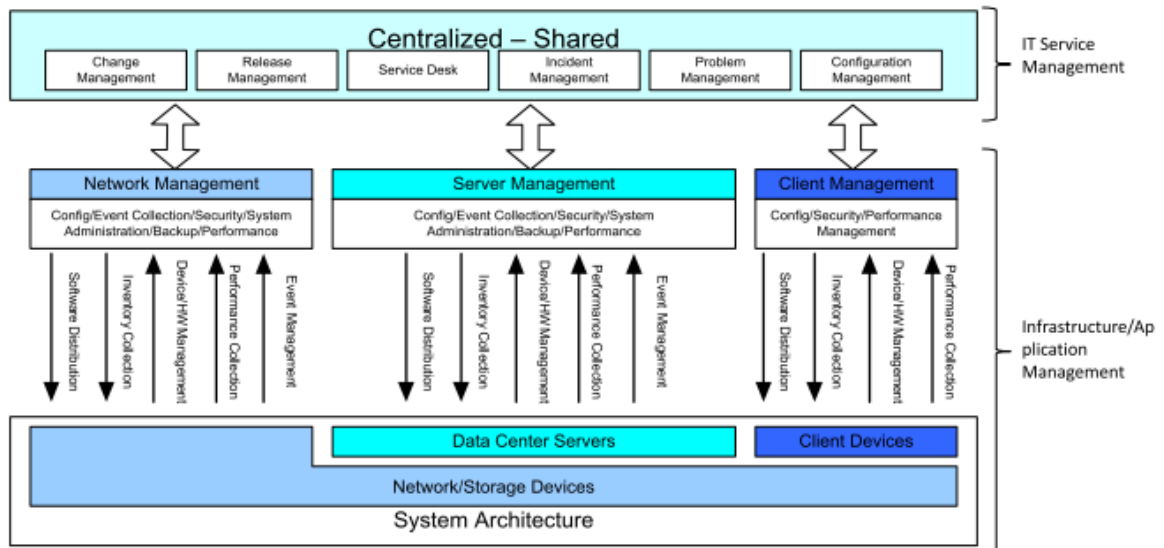
Perangkat pendukung (tools) Tata Kelola TI dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi dan memusatkan pemantauan dan pengawasan terhadap keberjalanan layanan TI. Perangkat tersebut meliputi aspek-aspek berikut ini:

Tabel 27 Teknologi Pendukung

Kategori	Tool	Penjelasan Teknologi
Perencanaan dan Pengorganisasian	Enterprise Architecture	Definisi: Praktik pendokumentasian elemen-elemen strategi bisnis, business case, model bisnis, serta teknologi, kebijakan dan infrastruktur yang membentuk perusahaan. Enterprise Architecture juga merujuk pada cara perusahaan diorganisasi, beroperasi dan merespon perubahan-perubahan dalam pasar. Standards: TOGAF
	IT Portfolio Management	Definisi: Penerapan manajemen sistematis untuk investasi, proyek, dan kegiatan departemen Teknologi Informasi perusahaan. Contoh portofolio TI adalah inisiatif yang direncanakan, proyek, dan layanan TI yang sedang berlangsung (seperti dukungan aplikasi) Standards: ITIL/ITSM
	Performance Management	Definisi: Aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Standards: ITIL/ITSM
Pengembangan, akuisisi, dan Implementasi	Application Management	Definisi: Proses ini memainkan peran penting dalam aspek-aspek terkait aplikasi dalam merancang, menguji, mengoperasikan, dan meningkatkan layanan TI, serta dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi organisasi TI. Standards : ITIL/ITSM
	Change Management	Definisi: Suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Standards : ITIL/ITSM
	Configuration Management	Definisi: Proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi kinerja, fungsional, dan atribut fisik suatu produk dengan persyaratan, desain, dan informasi operasionalnya selama masa pakainya

Kategori	Tool	Penjelasan Teknologi
		Standards : ITIL/ITSM
Operasi	Server Management	Definisi: Kontrol atau akses ke server fisik, virtual atau aplikasi untuk melakukan berbagai jenis administrasi atau operasi pemeliharaan Standards: ISMS, TIA 942, Uptime
	Network Management	Definisi: Proses mengatur dan mengelola jaringan komputer. Layanan yang disediakan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja, penyediaan jaringan, dan menjaga kualitas layanan Standards: FCAPS, ITIL
	Backup & Recovery Management	Definisi: Proses membuat dan menyimpan salinan data yang dapat digunakan untuk melindungi organisasi dari kehilangan data. Ini kadang-kadang disebut sebagai pemulihan operasional Standards: ITIL/ITSM
	Incident & Problem Management	Definisi: Proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua masalah yang terjadi atau dapat terjadi dalam layanan TI dan untuk mengembalikan operasi layanan normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan dampak pada operasi bisnis Standards: ITIL/ITSM, ISO 20000
	Security Management	Definisi: Identifikasi aset organisasi (termasuk orang, bangunan, mesin, sistem dan aset informasi), diikuti oleh pengembangan, dokumentasi, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset ini. Standards: ISO 27001
Monitoring dan Evaluasi	Risk Management	Definisi: Suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pengelolaan sumberdaya. Standards: COSO/Val-IT/ISO 30000
	Audit Management	Definisi: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa arahan audit yang disetujui dewan diterapkan. Manajemen audit membantu menyederhanakan dan mengatur dengan baik alur kerja dan proses kolaborasi penyusunan audit. Standards: COBIT

Arsitektur referensi dan keterkaitan antar komponen dari tools di atas diperlihatkan oleh ilustrasi berikut ini:



Gambar 19 Arsitektur Komponen Tools

4.7.8.1. Rekomendasi Teknologi Pendukung Tata Kelola TI

Selain faktor People (Struktur dan SDM) dan Process (Kebijakan, SOP, IK), Tata Kelola TI harus didukung oleh faktor Technology (Aplikasi, Infrastruktur). Tools yang dapat menjadi referensi pembandingan dalam pengadaan aset teknologi pendukung tata kelola dan pengelolaan TI terkait.

Tabel 28 Rekomendasi Teknologi Pendukung Tata Kelola TI

Kategori	Tool	Penjelasan Teknologi
Perencanaan dan Pengorganisasian	Enterprise Architecture	Mega Suite, IBM Rational EA, Troux Technologies, Avolution
	IT Portfolio Management	CA Portfolio Management, PlanView, BMC, Adaptive IT Portfolio Manager
	Performance Management	BMC PATROL Performance Manager, HP Openview Performance Management, Microsoft Operation Manager
Pengembangan, akuisisi, dan Implementasi	Application Management	IBM Application Development, Borland AppCenter, Microsoft Application Center
	Change Management	BMC Change Management, CA Change Management, OTRS Change Management
	Configuration Management	BMC Configuration Management, CA Configuration Management, OTRS Service Asset & Configuration Management
Operasi	Server Management	IBM Tivoli Business System Manager, HP OpenView, BMC PATROL, ManageEngine (Monitoring)
	Network Management	IBM Tivoli Netview, HP OpenView, ManageEngine (Monitoring)

Kategori	Tool	Penjelasan Teknologi
	Backup & Recovery Management	CommVault, IBM, EMC, Symantec, CA Technologies
	Incident & Problem Management	BMC Service Desk, CA IT Helpdesk, OTRS Helpdesk
	Security Management	Administrative: IBM Tivoli, HP OpenView, SunSolstice Policy Management: CA eTrust AM, Cisco Secure Policy Manager, Evidian Access Master SP Identify & Password Management: IBM Tivoli Identify Director, BMC CONTROL-SA, CA eTrust Admin
Monitoring dan Evaluasi	Risk Management	EMC-RSA, SAP GC, IBM OpenPage GRC, MegaSuite, Oracle GRC
	Audit Management	BPS Resolver, IBM OpenPage GRC, Jade Software-Methodware

5. Gap Analysis

5.1. Gap Analysis Arsitektur Aplikasi

Tabel 29 Gap Analysis Arsitektur Aplikasi

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Pengendalian Penduduk			
▪	Rumah Dataku	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu kampung KB dengan dijadikan portal, menambahkan data penduduk, peta, penggunaan oleh wilayah provinsi sampai RW yang bukan kampung KB.	Enhance	▪ Aplikasi Kampung KB ditingkatkan fitur dan perluasan penggunaannya.
▪	Kampung KB	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu kampung KB dengan dijadikan portal, menambahkan peta dan ddigunakan secara luas.	Enhance	▪ Aplikasi Kampung KB dijadikan portal, ditingkatkan fitur dan perluasan penggunaannya.
▪	Peta Bangsa Kencana	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu Peta Keluarga. Peta belum menampilkan data-data terkait Bangsa Kencana.	Enhance	▪ Peta Keluarga ditingkatkan dengan menampilkan data bangsa kencana.
▪	Partnership Management	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu SISKA. SISKA perlu dijadikan portal dan	Enhance	▪ Fitur SISKA ditingkatkan sesuai dengan aplikasi target.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		ditambah fitur terkait kerjasama termasuk akses ke layanan BKKBN.		
▪	Regulation Management	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Aplikasi baru untuk Regulation Management.
▪	Siperindu	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Siperindu.	Enhance	▪ Penggunaan data analytics dalam peringatan dini.
▪	KBKR			
▪	Kesehatan Reproduksi	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Aplikasi baru untuk Kesehatan Reproduksi.
▪	Monika	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Monika.	Enhance	▪ Aplikasi Monika ditingkatkan dalam bentuk mobile dan verifikasi JNPK.
▪	Manajemen Alkon	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu F/V/KB dan SIRIKA. Aplikasi F/V/KB sudah digunakan tetapi tidak bisa menghitung proyeksi kebutuhan alkon. SIRIKA masih diujicoba di beberapa provinsi dan masih dikembangkan.	Enhance	▪ Aplikasi SIRIKA diimplementasikan di semua provinsi dan dikembangkan untuk fasilitas kesehatan serta diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti Manajemen Keuangan dan E-Procurement.
▪	KSPK			

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	SINTA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SINTA.	Enhance	▪ Aplikasi SINTA ditingkatkan dalam bentuk mobile.
▪	Yo-Sakurga	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Yo-Sakurga.	Enhance	▪ Yo-Sakurga ditambah fitur Basis data UPPKS, Forum UPPKS.
▪	Siapnikah	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu siapnikah.org.	Enhance	▪ Siapnikah.org ditingkatkan kontennya.
▪	Golantang	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Golantang.	Enhance	▪ Golantang ditambah fitur e-counseling dan berbasis mobile.
▪	Orangtuahebat	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu orangtuahebat.	Enhance	▪ Orangtuahebat menjadi portal dan terdapat basis data keluarga baduta.
▪	Penelitian, Palatihan			
▪	CITC	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu CITC.	Enhance	▪ CITC menjadi portal yang memiliki personalisasi layanan ke masing-masing pengguna.
▪	E-Journal	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu E-journal.	Enhance	▪ E-journal menjadi portal dan membantu dalam menyeleksi jurnal.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	E-Learning	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu E-learning.	Enhance	▪ E-learning menjadi portal pembelajaran dengan menambahkan pembelajaran berjenjang, ujian, sertifikat, monitoring pembelajaran, forum, pengelolaan blended learning.
▪	Manajemen Riset	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	Enhance	▪ Pengembangan manajemen riset.
▪	Pengaduan dan Informasi			
▪	Pengaduan Masyarakat	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Pengaduan Masyarakat.	Enhance	▪ Pengaduan Masyarakat menggunakan aplikasi Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan oleh PANRB.
▪	Whistle Blower	Pemenuhan: Fully Aplikasi yang digunakan yaitu wistle blower.	Keep	▪ whistle blower sudah mencukupi.
▪	JDIH	Pemenuhan: Fully Aplikasi yang digunakan yaitu JDIH.	Keep	▪ JDIH sudah mencukupi.
▪	E-PPID	Pemenuhan: Fully Aplikasi yang digunakan yaitu E-PPID.	Keep	▪ E-PPID sudah mencukupi.
▪	IEC Management	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Aplikasi baru untuk mendukung manajemen KIE.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Manajemen Pengawasan			
▪	Sistem Manajemen Audit	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu SIMWAS.	Enhance	▪ Aplikasi manajemen audit yang bisa mendukung proses manajemen audit.
▪	Audit Repository	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Sistem untuk mendukung audit repository.
▪	Sistem Continuous Audit	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Sistem untuk mendukung continuous audit.
▪	Penilaian ZI-WBK	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Sistem untuk mendukung penilaian ZI-WBK.
▪	Penilaian E-SAKIP	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Sistem untuk mendukung penilaian SAKIP. Aplikasi dibangun oleh Kementerian PANRB.
▪	CAAT	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Tools untuk mendukung analisis data audit.
▪	Pengelolaan Data Keluarga			
▪	Statistik Rutin	Pemenuhan: Fully Aplikasi yang mendukung yaitu Statistik Rutin.	Replace	▪ Aplikasi diganti oleh SIGA.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	SIGA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung yaitu PK, BDKI, PBDKI, YANKB, DALAP, Non-Rutin.	Replace	▪ Aplikasi diganti oleh New SIGA dengan platform baru.
▪	Survey Management	Pemenuhan: None Belum ada sistem yang mendukung.	New	▪ Sistem untuk mendukung manajemen survey .
▪	Manajemen Lini Lapangan			
▪	SILILI	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang mendukung yaitu SILILI.	Enhance	▪ Pengembangan SILILI menjadi portal penyuluh/lini lapangan dengan menambahkan data penyuluh, informasi karir, manajemen kompetensi, personalisasi layanan dan akses ke layanan seperti IEC management, SIMSDM, SIDIKA, E-Learning.
▪	E-VISUM	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung pengelolaan kinerja penyuluh PNS.	Enhance	▪ Pengembangan E-VISUM untuk kinerja berbasis output, kinerja non-penyuluhan, integrasi dengan SIMSDM, SIPP, SIDIKA, E-Learning.
▪	EKLOP	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung pengelolaan kinerja penyuluh Non-PNS.	Enhance	▪ Pengembangan kinerja berbasis output dan integrasi dengan SIPP.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Presensi Online	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung yaitu Presensi Online.	Keep	▪ Aplikasi untuk mendukung pengelolaan presensi penyuluh.
▪	E-Sertifikasi	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung yaitu E-Sertifikasi.	Enhance	▪ Aplikasi untuk mendukung sertifikasi penyuluh.
▪	E-DUPAK	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang mendukung yaitu E-DUPAK.	Enhance	▪ Aplikasi untuk mendukung pengelolaan DUPAK penyuluh.
▪	MONALISA	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang mendukung yaitu MONALISA.	Enhance	▪ Pengembangan MONALISA pada monitoring mekanisme operasional per wilayah.
▪	Data and Integration			
▪	Metadata Repository	Pemenuhan: None Metadata Repository belum diimplementasikan.	New	▪ Implementasi Metadata Repository.
▪	Data profiling	Pemenuhan: None Tools data profiling belum diimplementasikan.	New	▪ Implementasi Data profiling.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Enterprise Service Bus	Pemenuhan: None ESB belum diimplementasikan.	New	▪ Implementasi ESB.
▪	Analytics			
▪	Dashboard	Pemenuhan: Partial Dashboard sudah ada tetapi terbatas.	Enhance	▪ Implementasi dashboard dengan dukungan analytics.
▪	Analytics	Pemenuhan: None Analytics belum diimplementasikan.	New	▪ Implementasi datawarehouse, business intelligence, atau juga big data analytics.
▪	Kesekretariatan			▪
▪	E-Office	Pemenuhan: Partial Saat ini sudah terdapat Portal Aplikasi untuk mengakses aplikasi di BKKBN.	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-Office merupakan pengembangan dari portal internal; ▪ E-Office sebagai sarana single sign on bagi pegawai; ▪ E-Office memiliki fitur News/Artikel, Agenda Kegiatan, Kolaborasi, Chat/Messaging, Forum Diskusi, Digital signature.
▪	E-Monev	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi E-Monev Aplikasi e-Monev dari Bappenas, Aplikasi e-Monev SMART dari	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum SPBE yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		Kemenkeu dan Aplikasi QPR dari internal BKKBN.		
▪	E-Procurement	Pemenuhan: Fully Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum SPBE yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS.
▪	Manajemen Arsip	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Srikandi dari ANRI.	Enhance	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Srikandi versi terbaru yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.
▪	Manajemen Kepegawaian - SIMSDM	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SIMSDM.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.
▪	Manajemen Kepegawaian - SAPK	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SAPK.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.
▪	Manajemen Kepegawaian - SIVIKA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SIVIKA.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Manajemen Kepegawaian SIMPAK -	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Mengembangkan aplikasi SIMPAK.
▪	Manajemen Kepegawaian Presensi -	Pemenuhan: Largely Sistem yang digunakan yaitu Presensi.	Enhance	▪ Perluasan aplikasi presensi.
▪	Manajemen Kepegawaian - SIDIKA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SIDIKA. Kekurangannya pada modul untuk mengelola pendidikan jangka panjang dan integrasi dengan sistem lain terkait.	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan modul SIDIKA untuk mengelola pendidikan jangka panjang. ▪ SIDIKA diintegrasikan dengan SIMSDM, E-Learning, SAPK, SIPP.
▪	Manajemen Kepegawaian - SIPP	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SIPP.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Kepegawaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB.
▪	Manajemen Perencanaan – SPA Online	Pemenuhan: Largely Aplikasi SPA Online masih dalam pengembangan.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Perencanaan Morena DAK -	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Morena DAK. Morena mambantu dalam	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		mengelola perencanaan dan pelaksanaan/realisasi DAK.		
▪	Manajemen Perencanaan – SIPPUJA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SIPPUJA.	Enhance	▪ Aplikasi dikembangkan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Perencanaan – E-KOREN	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu E-KOREN dan perlu ditambahkan dengan Data basis perencanaan dan forum kinerja.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan - SAIBA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SAIBA.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan - Persediaan	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu Persediaan.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – E-Rekon	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu E-Rekon.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – CaLK SATKER	Pemenuhan: Largely	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		Aplikasi yang digunakan yaitu CaLK SATKER.		
▪	Manajemen Keuangan - Teladan	Pemenuhan: Partial Aplikasi yang digunakan yaitu Teladan.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – SIMAK BMN	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SIMAK BMN.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – SIMAN	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SIMAN.	Replace	▪ Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – ARMIRA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu ARMIRA. Aplikasi tersebut perlu dikembangkan dengan menambah variabel.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Manajemen Keuangan – SAKURA	Pemenuhan: Largely Aplikasi yang digunakan yaitu SAKURA.	Keep	▪ Aplikasi tetap digunakan dengan menunggu aplikasi umum Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪	Advokasi Hukum	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Aplikasi baru untuk advokasi hukum.

No	Aplikasi Target	Aplikasi Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Manajemen Risiko	Pemenuhan: None Belum ada aplikasi yang mendukung.	New	▪ Aplikasi baru untuk manajemen risiko.

5.2. Gap Analysis Arsitektur Infrastruktur

Bagian ini mengulas tentang analisa kesenjangan arsitektur infrastruktur. Infrastruktur target dibandingkan dengan infrastruktur eksisting menggunakan kriteria pemenuhan. Berdasarkan tingkat pemenuhan direkomendasikan strategi migrasi. Berikut ini adalah penjelasan untuk aspek pemenuhan dan strategi migrasi.

Tabel 30 Gap Analysis Arsitektur Infrastruktur

Kategori	Rating	Deskripsi
Pemenuhan	None	Jika belum ada atau pemenuhan aspek arsitektural < 15%
	Partial	Jika pemenuhan aspek arsitektural di atas 15% tapi di bawah 50%
	Largely	Jika pemenuhan aspek arsitektural di atas 50% tadi di bawah 85%
	Fully	Jika pemenuhan aspek arsitektural di atas 85%
Strategi Migrasi	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur telah ada tetapi perlu penyesuaian konfigurasi untuk mendukung kebutuhan ▪ Infrastruktur eksisting memiliki kapabilitas untuk diupdgrade kapasitasnya
	Replace	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur telah ada tetapi tidak mendukung kebutuhan organisasi ▪ Sulit untuk mempertahankan atau mengupgrade Infrastruktur eksisting untuk mendukung kebutuhan organisasi (misal karena usia infrastruktur, kapasitas yang tidak memadai, tidak mendukung interoperabilitas, tingkat risiko operasional yang tinggi) dibandingkan jika harus mengimplementasikan infrastruktur baru. ▪ Aplikasi atau modul eksisting harus diganti dengan aplikasi atau modul baru
	New	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur belum ada

Kategori	Rating	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur baru dibutuhkan
	Keep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur sudah mendukung kebutuhan saat ini dan masa depan ▪ Hanya diperlukan penyesuaian konfigurasi minor untuk mendukung kebutuhan organisasi

Berikut ini adalah analisa strategi migrasi untuk satu per satu aplikasi yang ada dalam lanskap:

Tabel 31 Analisa Strategi Migrasi

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Fasilitas Data Center	Pemenuhan: Largely Saat ini sudah terdapat DC yang sudah hamper memenuhi kriteria standar tier-2 data center uptime	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini sudah terdapat DC yang sudah hamper memenuhi kriteria standar tier-2 data center uptime ▪ Diperlukan adanya peningkatan redundansi kelistrikan data center dengan menambahkan kabel kabel induk yang menuju ke data center
▪	Fasilitas Disaster Recovery Center	Pemenuhan: Fully Saat ini terdapat ada fasilitas DRC	Keep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini terdapat ada fasilitas DRC dengan menggunakan jasa colocation
▪	Perangkat Keras dan Software Sistem DC	Pemenuhan: Largely Mayoritas layanan saat ini difasilitasi perangkat keras DC, tetapi dengan platform yang belum terkonsolidasi	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat beberapa perangkat sudah usianya cukup tua ▪ Berdasarkan analisa pada arsitektur infrastruktur, infrastruktur DC ke depan peremajaan perangkat dapat berupa

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
				Public Cloud menggunakan jasa pihak ke 3
▪	Perangkat Keras dan Software Sistem DRC	Pemenuhan: Largely Sudah terdapat layanan yang difasilitasi perangkat keras DRC	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat beberapa perangkat sudah usianya cukup tua ▪ Berdasarkan analisa pada arsitektur infrastruktur, infrastruktur DRC ke depan dapat berupa Public Cloud menggunakan jasa pihak ke 3 untuk sistem yang terdapat di perangkat tua
▪	Keamanan Sistem Informasi	Pemenuhan: Fully Arsitektur keamanan sistem informasi saat ini sudah cukup lengkap dan memiliki threat management yang cukup baik	Keep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi untuk pengelolaan risiko keamanan karena threat dan malware saat ini dapat dipertahankan.
▪	Keamanan Infrastruktur	Pemenuhan: Fully Arsitektur keamanan infrastruktur saat ini sudah cukup lengkap dan memiliki perangkat dengan threat management yang cukup baik	Keep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi untuk pengelolaan risiko keamanan karena threat dan malware saat ini dapat dipertahankan.
▪	LAN Kantor Pusat	Pemenuhan: Partial LAN Kantor Pusat saat ini masih belum mengimplementasikan manajemen jaringan yang memadai. Masih terdapat SPOF (Single Point of Failure), terdapat	Enhance	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diperlukan adanya penambahan perangkat untuk meningkatkan redundansi pada LAN kantor Pusat ▪ Diperlukan untuk memutakhirkan konektivitas antara gedung halim I menuju

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		konektifitas LAN antar Gedung yang masih menggunakan kabel UTP		pusdiklat dengan menggunakan kabel fiber optic
▪	WAN Unit Kerja Daerah	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat koneksi WAN yang digunakan untuk koneksi ke unit kerja daerah	Keep	▪ Sudah terdapat koneksi WAN yang digunakan untuk koneksi ke unit kerja daerah
▪	Koneksi Internet	Pemenuhan: Largely Saat ini BKKBN telah bekerjasama dengan 1 ISP untuk menyediakan koneksi internet.	Enhance	▪ Kapasitas internet dapat dinaikkan sesuai kebutuhan jika persyaratan perbaikan manajemen jaringan LAN Kantor Pusat sudah dilakukan.
▪	Manajemen Log dan Korelasinya	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat management log pada sistem SIEM yang dimiliki oleh BKKBN	Keep	▪ Sudah terdapat pencatatan data historis atas jaringan dan infrastruktur, termasuk keamanan yang kemudian digunakan untuk menganalisa insiden yang terjadi.
▪	Manajemen Sistem dan Jaringan	Pemenuhan: Fully Saat ini terdapat satu software tool yang digunakan untuk memantau seluruh asset TI dari sisi performance maupun availability	Keep	▪ Saat ini terdapat satu software tool yang digunakan untuk memantau seluruh asset TI dari sisi performance maupun availability
▪	Manajemen Layanan TI	Pemenuhan: Partial	New	▪ Diperlukan adanya implementasi tools untuk manajemen layanan TI untuk kebutuhan helpdesk

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		Saat ini belum memiliki tool yang memfasilitasi pelaksanaan manajemen layanan TI		

5.3. Gap Analysis Arsitektur Keamanan

Tabel 32 Gap Analysis Arsitektur Keamanan

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
▪	Keamanan Aplikasi dan Database	Pemenuhan: Largely Saat ini sudah dilakukan vulnerability assessment atau penetration testing untuk aplikasi dan database dengan menggunakan jasa pihak ketiga	Enhance	▪ Saat ini sudah dilakukan vulnerability assessment atau penetration testing untuk aplikasi dan database dengan menggunakan jasa pihak ketiga namun hal ini belum dilakukan secara berkala
▪	Manajemen Akses	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat akses manajemen menggunakan active directory	Keep	▪ Sudah terdapat akses manajemen menggunakan active directory
▪	Threat Management	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat layanan untuk kontrol dan proteksi dini terhadap ancaman yang masuk pada jaringan komputer	Keep	▪ Sudah terdapat layanan untuk kontrol dan proteksi dini terhadap ancaman yang masuk pada jaringan komputer dengan modul yang cukup lengkap
▪	Antivirus	Pemenuhan: Fully	Keep	▪ Sudah terdapat antivirus pada server dan end user dengan lisensi yang diperbarui setiap tahun

No	Infrastruktur Target	Infrastruktur Eksisting	Strategi Migrasi	Rasional
		Sudah terdapat antivirus pada server dan end user		
▪	Data Leak Prevention	Pemenuhan: None Belum terdapat tools untuk proteksi adanya kebocoran data ataupun tools untuk data trashing	New	▪ Diperlukan adanya implementasi tools yang dapat digunakan untuk data trashing
▪	Identity Management	Pemenuhan: Largely Identity Management tools menggunakan active directory	Enhance	▪ Diperlukan adanya integrasi active directory dengan sistem kepegawaian
▪	Security Information & Event Management	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat management log pada sistem SIEM yang dimiliki oleh BKKBN	Keep	▪ Sudah terdapat pencatatan data historis atas jaringan dan infrastruktur, termasuk keamanan yang kemudian digunakan untuk menganalisa insiden yang terjadi.
▪	Security Analysis & Forensic	Pemenuhan: Fully Sudah terdapat analisis terhadap log-log yang dihasilkan oleh SIEM. Sudah terdapat tindak lanjut terhadap insiden keamanan	Keep	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah terdapat analisis terhadap log-log yang dihasilkan oleh SIEM. ▪ Sudah terdapat tindak lanjut terhadap insiden keamanan

5.4. Gap Analysis Tata Kelola TI

Gap analysis dengan menganalisis perbedaan maturity level antara target dengan kondisi saat ini. Analisis tersebut dengan melihat maturity level tiap atribut dari proses bersangkutan. Atribut tersebut sebagai berikut.

- a. A1 = Plan, Policies & Procedure
- b. A2 = Responsibility & Accountability
- c. A3 = Goal Setting & Measurement
- d. A4 = Skill & Expertise
- e. A5 = Awareness
- f. A6 = Tools

Berikut Gap analysis tiap proses COBIT 4.1.

Tabel 33 GAP Analysis Proses COBIT 4.1

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
Domain PO – Plan and Organize					
PO1 Define Strategic Plan	PO1 = 2,58 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO1 = 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,42. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait b. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar perencanaan, melaksanakan dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Plan and Organize (misal: pelatihan ITIL) b. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses plan and organize

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
PO2 Define the Information Architecture	PO2 = 2,00 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 1,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO2 = 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 1,00. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat KPI khusus terkait arsitektur informasi/IT Master Plan b. Belum terdapat pelatihan dan sertifikasi khusus terkait arsitektur informasi c. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Sedang	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses define the information architecture b. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi (Contoh: TOGAF) c. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses define the information architecture
PO3 Determine Technological Direction	PO3 = 2,25 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO3 = 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,75. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat IT Steering Committee (ITSC) b. Belum terdapat KPI khusus terkait arahan teknologi/IT Master Plan c. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait d. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga	Berat	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membentuk, menetapkan dan mengesahkan ITSC/Komite TI b. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses Determine Technological Direction c. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait (Contoh: XYZ) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses determine technological direction (Contoh: XYZ)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			masih menggunakan aplikasi standar desktop		
PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships	PO4 = 2,25 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO4 = 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,75. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat KPI khusus terkait proses Define the IT processes, organization and relationships b. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait c. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Sedang	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses define the IT processes, organisation and relationships b. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait (Contoh: Business Analyst) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses processes, organization and relationships (Contoh: XYZ)
PO5 Manage the IT Investment	PO5 = 3,33 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,50 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,50 f. A6 = 3,50	PO5 = 3.50	Gap untuk proses ini adalah = 0,17. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice b. Telah terdapat beberapa pelatihan yang relevan namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: XYZ) b. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait (Contoh: XYZ)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			ada proses transfer knowledge terkait		
PO6 Communicate Management Aims and Direction	PO6 = 2,58 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	PO6 = 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,42. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Terkait pengukuran dilakukan secara lisan, evaluasi master plan dilakukan setiap tahunnya, namun belum terdapat KPI formal b. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait	Ringan	Gap bi ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan kpi terkait proses communicate management aims and direction b. Menyusun training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait (Contoh: COBIT)
PO7 Manage IT Human Resources	PO7 = 3,17 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,50 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,50	PO7 = 3.42	Gap untuk proses ini adalah = 0.25 Gap tersebut antara lain terjadi karena: c. Belum menerapkan best practice d. Telah terdapat beberapa pelatihan yang relevan namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait e. Belum optimalnya pembahasan issue kritikal	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh:COBIT) b. Menyusun training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait (Contoh: COBI) c. Mengkomunikasikan kritikal issue dan melaksanakan tindak lanjut

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			terkait proses Manage IT Human Resources (belum ada tindaklanjut yang signifikan terkait kurang SDM di unit TI)		
PO8 Manage Quality	PO8 = 2,08 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 2,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO8 = 3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,92. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat prosedur terkait QA, terkait proses QA selalu dilaksanakan hanya saja, proses pendokumentasian belum konsisten b. Belum terdapat KPI terkait manage quality c. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait d. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Berat	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan terkait prosedur manajemen kualitas b. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses manage quality c. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses manage quality (Contoh: ISO 9001) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses manage quality (Contoh: XYZ)
PO9	PO9 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00	PO9 = 3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena:	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
Assess and Manage IT Risks	b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00		a. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait		dan sertifikasi terkait proses assess and manage IT risks (Contoh:COBIT dan ISO 31000)
PO10 Manage Projects	PO10 = 1,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 1,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	PO10= 3.00	Gap untuk proses ini adalah = 1,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat kebijakan dan SOP yang mengatur terkait manajemen proyek b. Belum terdapat KPI terkait proses manajemen proyek c. Belum terdapat pelatihan khusus terkait manajemen proyek, sejauh ini terdapat pelatihan COBIT namun belum terdokumentasi d. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Berat	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan terkait kebijakan dan prosedur manajemen proyek b. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses manajemen proyek c. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses manajemen proyek (Contoh: Project Management) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses manajemen proyek (Contoh: XYZ)
Domain AI – Acquire and Implement					
AI1 Identify Automated Solutions	AI1= 2,33 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00	AI1=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,67 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat KPI terkait identify automated solutions	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Penetapan KPI terkait identifikasi proses otomasi TI secara menyeluruh;

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	c. A3 = 1,00 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00		b. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop		b. Penetapan dan penggunaan tool terkait proses identifikasi otomasi solusi;
AI2 Acquire and Maintain Application Software	AI2 = 3, 08 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,50 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	AI2=3,5	Gap untuk proses ini adalah = 0,42 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice b. Belum menerapkan proses reward terkait proses Acquire and Maintain Application Software c. Belum melaksanakan penilaian terhadap efektivitas training plan d. Belum optimalnya pembahasan issue kritikal terkait proses pembangunan aplikasi (beberapa unit membangun sistem tanpa sepengetahuan unit TI) e. Belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi terkait tools yang digunakan dalam membangun aplikasi	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice internal yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: XYZ) b. Menerapkan proses reward terkait proses Acquire and Maintain Application Software c. Melaksanakan penilaian terhadap efektivitas training plan d. Mengoptimalkan pembahasan issue kritikal terkait proses pembangunan aplikasi (beberapa unit membangun sistem tanpa sepengetahuan unit TI) e. Belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi terkait tools yang digunakan dalam membangun aplikasi
AI3 Acquire and Maintain	AI3 = 2,58 Dengan maturity tiap atribut:	AI3=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,42 Gap tersebut antara lain terjadi karena:	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
Technology Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00 		<ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan belum ada proses transfer knowledge terkait b. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop 		<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi (Contoh: Server Fundamentals) b. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi (Contoh: XYZ)
AI4 Enable Operation and Use	<p>AI4 = 2,25 Dengan maturity tiap atribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00 	AI4=3,00	<p>Gap untuk proses ini adalah = 0,75 Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum terdapat KPI terkait b. Telah terdapat pelatihan ITIL (namun belum ditemukan dokumentasi terkait) c. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop 	Ringan	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan KPI terkait proses enable operation and use b. Menyusun training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses enable operation and use (Contoh: ITIL Foundation) c. Penetapan dan penggunaan tool terkait proses enable operation and use.
AI5 Procure IT Resources	<p>AI5 = 3,25 Dengan maturity tiap atribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 	AI5=0,25	<p>Gap untuk proses ini adalah = 0,42. Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum menerapkan best practice 	Ringan	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji best practice internal yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: XYZ)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	c. A3 = 3,50 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,50 f. A6 = 3,50		b. Belum menerapkan proses reward terkait proses Acquire and Maintain Application Software c. Belum melaksanakan penilaian terhadap efektivitas training plan		b. Menerapkan proses reward terkait proses procure IT resources c. Melaksanakan penilaian terhadap efektivitas training plan
AI6 Manage Changes	AI6 = 1,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 1,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	AI6=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 1,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat kebijakan dan SOP terkait manajemen perubahan b. Belum Terdapat KPI c. Telah terdapat Pelatihan/sertifikasi terkait Cobit dan ITIL namun belum ditemukan dokumentasi terkait d. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop	Berat	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan terkait kebijakan dan prosedur manajemen perubahan b. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses manajemen perubahan c. Menyusunan training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses manajemen perubahan (Contoh: ITIL Foundation) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses manajemen perubahan (Contoh: XYZ)
AI7 Install and Accredited Solutions and Changes	AI7 = 1,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 1,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 1,00 d. A4 = 2,50	AI7=3	Gap untuk proses ini adalah = 1,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum terdapat kebijakan dan SOP terkait yang spesifik b. Belum terdapat KPI terkait	Berat	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Menyusun dan mengesahkan terkait kebijakan dan prosedur terkait proses install and accredited solutions and changes

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00		c. Terdapat pelatihan Cobit/ITIL, namun belum ditemukan dokumentasi terkait d. Belum terdapat tools khusus yang digunakan dalam proses ini, sehingga masih menggunakan aplikasi standar desktop		b. Menyusun dan mengesahkan KPI terkait proses install and accredit solutions and changes c. Menyusun training plan, beserta pelaksanaan, dan pelaporan training dan sertifikasi terkait proses install and accredit solutions and changes (Contoh: XYZ) d. Mengkaji, mengadakan, dan mengimplementasikan tools yang tepat terkait proses install and accredit solutions and changes (Contoh: XYZ)
DS – Delivery and Support					
DS1 Define and Manage Service Levels	DS1 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	DS1=3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,08 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Telah terdapat pelatihan COBIT dan ITIL (Manajemen Layanan), namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support (misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan)
DS2 Manage Third-party Services	DS2 = 3.08 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00	DS2=3.50	Gap untuk proses ini adalah = 0,42 Gap tersebut antara lain terjadi karena:	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,00 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00		a. Belum menerapkan best practice b. Belum terjalin komunikasi unit kerja yang terkait proses bisnis dalam penyusunan layanan TI pihak ketiga c. Belum melaksanakan penilaian terhadap efektifitas training plan dan knowledge sharing / transfer knowledge terhadap pelatihan mengenai layanan TI pihak ketiga d. Belum teroptimisasi pembahasan issue kritikal terkait proses layanan TI dari pihak ketiga dalam pencapaian tujuan bisnis dan perubahan lingkungan TI e. Tidak bisa melakukan kustomisasi terhadap aplikasi layanan TI Pihak ketiga		a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: COBIT, ITIL, dan LKPP) b. Mengkaji komunikasi proses bisnis penyusunan layanan TI pihak ketiga dan melakukan peningkatan berkelanjutan mengenai layanan TI pihak ketiga dan sistem kontrak dengan pihak ketiga c. Melakukan penilaian terhadap efektifitas training plan dan knowledge sharing untuk mengoptimisasi pelatihan mengenai layanan ketiga (Contoh LPSE yang dikembangkan lembaga LKPP) d. Melakukan penentuan nilai prioritas issue kritikal terhadap proses layanan TI pihak ketiga untuk membantu optimalisasi proses bisnis dan kebutuhan TI e. Mengembangkan aplikasi yang serupa dan sudah ada untuk mendukung optimalisasi layanan TI dari pihak ketiga dan optimalisasi kebutuhan TI untuk mendukung proses bisnis
DS3 Manage Performance and Capacity	DS3 = 3,17 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50	DS3=3.50	Gap untuk proses ini adalah = 0.33 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: COBIT, ITIL)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
<p>Nilai GAP nya melebihi nilai 3,00</p>	<p>c. A3 = 3,00 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,50</p>		<p>b. Belum terjalin komunikasi unit kerja yang terkait proses bisnis penyusunan rencana kinerja dan kapasitas TI yang meliputi prioritas bisnis, tujuan bisnis, perubahan lingkungan, dan kapabilitas TI</p> <p>c. Belum melaksanakan penilaian terhadap efektifitas training plan dan knowledge sharing / transfer knowledge terhadap pelatihan mengenai rencana kinerja dan kapasitas TI</p> <p>d. Belum teroptimalisasi pembahasan issue kritikal terkait proses rencana kerja dan kapasitas TI dalam pencapaian tujuan bisnis dan perubahan lingkungan TI</p>		<p>b. Mengkaji komunikasi proses bisnis penyusunan rencana kinerja dan kapasitas TI dan melakukan peningkatan berkelanjutan mengenai rencana kinerja dan kapasitas TI yang meliputi prioritas bisnis, tujuan bisnis, perubahan lingkungan, kapabilitas bisnis, dan trend bisnis</p> <p>c. Melakukan penilaian terhadap efektifitas training plan dan knowledge sharing untuk mengoptimalisasi pelatihan mengenai rencana kinerja dan kapasitas TI (Contoh Aplikasi SMART dari Kemenkeu dan Aplikasi KRISNA yang dikembangkan oleh BAPPENAS)</p> <p>d. Melakukan penentuan nilai prioritas issue kritikal terhadap proses rencana kinerja dan kapasitas TI untuk membantu optimalisasi proses bisnis dan kebutuhan TI</p>
<p>DS4 Ensure Continuous Service</p>	<p>DS4 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50</p>	<p>DS4=3.00</p>	<p>Gap untuk proses ini adalah = 0.08 Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <p>a. Telah terdapat pelatihan COBIT dan ITIL (Manajemen Layanan) , namun proses pelatihan/sertifikasi belum</p>	<p>Ringan</p>	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <p>a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support (misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan)</p>

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00		terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI		
DS5 Ensure Systems Security	DS5 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	DS5=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,71 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Telah terdapat pelatihan COBIT dan ITIL (Manajemen Layanan) serta Pelatihan E-Five mengenai Keamanan Jaringan, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support (misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan serta Pelatihan E-Five untuk dilakukan Transfer Knowledge ke user lain)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
DS6 Identify and Allocate Costs nilai GAP nya melebihi nilai 3,00	DS6 = 3,25 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,00 d. A4 = 3,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,50	DS6=3,50	Gap untuk proses ini adalah = 0,25. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice b. Belum terjalin komunikasi unit kerja yang terkait proses bisnis penyusunan seluruh biaya/ anggaran dan pembelanjaan kebutuhan TI c. Belum teroptimalisasi pembahasan issue kritikal terkait proses proses bisnis penyusunan seluruh biaya/ anggaran dan pembelanjaan kebutuhan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: COBIT, ITIL) b. Mengkaji komunikasi proses bisnis penyusunan penyusunan seluruh biaya/ anggaran dan pembelanjaan kebutuhan T dan melakukan peningkatan berkelanjutan mengenai penyusunan seluruh biaya/ anggaran dan pembelanjaan kebutuhan TI c. Melakukan penentuan nilai prioritas issue kritikal terhadap proses penyusunan seluruh biaya/ anggaran dan pembelanjaan kebutuhan TI untuk membantu optimalisasi proses bisnis dan kebutuhan TI
DS7 Educate & Train Users nilai GAP nya melebihi nilai 3,00	DS7 = 3,17 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,00 d. A4 = 3,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	DS7=3,50	Gap untuk proses ini adalah = 0,33 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice b. Belum terjalin komunikasi unit kerja yang terkait proses bisnis dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: COBIT, ITIL) b. Mengkaji komunikasi proses bisnis penyusunan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan TI dan melakukan peningkatan berkelanjutan mengenai kurikulum pendidikan dan pelatihan TI

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> c. Belum teroptimalisasi pembahasan issue kritikal terkait kurikulum pendidikan dan pelatihan TI dalam pencapaian tujuan bisnis dan perubahan lingkungan TI d. Belum optimalnya aplikasi E-Learning untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan pelatihan TI 		<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan penentuan nilai prioritas issue kritikal terhadap proses kurikulum pendidikan dan pelatihan TI untuk membantu optimalisasi proses bisnis dan kebutuhan TI d. Mengembangkan aplikasi E-Learning dalam memenuhi kebutuhan TI untuk mendukung optimalisasi sistem pembelajaran dan pendidikan pelatihan TI
DS8 Manage Service Desk and Incidents	DS8 = 2,25 Dengan maturity tiap atribut: g. A1 = 2,00 h. A2 = 3,00 i. A3 = 3,00 j. A4 = 2,50 k. A5 = 2,00 l. A6 = 1,00	DS8=3,00	<p>Gap untuk proses ini adalah = 0,75. Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada prosedur mengenai layanan Helpdesk yang mengatur tentang manajemen layanan dan insiden TI; b. Telah terdapat pelatihan COBIT dan ITIL (Manajemen Layanan), namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI c. Belum terdapat meeting reguler untuk 	Berat	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan prosedur untuk mengatur manajemen layanan dan insiden TI; a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support (misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan); b. Membangun awareness terhadap pentingnya mengkomunikasikan hal-hal terkait proses manajemen layanan dan insiden TI dengan cara mengkomunikasikan isu-isu yang terjadi, dan membangun struktur dan komunikasi yang formal dan berkala/terjadwal. c. Melakukan kajian mengadakan/mengimplementasi

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			<p>mengkomunikasikan terkait manajemen layanan dan insiden TI</p> <p>d. Belum ada tools khusus untuk manajemen layanan dan insiden TI.</p>		tools yang tepat seperti: Manage Engine Service Desk
DS9 Manage the Configuration	<p>DS9 = 2,58</p> <p>Dengan maturity tiap atribut:</p> <p>a. A1 = 3,00</p> <p>b. A2 = 3,00</p> <p>c. A3 = 3,00</p> <p>d. A4 = 2,50</p> <p>e. A5 = 3,00</p> <p>f. A6 = 1,00</p>	DS9=3,00	<p>Gap untuk proses ini adalah = 1,42. Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <p>a. Telah terdapat pelatihan COBIT dan E-Five untuk pengembangan kompetensi manajemen konfigurasi TI, namun belum terdokumentasi dan tidak ada proses Transfer Knowledge untuk training yang sudah dilakukan;</p> <p>b. Belum ada tools khusus untuk membantu konfigurasi TI .</p>	Ringan	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <p>a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support khususnya pelatihan mengenai konfigurasi(misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan);</p> <p>b. Melakukan kajian mengadakan/mengimplementasi tools yang tepat seperti: Manage Engine</p>
DS10 Manage Problem	<p>DS10 = 2,75</p> <p>Dengan maturity tiap atribut:</p> <p>a. A1 = 2,00</p> <p>b. A2 = 3,00</p> <p>c. A3 = 3,00</p> <p>d. A4 = 2,50</p> <p>e. A5 = 3,00</p> <p>f. A6 = 3,00</p>	DS10=3	<p>Gap untuk proses ini adalah = 1,33. Gap tersebut antara lain terjadi karena:</p> <p>a. Belum ada prosedur kerja manajemen permasalahan TI;</p> <p>b. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait manajemen permasalahan</p>	Berat	<p>Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut.</p> <p>a. Penetapan prosedur manajemen permasalahan TI;</p> <p>b. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support khususnya mengenai problem management dan melakukan hasil</p>

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			TI dengan pelatihan COBIT dan ITIL (Manajemen Layanan), namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI		proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT dan ITIL /Manajemen Layanan);
DS11 Manage Data	DS11 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	DS11=3	Gap untuk proses ini adalah = 0.08 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait manajemen Data TI dengan pelatihan COBIT, Pelatihan data warehouse dengan sql server, dan pelatihan cloud computing namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI.	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support khususnya mengenai Manajemen Data dan melakukan hasil proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT, Pelatihan Data Warehouse dengan SQL Server, dan Pelatihan Cloud Computing);
DS12 Manage the Physical Environment	DS12 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50	DS12=3	Gap untuk proses ini adalah = 0.08 Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait manajemen Data TI dengan	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Delivery and Support khususnya mengenai Manajemen Lingkungan Fisik dan

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00		pelatihan COBIT, 'Pelatihan terkait proses pengelolaan Physical Environment dengan pelatihan PC Hardware dan network Technical Support dan SQL Server namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI.		melakukan hasil proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT, elatihan PC Hardware dan network Technical Support dan SQL Server);
DS13 Manage Operations (Nilai sudah mencapai 3,00)	DS13 = 3,08 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,50 c. A3 = 3,00 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 3,00	DS13=3,5	Gap untuk proses ini adalah = 0,50. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Belum menerapkan best practice b. Belum terjalin komunikasi unit kerja yang terkait proses bisnis dalam pemeliharaan operasional TI c. Belum teroptimisasi pembahasan issue kritikal terkait pemeliharaan operasional TI dalam pencapaian tujuan bisnis dan perubahan lingkungan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut: a. Mengkaji best practice yang relevan untuk kemudian diterapkan (contoh: COBIT, ITIL) b. Mengkaji komunikasi proses bisnis penyusunan ddalam pemeliharaan operasional TI c. Melakukan penentuan nilai prioritas issue kritikal terhadap proses dalam pemeliharaan operasional TI untuk membantu optimalisasi proses bisnis dan kebutuhan TI d. Pengembangan tools yang mendukung otomatisasi aktivitas kritikal dan kontrol dalam pemeliharaan operasional TI

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			d. Belum optimalnya tools dalam pemeliharaan operasional TI		
ME – Monitor and Evaluate					
ME1 Monitor and Evaluate IT Performance	ME1 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 2,00 c. A3 = 2,00 d. A4 = 3,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	ME1-3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait manajemen Performance TI dengan pelatihan COBIT namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Monitor and Evaluate khususnya mengenai Manajemen Performance TI dan melakukan hasil proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT)
ME2 Monitor and Evaluate Internal Control	ME2 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 2,00 c. A3 = 2,00 d. A4 = 2,00 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	ME2=3.00	Gap untuk proses ini adalah = 0,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait Internal Control TI dengan pelatihan COBIT namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. 1. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Monitor and Evaluate khususnya mengenai Manajemen internal control TI dan melakukan hasil proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT)

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
			knowledge terkait Manajemen Layanan TI		
ME3 Ensure Compliance With External Requirements	ME3 = 2,58 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00 f. A6 = 1,00	ME3=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,42. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait Manajemen Kepatuhan TI dengan pelatihan COBIT dan pelatihan ISO 37001:2016 - Manajemen Anti Penyuapan namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI b. Belum ada tool khusus untuk membantu penjaminan kepatuhan TI dan masih menggunakan aplikasi Dekstop.	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Monitor and Evaluate khususnya mengenai Manajemen Kepatuhan TI dan melakukan hasil proses transfer knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT) b. Melakukan kajian mengadakan/mengimplementasi tools yang tepat seperti tools E-DATA yang digunakan untuk manajemen kepatuhan dan GRC Cloud menangani berbagai jenis audit yang seperti proses lapisan audit, audit kepatuhan.
ME4 Provide IT Governance	ME4 = 2,92 Dengan maturity tiap atribut: a. A1 = 3,00 b. A2 = 3,00 c. A3 = 3,00 d. A4 = 2,50 e. A5 = 3,00	ME4=3,00	Gap untuk proses ini adalah = 0,08. Gap tersebut antara lain terjadi karena: a. Sudah terdapat penetapan dan pengembangan kompetensi terkait Manajemen Kepatuhan TI dengan pelatihan	Ringan	Gap bisa ditutup dengan beberapa hal berikut. a. Membuat daftar kebutuhan Pelatihan TI dan mendokumentasikan pelatihan terkait proses Monitor and Evaluate khususnya mengenai Manajemen Tata Kelola Risiko TI dan melakukan hasil proses transfer

Proses	Saat Ini	Target	Gap Analysis	Risk Level	Rekomendasi
	f. A6 = 3,00		COBIT namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi, dan tidak ada proses transfer knowledge terkait Manajemen Layanan TI		knowledge setelah melakukan pelatihan yang terkait misal: pelatihan COBIT)

6. Peta Rencana Arsitektur Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan dan Tata Kelola TI

6.1. Inisiatif Arsitektur Aplikasi

Berikut daftar inisiatif aplikasi.

Tabel 34 Daftar Inisiatif Aplikasi

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
A.	ARSITEKTUR APLIKASI						
1.	PENGENDALIAN PENDUDUK						
a.	Pengembangan Rumah Dataku						
b.	Pengembangan Kampung KB						
c.	Pengembangan Peta Bangga Kencana						
d.	Pengembangan Partnership Management						
e.	Regulation Management						
f.	Pengembangan Siperindu						
2.	KBKR						
a.	Pengembangan Kesehatan Reproduksi						
b.	Pengembangan Monika						
c.	Pengembangan Manajemen Alkon						
3.	KSPK						
a.	Pengembangan SINTA						
b.	Pengembangan Yo-Sakurga						

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
c.	Pengembangan Siapnikah						
d.	Penegmbangan Golantang						
e.	Pengembangan Orangtuahebat						
4.	PENELITIAN, PELATIHAN						
a.	Pengembangan CITC						
b.	Pengembangan E-Journal						
c.	Pengembangan E-Learning						
d.	Manajemen Riset						
5.	PENGADUAN DAN INFORMASI						
a.	Implementasi Pengaduan Masyarakat						
b.	Pengembangan E-Library						
c.	Pengembangan IEC Management						
6.	MANAJEMEN PENGAWASAN						
a.	Pengembangan Sistem Manajemen Audit						
b.	Implementasi Audit Repository						
c.	Pengembangan Sistem Continuous Audit						
d.	Pengembangan Penilaian ZI-WBK						
e.	Pengembangan Penilaian E-SAKIP						
f.	Implementasi CAAT						
7.	PENGOLAHAN DATA KELUARGA						

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
a.	Pengembangan SIGA						
b.	Pengembangan Survey Management						
8.	MANAJEMEN LINI LAPANGAN						
a.	Pengembangan SILILI						
b.	Pengembangan E-VISUM						
c.	Pengembangan EKLOP						
d.	Pengembangan E-Sertifikasi						
e.	Pengembangan MONALISA						
9.	DATA AND INTEGRATION						
a.	Metadata Repository						
b.	Data Profiling						
c.	Enterprise Service Bus						
10.	ANALYTICS						
a.	Dashboard						
b.	Implementasi DW-BI						
c.	Implementasi Big Data Analytics						
11.	KESEKRETARIATAN						
a.	Pengembangan E-Office						
b.	Implementasi E-Monev						
c.	Implementasi E-Procurement						

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
d.	Implementasi Manajemen Arsip						
e.	Implementasi Kepegawaian						
f.	Pengembangan SIMPAK						
g.	Implementasi Presensi						
h.	Pengembangan SIDIKA						
i.	Pengembangan SIPPUJA						
j.	Implementasi Perencanaan						
k.	Implementasi Keuangan						
l.	Pengembangan Advokasi Hukum						
m.	Pengembangan Manajemen Risiko						

6.2. Deskripsi Inisiatif Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan
Berikut daftar inisiatif infrastruktur dan keamanan.

Tabel 35 Daftar Inisiatif Infrastruktur dan Keamanan

NO	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Peningkatan redundansi suplai listrik data center						Penambahan kabel induk kelistrikan yang menuju ke data center
2.	Penambahan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan penyediaan emergency exit pada data center						Penambahan unit UPS yang semula hanya satu lapis menjadi dua lapis dan penyediaan pintu emergency exit pada data center
3.	Penambahan redundansi pada core segmen infrastruktur jaringan						Penambahan core switch untuk mengeliminasi single point of failure pada infrastruktur jaringan TI BKKBN
4.	Pemutakhiran konektifitas antar Gedung di kantor pusat						Mengganti penggunaan kabel UTP yang saat ini digunakan untuk menghubungkan Gedung Halim I dan Pusdiklat menjadi fiber optic

NO	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
5.	Peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan						Melakukan peremajaan untuk perangkat infrastruktur jaringan dan keamanan yang sudah memasuki masa end of life
6.	Feasibility study kebutuhan kapasitas layanan cloud pihak ke 3						Melakukan perencanaan , analisis kebutuhan, dan vendor selector terkait penggunaan jasa 3 rd party cloud yang akan digunakan untuk menampung sistem-sistem yang akan dimigrasikan menuju environment 3 rd party cloud
7.	Migrasi dan Implementasi environment cloud pihak ke 3						Melakukan migrasi system menuju environment 3 rd party cloud sesuai dengan feasibility study.
8.	Feasibility study migrasi sistem menuju pusat data nasional						Melakukan feasibility study terkait migrasi

NO	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
							system menuju pusat data nasional
9.	Migrasi system menuju environment pusat data nasional						Melakukan migrasi system menuju environment pusat data nasional sesuai dengan feasibility study.
10.	Implementasi tools untuk kebutuhan manajemen layanan TI						Impementasi tools untuk kebutuhan manajemen layanan IT seperti tools untuk helpdesk
11.	Maintenance hardware tahunan						Maintenance hardware server dan perangkat jaringan yang dilakukan setiap tahun
	ARSITEKTUR KEAMANAN						
12.	Vulnerability Assessment						Melakukan vulnerability assessment dengan bantuan jasa pihak ke 3 secara terjadwal minimal satu tahun sekali
13.	Implementasi Identity Management						Implementasi tools identity management yang sesuai dengan

NO	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
							sistem kepegawaian untuk kemudian diintegrasikan dengan manajemen akses yang saat ini sudah dimiliki oleh BKKBN
14.	Implementasi tools data leak prevention system						Implementasi tools untuk kebutuhan data trashing dan data leak prevention untuk menghindari terjadinya kebocoran data
15.	Perpanjangan lisensi antivirus						Melakukan pebaharuan terkait lisensi antivirus setiap tahun

6.3. Deskripsi Inisiatif Tata Kelola TI

Berikut daftar inisiatif tata kelola TI.

Tabel 36 Daftar Inisiatif Tata Kelola TI

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
1.	Organisasi TIK						
a.	Pembentukan ITSC						
b.	Penyesuaian Jobdesc						
2.	Kebijakan dan Prosedur						
a.	Pengesahan Kebijakan						
b.	Pengesahan Prosedur						Prosedur Manajemen Proyek, Pengembangan Aplikasi, Instalasi Software, Manajemen Oerubahan, Manajemen Service Desk & Incident, Manajemen Permasalahan, Manajemen Mutu TI.
3.	SDM TIK						
a.	Penetapan Kompetensi SDM TIK						
b.	Penguatan Kompetensi SDM TIK						
4.	Tools TIK						

	NAMA INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024	PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
a.	Implementasi Tools IT Management						Tools Incident, Problem, Change, Configuration Management.

7. Lampiran

7.1. Estimasi Anggaran Infrastruktur

	INISIATIF	2020	2021	2022	2023	2024
	ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR					
1.	Peningkatan reduksi suplai listrik data center					
2.	Penambahan Uninterruptible Power Supply (UPS) dan penyediaan emergency exit pada data center					
3.	Penambahan reduksi pada core segmen infrastruktur jaringan					
4.	Pemutakhiran konektivitas antar Gedung di kantor pusat		300,000,0 00			
5.	Peremajaan perangkat infrastruktur dan keamanan	14,773,70 6,000				
6.	Feasibility study kebutuhan kapasitas layanan cloud pihak ke 3		-			
7.	Migrasi dan Implementasi environment cloud pihak ke 3	3,976,503, 000				

8.	Feasibility study migrasi sistem menuju pusat data nasional					
9.	Migrasi system menuju environment pusat data nasional					
10.	Implementasi tools untuk kebutuhan manajemen layanan TI		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
11.	Maintenance hardware tahunan	1,314,100,000				
	ARSITEKTUR KEAMANAN					
12.	Vulnerability Assessment	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
13.	Implementasi Identity Management			450,000,000	450,000,000	450,000,000
14.	Implementasi tools data leak prevention system			500,000,000		
15.	Perpanjangan lisensi antivirus	377,600,000	400,000,000	430,000,000	460,000,000	500,000,000

7.2. Lampiran Kebijakan

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 425/PER/G5/2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

1. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut TIK BKKBN adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan informasi.
- (2) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut RSTI berisi detail *roadmap* perencanaan dan anggaran terkait Teknologi Informasi
- (3) Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut pengelola TIK adalah unit kerja yang memfasilitasi layanan TIK BKKBN.
- (4) Pengguna adalah kementerian/lembaga pemerintah daerah/organisasi berbadan hukum perseorangan yang memanfaatkan fasilitas layanan TIK BKKBN.
- (5) *Disaster Recovery Center* adalah fasilitas yang memberikan jaminan bagi instansi untuk dapat terus beroperasi bila terjadi gangguan pada unit sebuah instansi.
- (6) *Collocation* adalah tempat untuk meletakkan *server* pada sebuah ruangan di *data center* Indonesia yang dirancang khusus sesuai standar tertentu agar dapat memenuhi aksesibilitas diatas 99,9%.
- (7) *Single Sign On* adalah teknologi yang memungkinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
- (8) *Proprietary* adalah sistem dan aplikasi yang dilindungi oleh merk dagang atau paten atau hak cipta yang dibuat atau dikembangkan dan didistribusikan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak eksklusif.
- (9) *Open source* adalah kode-kode sistem dan aplikasi yang bersifat terbuka untuk digunakan, dikembangkan, dan atau dimodifikasi menjadi sistem dan aplikasi lain, yang dilakukan oleh individu-individu yang saling bekerjasama dalam memanfaatkan kode-kode tersebut, dan tidak diatur oleh suatu lembaga tertentu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
- (10) Unit Kerja adalah seluruh unit organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dan Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- (11) Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat DITTEK adalah unit kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi, serta dokumentasi dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (12) Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

A. TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan TIK BKKBN Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung (*backbone*) dalam menjalankan fungsi manajemen pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga untuk mencapai visi dan misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Peraturan Kepala Badan tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah pengelola TIK dan pengguna.
- (2) Penunjukan/pendelegasian pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Kepala Badan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal

- (4) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Aparatur Sipil Negara yang aktif di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (5) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/organisasi berbadan hukum/ perseorangan yang mendapat persetujuan untuk memanfaatkan layanan TIK BKKBN.

C. RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 - a. kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pengelolaan TIK BKKBN

BAB III

KEBIJAKAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Perencanaan Strategis Teknologi Informasi

Pasal 5

Kebijakan untuk perencanaan strategis teknologi informasi mencakup:

- (1) DITTEK Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) untuk meningkatkan daya saing/kinerja dan pemanfaatan TI secara optimal.
- (2) RSTI disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan diselaraskan dengan rencana strategis Organisasi (*corporate plan*) untuk mendukung strategi dan pencapaian tujuan Organisasi.
- (3) RSTI yang disusun meliputi:
 - a. Analisis konteks organisasi dan arahan strategis Organisasi, arsitektur Organisasi, analisis kebutuhan TI atas strategi Organisasi serta visi dan misi TI Organisasi
 - b. Analisis kapabilitas TI ke depan
 - c. Desain arsitektur informasi strategis
 - d. Desain arsitektur aplikasi, yang berisi prinsip, lanskap, deskripsi dan integrasi arsitektur
 - e. Desain arsitektur infrastruktur TI, yang berisi prinsip, arsitektur DC dan DRC, arsitektur jaringan komunikasi, serta arsitektur keamanan
 - f. *Roadmap*, yang berisi *gap analysis*, strategi sumber daya, tata waktu implementasi, dan portofolio program.
- (4) Arsitektur TI tersebut yang dimaksud harus mendukung tercapainya tujuan lembaga dan sejalan dengan prinsip dan persyaratan arsitektur TI yang ditetapkan. Untuk itu sebelum membangun arsitektur TI maka perlu disusun dahulu visi arsitektur yang mencakup ruang lingkup, *business case*, dan prinsip-prinsip arsitektur TI.
- (5) Peninjauan terhadap RSTI dalam rangka evaluasi pencapaian realisasi RSTI perlu dilakukan secara periodik.
- (6) Peninjauan terhadap RSTI dilakukan oleh DITTEK yang membidangi Arsitektur TI paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (7) Indikator kinerja proses ini antara lain mencakup: persentase proyek yang merujuk ke arsitektur TI yang telah ditetapkan, ketersediaan RSTI yang aktif, jumlah pelaksanaan evaluasi RSTI per tahun, kelengkapan komponen arsitektur TI (arsitektur data, aplikasi, infrastruktur) yang ada dalam RSTI, persentase jumlah inisiatif TI dalam RSTI yang dilaksanakan sesuai waktunya.

B. Manajemen Inovasi TI

Pasal 6

Kebijakan untuk manajemen inovasi TI mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) BKKBN memberikan ruang dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya inovasi, termasuk inovasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan perkembangan tren teknologi terkini yang relevan agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi.
- (2) Manajemen inovasi terkait TI dilaksanakan oleh satuan kerja khusus yang ditetapkan oleh BKKBN untuk mengelola inovasi di lingkungan Organisasi.
- (3) Inovasi yang diajukan, dinilai kelayakan dan manfaatnya, dan apabila disetujui dapat dimasukkan menjadi inisiatif rencana strategi TI (RSTI).
- (4) Indikator kinerja untuk proses ini antara lain mencakup jumlah inisiatif TI yang dihasilkan dari ide inovasi.

C. Manajemen Anggaran Dan Biaya Teknologi Informasi

Pasal 7

Kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- (1) Menjamin pelaksanaan investasi TIK BKKBN dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- (2) Unit Pengelola Teknologi Informasi bertanggung jawab membuat rencana investasi yang harus dituangkan dalam rencana proyek teknologi informasi yang berisi studi kelayakan dari proyek, analisis manfaat dan risiko, sumber daya yang terkait, dan manfaat yang terukur dalam kurun waktu yang ditetapkan.

D. Manajemen SDM TI

Pasal 8

Kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- (1) Menjamin seluruh penganggaran, sumber daya manusia, aset, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TIK BKKBN dilaksanakan oleh DITTEK secara bertahap;
- (2) Unit Kerja menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk dilatih oleh DITTEK untuk menangani *troubleshooting*.

E. Manajemen Pihak ketiga

Pasal 9

- (1) Untuk pengadaan barang dan jasa terkait teknologi informasi, BKKBN dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan jasa TI mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku di BKKBN.
- (3) DITTEK Wajib melakukan pengelolaan atas jasa pihak ketiga sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan dan kontrak pihak ketiga.
 - b. Mengelola risiko kontrak dengan pihak ketiga.
 - c. Memantau kinerja dan kepatuhan kontrak pihak ketiga.
 - d. Menilai kinerja pihak ketiga.
- (4) Keluaran dari proses manajemen pihak ketiga antara lain mencakup:
 - a. Katalog kontrak pihak ketiga.
 - b. Hasil evaluasi kontrak pihak ketiga
 - c. Hasil analisis risiko vendor
 - d. Kriteria pemantauan kepatuhan kontrak pihak ketiga.
 - e. Hasil tinjauan pemantauan kepatuhan kontrak pihak ketiga.
- (5) Indikator Kinerja untuk manajemen pihak ketiga antara lain mencakup:
 - a. Persentase tingkat kepuasan stakeholder dengan pengadaan pihak ketiga
 - b. Frekuensi insiden yang terjadi terkait risiko penggunaan pihak ketiga.

F. Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Manajemen risiko TI mencakup aktifitas Identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko terkait TI secara kontinu dalam tingkat toleransi risiko (*risk tolerance*) yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- (2) Aktifitas penilaian risiko dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Manajemen risiko TI merupakan bagian integral dari risiko Organisasi, pelaksanaannya dikelola oleh Fungsi Manajemen Risiko BKKBN dengan mendapatkan masukan dari DITTEK.
- (4) Indikator kinerja untuk proses manajemen risiko antara lain: persentase tujuan dan layanan bisnis kritikal yang tercakup dalam penilaian risiko TI, rasio insiden signifikan terkait TI yang tidak diidentifikasi dalam penilaian risiko TI vs total insiden terkait TI, frekuensi pengkinian profil risiko TI, jumlah biaya akibat insiden TI terhadap proses bisnis organisasi, dan jumlah jam pemrosesan layanan yang hilang akibat gangguan atas layanan TI.

BAB VI

KEBIJAKAN PENGADAAN, PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI TI

A. Manajemen Program dan Proyek

Pasal 11

- (1) DITTEK menjalankan pengelolaan program dan proyek teknologi informasi dengan mempertimbangkan risiko proyek teknologi informasi.
- (2) Manajemen program dan proyek yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan pendekatan standar untuk manajemen program/proyek.
 - b. Pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - c. Mengembangkan dan memelihara rencana program/proyek
 - d. Memantau, mengendalikan, dan melaporkan status pengelolaan program/proyek.
 - e. Mengelola kualitas program/proyek.
 - f. Mengelola risiko program/proyek.
- (3) Keluaran dari proses manajemen proyek/program antara lain :
 - a. Pendekatan manajemen program/proyek
 - b. Anggaran program/proyek
 - c. Rencana program/proyek
 - d. Hasil pemantauan realisasi manfaat.
 - e. Hasil penilaian risiko program/proyek
 - f. Laporan pelaksanaan program/proyek
- (4) Indikator Kinerja untuk manajemen proyek dan program adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah program dan proyek yang sesuai dengan target (waktu, biaya, dan kualitas)
 - b. Persentase program dan proyek yang berhasil memberikan manfaat/benefit sesuai dengan yang direncanakan
 - c. Frekuensi monitoring status program/proyek yang sedang berjalan.
- (5) Menjalankan dan mematuhi prosedur manajemen proyek yang telah disetujui

B. Manajemen Pengadaan Teknologi Informasi

Pasal 12

- (1) Pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan oleh DITTEK agar memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal terdapat keterbatasan sumberdaya manusia untuk pengembangan sistem, maka pemenuhan kebutuhan sistem dapat dilaksanakan pemenuhannya melalui mekanisme *outsourcing* dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
- (2) Pengadaan teknologi informasi dengan menggunakan jasa pihak ketiga harus selaras dengan pedoman pengelolaan barang dan jasa BKKBN.
- (3) Pengelolaan proses pengadaan TI antara lain meliputi:
 - a. Standar pengadaan;
 - b. Pedoman proyek pengadaan;
 - c. *Escrow agreement*;
 - d. Kontrak pembelian, lisensi, dan pemeliharaan perangkat lunak;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Garansi;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Perubahan perjanjian;
 - i. Keamanan;
- (4) Pengelolaan pihak ketiga selanjutnya diatur lebih rinci dalam sub bab pengelolaan pihak ketiga pada dokumen kebijakan ini.
- (5) Untuk pengadaan sistem operasi dan aplikasi yang digunakan di personal *computer/notebook*, perangkat komunikasi data dan/atau suara untuk memenuhi kebutuhan unit kerja pelaksanaan pengadaannya harus selaras dengan pedoman pengelolaan barang dan jasa BKKBN.

C. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 13

Kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- (1) Memenuhi Standardisasi pelayanan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Dalam memenuhi Standardisasi pelayanan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (1) dilakukan melalui cara penerapan standar operasional prosedur

pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- (3) Pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wewenang dan tanggung jawab DITTEK.
- (4) Unit Kerja yang membutuhkan pelayanan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi wajib memenuhi persyaratan dengan mengajukan surat permohonan kepada DITTEK yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama dengan tembusan kepada Sekretaris Utama (SESTAMA) dan Deputi Bidang ADPIN BKKBN.
- (5) DITTEK melakukan pengkajian dan pengujian terhadap pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan layak atau tidak untuk dipenuhi pengadaannya.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat satu bulan sebelum Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran 1 dilaksanakan.
- (7) Contoh format surat permohonan pelayanan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 14

- (1) Pengguna layanan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi adalah Unit Kerja di lingkungan BKKBN.
- (2) Pengelolaan substansi sistem aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan oleh DITTEK berdasarkan pengajuan permohonan merupakan tanggung jawab unit kerja yang mengajukan pembangunan atau pengembangan aplikasi.

D. Pengembangan Teknologi Informasi

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan layanan TIK BKKBN secara menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh unit kerja, pengelola, dan pengguna meliputi:
 - a. Seluruh TIK BKKBN merupakan tanggung jawab Deputi Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - b. Semua pihak tidak diijinkan untuk meniru, mengubah, menambah atau melampirkan sesuatu kedalam TIK BKKBN tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung Jawab TIK BKKBN;

Pasal 16

- (1) Pengembangan teknologi informasi (TI) mencakup pengembangan dan pengadaan aplikasi dan infrastruktur TI yang dilakukan oleh DITTEK.
- (2) Pengembangan TI mengacu kepada rencana strategis Organisasi (*Corporate Plan*), Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI), dan rencana tahunan TI agar terjadi sinkronisasi pengembangan TI dengan arah rencana strategis Organisasi (*Corporate Plan*) melalui pengelolaan sistem informasi yang tepat.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan sistem aplikasi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meliputi:
 - a. Sistem aplikasi yang digunakan setiap unit Pejabat Tinggi Madya/Eselon I harus memenuhi karakteristik kebutuhan proses bisnisnya dengan mempertimbangkan fungsi kinerja dan biaya;
 - b. Pilihan untuk pemenuhan sistem aplikasi baik dalam bentuk paket maupun membangun sendiri didasarkan pada kelengkapan fungsi, kemudahan operasi, waktu dan biaya menjadi ekonomis, serta mutu aplikasi yang lebih baik;
- (2) Setiap sistem aplikasi yang dibangun minimal wajib memiliki Hak Akses sebagai *Administrator*.
- (3) Hak Akses sebagai *Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Administrator* Sistem; dan
 - b. *Administrator* Substansi.

Pasal 18

- (1) Setiap program aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan dan tidak dipergunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembangunan/pengembangan, maka DITTEK berhak melakukan de-aktifisasi (*idle system*).
- (2) De-aktifisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada Unit Kerja terkait.
- (3) Dalam hal De-aktifisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Unit Kerja ingin kembali mengaktifkan program aplikasi, perlu membuat surat pengajuan pengaktifan kembali program aplikasi dimaksud kepada DITTEK.
- (4) Dalam hal mengenai pelaksana pengelolaan sistem aplikasi, Kepala Badan menetapkan Unit Kerja selaku pengelola sistem aplikasi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

- (1) Aplikasi yang dikembangkan harus memenuhi standar teknis, prosedur serta metodologi pengembangan aplikasi baik menggunakan pendekatan SDLC *waterfall* ataupun *agile*.
- (2) Aplikasi yang dikembangkan harus mencakup kode program (*source code*), basis data, dan dokumentasi yang dijaga kekiniannya (*up to date*).
- (3) Pengelola aplikasi adalah DITTEK. Pengembangan dan pengadaan aplikasi oleh unit kerja lain di BKKBN selain DITTEK wajib berkoordinasi dengan DITTEK dalam proses perencanaan dan pengembangannya.
- (4) Dalam setiap usulan pengembangan sistem informasi informasi yang diminta oleh BPO (*Business Process Owner*) maka BPO tersebut harus mencantumkan kajian *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan *Cost Effectiveness Analysis* (CEA).
- (5) DITTEK harus melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap penggunaan sistem informasi serta progress pencapaian manfaat (benefit) TI yang diterapkan.
- (6) Aplikasi yang dikembangkan diwajibkan melalui tahapan SDLC yang diatur pada pasal (7) sampai dengan pasal (12)
- (7) Tahap Perancangan Aplikasi diatur sebagai berikut:
 - a. Mengesahkan rancangan aplikasi dan keamanan informasi aplikasi;
 - b. Memberi dukungan yang diperlukan pada setiap proses pengembangan aplikasi.
 - c. Menyusun rancangan solusi aplikasi yang sesuai dengan arsitektur TI dan standar teknis yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusunan Functional Specification Design (FSD) dan Scope of Works (SOW) berdasarkan Business Requirement Document (BRD).
 - e. Merancang pengamanan aplikasi yang disusun sesuai dengan standar pengamanan minimum BKKBN dan dijelaskan secara rinci di dalam dokumen spesifikasi.
 - f. Melaksanakan review bersama dengan Unit Kerja (User) terhadap rancangan sistem aplikasi tersebut (FSD dan SOW).
- (8) Tahap Pemrograman Sistem Aplikasi diatur sebagai berikut:
 - a. Mengelola pemrograman sistem aplikasi yang dikembangkan sendiri atau mengkoordinasikan pemrograman sistem aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga;
 - b. Mengelola kegiatan penyempurnaan, perbaikan, perubahan atau penambahan modul paket aplikasi bisnis dan aplikasi bisnis yang dikembangkan sendiri;
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dengan Tim DC & Network Center;

- d. Memonitor pengembangan aplikasi sesuai dengan modifikasi/perubahan dan/atau rancangan yang telah disetujui (*versioning*);
 - e. Membuat rencana uji coba sistem yang dikembangkan.
 - f. Mendokumentasikan Kronologis dari salinan program dengan menggunakan metode pengendalian versi.
 - g. Mendokumentasikan dan memelihara dokumentasi untuk setiap sistem aplikasi yang dikembangkan baik yang dikembangkan oleh pihak internal maupun pihak penyedia jasa.
 - h. Dokumentasi pemrograman harus mengikuti standar dokumentasi pengembangan;
- (9) Tahap Pengujian Sistem Aplikasi diatur sebagai berikut:
- a. Harus dilakukan rangkaian uji coba untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta hubungan sistem aplikasi tersebut dengan sistem aplikasi lain (*interoperability*) dengan yang telah digunakan oleh BKKBN.
 - b. Pada saat pengujian sistem informasi menggunakan data operasional (*real data*), informasi yang bersifat rahasia harus disamarkan (*masked*).
 - c. Fasilitas pengujian harus dipisahkan dari fasilitas operasional. Fasilitas pengembangan, pengujian dan operasional harus dipisahkan untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadinya pengaksesan atau perubahan yang tidak sah pada sistem operasional.
 - d. Segala koreksi dan modifikasi yang dilakukan selama tahap uji coba harus terdokumentasikan.
 - e. Dokumen pedoman, rencana implementasi dan pelatihan harus disiapkan.
 - f. Menjalankan proses *System Integration Testing* (SIT) dan melakukan *Stress Testing* baik pada sistem aplikasi baru maupun yang mengalami proses perubahan.
 - g. Dalam kaitannya dengan pengembangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, uji coba yang dilakukan oleh internal BKKBN adalah *Stress Testing* dan *User Acceptance Test* (UAT).
 - h. Pengembangan Aplikasi wajib menyusun *Script User Acceptance Test* (UAT) dan melakukan *User Acceptance Test* (UAT).
 - i. Menyusun Berita Acara UAT yang telah disetujui oleh pengguna.
 - j. Fungsi *Quality Assurance* bertanggung jawab mendefinisikan standar penjaminan mutu dalam pengujian sistem untuk menjamin siklus daur hidup layanan TI (SDLC) yang berkualitas dan memberikan rekomendasi jaminan kualitas dari Teknologi Informasi secara independen;
 - k. Fungsi Pengembangan Aplikasi melakukan verifikasi terhadap Berita Acara UAT.

(10) Tahap Implementasi Sistem diatur sebagai berikut:

- a. Persetujuan IT *Quality Assurance* harus dilakukan sebelum proses migrasi pembuatan dan/atau perubahan sistem ke lingkungan produksi dilakukan;
- b. IT *Quality Assurance* menetapkan paket aplikasi yang akan diimplementasikan dan langkah-langkah implementasi;
- c. Implementasi hanya dapat dilakukan oleh Fungsi Operasi;
- d. Jadwal implementasi harus disiapkan terlebih dahulu dan diberitahukan kepada pihak terkait.
- e. Tahap implementasi harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan.
- f. Sistem aplikasi yang diinstal ke lingkungan produksi harus merupakan sistem aplikasi yang telah disetujui.
- g. Harus dilakukan pengecekan keamanan data hasil migrasi pada sistem baru.
- h. Harus dilakukan pengecekan integritas program terhadap *Source Code* yang dikonversikan ke *object code* yang akan diimplementasikan.
- i. Laporan Hasil Implementasi dan Berita Acara Implementasi dibuat oleh IT *Quality Assurance* baik implementasi yang dilakukan berhasil ataupun tidak.
- j. Laporan Hasil Implementasi dan Berita Acara Implementasi akan dilaporkan kepada Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi serta kerjasama teknologi Informasi

(11) Tahap *Post-Implementation Review* diatur sebagai berikut:

- a. Tahap *Post-Implementation Review* harus dilakukan untuk memastikan keefektifan sistem aplikasi;
- b. *Post-Implementation Review* dilakukan oleh IT *Quality Assurance*, Fungsi Pengembangan Aplikasi dan disampaikan kepada Unit Kerja terkait;
- c. Tahap Pemeliharaan Sistem Aplikasi;
- d. Pemeliharaan sistem aplikasi dilakukan secara periodik oleh Fungsi Operasi;
- e. Laporan pemeliharaan aplikasi harus di *review* dan disetujui oleh DITTEK
- f. Setiap aktivitas pengembangan dan/atau perubahan harus memiliki jejak audit (*audit trail*).

(12) Tahap Pelatihan Sistem Aplikasi Baru

- a. Pelatihan dilakukan berdasarkan *User Manual* yang disusun oleh Fungsi Pengembangan Aplikasi.
- b. Fungsi Pengembangan Aplikasi mendampingi *User* selama pelatihan penggunaan sistem aplikasi.
- c. Unit Kerja, Pengelola TIK, dan Pengguna tidak diperkenankan menyalahgunakan, melakukan plagiat sistem teknik atau pemrograman, jaringan atau sumber dari internet, dengan akses tertentu dan/atau

menjalankan suatu sistem tanpa ijin tertulis dari BKKBN;

E. Instalasi dan Pengujian Aplikasi

Pasal 20

- (1) Rencana instalasi dan pengujian aplikasi harus dipersiapkan, dievaluasi, dan ditetapkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi TIK
- (2) Rencana instalasi mencakup penyiapan lokasi, akuisisi, instalasi perangkat, pelatihan pengguna, instalasi sistem operasi, implementasi dari prosedur operasi, dan konversi elemen penting seperti *hardware*, *software*, data transaksi, *master file*, *back up & archive*, *interface* dengan sistem lain, dan prosedur serta dokumentasi sistem dari sistem lama ke sistem baru.
- (3) Rencana pengujian disiapkan mencakup unit *test*, *system test*, *integration test*, *user acceptance test*, *load test*, *stress test*, *interface test*, dan *security test*.
- (4) Pengelola aplikasi harus memiliki rencana implementasi aplikasi beserta rencana *fallback/backout* yang mendapat persetujuan pihak yang terkait dengan aplikasi.
- (5) Uji terima (*acceptance test*) sistem informasi baru atau modifikasi harus dievaluasi dan mendapat persetujuan unit Pengguna dan/atau Unit Pengelola TIK. Data hasil pengujian harus disimpan untuk keperluan *audit trail* dan pengujian di masa mendatang.
- (6) Pengalihan status teknologi informasi mulai dari pengembangan, pengujian, hingga operasi diatur dalam suatu prosedur formal yang disusun oleh Unit Pengelola TIK.
- (7) Tim penguji yang dibentuk berkewajiban untuk melaksanakan pengujian sesuai dengan dokumen rencana pengujian dan menyusun dokumen laporan hasil pengujian.

F. Manajemen Perubahan TI

Pasal 21

- (1) Manajemen perubahan menetapkan prosedur pengendalian perubahan secara detail yang memuat prosedur otorisasi, uji coba, dokumentasi, implementasi dan sosialisasi atas modifikasi teknologi.
- (2) Perubahan atas TI dapat berupa perubahan atas perangkat lunak (*software*) ataupun perangkat keras (*hardware*).
- (3) Perubahan *software* dibutuhkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memperbaiki permasalahan *software* dan kelemahan keamanan atau implementasi teknologi baru.
- (4) Perubahan *hardware* dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang lama atau tidak berfungsi atau bahkan untuk meningkatkan kinerja atau kapasitas penyimpanan.

- (5) Setiap perubahan *software* ataupun *hardware* harus melalui proses manajemen perubahan yang terpusat dan dikelola oleh DITTEK dan sesuai dengan prosedur manajemen perubahan yang berlaku.
- (6) Khusus untuk perubahan darurat, Unit Pengelola TIK dapat menggunakan proses khusus untuk mendefinisikan, mengevaluasi, dan melaksanakan perubahan tanpa melalui proses pengelolaan perubahan standar. Dokumentasi dan pengujian atas perubahan tetap dilakukan setelah implementasi.
- (7) Perubahan yang diklasifikasikan sebagai perubahan darurat adalah perubahan kebutuhan pada saat kondisi BKKBN dalam situasi *force major* atau dalam situasi dimana perubahan teknologi informasi dibutuhkan akibat keadaan yang memberikan *business impact* negatif yang membahayakan kelangsungan bisnis yang berjalan
- (8) Unit Sistem Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan prosedur formal untuk mengelola *release* sistem aplikasi yang mencakup *sign-off*, *packaging*, distribusi, pengalihan, status *tracking*, prosedur *backout*, dan notifikasi kepada Pengguna.
- (9) Proses *retirement* sistem aplikasi harus dibuat dan dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi dalam rangka persiapan sistem pengarsipan data, migrasi dan pemindahan data ke sistem baru, dan penghentian operasi sistem aplikasi dan infrastruktur penunjangnya
- (10) Adapun Indikator kinerja yang ditetapkan untuk manajemen perubahan TI antara lain:
 - a. Persentase dari perubahan TI yang berhasil.
 - b. Persentase permintaan perubahan TI yang melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan.

G. Manajemen Aset TI

Pasal 22

Kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- (1) Memastikan standarisasi perangkat keras;
- (2) Dalam memenuhi standarisasi perangkat keras sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 wajib memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi.

- (3) Kesesuaian kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi meliputi:
- (4) Unit Kerja dan Pengguna tidak diperkenankan memanfaatkan sistem atau peralatan TIK BKKBN untuk kepentingan pribadi yang bersifat komersial ataupun non-komersial; dan
- (5) Dalam memenuhi standardisasi perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c wajib memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi.
- (6) Kesesuaian kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi meliputi:
 - 1) Spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh setiap Unit Kerja dan Pengguna wajib mengacu pada Pedoman Standardisasi Perangkat TIK;
 - 2) -DITTEK bertanggung jawab melakukan pengaturan perangkat keras;
 - 3) Unit Kerja dan Pengguna tidak diperkenankan melakukan perubahan pengaturan pada perangkat keras -nya masing masing;
 - 4) -DITTEK melakukan pembatasan akses layanan TIK BKKBN kepada Unit Kerja dan Pengguna Internal sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
 - 5) Perangkat lunak (software) yang digunakan pada perangkat keras harus legal dan/atau berlisensi;

- 6) Keamanan data dalam perangkat keras menjadi tanggung jawab setiap Unit Kerja maupun Pengguna Internal;
 - 7) Setiap perangkat keras yang merupakan inventaris Barang Milik Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wajib menerapkan sistem join domain; dan
 - 8) Penggunaan perangkat keras diluar standardisasi tidak akan mendapatkan dukungan kebijakan maupun teknis apabila terjadi kendala dalam pengoperasiannya
- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman standardisasi perangkat TIK BKKBN diatur dengan Surat Edaran.

Pasal 23

- (1) Dalam menjamin legalitas perangkat lunak yang digunakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui cara:
- a. Perangkat Lunak Sistem Operasi yang resmi dipakai oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah Sistem Operasi yang mendukung
 - b. Single Sign On, dan harus merujuk kepada Infrastruktur sistem teknologi informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - c. Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi ditetapkan oleh ;
 - d. Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Aplikasi Perkantoran yang dibutuhkan dan/atau disediakan oleh Unit Kerja dan Pengguna Internal wajib merujuk kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh ; dan
 - e. Pemakaian perangkat lunak di luar ketentuan yang telah ditetapkan, tidak mendapat dukungan kebijakan maupun teknis apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.
 - f. Pemakaian perangkat lunak di luar ketentuan yang telah ditetapkan, tidak mendapat dukungan kebijakan maupun teknis apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal X

- a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wajib menggunakan sistem dan aplikasi legal sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang ada pada:
 - (1) Server; dan
 - (2) Pengguna.
- c. Sistem dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat proprietary dan/atau non proprietary (open source).

H. Manajemen Konfigurasi TI

Pasal 24

- (1) DITTEK menggunakan repositori untuk konfigurasi seluruh aset TI secara terpusat dan komprehensif.
- (2) Aset TI yang dimaksud dapat mencakup antara lain perangkat keras, perangkat lunak, SDM TI, lisensi, dan lain-lain.
- (3) DITTEK memastikan pencatatan setiap perubahan konfigurasi dari setiap aset TI tersebut.
- (4) Manajemen konfigurasi TI yang dimaksud mencakup:
 - (1) Identifikasi dan pencatatan konfigurasi aset TI
 - (2) Pengelolaan repositori konfigurasi
 - (3) Pencatatan status konfigurasi terkini
 - (4) Memverifikasi dan meninjau ulang integritas repositori konfigurasi.
- (5) Keluaran dari proses manajemen konfigurasi TI lembaga antara lain :
 - a. Repositori Konfigurasi
 - b. Status Laporan Konfigurasi
- (6) Indikator Kinerja untuk manajemen konfigurasi TI antara lain mencakup jumlah item konfigurasi (CI) yang tercantum dalam repositori, frekuensi perubahan/pengkinian data repositori konfigurasi aset TI

I. Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI

Pasal 25

- a. DITTEK melakukan perencanaan infrastruktur TI dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan layanan TI, skalabilitas, dan kehandalan dari sumber daya TI.
- b. DITTEK mengidentifikasi bandwidth, kapasitas dan ketersediaan layanan, menyusun kesepakatan tingkat layanan (Service Level Agreement/SLA), dan menerapkan pemantauan berkelanjutan atas perangkat-perangkat TI yang mendukung terselenggaranya layanan TI kepada pengguna.
- c. Untuk itu, DITTEK melakukan manajemen ketersediaan layanan dan kapasitas sumber daya TI yang mencakup:
 - (1) Penilaian ketersediaan layanan, kinerja, dan kapasitas sumber daya TI saat ini
 - (2) Melakukan analisis dampak bisnis (business impact analysis/BIA) untuk mengetahui kritikalitas dari sistem/layanan TI.
 - (3) Merencanakan persyaratan dari layanan baru atau dari perubahan layanan TI.
 - (4) Memantau dan meninjau ketersediaan dan kapasitas infrastruktur TI.
 - (5) Menangani permasalahan ketersediaan layanan, kinerja, dan kapasitas sumber daya TI.
- d. Keluaran dari Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI antara lain:
 - a. Laporan kondisi saat ini (existing) ketersediaan, kinerja, dan kapasitas infrastruktur TI
 - b. Penilaian dampak ketersediaan, kinerja, dan kapasitas bisnis
 - c. Laporan hasil pemantauan ketersediaan, kinerja, dan kapasitas
 - e. Manajemen kapasitas infrastruktur TI mencakup perencanaan kapasitas diatur dalam Pedoman Infrastruktur TI yang mencakup:
 - a. Perencanaan kapasitas TI (dalam rangka rencana peningkatan kapasitas infrastruktur TI)
 - b. Monitoring dan evaluasi kapasitas TI
 - f. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Manajemen Ketersediaan dan Kapasitas TI adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase ketersediaan layanan TI

- b. Persentase pemakaian sumber daya TI

BAB VI

KEBIJAKAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI

A. Manajemen Operasional Teknologi Informasi

Pasal 26

Kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:

- (1) menerapkan backup system melalui Disaster Recovery Centre dan Collocation untuk menjamin keberlangsungan operasional pelayanan TIK; dan
- (2) Unit Kerja, Pengelola TIK, dan Pengguna tidak diperkenankan memasang atau menggunakan aplikasi hasil modifikasi atau buatan sendiri pada peralatan dan TIK BKKBN;

B. Manajemen Infrastruktur

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Jaringan merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan kinerja yang optimal dalam berkomunikasi dan mentransmisikan informasi antar komputer atau peralatan yang terhubung dengan jaringan
- (1) Layanan pengelolaan jaringan terdiri atas:
 - (1) Local Area Network (LAN); dan
 - (2) Wireless Fidelity (Wi-Fi).
- (2) Pengguna jaringan terdiri atas:
 - a. Pengguna internal; dan
 - b. Pengguna eksternal

Pasal 28

- a. Ketentuan pengelolaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 19 ayat (1)~~ Pasal X ayat (1) meliputi:
 - a. Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dapat mengakses koneksi internet menggunakan LAN dan Wi-Fi dalam mendukung pekerjaan perkantoran.
 - b. Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 19~~ Pasal X ayat (3) huruf b dapat mengakses koneksi internet melalui Wi-Fi dengan menggunakan username dan password sesuai prosedur yang telah ditetapkan selaku penyedia perangkat TIK.

Pasal 29

- (1) Unit Kerja dapat mengajukan permintaan atas penyediaan fasilitas Wi-Fi dan penyebaran sinyal Wi-Fi khusus di Unit Kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Pengajuan permintaan atas penyediaan fasilitas Wi-Fi dan penyebaran sinyal Wi-Fi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permintaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Tinggi Pratama yang bersangkutan dan disetujui oleh -DITTEK selaku penyedia perangkat TIK.

- (3) Unit Kerja tidak diperkenankan memasang fasilitas Wi-Fi dari pihak luar dan pengaturan/konfigurasi perangkat access point tanpa persetujuan DITTEK.
- (4) Permintaan Internet Protocol (IP) Address atau perubahan IP oleh Perwakilan BKKBN Provinsi wajib melakukan permintaan secara tertulis dan wajib menyertakan kronologis/alasan perubahan IP tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan ditujukan kepada ~~Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi~~ u.p. Direktorat Teknologi Informasi Dan Data (DITTEK) Kasubdit Infrastruktur Teknologi Informasi.
- (5) Permintaan Internet Protocol (IP) Address atau perubahan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 30

- a. Pengelolaan server merupakan kegiatan yang dilakukan agar server dapat bekerja seefisien mungkin tanpa ada masalah yang memungkinkan terjadinya server gagal berfungsi (down) atau terganggu kinerjanya.
- b. Ketentuan Pengelolaan Server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (1) Unit kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilarang melakukan pengadaan server;
 - (2) pengadaan perangkat server yang dilakukan secara mandiri oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi wajib mengikuti standardisasi TIK BKKBN yang telah ditetapkan; dan
 - (3) DITTEK melalui Sub Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi wajib membuat laporan monitoring Pengelolaan Perangkat Server BKKBN secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kondisi server

C. Manajemen Pengelolaan Data Center

Pasal 31

- a. Pengelolaan data center merupakan pengelolaan repository terpusat baik fisik maupun virtual untuk penyimpanan manajemen dan penyebaran data dan informasi.

- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data center diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 32

c. Ketentuan pengelolaan bank data di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, meliputi:

- (1) Bank data yang disimpan dalam Data Warehouse, sepenuhnya milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- (2) Pihak yang ingin menggunakan data, harus mengajukan permohonan dan mendapatkan izin dari Direktorat Pelaporan dan Statistik; dan
- (3) Pengajuan penggunaan data harus dilaksanakan secara bersinergi dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/KEP/G5/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan sistem pendukung keputusan (Decision Support System/DSS) dalam bentuk data warehouse, on line analytical processing (OLAP) dan Business Intelligence (BI) dilaksanakan oleh DITTEK.
- (2) Dalam mendukung pengelolaan (Decision Support System/DSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Unit Kerja wajib memberikan akses data kepada DITTEK.
- (3) DITTEK menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan aplikasi untuk menyelenggarakan pengelolaan Database yang dimiliki oleh setiap Unit Kerja.
- (4) DITTEK melakukan pengelolaan seluruh Database untuk kepentingan Extract, Transform dan Load (ETL) yang dimiliki oleh setiap Unit Kerja dan menyimpannya ke dalam Data Warehouse.
- (5) Seluruh media komunikasi elektronik, penyimpanan data maupun akses yang dihasilkan atau disimpan di peralatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ditempat kerja atau merupakan materi pekerjaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dianggap bukan sebagai milik pribadi pegawai, namun sebagai hak milik penuh dan eksklusif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- (6) Unit Kerja dan Pengguna tidak diperkenankan menyimpan file-file yang tidak berhubungan dengan pekerjaan ke dalam Storage Server Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan file-file tersebut akan dihapus sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu;

D. Manajemen Perjanjian Layanan TI

Pasal 34

- a. DITTEK bertanggung jawab untuk menyusun IT Service Management System (IT-SMS) yang standar, formal dan berkelanjutan dengan mengacu kepada model referensi proses yang relevan seperti seri ISO 20000.
- b. Berdasarkan perencanaan tahunan TI ataupun permintaan layanan TI, DITTEK perlu mengidentifikasi layanan TI baru ataupun perubahan, lalu menyusun Service Level Requirement (SLR), Operational Level Agreement (OLA) dan Service Level Target (SLT) sebagai referensi Service Level Agreement (SLA).
- c. DITTEK bertanggung jawab untuk menyusun katalog layanan serta menyepakati tingkat layanan dari pihak DITTEK terhadap pengguna internal maupun eksternal yang dituangkan dalam dokumen SLA berdasarkan kebutuhan pengguna dan kemampuan yang ada.
- d. SLA sebaiknya mencakup hal-hal berikut ini seperti komitmen, persyaratan dukungan layanan, parameter untuk mengukur kinerja layanan, peran dan tanggung jawab, ketersediaan, kehandalan, kinerja, kapasitas layanan, perubahan kebutuhan, tingkat dukungan, continuity planning, keamanan dan pembatasan kebutuhan.
- e. Pemenuhan SLA akan berkaitan dengan proses manajemen pihak ketiga, implementasi layanan melalui manajemen proyek maupun manajemen kapasitas dan ketersediaan TI.
- f. DITTEK bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada pengguna atas pencapaian tingkat layanan untuk memastikan kesesuaian antara layanan TI dan kebutuhan bisnis berdasarkan hasil monitoring.
- g. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk memperoleh nilai tolak ukur pengukuran kinerja yang menjadi Key Performance Indikator (KPI)

DITTEK sebagai pemberi layanan terkait dalam perjanjian tingkat layanan.

E. Manajemen Permintaan Layanan dan Insiden TI

Pasal 35

- a. DITTEK perlu memiliki Fungsi Service Desk dan Technical Support sebagai single point of contact yang bertugas untuk mencatat, melaksanakan komunikasi, disposisi dan eskalasi, menganalisis pelaporan keluhan, insiden, permintaan layanan TI atau perubahan layanan TI dari Pengguna, serta melaksanakan konfirmasi penutupan status jika sudah diselesaikan.
- b. Fungsi Service Desk dan Technical Support perlu melaksanakan identifikasi kebutuhan layanan TI saat ini dan ke depan, serta perubahan yang perlu dilakukan:
 - (1) Service request dari Pengguna untuk permintaan layanan TI yang ada saat ini maupun permintaan usulan layanan TI baru;
 - (2) Change Request (CR)/Request for Change (RFC) dari Pengguna dan/ atau internal DITTEK untuk perubahan layanan TI;
 - (3) Laporan keluhan ataupun insiden TI dari Pengguna ataupun notifikasi sistem monitoring TI, untuk dilakukan tindak lanjut.
- c. Pimpinan dan Fungsi TI lainnya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti disposisi dan eskalasi dari Service Desk sesuai dengan klasifikasi jenis permintaan layanan maupun insiden, baik itu eskalasi struktural maupun fungsional.
- d. DITTEK perlu menggunakan catatan di Service Desk sebagai salah satu komponen untuk mengukur kinerja layanan TI dan menjadi feedback untuk peningkatan layanan TI secara berkelanjutan.
- e. Divisi Sisfo bertanggung jawab untuk segera memulihkan layanan TI yang terganggu oleh terjadinya insiden.

F. Manajemen permasalahan TI

Pasal 36

- a. Manajemen permasalahan (problem management) bertujuan untuk menemukan akar penyebab (root cause) dari insiden TI sehingga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

b. Manajemen Permasalahan yang dimaksud mencakup kegiatan sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan TI
- (2) Menyelidiki dan mendiagnosis permasalahan TI
- (3) Menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah
- (4) Menyelesaikan permasalahan dengan menangani akar penyebabnya.
- (5) Memperbaharui data KEDB (Known Error Database).

c. Keluaran dari proses Manajemen Permasalahan antara lain:

- a. Kriteria untuk registrasi permasalahan TI
- b. Daftar masalah
- c. Matriks hubungan masalah dan insiden TI
- d. KEDB yang berisi informasi: masalah, workaround, dan known error.
- d. Indikator kinerja untuk manajemen permasalahan TI antara lain mencakup:
 - a. Jumlah permasalahan TI yang diidentifikasi dan diselesaikan.
 - b. Persentase jumlah Known Error yang dihasilkan dibandingkan dengan masalah yang teridentifikasi
 - c. Frekuensi peninjauan ulang KEDB.
 - e. Manajemen permasalahan TI diatur lebih lanjut pada Pedoman Penanganan Keluhan Teknologi Informasi yang merupakan lampiran dari Kebijakan Tata Kelola TI ini.

G. Keberlangsungan Layanan TI

Pasal 37

- a. BKKBN berkomitmen untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memitigasi, memantau, dan melaporkan risiko keberlangsungan lembaga guna memastikan kelangsungan operasi organisasi saat timbulnya insiden disruptif terhadap organisasi serta guna meneruskan tanggung jawab keuangan dan layanan kepada pemangku kepentingan
- b. Pimpinan bertanggung jawab terhadap manajemen keberlangsungan lembaga dengan:

- (1) Menerapkan rencana untuk memastikan keberlangsungan aktivitas kritis
- (2) Mempertimbangkan isu dan persyaratan internal dan eksternal dalam penyusunan rencana keberlangsungan usaha/layanan lembaga
- (3) Menguji rencana keberlangsungan keberlangsungan usaha/layanan lembaga
- (4) Melatih SDM dalam mengoprasikan rencana keberlangsungan usaha/layanan lembaga
- (5) Menetapkan struktur tata kelola yang sesuai dengan rencana keberlangsungan usaha/layanan lembaga
 - c. DITTEK memastikan keberlangsungan layanan TI sebagai bagian integral dari manajemen keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management/BCM) dari BKKBN.
 - d. Manajemen keberlangsungan usaha lebih lanjut diatur pada Pedoman Business Continuity Management yang merupakan lampiran dari Kebijakan tata kelola Teknologi Informasi ini.
 - e. Pengelolaan DRP diatur dalam Pedoman IT Disaster Recovery Plan yang merupakan lampiran dari Kebijakan tata kelola Teknologi Informasi ini yang mencakup:
 - a. Tugas & Tanggung Jawab Tim Disaster Recovery
 - b. Hierarki Panggilan Disaster Recovery
 - c. Fasilitas Recovery
 - d. Komunikasi Ketika Terjadi Bencana
 - e. Menghadapi Bencana
 - f. Mengembalikan Fungsi IT
 - g. Arsitektur Sistem Eksisting
 - h. Rencana Pengujian dan Pemeliharaan
 - f. Keberlangsungan layanan TI dicapai melalui penyusunan dokumen DRP dan penyediaan fasilitas Disaster Recovery Center (DRC).
 - g. Dokumen DRP merupakan rencana yang dipersiapkan untuk mengelola risiko bencana/gangguan yang bersifat signifikan dampaknya bagi operasional BKKBN yang mungkin terjadi terhadap layanan TI yang diberikan.

- h. Kaji ulang, pengujian, dan pengkinian DRP dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kesiapan Organisasi dan kecukupan rencana dalam menghadapi berbagai skenario risiko bencana.
- i. Pengujian DRP dilakukan oleh DITTEK dengan melibatkan unit-unit bisnis terkait atau dapat melibatkan tenaga ahli TI independen di luar Organisasi dengan memperhatikan keamanan informasi dan operasional Organisasi.
- j. Pengujian DRP dilakukan terhadap seluruh aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak bisnis (business impact analysis) dan melibatkan pengguna layanan TI Organisasi.
- k. Tim DRP wajib dibentuk dengan mencakup perwakilan semua komponen pendukung keberlangsungan TI. Tim DRP melakukan pelatihan secara berkala untuk memastikan kesiapan pada saat kondisi darurat/bencana terjadi.
- l. Penyusunan DRP mencakup tahapan analisis dampak bisnis (BIA), penentuan kriteria bencana, rencana eskalasi, rencana pemulihan, pelatihan dan pengujian.
- m. Manajemen Keberlangsungan Layanan yang dimaksud mencakup:
 - a. Penentuan tujuan dan ruang lingkup kelangsungan layanan.
 - b. Penyusunan dan pengujian DRP
 - c. Review dan pengkinian DRP
 - d. Pelatihan eksekusi DRP.
- n. Keluaran dari manajemen keberlangsungan layanan antara lain:
 - a. Dokumen BIA
 - b. Dokumen DRP
 - c. Hasil pengujian DRP dan rekomendasi perbaikannya
 - d. Laporan pelaksanaan pelatihan DRP.
- o. Indikator Kinerja manajemen keberlangsungan layanan adalah sebagai berikut:
 - a. Total downtime yang disebabkan oleh insiden besar atau gangguan

- b. Frekuensi pengujian DRP
- c. Persentase pemulihan yang berhasil dan tepat waktu
- d. Persentase jumlah aplikasi dan data kritikal yang dibackup

H. Manajemen Akses Internet

Pasal 38

- (1) Pengelolaan akses internet merupakan kegiatan yang dilakukan oleh admin dalam memberikan hak akses pada pengguna internet

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengelolaan akses internet di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 22~~ Pasal X meliputi:
 - (1) Layanan akses internet diberikan kepada Unit Kerja dan Pengguna baik internal maupun eksternal yang dipergunakan untuk penunjang pekerjaan perkantoran secara bijaksana.
 - (2) -DITTEK berhak melakukan pembatasan akses internet untuk kepentingan bersama.

Pasal 40

- (1) Pengguna layanan akses internet dilarang:
 - a. Melakukan akses terhadap situs-situs terlarang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO);
 - b. Bermain game online; dan
 - c. Melakukan transaksi keuangan ilegal

I. Manajemen Surel

Pasal 41

- a. Pengelolaan Surel merupakan kegiatan yang dilakukan oleh admin untuk mengelola surel Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pengelolaan surel di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - (1) Surel Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menggunakan domain @bkkbn.go.id dengan format nama_awal.nama_akhir@bkkbn.go.id;
 - (2) DITTEK memfasilitasi penggunaan layanan Surel Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan perangkat ponsel pintar (smartphone) melalui Sub Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - (3) Pemanfaatan layanan Surel Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdiri atas Public Folder diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh Unit Kerja dalam penyebarluasan informasi strategis yang dimiliki oleh Unit Kerja tersebut;
 - (4) Public Folder dapat diakses dengan menggunakan user account Unit Kerja yang telah ditentukan oleh DITTEK;
 - (5) Unit Kerja berkewajiban mengelola isi dari Public Folder tersebut seperti menghapus informasi yang sudah lama, memasukkan informasi baru, dan menyimpan informasi tersebut ke dalam arsip;
 - (6) DITTEK dapat melakukan intervensi secara langsung terhadap Public Folder yang penggunaannya tidak dikelola dengan baik;
 - (7) Alamat Surel merupakan identitas resmi dan melekat kepada setiap Unit Kerja atau Pengguna sebagai media komunikasi formal BKKBN;
 - (8) Unit Kerja dan Pengguna wajib menjaga kerahasiaan User ID dan Password, untuk menghindari penyalahgunaan surel dari pihak yang tidak bertanggungjawab;
 - (9) Pengguna tidak diperkenankan menggunakan akun surel BKKBN untuk keperluan pribadi selain pekerjaan kantor;
 - (10) Besar kuota yang diperoleh setiap Unit Kerja dan Pengguna adalah 2 GB;

- (11) Untuk keperluan tertentu dan mendesak, besaran kuota dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengajukan surat penambahan kuota kepada DITTEK;
- (12) Unit Kerja dan Pengguna tidak diperkenankan untuk membuka, mengirim, menerima, mendistribusikan, mencetak atau menyimpan dokumen dalam bentuk apapun, elektronik atau hardcopy yang mengandung pemahaman seksual dan unsur SARA, yang dapat memberikan penilaian yang kurang baik terhadap BKKBN; dan
- (13) Besar kapasitas untuk mengirim lampiran pada surel sebesar 20 MB

BAB VII KEBIJAKAN PENGAMANAN INFORMASI

A. Konteks Organisasi

Pasal 43

- (1) Organisasi mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang berpengaruh pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- (2) Organisasi menentukan pihak yang berkepentingan dalam implementasi Sistem Keamanan Informasi serta mengidentifikasi kebutuhan pihak-pihak tersebut;
- (3) Organisasi menentukan ruang lingkup Sistem Keamanan Informasi dengan mempertimbangkan :
 - (1) Isu internal dan eksternal;
 - (2) Kebutuhan pihak yang berkepentingan; dan
 - (3) Interface dan ketergantungan proses bisnis.
- (4) Penentuan ruang lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan bersama dengan pihak yang berkepentingan dan termasuk Manajemen Organisasi.

B. Komitmen Manajemen

Pasal 45

Manajemen berkomitmen terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam bentuk, namun tidak terbatas pada.

- a. Memastikan tujuan dan kebijakan SMKI yang selaras dengan arahan strategis Organisasi;

- b. Memastikan terjadinya integrasi antara SMKI dengan proses bisnis Organisasi;
- c. Memastikan ketersediaan sumber daya SMKI;
- d. Mengkomunikasikan pentingnya SMKI dan pemenuhan persyaratannya kepada stakeholder;
- e. Memberikan arahan dan dukungan kepada manajemen dan pelaksana SMKI; dan
- f. Memastikan tercapainya tujuan SMKI.

C. Perencanaan SMKI

Pasal 46

- (1) Manajemen Risiko Keamanan Informasi (MRKI)
 - (1) Proses Manajemen Risiko Keamanan Informasi perlu terintegrasi dan selaras dengan proses Enterprise Risk Management (ERM) BKKBN, termasuk penyesuaian kriteria penerimaan risiko;
 - (2) Manajemen bertanggungjawab terhadap proses manajemen risiko;
 - (3) Fungsi Manajemen Risiko melakukan assessment risiko keamanan informasi dengan mengidentifikasi setiap kemungkinan yang bisa terjadi, baik berupa ancaman, kerentanan beserta dampaknya jika risiko terjadi;
 - (4) Assessment risiko keamanan informasi perlu dilakukan secara rutin minimal setahun sekali atau jika ada perubahan proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil risiko yang ada saat ini;
 - (5) Fungsi Manajemen Risiko menindaklanjuti profil risiko keamanan informasi dengan menyusun Risk treatment Plan (RTP) keamanan informasi sesuai dengan kriteria penerimaan risiko yang berlaku; dan
 - (6) Profil risiko dan RTP keamanan informasi perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada stakeholder dalam berbagai kesempatan untuk meningkatkan awareness, buy-in dan ownership risiko, termasuk perlu menetapkan konsekuensi jika ada ketidakpatuhan.
- (2) Penyusunan Rencana Manajemen Keamanan Informasi (RMKI)
 - a. DITTEK menyusun Rencana Manajemen Keamanan Informasi (RMKI) yang disusun berdasarkan profil risiko keamanan informasi, RTP dan dilengkapi dengan deskripsi program dan proyek yang akan dilakukan,

business case yang memadai, sumber daya yang dibutuhkan, penanggung jawab, penjadwalan serta rencana kinerja dan evaluasinya; dan

- b. RMKI perlu direalisasikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran BKKBN pada fungsi TIK dan fungsi lainnya yang relevan.

D. Dukungan SMKI

Pasal 47

a. Manajemen Sumber Daya SMKI

- (1) Perwakilan manajemen BKKBN memberikan dukungan sumber daya yang memadai untuk keberjalanan SMKI, yang dinyatakan dalam bentuk persetujuan RKAP terkait dan realisasi pengadaannya; dan
- (2) Perwakilan manajemen BKKBN mengalokasikan SDM keamanan informasi yang memadai untuk keberjalanan SMKI, yang memenuhi aspek kuantitas maupun kualitas/kompetensi yang disyaratkan.

b. Manajemen Komunikasi dan Dokumentasi SMKI

- a. Perwakilan manajemen BKKBN menyusun Rencana Komunikasi Keamanan Informasi (RKKI) yang akan disampaikan kepada stakeholder yang berisi mengenai apa, kapan, siapa, dengan siapa, beserta penentuan proses bisnis apa yang akan terdampak; dan

- b. Dokumentasi SMKI perlu dikelola dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan prosedur keamanan informasi yang berlaku, yang memenuhi aspek ketersediaan, integritas, kerahasiaan dalam hal akses, distribusi, penyimpanan, perubahan/ kendali versi, retensi dan disposisi.

c. Ketentuan Pengendalian Dokumen

- a. Distribusi dokumen dikendalikan sesuai dengan klasifikasi keamanan informasi dokumen tersebut;

- b. Dokumen yang digunakan dipastikan merupakan dokumen yang terbaru;

- c. Kebijakan, prosedur, dan pedoman dipublikasikan secara terpusat melalui intranet BKKBN. Publikasi tersebut tersedia bagi pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing; dan

- d. Dokumen yang sudah tidak digunakan atau sudah digantikan oleh dokumen versi terbaru atau ditarik karena alasan tertentu maka ditandai sebagai dokumen kadaluarsa atau tidak digunakan sejak tanggal

tertentu.

E. Operasi SMKI

Pasal 48

- a. Semua Unit Kerja harus melaksanakan operasi keamanan informasi berdasarkan Rencana Manajemen Keamanan Informasi (RMKI) dan Risk treatment Plan (RTP) Keamanan Informasi yang telah disusun sebelumnya; dan
- b. Hasil pelaksanaan RMPI dan RTP perlu didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

F. Evaluasi Kinerja SMKI

Pasal 49

- (1) Perwakilan manajemen BKKBN melakukan evaluasi kinerja keamanan informasi dengan menentukan apa yang perlu dimonitor dan dievaluasi, metodenya, waktunya, siapa yang akan memonitor dan mengukur, siapa yang akan menganalisis dan mengevaluasinya;
- (2) Fungsi Inspektorat Organisasi secara mandiri maupun dengan dibantu oleh pihak ketiga yang independen harus melakukan audit SMKI sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan persyaratan SMKI telah dipenuhi dan terimplementasi serta terpelihara secara efektif;
- (3) Dalam pelaksanaan audit SMKI, fungsi Inspektorat perlu menyusun program audit, kriteria, ruang lingkup, pemilihan auditor, pelaksanaan, pendokumentasian serta pelaporan sesuai prosedur yang berlaku;
- (4) Perwakilan manajemen BKKBN melakukan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap implementasi SMKI secara rutin setiap 6 bulan sekali ataupun jika diperlukan; dan
- (5) Tinjauan Perwakilan manajemen BKKBN dilakukan dengan pertimbangan status Tinjauan Manajemen sebelumnya, perubahan, ketidaksesuaian, aksi korektif, evaluasi kinerja, hasil audit, feedback dari pihak terkait, hasil assessment risiko serta status risk treatment, serta untuk peningkatan kematangan SMKI BKKBN.

G. Peningkatan SMKI

Pasal 50

- (1) Jika terjadi pelanggaran terhadap SMKI, maka fungsi terkait perlu mengendalikannya, menemukan penyebabnya, melakukan aksi koreksi terhadapnya, mengevaluasi keefektifan solusinya serta mendokumentasikan hasilnya; dan
- (2) Perwakilan manajemen BKKBN mengkoordinasikan peningkatan berkelanjutan SMKI dengan meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMKI

H. Pengelolaan Hak Akses

Pasal 51

A. Pengelola sistem aplikasi terdiri atas:

- (1) Super Admin;
- (2) Admin;
- (3) Supervisor; dan
- (4) Operator.

B. Super Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

C. Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit kerja yang melakukan pengelolaan operasional sistem aplikasi.

D. Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unit kerja penanggung jawab pengelolaan operasional sistem aplikasi.

E. Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang yang bertugas menjaga, melayani dan menjalankan sistem aplikasi.

Pasal 52

- a. Dalam pengelolaanteknologi informasi dan komunikasi, pengelola sistem aplikasi mempunyai hak:
- b. Akses pengelolaan sistem sesuai kebutuhan;
- c. Mendapatkan bantuan teknis yang berkaitan dengan troubleshooting dan bug system;
- d. Mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi dan
- e. Mendapatkan perawatan dan pengembangan sistem sesuai kebutuhan

Pasal 53

Dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelola sistem aplikasi wajib:

- (1) Memanfaatkan sistem aplikasi yang sudah dibangun/ dikembangkan;
- (2) Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi;
- (3) Mengelola dan meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang meliputi penambahan data, perubahan data dan penghapusan data; dan
- (4) Melakukan pengelolaan user dan hak akses kepada para pengguna.

Pasal 54

Dalam penyebarluasan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga berbasis teknologi informasi, unit kerja selaku kontributor materi mempunyai hak:

- (1) Akses unggah informasi ke media elektronik yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Mendapatkan bantuan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan operasionalisasi media penyebarluasan informasi; dan
- (3) Mendapatkan petunjuk teknis dalam pengelolaan informasi.

Pasal 55

Dalam penyebarluasan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga berbasis teknologi informasi, unit Kerja selaku Kontributor Materi wajib:

- (1) Menyampaikan informasi kegiatan Unit Kerja yang sudah dilaksanakan kepada DITTEK, sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur pengumpulan informasi publik;
- (2) Mengklasifikasikan Informasi yang disampaikan yaitu yang bersifat publik (dapat disebarluaskan kepada masyarakat) dan yang dikecualikan (tidak dapat disebarluaskan) atas persetujuan pimpinan; dan
- (3) Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik (Situs, SMS Broadcast, SMS LBA, live streaming, BKKBN Channel, Jejaring Sosial, Digital library dan signage) dan perpustakaan secara konvensional.

BAB VIII

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

A. Manajemen Pengawasan Internal

Pasal 56

- a. Sistem pengendalian internal wajib dilaksanakan terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi.
- b. Sistem pengendalian internal terkait teknologi informasi tersebut meliputi:
 - (1) General control
 - (2) Application control
 - c. Pengawasan internal atas kontrol-kontrol TI tersebut di atas dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal.
 - d. Kegiatan pengawasan internal mencakup aktifitas sebagai berikut:
 - a. Pemantauan kendali internal
 - b. Review efektifitas kendali atas proses bisnis
 - c. Melaksanakan penilaian sendiri (self-assessment) atas kendali
 - d. Identifikasi dan pelaporan kekurangan-kekurangan kendali.
 - e. Fungsi Inspektorat menetapkan manajemen pengendalian internal dan menetapkan standar untuk desain dan operasi sistem kontrol internal lembaga dalam memitigasi semua risiko.
 - f. Fungsi Inspektorat memberikan panduan untuk terus memantau dan mengevaluasi kontrol lingkungan, termasuk self assessment.
 - g. Fungsi Inspektorat menetapkan pemantauan berkelanjutan dari pengendalian internal untuk mengidentifikasi kekurangan dan kesenjangan, menentukan akar penyebabnya, dan memulai rencana tindak lanjut dan tindakan korektif pelaporan kepada stakeholder.
 - h. Indikator Kinerja untuk pengendalian Internal adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah pelanggaran terhadap internal
 - b. Jumlah pelaksanaan self assessment atas kendali internal yang dilakukan per tahun.

B. Audit Teknologi Informasi

Pasal 57

- a. Implementasi Teknologi Informasi di BKKBN diawasi dan dievaluasi secara berkala melalui audit TI.
- b. Pelaksana audit TI harus bersifat independen terhadap objek auditnya.
- c. Audit TI dapat dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal. Audit TI secara internal dilakukan oleh Auditor Pusat dan Auditor Wilayah dari Bidang Pengawasan Internal.
- d. Audit TI antara lain mencakup audit terhadap Infrastruktur TI, aplikasi, dan keamanan informasi.
- e. Untuk keperluan audit internal TI maka Organisasi harus memastikan ketersediaan jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lain.
- f. Cakupan audit TI yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan risiko (risk-based audit).
- g. Organisasi harus memiliki pedoman audit internal atas penggunaan teknologi informasi.
- h. Audit TI dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Internal/Inspektorat dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Jika Fungsi Pengawasan Internal/Inspektorat memiliki keterbatasan kemampuan, pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh auditor eksternal.
- i. Indikator kinerja untuk audit teknologi informasi antara lain mencakup: frekuensi audit yang dilakukan dalam satu tahun dan jumlah temuan audit yang berulang.

C. Manajemen Kepatuhan TI

Pasal 58

- (1) Organisasi harus memastikan persyaratan regulasi dan aturan eksternal yang relevan dan berlaku atas Organisasi dipatuhi.
- (2) Fungsi Pengawasan Internal/Inspektorat mengidentifikasi persyaratan untuk kepatuhan atas regulasi, peraturan, dan kontrak yang berlaku.
- (3) Fungsi Pengawasan Internal/Inspektorat melakukan penyusunan pelaporan kepatuhan dan mengonfirmasi kepatuhan atau tindakan korektif untuk mengatasi remediasi kesenjangan kepatuhan secara tepat waktu.
- (4) Manajemen kepatuhan atas regulasi eksternal TI yang dimaksud mencakup:

- (1) Identifikasi persyaratan kepatuhan eksternal.
- (2) Pengoptimalan respon terhadap regulasi eksternal.
- (3) Konfirmasi hasil kepatuhan terhadap regulasi eksternal.
- (5) Proses manajemen kepatuhan TI menghasilkan keluaran sebagai berikut:
 - a. Log tindakan kepatuhan yang diperlukan
 - b. Registrasi persyaratan kepatuhan
 - c. Kebijakan, prinsip, prosedur, dan standar terbaru
 - d. Kesenjangan kepatuhan yang teridentifikasi
 - e. Laporan kepatuhan
- (6) Indikator Kinerja untuk proses kepatuhan TI antara lain frekuensi identifikasi persyaratan kepatuhan per tahun, persentase tindakan korektif yang dilakukan dibandingkan dengan kesenjangan kepatuhan yang ada.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 59

- a. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Perekaman, Pengolahan, Penyajian, Penyebarluasan dan Pendokumentasian Data dan Informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 60

- b. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 264/PER/B2/2014 tentang Pengelolaan dan Kebijakan Operasional Pemanfaatan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61


- c. Peraturan Kepala Badan ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

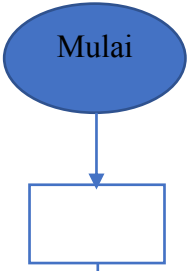
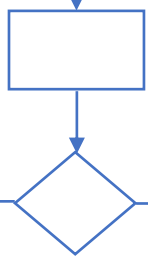

7.3 Lampiran Prosedur

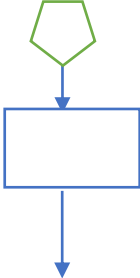
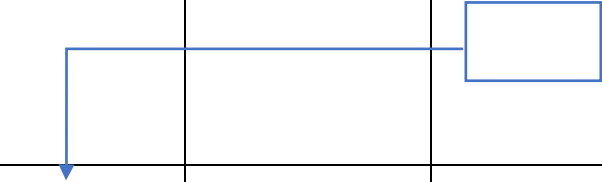
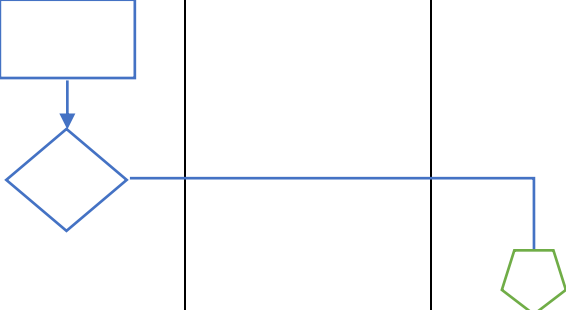
7.1.3 Lampiran Prosedur Manajemen Proyek TI

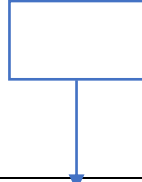

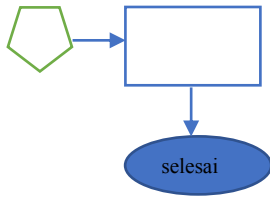
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	Nomor SOP :	
	Tanggal Pembuatan:	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	
	NAMA SOP : Manajemen Proyek TI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

1. DIAGRAM ALIR


No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Departemen terkait atau Direksi	Dirtek Informasi dan Data	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan penyusunan Draft Project Plan dan Project Charter						Draf Project Plan & Project Charter	
2	Melakukan review dan persetujuan project plan dan project charter						1. Lampiran 9.2.1 Project Charter 2. Lampiran 9.2.2 Project Plan	
3	Melakukan review dan menyetujui project plan.						1. Lampiran 9.2.1 Project Charter 2. Lampiran 9.2.2 Project Plan	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Departemen terkait atau Direksi	Dirtek Informasi dan Data	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Pelaksanaan konsultasi oleh pihak ketiga yang dikelola langsung oleh fungsi IT Plan						Dokumentasi Hasil Konsultasi	4
5	Menyampaikan progress pelaksanaan kegiatan konsultasi.							
6	Mereview dan memberikan masukan atas keberjalanan konsultasi oleh pihak ketiga.						Dokumentasi Review	6

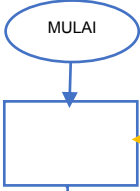




No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Departemen terkait atau Direksi	Dirtek Informasi dan Data	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan sosialisasi terhadap <i>deliverables</i> yang sudah ditetapkan.						Dokumentasi Sosialisasi	
8	Melakukan serah terima <i>deliverables</i> kepada pihak yang mengerjakan proyek.				Dokumentasi hasil konsultasi dan Sosialisasi		Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	
9	Melakukan penutupan proyek				Berita Acara Penyerahan Pekerjaan		Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	

7.1.4 Lampiran Perbaikan Prosedur Pengembangan Aplikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

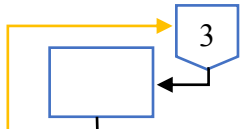
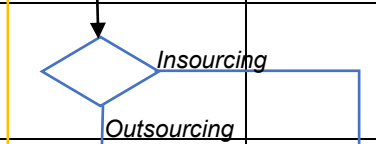
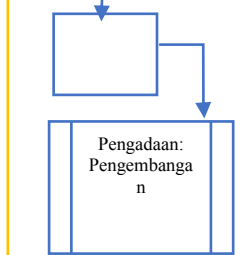
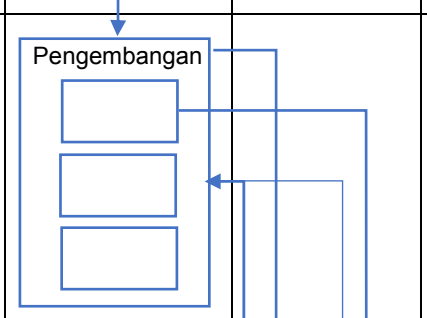
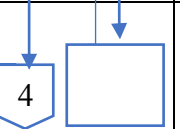
	Nomor SOP :	001/OT.04/F2/2020
	Tanggal Pembuatan:	November 2020
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	Plt. Dir Teknologi Informasi dan Data
	NAMA SOP : Pengembangan, akuisisi dan Implementasi Sistem Aplikasi	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

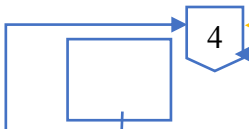
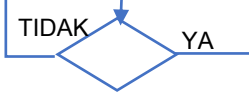

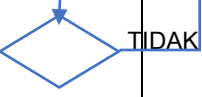
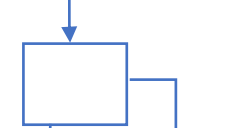
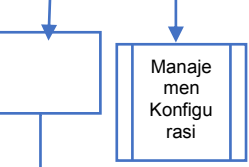
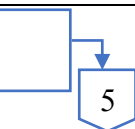
2. DIAGRAM ALIR

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menganalisis Kebutuhan Bisnis						<i>Project Planning</i>		<i>Business Requirement</i>	Ditindaklanjuti
2.	Memberikan masukan kebutuhan bisnis						<i>Business Requirement</i>		<i>Business Requirement</i>	Ditindaklanjuti
3.	Mengupdate kebutuhan bisnis dari Stakeholder						<i>Business Requirement</i>		<i>Business Requirement</i>	Ditindaklanjuti
4.	Mengajukan Persetujuan Kebutuhan bisnis						<i>Business Requirement</i>		<i>Requirement Traceability Matrix</i>	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5.	Kebutuhan Bisnis Disetujui						<i>Requirement Traceability Matrix</i>		<i>Requirement Traceability Matrix</i>	Jika disetujui manajemen, maka diteruskan ke Tim Pendamping/QA
6.	Review dan Rekomendasi									Ditindaklanjuti
7.	Pengembangan/ akuisisi?									Jika disetujui manajemen, maka dilakukan pengembangan/akuisisi
8.	Memilih Produk									Ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Manajer DITTIFDOK & User
9.	Menyetujui Produk									Disetujui Produk

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10.	Menyetujui Produk				2		Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Jika disetujui Business Owner maka diadakan akuisisi
11.	Mengirimkan Memo Pengadaan: Akuisisi						Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Ditindaklanjuti
12.	Menentukan Desain konfigurasi software aplikasi & Melakukan Konfigurasi software aplikasi						Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Ditindaklanjuti
13.	Menyetujui Desain Konfigurasi				3		Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Jika disetujui Business Owner maka dilakukan review

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
14.	Pembentukan Tim Pelaksana/ Counterpart						Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Ditindaklanjuti
15.	Insourcing/Outsourcing?						Requirement Traceability Matrix		Requirement Traceability Matrix	Memutuskan insourcing/outsourcing
16.	Mengirimkan Memo Pengadaan: Pengembangan						Requirement Traceability Matrix		Software Requirement System	Proses/aktivitas Outsourcing
17.	Menganalisis Kebutuhan Sistem, Mendesain sistem & Membuat Program						Software Requirement System		Software Requirement System	Proses/aktivitas insourcing
18.	Menyetujui Kebutuhan sistem						Software Requirement System		Software Requirement System	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
19.	Melakukan Sistem Tes						Software Mockup		Software Mockup	Ditindaklanjuti
20.	Apakah Memadai sistem tes?						Software Mockup		Software Mockup	Jika memadai, maka akan dilakukan UAT
21.	Melakukan UAT						Software Mockup		Software Mockup	Ditindaklanjuti
22.	Sesuai dengan Kebutuhan?						Software Mockup		Software Mockup	Jika sesuai, dilakukan release aplikasi
23.	Melakukan release Software aplikasi						Software Mockup		Software Mockup	Ditindaklanjuti
24.	Menyusun Rencana Roll-out						Software Mockup		Roll-Out Plan	Ditindaklanjuti
25.	Menyetujui Rencana Roll-Out						Roll-Out Plan		Roll-Out Plan	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
26.	Menyiapkan <i>Roll-Out</i>				5		<i>Roll-Out Plan</i>		<i>Roll-Out Plan</i>	Ditindaklanjuti
27.	Melakukan Pelatihan untuk <i>trainer</i>						<i>Roll-Out Plan</i>		<i>Software Mockup</i>	Ditindaklanjuti
28.	Menyelenggarakan Paket Pelatihan bagi <i>End-User</i>						<i>Software Mockup</i>		<i>Software Mockup</i>	Ditindaklanjuti
29.	Melakukan Instalansi sistem produksi						<i>Software Mockup</i>		<i>Software Mockup</i>	Ditindaklanjuti
30.	Melakukan Migrasi Data & Melakukan Integrasi sistem						<i>Software Mockup</i>		<i>Software Mockup</i>	Ditindaklanjuti
31.	Melakukan Pengujian Akhir					6	<i>Software Mockup</i>		<i>Software Mockup</i>	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Pengembang/ Vendor	Manajer Direktorat DITTIFDOK	Business Owner (User)	Tim Pendamping /QA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
32.	Mengesahkan Berita Acara Keberhasilan Implementasi				<pre> graph TD A[] --> B[6] B --> C[] C --> D((SELESAI)) </pre>			<i>Software Mockup</i>		Berita Acara Keberhasilan Implementasi	Disahkan berita acara keberhasilan implementasi

2.1 Template Requirement Traceability Matrix

Requirement Traceability Matrix

ID RTM :

Nama Sistem :

Pemilik Sistem :

.....

Pengembang :

Disiapkan oleh:

<i>Document Owner(s)</i>	Jabatan dalam Proyek

Riwayat Perubahan:

Version	Date	Author	Change Description
		[Isi dengan nama Document Owner.]	Dokumen pertama dibuat
		[Isi dengan nama Change Owner.]	[Isi dengan list perubahan pada tanggal dan versi ini] <ul style="list-style-type: none"> • [Perubahan 1] • [Perubahan 2] • [Perubahann]

2.2 Template System Requirement Specification

System Requirement Specification

ID SRS :

Nama Sistem :

Pemilik Sistem :

.....

Pengembang :

Disiapkan oleh:

<i>Document Owner(s)</i>	<i>Jabatan dalam Proyek</i>

Riwayat Perubahan:

Versio n	Date	Author	Change Description
		[Isi dengan nama Document Owner.]	Dokumen pertama dibuat
		[Isi dengan nama Change Owner.]	[Isi dengan list perubahan pada tanggal dan versi ini] <ul style="list-style-type: none"> • [Perubahan 1] • [Perubahan 2] • [Perubahann]

2. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan pengembangan aplikasi X sebagai berikut.

- a.
- b.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aplikasi yang dikembangkan sebagai berikut.

- a. Modul A
Modul A....
- b. Modul B
Modul B....

1.3 Asumsi dan Batasan

[Asumsi dan batasan menjelaskan asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini dan batasan-batasan yang digunakan. Asumsi dan batasan tersebut disepakati dengan business owner atau key user.]

1.4 Daftar Istilah

[Daftar istilah menjelaskan definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen SRS ini.]

1.5 Daftar Notasi

[Daftar notasi menjelaskan notasi yang digunakan dalam diagram pada dokumen SRS ini. Notasi yang digunakan seharusnya notasi standar yang digunakan oleh semua SRS .]

1.6 Referensi

[Referensi berisi daftar acuan yang digunakan dalam menyusun SRS. Acuan tersebut bisa dari internal maupun eksternal.]

1. PROSES BISNIS UMUM

[Proses bisnis umum memuat proses bisnis yang akan difasilitasi oleh aplikasi. Proses bisnis tersebut disampaikan secara umum untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai ruang lingkup proses bisnis dan keterkaitan dengan proses bisnis lainnya. Penggambaran proses bisnis tersebut juga akan menyelaraskan antara aplikasi yang akan dibangun dengan proses bisnis perusahaan. Proses bisnis tersebut digambarkan dengan flowchart/BPMN dan deksripsinya.]

1. ANALISIS PERSYARATAN FUNGSIONAL

[Analisis persyaratan aplikasi mendetilkkan persyaratan aplikasi yang akan menjadi acuan dalam desain aplikasi. Analisis persyaratan tersebut juga menjadi kesepakatan aplikasi yang akan dibangun antara business owner/key user dengan TI serta pengembang. Analisis persyaratan aplikasi dimulai dengan Usecase Diagram yang menggambarkan interaksi antara stakeholder terkait dengan aplikasi dan fungsi-fungsi dalam aplikasi tersebut. Usecase diagram bisa terdiri dari satu atau lebih diagram yang akan dijelaskan dalam deskripsi usecase.]

1.1 Use Case Diagram A

[Seperti yang disampaikan sebelumnya, Usecase Diagram menggambarkan interaksi antara stakeholder dengan aplikasi dan menggambarkan fungsi-fungsi dalam aplikasi tersebut.]

Usecase Diagram A sebagai berikut.

<Gambar Usecase Diagram>

1.1.1 Usecase A1

[Pada bagian Usecase akan disampaikan penjelasan setiap usecase yang ada dalam Usecase Diagram. Usecase merupakan fungsi dalam aplikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder.]

1.1.1.1 Deskripsi Usecase A1

[Deskripsi usecase menjelaskan secara deskriptif usecase terkait.]

Fungsi	:	[Nama usecase/fungsi]....
Deskripsi	:	[Deskripsi singkat usecase]
Role	:	[Aktor yang menggunakan fungsi tersebut]
Pra Kondisi	:	[Trigger yang menjadikan fungsi terkait menjadi aktif]
<i>Normal flows</i>	:	[Proses normal yang merupakan urutan aktivitas/event normal di dalam usecase terkait.] 1. ... 2. 3.
<i>Alternate flows</i>	:	[Aktivitas di luar proses normal yang terjadi di dalam usecase terkait.] 1. 2. 3.
Post Kondisi	:	[Kondisi akhir yang terjadi ketika fungsi terkait selesai dijalankan] 1. 2.

1.1.1.2 Flow Fungsi A1

[Menggambarkan proses dalam fungsi terkait dalam bentuk diagram.

Diagram yang bisa digunakan yaitu activity diagram disertai penjelasannya.]

1.1.1.3 Mock-up A1

[Menggambarkan mock-up yang ada dalam fungsi terkait. Mock-up tersebut akan digabungkan dengan mock-up pada fungsi lain menjadi prototype.

Prototype ini yang akan memberikan gambaran lebih nyata aplikasi yang akan dibangun.]

1.1.2 Usecase A2

....

1.1.2.1 Deskripsi Usecase A2

....

1.1.2.2 Flow Fungsi A2

....

1.1.2.3 Mock-up A2

....

1.1.3 ...**1.2 Usecase Diagram B**

....

a. ANALISIS PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL**4.1 Performance****4.2**
Reliability**4.3**
Usability**4.4**
Security**4.5****3 PENUTUP****PERSETUJUAN****Disetujui oleh**

2.3 Template Software Architecture Document

Software Architecture Document

ID SAD :

Nama Sistem :

Pemilik Sistem :

Pengembang :

Disiapkan oleh:

<i>Document Owner(s)</i>	Jabatan dalam Proyek

Riwayat Perubahan:

Version	Date	Author	Change Description
		[Isi dengan nama Document Owner.]	Dokumen pertama dibuat
		[Isi dengan nama Change Owner.]	[Isi dengan list perubahan pada tanggal dan versi ini] <ul style="list-style-type: none"> • [Perubahan 1] • [Perubahan 2] • [Perubahann]

4. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan pengembangan aplikasi X sebagai berikut.

- a.
- b.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup software dalam software architecture document ini sebagai berikut.

- a. Modul A
Modul A....
- b. Modul B
Modul B....

1.3 Asumsi dan Batasan

[Asumsi dan batasan menjelaskan asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini dan batasan-batasan yang digunakan. Asumsi dan batasan tersebut disepakati antara pengembang dengan TI.]

1.4 Daftar Istilah

[Daftar istilah menjelaskan definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen SAD ini.]

1.5 Referensi

[Referensi berisi daftar acuan yang digunakan dalam menyusun SAD. Acuan tersebut bisa dari internal maupun eksternal.]

6 SOFTWARE ARCHITECTURE

1.6 Daftar Notasi

[Daftar notasi menjelaskan notasi yang digunakan dalam diagram pada dokumen SAD ini. Notasi yang digunakan seharusnya notasi standar yang digunakan oleh semua SAD .]

Menggambarkan secara garis besar software architecture termasuk framework yang digunakan.]

5 USE CASE

[Usecase menggambarkan modul-modul dalam aplikasi yang akan dibangun. Level usecase bisa lebih detail dibandingkan dengan usecase yang ada di SRS.]

<Gambar Usecase Diagram>

3.1.1 [Usecase A1

[Pada bagian Usecase akan disampaikan penjelasan setiap usecase yang ada dalam Usecase Diagram. Usecase merupakan fungsi dalam aplikasi yang dibutuhkan oleh stakeholder.]

3.1.2 Deskripsi Usecase A1

[Deskripsi usecase menjelaskan secara deskriptif usecase terkait.]

Fungsi	:	[Nama usecase/fungsi]....
Deskripsi	:	[Deskripsi singkat usecase]
Role	:	[Aktor yang menggunakan fungsi tersebut]
Pra Kondisi	:	[Trigger yang menjadikan fungsi terkait menjadi aktif]
Skenario	:	[Urutan interaksi antar obyek dan antar proses.] 1. ... 2. 3.
Post Kondisi	:	[Kondisi akhir yang terjadi ketika fungsi terkait selesai dijalankan] 1. 2.

3.2 Usecase A2

....

3.2.1 Deskripsi Usecase A2

....

7. LOGICAL ARCHITECTURE

[Logical architecture menggambarkan layanan yang seharusnya diberikan oleh sistem. Logical architecture direpresentasikan oleh class diagram atau E-R diagram. Setiap usecase dibuat satu diagram.

4.1 Diagram....

4.1.1 Primary Presentation

[Primary presentation menyampaikan diagram utama (clas diagram atau E-R diagram. Yang menggambarkan komponen utama dan hubungan antar komponen tersebut.]

4.1.2 Katalog Elemen

[Mendefinisikan setiap elemen yang ada dalam *primary presentation* dan menjelaskan properties setiap elemen tersebut.]

ID	Elemen	Tipe	Deskripsi

4.1.3 Context Diagram

[Menggambarkan ruang lingkup dan posisi diagram terhadap diagram yang lain. Atau bahasa lainnya membuat *top level context diagram*.]

4.2 Diagram....

....

4.2.1 Primary Presentation

....

4.2.2 Katalog Elemen

....

4.2.3 Context Diagram

....

7 PROCESS ARCHITECTURE

[Process architecture menggambarkan aspek konsistensi dan sinkronisasi pada sistem. Process architecture direpresentasikan oleh sequence diagram dan atau state diagram dan atau activity diagram. Setiap usecase dibuat satu diagram.]

5.1 Diagram....

5.1.1 Primary Presentation

[Primary presentation menyampaikan diagram utama (sequence diagram dan atau state diagram dan atau activity diagram). Yang menggambarkan komponen utama dan hubungan antar komponen tersebut.]

5.1.2 Katalog Elemen

[Mendefinisikan setiap elemen yang ada dalam *primary presentation* dan menjelaskan properties setiap elemen tersebut.]

ID	Elemen	Tipe	Deskripsi

5.1.3 Context Diagram

[Menggambarkan ruang lingkup dan posisi diagram terhadap diagram yang lain. Atau bahasa lainnya membuat *top level context diagram*.]

5.2 Diagram....

....

5.2.1 Primary Presentation

....

5.2.2 Katalog Elemen

....

5.2.3 Context Diagram

▪ DEVELOPMENT ARCHITECTURE

[Development architecture menggambarkan pengorganisasian statis dari software dan pengembangannya. Development architecture direpresentasikan oleh component diagram..]

6.1 Diagram....

6.1.1 Primary Presentation

[Primary presentation menyampaikan diagram utama (component diagram). Yang menggambarkan komponen utama dan hubungan antar komponen tersebut.]

6.1.2 Katalog Elemen

[Mendefinisikan setiap elemen yang ada dalam *primary presentation* dan menjelaskan properties setiap elemen tersebut.]

ID	Elemen	Tipe	Deskripsi

6.1.3 Context Diagram

[Menggambarkan ruang lingkup dan posisi diagram terhadap diagram yang lain. Atau bahasa lainnya membuat *top level context diagram*.]

1. PHYSICAL ARCHITECTURE

[Physical architecture menggambarkan mapping software terhadap hardware beserta pendistribusiannya. Physical architecture direpresentasikan oleh deployment diagram.]

7.1 Diagram....

7.1.1 Primary Presentation

[Primary presentation menyampaikan diagram utama (deployment diagram). Yang menggambarkan komponen utama dan hubungan antar komponen tersebut.]

7.1.2 Katalog Elemen

[Mendefinisikan setiap elemen yang ada dalam *primary presentation* dan menjelaskan properties setiap elemen tersebut.]

ID	Elemen	Tipe	Deskripsi

7.1.3 Context Diagram

[Menggambarkan ruang lingkup dan posisi diagram terhadap diagram yang lain. Atau bahasa lainnya membuat *top level context diagram*.]

1. DESAIN TEKNIS

[Desain teknis menggambarkan desain aspek non-fungsional secara teknis untuk memenuhi persyaratan non-fungsional]

8.1 Platform Teknis

....

8.2 Performance

....

8.3 Security

....

8.4

a. PENUTUP

PERSETUJUAN

Disetujui oleh

2.4 Template Roll-out Planning

Roll-out Planning

Nama Aplikasi :

Pemilik :

Disiapkan oleh:

<i>Document Owner(s)</i>	Jabatan dalam Pembangunan Aplikasi

Riwayat Perubahan:

Versio n	Date	Author	Change Description
		[Isi dengan nama Document Owner.]	Dokumen pertama dibuat
		[Isi dengan nama Change Owner.]	[Isi dengan list perubahan pada tanggal dan versi ini] <ul style="list-style-type: none"> • [Perubahan 1] • [Perubahan 2] • [Perubahann]

a. PENDAHULUAN

[Menjelaskan latarbelakang, tujuan rollout .]

b. TANGGUNG JAWAB

[Menjelaskan pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan rollout infrastruktur]

2.1 Bagian

-
-
-

2.2 Bagian

-
-
-

c. JADWAL

[Menjelaskan jadwal rollout secara keseluruhan]

Proses	PIC	Partisipan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Rollout ke ...	[Penanggung jawab]	[Pihak sebagai lokasi rollout, misal Kantor Unit A...]	[Tanggal Mulai Rollout]	[Tanggal target selesai rollout]
Rollout ke ...				
Rollout ke ...				

d. PROSES ROLLOUT

[Menjelaskan lebih detil proses rollout]

4.1 Rollout ke

Aktivitas	PIC	Jadwal	Dokumen/Tool
[Aktivitas Detil rollout]	[Penanggung jawab]	[Jadwal aktivitas]	[Dokumen/tool terkait]

4.2 Rollout ke

....

7.1.5 Lampiran Prosedur Instalasi *Software*

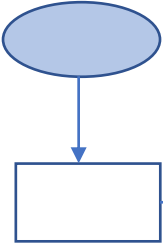

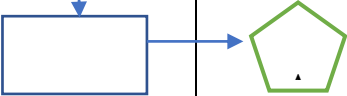
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

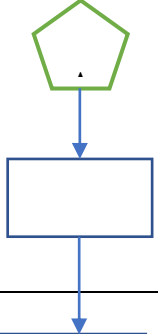
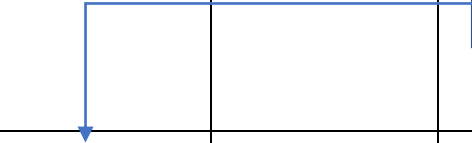

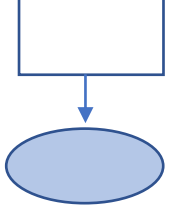
	Nomor SOP :	001/OT.04/F2/2020
	Tanggal Pembuatan:	Mei 2020
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	 Plt. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Eka Sulistia Ediningsih
	NAMA SOP :	Prosedur Manajemen Instalasi <i>Software</i> dan Aplikasi
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 	Memahami Kegiatan, Keterampilan, Integritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima	

<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;</p> <p>15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;</p> <p>16. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi</p> <p>17. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 454/PER/F2/2015 tentang Pedoman Pengelolaan BKR</p> <p>18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pedoman Pengelolaan PIK R/M</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p>
<p>1. SOP Melakukan Rapat Koordinasi terkait Rancangan Konsep atau Desain Program Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Remaja</p> <p>2. SOP Melakukan Perbaikan Konsep atau Desain Program Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Remaja</p>	<p>1. Data tingkat capaian kinerja dan anggaran Direktorat</p> <p>2. Dokumen laporan kegiatan dan anggaran dari masing masing bagian di Dithanrem</p> <p>3. Dokumen penetapan kinerja untuk tahun selanjutnya dari masing-masing bagian di Dithanrem</p> <p>4. Dokumen Renstra Tahun 2020-2024</p>

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan Rancangan Konsep atau Desain Program Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Remaja tidak dapat berjalan dengan baik.	Penyimpanan sebagai database intern Dithanrem secara elektronik dan manual

1. DIAGRAM ALIR

No	Alur Kegiatan	User	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Operasional TI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	User Mengajukan permintaan instalasi <i>software</i>							
2.	Fungsi <i>Helpdesk/ Service Management</i> menyampaikan IT <i>Service Request (ITSR)</i> permintaan instalasi <i>software</i> ke Fungsi IT <i>Operation</i>							
3.	Fungsi IT <i>Operation</i> Melakukan instalasi <i>software</i> pada perangkat komputer <i>user</i> .							

No	Alur Kegiatan	User	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Operasional TI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4.	Fungsi Operasional TI melakukan pengecekan dan meneliti <i>software</i> OS dan aplikasi yang telah terpasang, serta melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing <i>user</i> dan kebutuhan lembaga							
5.	Fungsi Operasional TI Menyerahkan komputer baru yang telah diinstal kepada <i>user</i> dengan disertai dengan slip laporan							
6.	<i>User</i> menandatangani/memaraf pada formulir slip laporan							

2. LAMPIRAN

2.1 Permohonan Permintaan Layanan TI (IT Service Request)

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama	Pemohon		Penyedia
	Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Disetujui oleh
Jabatan			
Tanda Tangan			
Tanggal			
Kontak Permintaan Layanan		Nama:	No Tlp:

Persetujuan Permintaan Layanan (diisi oleh Pimpinan Unit Sistem Informasi)

Prioritas Perubahan : £ Normal £ Emergency £ Minor

Status Persetujuan : £ Disetujui £ Ditolak £ Disetujui dengan syarat

Jelaskan, jika disetujui dengan syarat:

Tembusan

1. Kordinator Pemohon Terkait

Layanan yang dibutuhkan: Instalasi Aplikasi X

Deskripsi Permintaan Layanan

Latar Belakang:

- Membutuhkan instalasi aplikasi X, untuk membantu *entry* data X

Tujuan:

- Untuk Mempermudah Pengerjaan

Prosedur terkait:

- SOP X

Layanan Yang diminta

Justifikasi		Layanan Bisnis		Layanan Teknis	
	Legal / Peraturan Berlaku		Membuat Sistem baru		Layanan Perangkat Kerja (desktop, Notebook, Mobile)
	Penghematan Biaya		Integritas Sistem		Layanan Server Hosting (Web/Aplikasi)
	Meningkatkan efisiensi		Permintaan Lisensi		Layanan Pengembangan Jaringan
V	Meningkatkan efektivitas				Layanan Virtual Private Server (VPS)
					Layanan Pertukaran Data Elektronik (Integrasi Data)
					Layanan Video Conference
					Layanan Hosting Email, SAP, Akun Aplikasi, dan Sharing Folder
					Layanan Co Location
					Layanan Uji Kelayakan Sistem/Aplikasi
				V	Layanan Instalasi Aplikasi
Prediksi Target Waktu :					
Beri tanda check (√) pada kategori layanan yang terkait.					

SLIP LAPORAN PENANGANAN PERANGKAT TI

Perbaikan Komputer Baru Non Komputer/Jenis Lain Perawatan

Tanggal Masuk :
Nama User/Bidang/Bagian :

Kepada Yth :
Bidang/Bagian:

No.	NAMA / JENIS PERALATAN	JENIS PENANGANAN	TINDAK LANJUT/PENGANGANAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)	STATUS	PARAF USER
1.	Laptop XYZ	Instalasi	Telah dilakukan instalasi aplikasi X	Selesai	

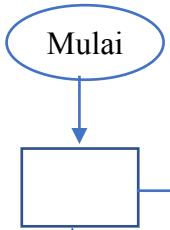

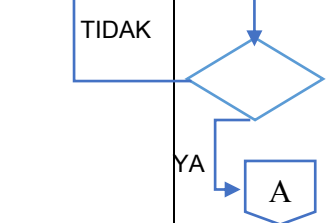
.....
Koordinator Operasional TI

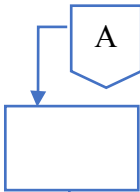
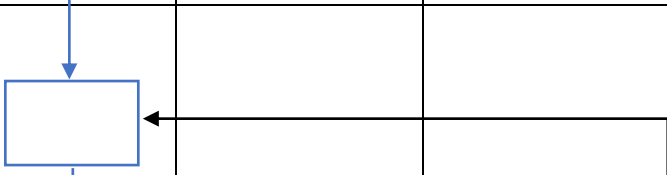
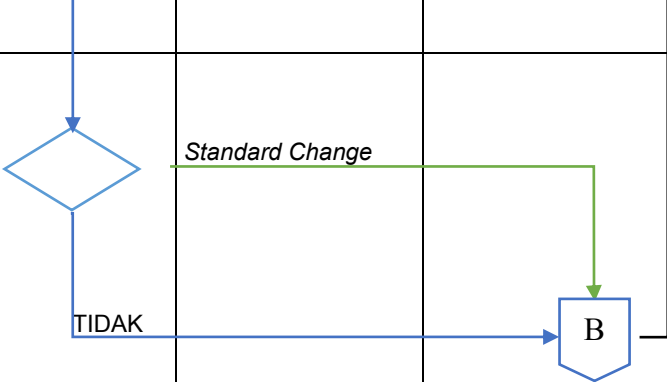
7.1.6 Lampiran Prosedur Manajemen Perubahan TI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	Nomor SOP :	001/OT.04/F2/2020
	Tanggal Pembuatan:	November 2020
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	Plt. Dir Teknologi Informasi dan Data
	 NAMA SOP : Manajemen Perubahan	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	Memahami Kegiatan, Keterampilan, Integritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

1. DIAGRAM ALIR

No	Alur Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku					
		Inisiator Perubahan (User)	Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk	Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Inisiator perubahan membuat form Change Request									Form Request For Change		Form Request For Change	Untuk Ditindaklanjuti
2.	Melakukan review change request									Form Request For Change		Change Log	Untuk Ditindaklanjuti
3.	Apakah Change Request memadai?									Change Log		Analisa Permintaan Perubahan	Jika disetujui maka akan dilakukan Assessment Perubahan

No	Alur Kegiatan	Inisiator Perubahan (User)	Pelaksana				Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Mutu Baku			
			Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4.	Melakukan <i>Assessment</i> perubahan								Analisa Permintaan Perubahan		Analisa Permintaan Perubahan	Ditindaklanjuti
5.	Menentukan klasifikasi <i>change request</i> (<i>Standard, Emergency, Normal</i>)								Analisa Permintaan Perubahan		Klasifikasi Permintaan Perubahan	Ditindaklanjuti
6.	Apakah perubahan bertipe standar?								Klasifikasi Permintaan Perubahan		Dokumentasi Perubahan Standar	Jika disetujui maka akan dilakukan perubahan standar

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Mutu Baku			
		Inisiator Perubahan (User)	Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7.	Perubahan Standar								Dokumen-tasi Pelak-sanaan Peruba-han		Dokum-ntasi Peruba-han standar	Ditindaklanj-uti
8.	Apakah perubahan bersifat emergency?								Dokume-ntasi Pelaksa-naan Peruba-han		Dokum-entasi peruba-han <i>emerge-ncy</i>	Jika disetujui, maka dilakukan perubahan bersifat <i>emergency</i>
9.	Persetujuan <i>emergency change</i>								Dokume-ntasi Pelaksa-naan Peruba-han		Dokum-entasi peruba-han <i>emerge-ncy</i>	Ditindaklanj-uti
10.	Perubahan <i>emergency change</i>								Dokume-ntasi Pelaksa-naan Peruba-han		Dokum-entasi peruba-han <i>emerge-ncy</i>	Ditindaklanj-uti

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					
		Inisiator Perubahan (User)	Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk	Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
11.	Apakah normal <i>change</i> termasuk kedalam perubahan <i>major</i> ?								Dokumen-tasi Pelaksa-naan Peruba-han		Persetu-juan atas Major Change	Jika disetujui manajemen, maka diteruskan ke manajer DITTIFDOK
12.	Persetujuan <i>Major change</i> oleh Manajer Direktorat DITTIFDOK								Dokumen-tasi Pelaksa-naan Peruba-han		Persetu-juan atas <i>Major/n on-major</i> Change	Jika disetujui Manajer, maka diteruskan ke Manajemen
13.	Eskalasi keputusan (<i>major</i> atau signifikan) ke Manajemen atau ITSC								Dokumen-tasi Pelaksa-naan Peruba-han		Persetu-juan atas <i>Major/n on-major</i> Change	Ditindaklanj-utin ke Pengemban-gan Aplikasi <i>software</i>

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Mutu Baku			
		Inisiator Perubahan (User)	Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
14.	Apakah Normal Change disetujui ?								Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		Dokumenasi perubahan normal	Jika disetujui Manajer, maka dilakukan implementasi perubahan
15.	Melakukan Implementasi Perubahan Normal								Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		Dokumenasi perubahan normal	Ditindaklanjuti
16.	Apakah Implementasi Perubahan Berhasil?							Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		Dokumenasi perubahan normal	Ditindaklanjuti	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Manajer Direktor at DITTIFD OK	ITSC	Mutu Baku			
		Inisiator Perubahan (User)	Change Manager	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi HelpDesk			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
17.	Mengubah Status menjadi terimplementasi								Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		Status implementasi perubahan	Ditindaklanjuti
18.	Melaksanakan <i>Backout Plan</i> dan dan mengubah status menjadi gagal								Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		<i>Backout Plan</i>	Ditindaklanjuti
19.	Melaksanakan <i>Review Change Record</i>								Dokumenasi Pelaksanaan Perubahan		Change Record	Ditindaklanjuti
20.	<i>Closing Change Record</i>								Change Record		Change Record	Penutupan Dokumentasi perubahan

2. LAMPIRAN
2.1 Form Request for Change

Request for Change

Informasi Pemohon	
Pemohon	<i>Nama</i>
Unit Kerja	<i>Diisi dengan nama unit kerja yang mengajukan perubahan</i>
Nomor Surat / Contact Person	No...

Informasi Data	
Jenis Perubahan	<input type="checkbox"/> Emergency <input checked="" type="checkbox"/> Non-Emergency
Perubahan yang diharapkan	<i>Diisi penjelasan mengenai perubahan yang diharapkan</i>
Latar belakang perubahan	<i>Diisi penjelasan mengenai latar belakang perubahan yang akan dilakukan</i>
Rincian atas perubahan yang diajukan	<i>Diisi penjelasan mengenai rincian atas perubahan yang diajukan</i> -
Risiko terkait bila perubahan tidak dilakukan	Kriteria: <input type="checkbox"/> Malapetaka <input checked="" type="checkbox"/> Sangat Berat <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Agak Berat <input type="checkbox"/> Tidak Berat Keterangan:

	<i>Diisi penjelasan mengenai risiko yang akan timbul, jika perubahan tidak dilakukan</i>
Solusi yang diharapkan	
Risiko Perubahan	
Alternatif perubahan	
Biaya perubahan	
Waktu perubahan	
Lampiran	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Fungsi Bisnis Terkait 	Fungsi <i>Change Manager</i> 	Manager DITTIFDOK

2.2 Change Log

No.	Nama Komponen Layanan	Deskripsi Perubahan	Alasan Dilakukan Perubahan	Status Perubahan	Tanggal Pelaksanaan
Jelas	Diisi nama aplikasi yang dilakukan perubahan	Diisi penjelasan perubahan yang dilakukan	Diisi alasan dilakukannya perubahan aplikasi	Diisi status perubahan yang dilakukan. Misal : Submitted	Diisi tanggal pelaksanaan proses perubahan.

Catatan :

.....
 Diisi oleh catatan tambahan yang diperlukan. Apabila masih perlu tambahan penjelasan dalam pengisian kolom diatas.

Dibuat Oleh:	Disetujui Oleh:	Diketahui Oleh:
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Pelaksana Perubahan	Fungsi <i>Change Manager</i>	Manajer DITTIFDOK

2.3 Back-out plan

Back-out Plan

Lingkup :

Pemilik :

Disiapkan oleh:

<i>Document Owner(s)</i>	<i>Jabatan dalam Proyek</i>

Riwayat Perubahan:

Version	Date	Author	Change Description
		<i>[Isi dengan nama Document Owner.]</i>	<i>Dokumen pertama dibuat</i>
		<i>[Isi dengan nama Change Owner.]</i>	<i>[Isi dengan list perubahan pada tanggal dan versi ini]</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>[Perubahan 1]</i> • <i>[Perubahan 2]</i> • <i>[Perubahann]</i>

1. PENDAHULUAN

[Menjelaskan latarbelakang, tujuan Backout]

2. TANGGUNG JAWAB

[Menjelaskan pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Backout]

2.1 Bagian

-
-
-

2.2 Bagian

-
-
-

3. JADWAL

[Menjelaskan jadwal Backout secara keseluruhan]

Proses	PIC	Partisipan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
<i>Backout ke ...</i>	<i>[Penanggung jawab]</i>	<i>[Pihak sebagai lokasi Backout, misal Kantor Unit A...]</i>	<i>[Tanggal Mulai Backout]</i>	<i>[Tanggal target selesai Backout]</i>
<i>Backout ke ...</i>				
<i>Backout ke ...</i>				

4. PROSES BACKOUT

[Menjelaskan lebih detil proses Backout]

4.1 Backout ke

Aktivitas	PIC	Jadwal	Dokumen/Tool
<i>[Aktivitas Detil Backout]</i>	<i>[Penanggung jawab]</i>	<i>[Jadwal aktivitas]</i>	<i>[Dokumen/tool terkait]</i>

4.2 Backout ke

Aktivitas	PIC	Jadwal	Dokumen/Tool
<i>[Aktivitas Detil Backout]</i>	<i>[Penanggung jawab]</i>	<i>[Jadwal aktivitas]</i>	<i>[Dokumen/tool terkait]</i>

5. ANALISIS RISIKO

[Menjelaskan analisis risiko Backout]

Risiko	Mitigasi
<i>[Menjelaskan risiko dalam Backout]</i>	<i>[Menjelaskan mitigasi risiko yang dilakukan]</i>

6. DOKUMEN/TOOL PENDUKUNG

[Menjelaskan dokumen dan tool pendukung]

Dokumen/Tool	Deskripsi	Lokasi
<i>[Dokumen/tool pendukung]</i>	<i>[Deskripsi singkat dokumen/tool terkait]</i>	<i>[Lokasi penyimpanan dokumen/tool]</i>

PENUTUP

Disetujui oleh

Manajer DITTIFDOK

Manajemen

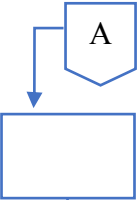

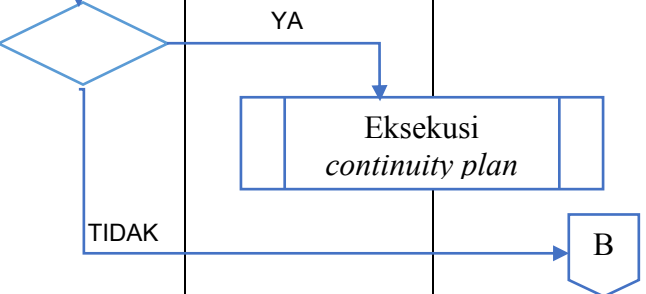
7.1.7 Lampiran Prosedur Manajemen *Service Desk* dan *Incident*

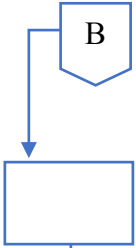
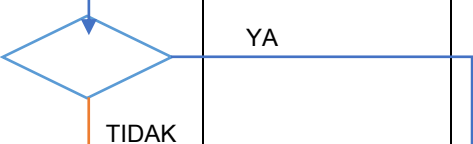


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

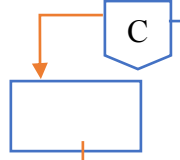
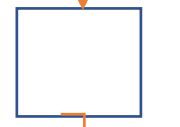

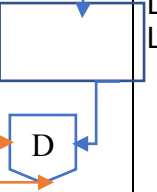
	Nomor SOP :	001/OT.04/F2/2020
	Tanggal Pembuatan:	November 2020
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	Plt. Dir Teknologi Informasi dan Data
	 NAMA SOP : Manajemen <i>Service Desk</i> dan Insiden	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	Memahami Kegiatan, Keterampilan, Integritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

1. DIAGRAM ALIR

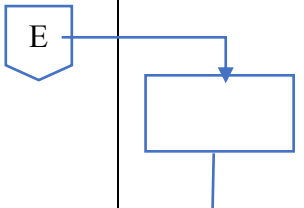
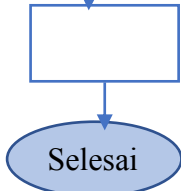
No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
1.	User melaporkan adanya insiden yang terjadi						Tiket Insiden	Diagnosis awal insiden	Untuk Ditindaklanjuti
2.	Apakah merupakan insiden? Jika tidak, maka akan dilakukan permintaan layanan						Tiket Insiden	Kategori Insiden atau permintaan layanan	Jika disetujui, akan diteruskan ke pencatatan insiden,
3.	Melakukan pencatatan insiden						Tiket Insiden	Logging dan Kategori Insiden	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
4.	Melakukan Kategori Insiden						Tiket Insiden	Kategori Insiden	Ditindaklanjuti
5.	Melakukan Priotisasi Insiden						Tiket Insiden	Logging dan Kategori Insiden	Ditindaklanjuti
6.	Insiden yang dianalisa bersifat <i>major</i> dan berpotensi bencana/ <i>disaster</i>						Diagnosis Awal Insiden	Diagnosis Awal Insiden	Jika disetujui maka akan dilakukan diagnosis awal

No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
7.	Fungsi <i>Helpdesk/service management</i> melakukan diagnosis awal atas insiden						Diagnosis Awal Insiden	Diagnosis lanjutan	Ditindaklanjuti
8.	Apakah diperlukan eskalasi dari hasil diagnosis yang dilakukan						Diagnosis Lanjutan	Keputusan eskalasi ke fungsi dukungan teknis	Jika disetujui, maka dilakukan eskalasi sesuai insiden yang terjadi, Jika tidak maka tidak perlu dilakukan eskalasi
9.	Eskalasi dilakukan sesuai dengan insiden yang terjadi.						Diagnosis Awal	Diagnosis Awal	Ditindaklanjuti
10.	Investigasi dan Diagnosis						Diagnosis Lanjutan	Diagnosis Lanjutan	Ditindaklanjuti

No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
11.	Investigasi dan Diagnosis Lanjutan						Diagnosis Lanjutan	Diagnosis Lanjutan	Ditindaklanjuti
12.	Resolusi dilakukan untuk melakukan identifikasi insiden						Diagnosis Lanjutan	Diagnosis Lanjutan	Ditindaklanjuti
13.	Apakah memerlukan eskalasi kepada manajemen karena insiden yang terjadi cukup serius?						Diagnosis Lanjutan	Keputusan notifikasi ke manajemen	Jika disetujui manajemen, maka diteruskan ke manajer TI
14.	Eskalasi dilakukan karena insiden cukup kritikal						Diagnosis Lanjutan	Notifikasi kepada Manager TI	Aktivitas dilakukan ke resolusi pemulihan insiden

No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
15.	Resolusi Insiden dan <i>recovery</i> untuk insiden yang memerlukan eskalasi (sesuai dengan fungsi masing-masing yang relevan)						Diagnosis Lanjutan	Diagnosis Lanjutan	Ditindaklanjuti
16.	Resolusi insiden dan <i>recovery</i> untuk insiden yang tidak memerlukan eskalasi						Diagnosis Lanjutan	Diagnosis Akhir	Ditindaklanjuti
17.	<i>Update</i> status insiden kepada <i>user</i>					Tiket Insiden	Diagnosis Akhir	Notifikasi ke <i>User</i> melalui <i>update</i> status Tiket	
18.	<i>User</i> menerima <i>update status</i> insiden					Laporan Penanganan Insiden	Notifikasi Kembali kepada fungsi <i>helpdesk/service management</i>	Notifikasi fungsi <i>helpdesk/Service Management</i>	

No	Alur Kegiatan	Komponen (User)	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Manager TI.	Kelengkapan	Output	Keterangan
19.	<i>Closing insiden</i>						Laporan Penanganan Insiden	Laporan Penanganan Insiden	Penutupan tiket insiden
20.	Melakukan pelaporan bulanan atas <i>monitoring</i> insiden yang telah dilakukan sebelumnya						Laporan Penanganan Insiden	Laporan Penanganan Insiden	<i>Monitoring</i> pelaporan penanganan insiden yang sudah dilakukan

2. LAMPIRAN

2.1 Form Lembar Kerja Laporan Penanganan *Helpdesk* TI dan Insiden

Laporan Penanganan Insiden

Informasi Insiden Atau Kejadian		
Nomor Formulir	<i>Diisi dengan nomor formulir ketentuan Perusahaan</i>	
Nama Pelapor	<i>Diisi dengan nama pelapor insiden</i>	
Departemen Pelapor	<i>Diisi dengan divisi pelapor insiden</i>	
Insiden/Kejadian	<i>Diisi dengan deskripsi insiden yang terjadi</i>	
Tanggal Pelaporan Insiden	<i>Diisi dengan tanggal pelaporan insiden</i>	
Waktu Pelaporan Insiden	<i>Diisi dengan waktu pelaporan insiden</i>	
Eskalasi Masalah	<input type="checkbox"/> Manajer Direktorat Teknologi Informasi dan Data <input type="checkbox"/> Fungsi <i>Helpdesk/Service Management</i> <input type="checkbox"/> Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi <input type="checkbox"/> Fungsi Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TI serta Pengelolaan Media Konferen	
Deskripsi Solusi Insiden Atau Kejadian *) <i>Diisi oleh Asisten Help Desk</i>		
Insiden/kejadian	<i>Diisi penjelasan mengenai deskripsi insiden yang terjadi</i>	
Akibat dari Insiden	<i>Diisi penjelasan mengenai akibat apabila insiden terjadi</i>	
Dampak Terhadap Sistem	<i>Diisi penjelasan mengenai dampak terhadap sistem aplikasi</i>	
Tingkat Dampak	<input type="checkbox"/> Besar	<input type="checkbox"/> Kecil
Prioritas	<input type="checkbox"/> Mendesak	<input type="checkbox"/> Tidak Mendesak
Hasil Investigasi/Solusi	<i>Diisi penjelasan mengenai solusi yang didapatkan dari hasil investigasi untuk penanganan insiden</i>	
Solusi Insiden	<i>Diisi penjelasan mengenai langkah-langkah penanganan insiden</i>	
Kategori	<input type="checkbox"/> <i>Human Error</i>	<input type="checkbox"/> <i>Hardware</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Aplikasi/Database</i>	<input type="checkbox"/> <i>Keamanan</i>
Status Insiden	<input type="checkbox"/> Selesai	<input type="checkbox"/> Eskalasi ke.....
		Tanggal selesai(DD/MM/YY)

Diselesaikan Oleh:	Diketahui Oleh:
Tanggal:	Tanggal:
<p data-bbox="400 309 878 347" style="text-align: center;"><i>Helpdesk/Service Management</i></p> <p data-bbox="490 475 786 491" style="text-align: center;">.....</p>	<p data-bbox="1498 309 1662 347" style="text-align: center;">ManagerTI</p> <p data-bbox="1435 475 1731 491" style="text-align: center;">.....</p>

**) Coret yang tidak perlu*

Ticket Followup	
Tickets	Number
New	
Processing (assigned)	
Processing (planned)	
Pending	
Solved	
Closed	
Deleted	

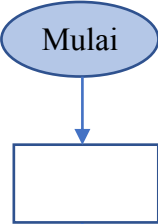
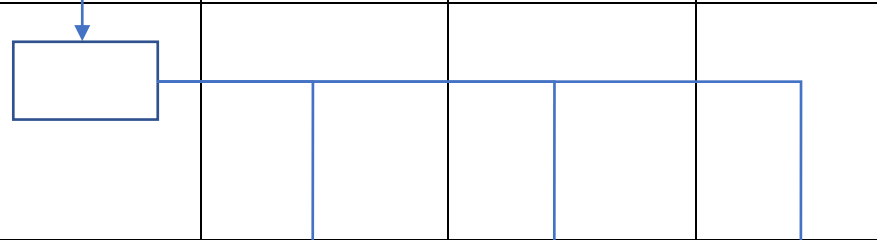


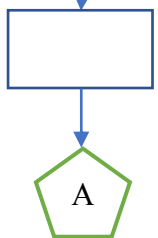
Issue Followup	
Tickets	Number
New	
Processing (assigned)	
Processing (planned)	
Pending	
Solved	
Closed	
Deleted	

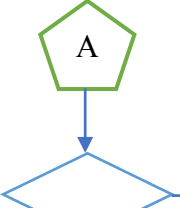





7.1.8 Lampiran Prosedur Manajemen Permasalahan

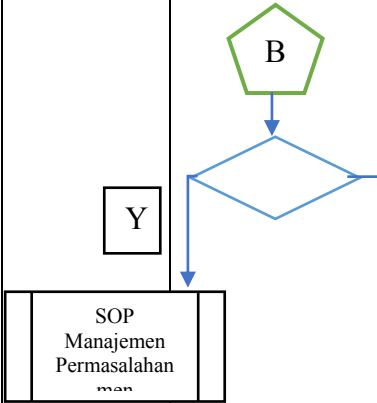
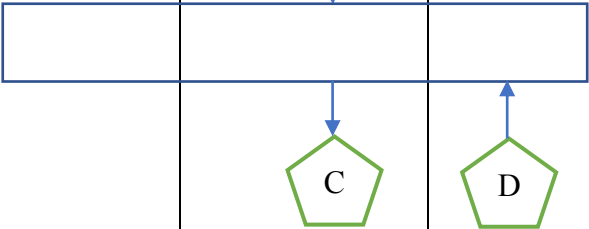
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	Nomor SOP :	001/OT.04/F2/2020
	Tanggal Pembuatan:	Mei 2020
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	Plt. Direktur Bina Ketahanan Remaja,  Eka Sulistia Ediningsih
	NAMA SOP :	Manajemen Permasalahan
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	Memahami Kegiatan, Keterampilan, Integritas, Profesionalisme, Pelayanan Prima	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

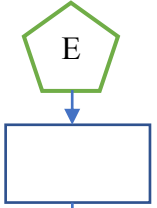
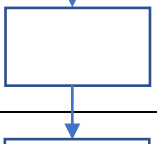
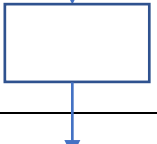
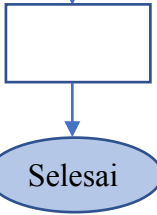
1. DIAGRAM ALIR

No	Alur Kegiatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Kelengkapan	Output	Keterangan
1.	Melakukan identifikasi permasalahan atas insiden.						Laporan rutin dari manajemen insiden	Analisa pola keterjadian insiden	
2.	Melakukan kategorisasi dan prioritas permasalahan.						Analisa pola keterjadian insiden	Laporan Penanganan Masalah: Kategorisasi dan prioritas permasalahan	
3.	Melakukan analisa akar permasalahan yang terjadi.						Kategorisasi dan prioritas insiden	Laporan Penanganan Masalah: Hasil investigasi dan diagnosis <i>root problem</i>	

No	Alur Kegiatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Kelengkapan	Output	Keterangan
4.	Apakah membutuhkan <i>workaround</i> atas permasalahan?								
5.	Implementasi <i>Workaround</i> dan mendokumentasikan permasalahan yang telah diketahui							Dokumentasi <i>workaround</i>	
6.	Menyampaikan progress terkait permasalahan.								

No	Alur Kegiatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Kelengkapan	Output	Keterangan
7.	Apakah membutuhkan perubahan? Jika dibutuhkan perubahan maka akan dilakukan manajemen perubahan.								
8.	Jika tidak membutuhkan perubahan, maka dilakukan penanganan masalah berdasarkan hasil analisa						Investigasi dan analisa lanjutan atas masalah yg masih terjadi		

No	Alur Kegiatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Kelengkapan	Output	Keterangan
	permasalahan								
9.	Apakah permasalahan sudah dapat diselesaikan? Apabila tidak dapat diselesaikan, maka dilakukan penanganan masalah kembali.								
10.	Jika permasalahan sudah diselesaikan, Fungsi Helpdesk / Service Management memperbaharui status masalah.								
11.	Mendokumentasikan <i>known error</i>							Dokumen-tasi <i>known error</i>	

No	Alur Kegiatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Fungsi Helpdesk/ Service Management	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi	Fungsi Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI serta pengelolaan media konferen	Fungsi Bank Data, Situs, Informasi Publik dan perpustakaan serta administrasi.	Kelengkapan	Output	Keterangan
12.	Melakukan <i>closing</i> masalah								
13.	Menyusun laporan penanganan masalah							Laporan Penanganan Masalah	
14.	Me-review laporan penanganan masalah							Laporan Penanganan Masalah	
15.	Mendokumen-Tasikan laporan Penanganan							Laporan Penanganan Masalah Dokumentasi penutupan permasalahan	

2. LAMPIRAN

2.1 Form Lembar Kerja Laporan Penanganan Masalah

Laporan Penanganan Masalah


Informasi Masalah dan Solusi				
Nomor Formulir	<i>Diisi dengan nomor formulir ketentuan Perusahaan</i>			
Nama Pelapor	<i>Diisi dengan nama pelapor masalah</i>			
Divisi	<i>Diisi dengan nama divisi pelapor</i>			
Tanggal Laporan	<i>Diisi dengan tanggal terima pemberian dokumen masalah</i>			
Masalah	<i>Diisi dengan deskripsi masalah yang terjadi</i>			
Dampak Masalah	<i>Diisi dengan waktu pelaporan masalah</i>			
Kategori Masalah	<input type="checkbox"/> Jaringan	<input type="checkbox"/> Database	<input type="checkbox"/> Hardware	<input type="checkbox"/> Aplikasi
	<input type="checkbox"/> Keamanan	<input type="checkbox"/> Lainnya		
Eskalasi Masalah	<input type="checkbox"/> General Manager Information System <input type="checkbox"/> Manager Information System <input type="checkbox"/> Fungsi IT Planning & Budgeting <input type="checkbox"/> Fungsi IT Development <input type="checkbox"/> Fungsi IT Infrastrukture & Security System <input type="checkbox"/> Fungsi NOC & Command Center (SIN)			
Hasil Investigasi dan Diagnosis Masalah	<i>Diisi dengan hasil diagnose masalah yang terjadi</i>			
Solusi Masalah	<i>Diisi dengan solusi yang dibuat dari metode yang telah dibuat</i>			
Known Error	<i>Dokumentasi permasalahan untuk dijadikan sebagai panduan insiden</i>			
Tanggal Selesai	<i>Diisi dengan tanggal selesai masalah terselesaikan</i>			

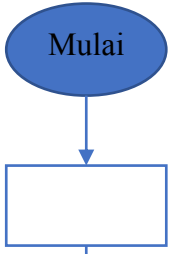

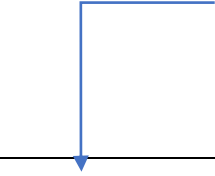

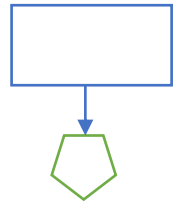
Diselesaikan Oleh:	Diketahui Oleh:
Tanggal:	Tanggal:
Fungsi NOC & Command Center (SIN) 	Manager NOC & Command Center (SIN)

**) Coret yang tidak perlu*

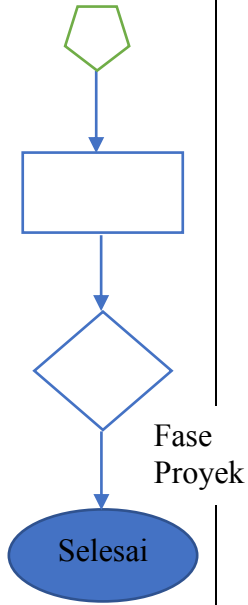
7.1.9 Lampiran Prosedur Manajemen Mutu Pengembangan TI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	Nomor SOP :	
	Tanggal Pembuatan:	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	
	NAMA SOP : Manajemen Mutu TI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	


No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Tim Pengembangan TI	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Quality Management Plan atas Sebuah Kegiatan/Proyek Pengembangan TI						Lampiran Rencana Mutu TI	
2	Persiapan dokumentasi oleh fungsi pengembangan terkait				Lampiran Dokumentasi Temuan : Dokumentasi kegiatan engembangan		Dokumentasi operasi terkait	
3	Pelaksanaan Quality Assurance atas setiap tahapan dalam proyek pengembangan TI				Dokumentasi Pengembangan terkait		Lampiran Dokumentasi Temuan : Draft laporan quality assurance	
4	Penyampaian tanggapan atas hasil QA untuk tahapan proyek pengembangan TI terkait				Lampiran Dokumentasi Temuan : Draft laporan quality assurance		Lampiran Dokumentasi Temuan : Tanggapan atas draft laporan Quality Assurance	

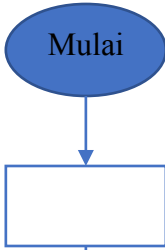





No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Tim Pengembangan TI	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Penyusunan laporan kegiatan Quality Assurance untuk tahapan terkait				Lampiran Dokumentasi Temuan : Tanggapan atas draft laporan Quality Assurance		Lampiran Dokumentasi Temuan : Laporan Quality Assurance per fase proyek TI	
6	Tindak Lanjut atas temuan dari kegiatan Quality Assurance				Lampiran Dokumentasi Temuan : Laporan Quality Assurance per fase proyek TI		Lampiran Dokumentasi Temuan : Laporan tindak lanjut atas temuan QA	
7	Monitoring atas kegiatan tindak lanjut atas hasil Quality Assurance				Lampiran Dokumentasi Temuan : Laporan tindak lanjut atas temuan QA		Monitoring realisasi Tindak Lanjut atas hasil Quality Assurance per Fase	

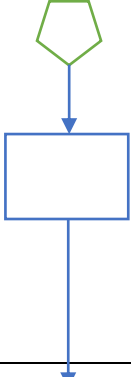


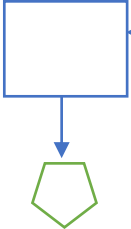

No	Alur Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Tim Pengembangan TI	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Evaluasi atas progress tindak lanjut atas temuan dari Quality Assurance Operasional TI	 <pre> graph TD A{{ }} --> B[] B --> C{ } C --> D([Selesai]) </pre> <p>Fase Proyek</p>	Tahapan Proyek Belum					

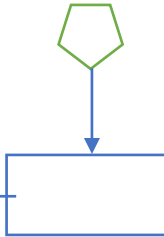

7.1.10 Lampiran Prosedur Manajemen Mutu Operasi TI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

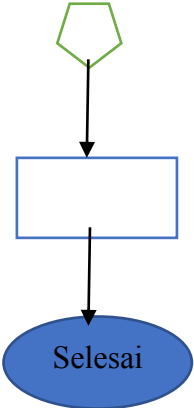
	Nomor SOP :	
	Tanggal Pembuatan:	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh :	
	NAMA SOP : Manajemen Mutu TI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Service Desk	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Quality Management Plan atas Operasi TI								Lampiran Rencana Mutu TI	
2	Persiapan dokumentasi oleh fungsi operasi terkait						Hasil control self assessment Dokumentasi kegiatan operasi		Dokumentasi operasi terkait	
3	Pelaksanaan Quality Assurance atas Operasi TI						Dokumentasi operasi terkait		Draft laporan quality assurance	
4	Penyampaian tanggapan atas operasional					Lampiran Dokumentasi Temuan : Draft		Draft laporan Quality Assurance		

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		Dirtek Informasi dan Data	Service Desk	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output			
	TI terkait dengan fungsi Service Desk									laporan quality assurance		
5	Penyampaian tanggapan atas operasional TI terkait dengan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI									Draft laporan quality assurance	Draft laporan Quality Assurance	
6	Penyampaian tanggapan atas operasional TI terkait dengan fungsi Pembangunan									Draft laporan quality assurance	Draft laporan Quality Assurance	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Service Desk	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
	an dan Pengembangan Sistem Aplikasi									
7	Penyusunan laporan kegiatan Quality Assurance atas Operasional TI								Draft laporan Quality Assurance	
8	Penetapan hasil Quality Assurance Operasional TI						Draft Laporan Quality Assurance		Laporan Quality Assurance	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Service Desk	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Tindak Lanjut atas temuan dari kegiatan Quality Assurance						Laporan Quality Assurance		Dokumentasi tindak lanjut atas hasil QA	
10	Monitoring atas kegiatan tindak lanjut atas hasil Quality Assurance						Dokumentasi tindak lanjut atas hasil QA		Laporan Monitoring Tindak Lanjut Quality Assurance Operasional TI	

No	Alur Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dirtek Informasi dan Data	Service Desk	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TI	Fungsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem aplikasi	Fungsi IT Planning & Compliance	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Evaluasi atas progress tindak lanjut atas temuan dari Quality Assurance Operasional TI	 <pre> graph TD A{{ }} --> B[] B --> C([Selesai]) </pre>							Laporan Final Quality Assurance Operasional TI	

7.4. Lampiran Detil Kompetensi

7.4.1. IFT01 – Business Relationship Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT01

Label : Business Relationship Management

Definisi : Kemampuan untuk menganalisa dan mengelola business requirement serta kemampuan untuk menilai dan memvalidasi kesesuaian sebuah solusi bisnis dengan business requirement.

Tabel 2 Deskripsi Area Kompetensi – IFT01

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami metodologi dalam analisa kebutuhan bisnis yang minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planning & monitoring 2. Elicitation 3. Requirement management & communication 4. Enterprise analysis 5. Requirement analysis <p>Memahami metodologi dalam melakukan assessment dan validasi</p>	<p>Mampu mengimplementasikan metodologi analisa kebutuhan bisnis untuk area kebutuhan bisnis secara berdiri sendiri</p> <p>Mampu menyusun kriteria kebutuhan solusi (fungsional dan non fungsional) berdasarkan user requirement yang telah didapat sebelumnya</p>	<p>Mampu menganalisa kebutuhan bisnis dengan mempertimbangkan interoperabilitas antar area kebutuhan bisnis secara organization-wide</p> <p>Mampu melakukan penilaian dan validasi sebuah usulan solusi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan kegiatan analisa kebutuhan bisnis</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas pelaksanaan penilaian dan validasi solusi bisnis, dengan memperhatikan kebutuhan bisnis organization wide dan trend-trend yang relevan.</p>	<p>Mampu untuk memformulasikan kandidat-kandidat model operasi baru yang ditawarkan kepada business owner, berdasarkan lesson learned dari kegiatan analisa kebutuhan bisnis, demand management dan berbagai trend relevan.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
usulan solusi (yang tersedia di pasar) Memahami demand management	Mampu mendokumentasikan penggunaan layanan TI dalam standar PBA (Pattern of Business Activity)	Mampu menganalisa dampak dinamika sebuah PBA terhadap proses-proses pengelolaan TI terkait	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan demand management	

7.4.2. IFT02 – Service Design

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT02

Label : Service Design

Definisi : Kemampuan untuk melakukan perancangan layanan TI secara menyeluruh untuk seluruh aspek-aspek kritikal

Tabel 3 Deskripsi Area Kompetensi – IFT02

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami 5 aspek kunci dalam Service Design, yaitu Service Solutions, Service Portfolio, Technology Architecture, Processes dan Measurement Methods/Metrics.	Mampu menyusun Service Design Package (SDP) untuk sebuah layanan TI yang didefinisikan, di luar aspek measurement methods/metrics. Mampu mengaplikasikan proses-proses standar organisasi terkait Service	Mampu menganalisa 5 aspek kunci penyusun sebuah service, untuk sebuah service yang diberikan. Mampu menyusun SDP secara menyeluruh, sesuai dengan best practice, merujuk kepada proses-	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas 5 aspek kritikal sebuah service. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas dokumen	Mampu mengusulkan pendekatan baru, baik parsial atau menyeluruh, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan service design

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami proses-proses pendukung dalam service design, yaitu Service Catalog Management, Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Service Level Management	Catalog Management, Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Service Level Management	proses pendukung dalam Service Design	SDP sebuah service organisasi. Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas keberjalanan proses-proses pendukung Service Design.	

7.4.3.IFT03 – Service Desk

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT03

Label : Service Design

Definisi : Kemampuan untuk melakukan perancangan layanan TI secara menyeluruh untuk seluruh aspek-aspek kritikal

Tabel 4 Deskripsi Area Kompetensi – IFT03

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami 5 aspek kunci dalam Service Design, yaitu Service Solutions, Service Portfolio, Technology Architecture, Processes dan	Mampu menyusun Service Design Package (SDP) untuk sebuah layanan TI yang didefinisikan, di luar aspek measurement methods/metrics.	Mampu menganalisa 5 aspek kunci penyusun sebuah service, untuk sebuah service yang diberikan.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas 5 aspek kritikal sebuah service.	Mampu mengusulkan pendekatan baru, baik parsial atau menyeluruh, untuk meningkatkan

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Measurement Methods/Metrics.</p> <p>Memahami proses-proses pendukung dalam service design, yaitu Service Catalog Management, Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Service Level Management.</p>	<p>Mampu mengaplikasikan proses-proses standar organisasi terkait Service Catalog Management, Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Service Level Management</p>	<p>Mampu menyusun SDP secara menyeluruh, sesuai dengan best practice, merujuk kepada proses-proses pendukung dalam Service Design</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas dokumen SDP sebuah service organisasi.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas keberjalanan proses-proses pendukung Service Design.</p>	<p>kualitas pelaksanaan kegiatan service design</p>

7.4.4.IFT04 – Service Strategy

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT04

Label : Service Strategy

Definisi layanan TI : Kemampuan untuk memformulasikan strategi TI yang terintegrasi dengan pengelolaan finansial dan portofolio

Tabel 5 Deskripsi Area Kompetensi – IFT04

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami pendekatan untuk menurunkan business strategy ke dalam IT Stategy; menuangkannya dalam kapabilitas kritikal arsitektur TI (untuk arsitektur data, aplikasi dan infrastruktur) dan usulan strategi pencapaian</p> <p>Memahami pendekatan untuk manajemen finansial layanan TI: budgeting, accounting, charging</p> <p>Memahami pendekatan manajemen portofolio layanan TI sesuai dengan dinamika kebutuhan bisnis: define, analyse, approve, charter</p>	<p>Mampu menuangkan dokumentasi manajemen finansial sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi</p> <p>Mampu menyusun portofolio layanan TI sesuai dengan standar best practices</p>	<p>Mampu menganalisa kapabilitas kritikal arsitektur TI berdasarkan strategi TI yang diterapkan</p> <p>Mampu menganalisa kebutuhan rencana-rencana kegiatan TI atas sebuah tujuan strategis yang ditetapkan; termasuk manajemen finansial yang menyertainya.</p> <p>Mampu menganalisa layanan-layanan TI penyusun sebuah portofolio layanan TI untuk sebuah strategi TI yang diberikan.</p>	<p>Mampu mengevaluasi kesesuaian strategi TI yang diimplementasikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi yang berjalan, dan merekomendasikan hal-hal yang memperkuat penyelarasannya</p> <p>Mampu mengevaluasi dan memberi rekomendasi pelaksanaan manajemen finansial TI</p> <p>Mampu mengevaluasi kecukupan portofolio layanan TI yang ada terhadap strategi bisnis, dan merekomendasikan perbaikan portofolio layanan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis</p>	<p>Mampu menyusun strategi TI baru, dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan bisnis dan dinamika trend atau industri terkait.</p> <p>Mampu menyusun portofolio layanan TI baru yang sesuai dengan strategi TI baru yang diusulkan</p>

7.4.5. IFT05 – Enterprise Architecture

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT05

Label : Enterprise Architecture

Definisi : Kemampuan untuk melakukan pengelolaan Enterprise Architecture organisasi sebagai sebuah siklus yang berkelanjutan, terintegrasi dengan kegiatan Service Strategy dan Service Design

Tabel 6 Deskripsi Area Kompetensi – IFT05

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami siklus pengelolaan Enterprise Architecture, yang merujuk kepada standar atau framework yang ada.	Mampu menyusun arsitektur bisnis menggunakan standar notasi yang ditetapkan	Mampu menganalisa kebutuhan arsitektur bisnis untuk sebuah visi diberikan	Mampu merumuskan visi enterprise architecture untuk konteks bisnis organisasi yang diberikan	Mampu menyusun visi baru enterprise architecture berdasarkan perkembangan terkini aspek-aspek eksternal organisasi, dan menurunkannya ke dalam spesifikasi enterprise architecture
Memahami standar dokumentasi Enterprise Architecture, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi	Mampu menyusun arsitektur sistem informasi menggunakan standar notasi yang ditetapkan	Mampu menganalisa kebutuhan arsitektur sistem informasi untuk arsitektur bisnis yang diberikan.	Mampu mengevaluasi kesesuaian enterprise architecture dengan pencapaian visi organisasi	Mampu mengidentifikasi aspek-aspek khas organisasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan enterprise architecture organisasi
	Mampu menyusun arsitektur infrastruktur menggunakan standar notasi yang ditetapkan	Mampu menganalisa kebutuhan arsitektur infrastruktur untuk beberapa arsitektur sistem informasi sekaligus	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan Enterprise Architecture organisasi	
	Mampu membuat analisa kesenjangan atas target architecture dan baseline architecture			

7.4.6. IFT06 – IT Project – Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT06

Label : IT Project Management

Definisi : Kemampuan dalam mengelola proyek IT sesuai dengan perencanaan dan anggaran sebelumnya, yang terintegrasi dengan pengembangan Sistem TI (baik aplikasi maupun infrastruktur)

Tabel 7 Deskripsi Area Kompetensi – IFT06

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mengetahui faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek Mampu memahami tahapan-tahapan dalam penyelesaian sebuah proyek beserta target-target yang ditetapkan	Mampu menyelesaikan bagian pekerjaannya dalam sebuah proyek sesuai dengan batas waktu dan anggaran yang telah direncanakan. Mampu mengatasi permasalahan ringan yang terjadi pada proyek IT seperti troubleshooting atau debugging	Mampu mengkoordinasikan bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang anggaran yang telah direncanakan Mampu mengintegrasikan modul-modul pada proyek ke dalam sebuah hasil akhir yang dapat diimplementasikan dengan baik	Mampu mengevaluasi jalannya proyek dan memberikan masukan perbaikan terhadap proyek yang sedang berjalan Mampu mengevaluasi hasil proyek dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk proyek sejenis di masa mendatang	Mampu membuat standar anggaran, waktu dan pembagian modul atas proyek IT Mampu mengevaluasi perlu tidaknya sebuah proyek dijalankan berdasarkan tujuan strategis dan operasional organisasi Mampu merekomendasikan proyek IT yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan strategis organisasi

7.4.7. IFT07 – Application Development

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT07

Label : Application Development

Definisi : Kemampuan dalam pengembangan atau akuisisi software aplikasi sebagai solusi bisnis

Tabel 8 Deskripsi Area Kompetensi – IFT07

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mengetahui spesifikasi teknis perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Memahami bahasa pemrograman dan database yang digunakan di organisasi	Mampu menganalisa proses bisnis yang ada dan menerjemahkannya ke dalam kebutuhan sistem aplikasi	Mampu mengevaluasi aplikasi yang dibangun dan menilai kelayakannya untuk diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis	Mampu mendesain strategi dan kebijakan pengembangan sistem untuk mengantisipasi kebutuhan aplikasi di masa mendatang
Memahami konsep system development life cycle (SDLC)	Mampu melakukan pemrograman yang bersifat sederhana	Mampu melakukan pemrograman yang kompleks dengan mempertimbangkan efisiensi dan kinerja perangkat lunak	Mampu melakukan analisa kinerja perangkat lunak berdasarkan hasil pengujian serta memberikan rekomendasi perbaikan	Mampu mendesain strategi untuk meningkatkan kualitas akuisisi paket aplikasi
Memahami konsep akuisisi paket software aplikasi		Mampu melakukan konfigurasi atas paket aplikasi terpilih berdasarkan kebutuhan pengguna	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas jalannya tahapan-tahapan akuisisi produk aplikasi	

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
		Mampu mengujicoba, memvalidasi, dan mendokumentasikan kesalahan/kekurangan yang ada pada perangkat lunak		

7.4.8. IFT08 – Business Solution Architecture

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT08

Label : Business Solution Architecture

Definisi : Kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur aplikasi korporat dalam satu kesatuan sistem informasi yang terintegrasi

Tabel 9 Deskripsi Area Kompetensi – IFT08

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami konsep dan arsitektur teknologi SOA (Service Oriented Architecture)	Mampu mengimplementasikan integrasi sistem informasi secara sederhana berbasis web service	Mampu menganalisa kebutuhan integrasi berbagai aplikasi bisnis untuk membuat sebuah layanan bisnis, menggunakan platform webservice.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan integrasi sistem informasi korporat, merujuk kepada tujuan integrasi layanan bisnis organisasi.	Mampu mengusulkan strategi untuk meningkatkan tingkat kematangan implementasi SOA di organisasi.
Memahami arsitektur solusi bisnis spesifik untuk jaminan sosial atau	Mampu memberikan penilaian pemenuhan			Mampu mengusulkan strategi untuk arsitektur

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>asuransi secara umum (yang terkait langsung dengan kepesertaan dan pelayanan)</p> <p>Memahami arsitektur solusi bisnis yang bersifat generik untuk organisasi sebesar BGR (misalnya manajemen keuangan, SDM, aset, logistik, dan sejenisnya)</p>	<p>kriteria teknis yang telah ditetapkan sebelumnya atas sebuah paket solusi bisnis, baik yang bersifat spesifik maupun generik.</p>	<p>Mampu menyusun kriteria seleksi dan menggunakannya dalam pemilihan alternatif-alternatif solusi bisnis yang tersedia di pasar, baik yang bersifat spesifik atau generik.</p> <p>Mampu menerapkan metodologi standar dalam melakukan implementasi solusi level enterprise system (solusi spesifik maupun generik), baik sebagai tim mandiri maupun yang bersifat join development.</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan atas pemilihan dan implementasi solusi bisnis baik spesifik maupun generik, merujuk kepada best practice dan trend yang ada.</p>	<p>solusi bisnis (baik spesifik atau generik), dengan merujuk kepada perkembangan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi-teknologi ke depan.</p>

7.4.9. IFT09 – DC/DRC Hardware Architecture

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT09

Label : DC/DRC Hardware Architecture

Definisi : Kemampuan untuk merancang dan memilih solusi teknologi hardware DC/DRC yang sesuai dengan dinamika kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi

Tabel 10 Deskripsi Area Kompetensi – IFT09

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami good practice dalam desain dan operasi network, termasuk perangkat-perangkat jaringan kunci di dalamnya.</p> <p>Memahami good practice dalam desain dan operasi arsitektur keamanan informasi korporat (OESA = Open Enterprise Security Architecture).</p> <p>Memahami sistem manajemen keamanan informasi (ISMS =</p>	<p>Mampu mendesain arsitektur jaringan (logical) yang sederhana.</p> <p>Mampu melakukan manajemen jaringan dan resolusi permasalahan yang umum terjadi.</p> <p>Mempu melakukan pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ISMS.</p> <p>Mampu melaksanakan request rutin terkait dukungan keamanan. Membantu investigasi dan penyelesaian masalah</p>	<p>Mampu menganalisa kebutuhan desain arsitektur jaringan yang kompleks</p> <p>Mampu menganalisa hal-hal yang dapat potensial mengoptimalkan manajemen jaringan</p> <p>Mampu menganalisa kebutuhan desain arsitektur keamanan level korporat, untuk semua lingkup security services dalam OESA</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas arsitektur network yang diimplementasikan</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas keberjalanan manajemen jaringan</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas arsitektur keamanan informasi yang diimplementasikan</p>	<p>Mampu mengusulkan strategi baru untuk arsitektur network dan security, dengan merujuk kepada perkembangan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi-teknologi ke depan.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Information Security Management System).	terkait akses kontrol dan sistem keamanan.	Mampu menginvestigasi security breach kecil yang terjadi. Membantu user mendefinisikan hak akses dan privileginya.	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas keberjalanan ISMS.	

7.4.10. IFT10 – Network & Security Architecture

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT10

Label : Network & Security Architecture

Definisi : Kemampuan untuk merancang dan mengelola solusi teknologi Network & Security yang sesuai dengan dinamika kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi, serta good practice terkait dengan pengelolaan jaringan dan keamanan informasi

Tabel 11 Deskripsi Area Kompetensi – IFT01

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami good practice dalam desain dan operasi network, termasuk perangkat-perangkat jaringan kunci di dalamnya. Memahami good practice dalam desain dan operasi	Mampu mendesain arsitektur jaringan (logical) yang sederhana. Mampu melakukan manajemen jaringan dan resolusi permasalahan yang umum terjadi.	Mampu menganalisa kebutuhan desain arsitektur jaringan yang kompleks Mampu menganalisa hal-hal yang dapat potensial mengoptimalkan manajemen jaringan	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas arsitektur network yang diimplementasikan Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas	Mampu mengusulkan strategi baru untuk arsitektur network dan security, dengan merujuk kepada perkembangan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi-teknologi ke depan.

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>arsitektur keamanan informasi korporat (OESA = Open Enterprise Security Architecture).</p> <p>Memahami sistem manajemen keamanan informasi (ISMS = Information Security Management System).</p>	<p>Mampu melakukan pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ISMS.</p> <p>Mampu melaksanakan request rutin terkait dukungan keamanan. Membantu investigasi dan penyelesaian masalah terkait akses kontrol dan sistem keamanan.</p>	<p>Mampu menganalisa kebutuhan desain arsitektur keamanan level korporat, untuk semua lingkup security services dalam OESA</p> <p>Mampu menginvestigasi security breach kecil yang terjadi. Membantu user mendefinisikan hak akses dan privileginya.</p>	<p>keberjalanan manajemen jaringan</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas arsitektur keamanan informasi yang diimplementasikan</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas keberjalanan ISMS.</p>	

7.4.11. IFT11 – Database/ Big Data

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT11

Label : Database & Big Data

Definisi : Kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan pengelolaan data korporat serta teknologinya, termasuk mengantisipasi pemanfaatan pertumbuhan big data ke depan

Tabel 12 Deskripsi Area Kompetensi – IFT11

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami arsitektur database (RDBMS = relational database management sytem): perancangan, operasi dan optimasi kinerja.</p> <p>Memahami arsitektur Datawarehouse – Business Intelligence.</p> <p>Memahami arsitektur big data untuk data terstruktur maupun tidak terstruktur, dan pemanfaatnya bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan.</p>	<p>Mampu merancang dan mengimplementasi database untuk sistem informasi sederhana.</p> <p>Mampu merancang dan mengimplementasikan datawarehouse – business intelligence untuk subject area yang tidak kompleks.</p>	<p>Mampu merancang dan mengimplementasikan database yang kompleks, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kinerja untuk transaksi bervolume besar.</p> <p>Mampu merancang dan mengimplementasikan datawarehouse-business intelligence untuk multi subject area korporat</p> <p>Mampu menganalisa kebutuhan arsitektur big data yang relevan dengan kebutuhan organisasi</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas perancangan, operasi dan kinerja database.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas perancangan dan implementasi datawarehouse-business intelligence</p> <p>Mampu merancang dan mengimplementasikan layanan data predictive analytic.</p> <p>Mampu merancang dan mengimplementasikan arsitektur big data yang sesuai dengan analisa kebutuhan organisasi.</p>	<p>Mampu menyusun strategi baru terkait arsitektur database dan big data untuk meningkatkan kualitas layanan organisasi</p>

7.4.12. IFT12 – System Instalation

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT11

Label : System Installation

Definisi : Kemampuan dalam mengelola proses instalasi system yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Proses instalasi meliputi perencanaan instalasi, pengujian, implementasi dan juga penghapusan aset baik hardware maupun software.

Tabel 13 Deskripsi Area Kompetensi – IFT12

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mampu memahami dan mengikuti tahapan-tahapan dalam melakukan instalasi sederhana, penggantian item, pengecekan proses instalasi, dan melakukan dokumentasi beserta pelaporan dari kegiatan instalasi yang telah dilakukan	Mampu melakukan instalasi dan penghapusan hardware atau software, dan koneksi menggunakan instruksi dan tools instalasi. Mampu melakukan pengujian dan perbaikan dari malfungsi yang terjadi. Mampu melakukan dokumentasi berdasarkan prosedur yang telah disetujui.	Mampu melakukan instalasi dan penghapusan hardware atau software, dan koneksi menggunakan instruksi dan tools instalasi. Dan jika diperlukan melakukan serah terima kepada klien Mampu melakukan pengujian, perbaikan dari malfungsi yang terjadi. Mampu melakukan dokumentasi berdasarkan prosedur yang telah disetujui.	Mampu melakukan instalasi rutin dan de-instalasi item perangkat keras dan / atau perangkat lunak. Mampu mengambil tindakan untuk memastikan target terpenuhi dan sesuai dengan prosedur keselamatan dan kualitas yang ditetapkan, termasuk, jika perlu, melakukan serah terima kepada klien. Mampu melakukan pengujian perangkat keras	Mampu mengemban tanggung jawab untuk proyek instalasi, menyediakan kepemimpinan tim yang efektif, termasuk mampu menjadi penanggung jawab utama terhadap klien selama proyek. Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kualitas dan metode instalasi. Mampu melakukan monitoring efektivitas instalasi dan memastikan

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
	<p>Mampu mendukung dari permintaan perubahan serta melakukan investigasi dari masalah dan kendala yang terjadi. Selain itu juga mampu memberikan solusi sederhana dari masalah ataupun kendala yang terjadi.</p>	<p>Mampu melakukan pelaporan secara mendetail dari keseluruhan hardware/software yang telah terinstall ataupun dihapus sehingga catatan configuration management bisa diperbaharui.</p> <p>Mampu melakukan dukungan pada user secara profesional sesuai dengan prosedur dan mampu melakukan eskalasi dan reviu permintaan perubahan.</p> <p>Mampu melakukan pencatatan permintaan user, kontak dari user terkait, beserta capaian dari permintaan secara mendetail.</p> <p>Mampu melakukan kontribusi terhadap pengembangan dari</p>	<p>dan / atau perangkat lunak menggunakan prosedur uji dan tools yang disediakan.</p> <p>Mampu melakukan koreksi terhadap malfungsi, dan menghubungi kolega maupun sumber daya eksternal jika diperlukan.</p> <p>Mampu melakukan dokumentasi secara mendetail terhadap semua item perangkat keras / perangkat lunak yang telah dipasang dan dihapus sehingga catatan configuration management dapat diperbarui.</p> <p>Mampu melakukan kontribusi terhadap pengembangan dari prosedur dan standar instalasi.</p>	<p>bahwa perubahan telah dilakukan dengan baik.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
		prosedur dan standar instalasi	Mampu memberikan bimbingan dan saran kepada rekan yang kurang berpengalaman guna mempertahankan atau meningkatkan layanan instalasi.	

7.4.13. IFT13 – Service Transition

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT13

Label : Service Transition

Definisi : Kemampuan untuk melakukan transisi ke operasi untuk layanan TI baru atau layanan TI hasil perubahan, atau memberhentikan retired service yang sudah tidak diperlukan lagi oleh organisasi

Tabel 14 Deskripsi Area Kompetensi – IFT13

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami proses-proses utama dalam service transition yaitu Transition Planning & Support, Release & Deployment Management, Service Validation & Testing dan Change Evaluation.</p> <p>Memahami proses-proses yang mendukung service transition, yaitu change management, asset & configuration management, knowledge management</p>	<p>Mampu melakukan transisi atas layanan TI dengan supervisi intensif dari pihak terkait</p> <p>Mampu melakukan kegiatan terkait change management, asset & configuration management, knowledge management dengan supervisi</p>	<p>Mampu melakukan kegiatan dalam transisi layanan secara mandiri, dengan supervisi minimal</p> <p>Mampu melakukan kegiatan terkait change management, asset & configuration management, knowledge management secara mandiri, dengan supervisi minimal</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas kegiatan transisi layanan</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas pelaksanaan proses pendukung change management, asset & configuration management, knowledge management secara mandiri</p>	<p>Mampu menjadi nara sumber bagi pelaksanaan service transition untuk berbagai kasus tipe layanan</p>

7.4.14. IFT14 – IT Infrastructure Operation

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT14

Label : IT Infrastructure Operation

Definisi : Kemampuan untuk melakukan operasi dan kontrol terhadap infrastruktur TI yang termasuk didalamnya terkait perangkat physical ataupun perangkat virtual, perangkat lunak, network services dan data storage

Tabel 15 Deskripsi Area Kompetensi – IFT14

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mampu melakukan kontribusi terkait pengawasan pada operasi infrastruktur.	Mampu menjalankan prosedur operasional secara rutin. Mampu berkontribusi dalam perawatan, instalasi, dan penanganan masalah	Melakukan menjalankan prosedur operasional, termasuk konfigurasi infrastruktur, instalasi dan pemeliharaan. Mampu menggunakan tools manajemen infrastruktur untuk mengumpulkan dan melaporkan kondisi statistik dan kinerja infrastruktur Mampu melakukan automasi penyediaan, pengujian, dan	Mampu memberikan keahlian teknis dalam pelaksanaan prosedur operasi. Mampu menggunakan Infrastructure management tools dalam menganalisa dan menentukan beban dan kinerja. Mampu menerapkan perubahan infrastruktur dan pemeliharaan rutin. Mampu melakukan konfigurasi guna	Mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pemeliharaan proses instalasi, termasuk membangun dan melakukan konfigurasi komponen infrastruktur di lingkungan virtual. Mampu melakukan identifikasi permasalahan operasional dan berkontribusi pada resolusi dan melakukan pengecekan terhadap masalah tersebut

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
		<p>pengembangan infrastruktur</p> <p>Mampu melaksanakan pemeliharaan dan instalasi.</p> <p>Mampu dalam pelaksanaan terhadap prosedur dan backup sistem yang telah ditetapkan</p> <p>Mampu melakukan penulihan data jika diperlukan.</p> <p>Mampu mengidentifikasi masalah operasional dan berkontribusi pada resolusinya.</p>	<p>melakukan proses otomasi, pengujian dan pengembangan pada infrastruktur baru maupun perubahan infrastruktur.</p> <p>Mampu melakukan pelaporan terkait infrastruktur</p>	<p>Mampu melakukan pelaporan dan memberikan pengajuan terhadap peningkatan kepada users dan manajer</p>

7.4.15. IFT15 – Application Support

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT15

Label : Application Support

Definisi : Kemampuan dalam mengelola proses dukungan dan perawatan terhadap aplikasi yang berhubungan dengan layanan TI baik yang berhubungan langsung dengan user, maupun kepada fungsi penyampaian layanan.

Tabel 16 Deskripsi Area Kompetensi – IFT15

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Mampu mendukung dalam proses investigasi dan resolusi terhadap isu-isu yang terkait dengan aplikasi</p> <p>Mampu mendukung terhadap proses-proses perawatan yang ada pada prosedur yang telah ditetapkan.</p>	<p>Mampu melakukan identifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Aplikasi yang digunakan yaitu prosedur baku yang telah ditetapkan</p> <p>Mampu menggunakan Application management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait aplikasi.</p>	<p>Mampu melakukan proses-proses terkait application support dan melakukan pengecekan terhadap dukungan terhadap permintaan terkait application support</p> <p>Mampu menggunakan Application management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait aplikasi.</p> <p>Mampu melaksanakan tahapan-tahapan perawatan aplikasi</p>	<p>Mampu melakukan proses-proses terkait application support dan melakukan pengecekan terhadap dukungan terhadap permintaan terkait application support</p> <p>Mampu melaksanakan tahapan-tahapan perawatan aplikasi</p> <p>Mampu menggunakan Application management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait aplikasi.</p> <p>Mampu melakukan pelaporan terhadap informasi-informasi statistik terkait aplikasi</p>	<p>Mampu menyusun draft dan mengelola prosedur dan dokumentasi terhadap dukungan aplikasi</p> <p>Mampu mengelola peningkatan aplikasi guna meningkatkan performa bisnis.</p> <p>Mampu memberikan masukan terhadap keamanan aplikasi, lisensi aplikasi, upgrade, backup, dan keperluan terkait pemulihan bencana.</p> <p>Mampu memastikan seluruh permintaan yang terkait dapat dipenuhi sesuai dengan standar dan</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
				prosedur baku yang telah ditentukan

7.4.16. IFT16 – Network Support

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT16

Label : Network Support

Definisi : Kemampuan dalam melakukan provisioning terhadap perawatan dan dukungan terhadap jaringan yang dimana didalamnya terdapat proses investigasi, penyelesaian masalah, monitoring terhadap performa jaringan, dan hal-hail lain yang terkait dengan dukungan terhadap jaringan.

Tabel 17 Deskripsi Area Kompetensi – IFT16

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Mampu mendukung dalam proses investigasi dan resolusi terhadap isu-isu yang terkait dengan jaringan</p> <p>Mampu mendukung terhadap proses-proses perawatan yang ada pada prosedur yang telah ditetapkan.</p>	<p>Mampu melakukan identifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan jaringan menggunakan prosedur baku yang telah ditetapkan</p> <p>Mampu menggunakan Network management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait jaringan.</p>	<p>Mampu melakukan proses-proses terkait network support dan melakukan pengecekan terhadap dukungan terhadap permintaan terkait network support</p> <p>Mampu menggunakan network management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait jaringan.</p> <p>Mampu melaksanakan tahapan-tahapan perawatan jaringan.</p>	<p>Mampu melakukan proses-proses terkait network support dan melakukan pengecekan terhadap dukungan terhadap permintaan terkait network support</p> <p>Mampu melaksanakan tahapan-tahapan perawatan jaringan</p> <p>Mampu menggunakan network management software dan tools guna mendapatkan informasi statistik terkait jaringan.</p>	<p>Mampu menyusun draft dan mengelola prosedur dan dokumentasi terhadap dukungan jaringan</p> <p>Mampu mengelola peningkatan jaringan guna meningkatkan performa bisnis.</p> <p>Mampu memberikan masukan terhadap keamanan jaringan, lisensi jaringan, upgrade, backup, dan keperluan terkait pemulihan bencana.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
			Mampu melakukan pelaporan terhadap informasi-informasi statistik terkait jaringan	Mampu memastikan seluruh permintaan yang terkait dapat dipenuhi sesuai dengan standar dan prosedur baku yang telah ditentukan

7.4.17. IFT17 – Database Administration

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT17

Label : Database Administration

Definisi : Kemampuan dalam melakukan instalasi, konfigurasi, upgrade, administrasi, monitoring dan perawatan terhadap database. Serta kemampuan dalam melakukan dukungan terhadap operasional database pada lingkungan pengembangan dan produksi.

Tabel 18 Deskripsi Area Kompetensi – IFT17

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mampu melakukan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan database support	Mampu menggunakan Database management software dan tools guna melakukan pengumpulan informasi statistik terhadap performa database. Mampu menggunakan aplikasi dan tools terkait dalam melakukan investigasi terhadap masalah dan melakukan pengumpulan terhadap informasi statistik serta membuat laporannya.	Mampu menggunakan database management system software and tools. Mampu melakukan kegiatan rutin terkait konfigurasi, instalasi dan rekonfigurasi terhadap database dan produk terkait. Mampu mengidentifikasi masalah dan isu-isu terkait, serta memberikan rekomendasi terhadap kegiatan perbaikan terhadap masalah dan isu-isu terkait.	Mampu melakukan identifikasi, evaluasi dan mengelola adopsi terhadap database management tools dan otomasi. Mampu melakukan pengembangan dan mengkonfigurasi tools terkait guna melakukan otomasi terhadap kegiatan administrasi database Mampu mengelola konfigurasi database termasuk melakukan instalasi dan pembaharuan software terkait, termasuk	Mampu melakukan perawatan dan pengembangan terhadap prosedur dan dokumentasi dari database. Mampu memberikan kontribusi terhadap standar dan definisi, kamanan dan integritas terhadap objek database, serta memastikan kesesuaian terhadap standar tersebut. Mampu melakukan optimasi performa database dan melakukan

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
	Mampu melaksanakan kegiatan administrasi dan perawatan database		<p>melakukan dokumentasi proses tersebut.</p> <p>Mampu melakukan monitoring terhadap kegiatan dan penggunaan sumberdaya database.</p>	perencanaan terhadap perkiraan kebutuhan sumberdaya kedepannya.

7.4.18. IFT18 – Security Administration

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT18

Label : Security Administration

Definisi : Kemampuan dalam melakukan administrasi dan manajemen keamanan operasional., pemberian otorisasi akses dan monitoring akses TI.

Tabel 19 Deskripsi Area Kompetensi – IFT18

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Mampu melakukan pekerjaan administrasi keamanan yang simple.	Mampu menerima dan merespon permintaan terkait dukungan keamanan yang bersifat rutin	Mampu menginvestigasi pelanggaran keamanan minor sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta memberikan rekomendasi dan corrective action terkait pelanggaran tersebut.	Mampu memonitor pengimplementasian serta kepatuhan administrasi keamanan terhadap standard dan ketentuan yang berlaku.	Mampu menyusun kebijakan, standar, prosedur terkait keamanan sistem.
Mampu mengelola rekaman dan dokumentasi terkait administrasi keamanan	Mampu mengelola dokumentasi, serta mengeskalasikannya pada personel yang relevan.	Mampu membantu user untuk mendefinisikan hak akses dan privilege sesuai tanggung jawabnya	Mampu memastikan seluruh pelanggaran keamanan terinvestigasi, dan corrective action dapat terimplementasi.	Memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta dapat terimplementasi dengan baik.
	Mampu mendukung investigasi dan penyelesaian permasalahan terkait akses kontrol dan keamanan sistem,		Mampu terlibat dalam penyusunan kebijakan, standar, atau prosedur terkait keamanan.	

7.4.19. IFT19 – IT Governance

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT19

Label : IT Governance

Definisi : Kemampuan terkait dengan pengelolaan TI level korporat, yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan, leadership, struktur tata kelola, proses tata kelola dan indikator kinerja tata kelola.

Tabel 20 Deskripsi Area Kompetensi – IFT19

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami model operasi TI sebagai konteks implementasi IT Governance</p> <p>Memahami framework IT Governance:</p> <p>a. Entitas pengambil keputusan dan mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>b. Struktur tata kelola TI</p> <p>c. Proses tata kelola TI</p> <p>d. Teknologi pendukung tata kelola TI</p> <p>e. Metrik tata kelola TI</p>	<p>Mampu menjalankan proses tata kelola TI secara tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau good practice yang ada, sesuai dengan posisinya dalam organisasi TI.</p> <p>Mampu mengoperasikan tool teknologi pendukung terkait dengan proses tata kelola yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>Mampu menganalisa proses-proses tata kelola</p>	<p>Mampu menganalisa entitas pengambil keputusan TI dan alternatif mekanisme pengambilan keputusan.</p> <p>Mampu menganalisa kebutuhan fungsi dalam sebuah struktur organisasi TI, serta kebutuhan kompetensi terkait dengan struktur organisasi.</p> <p>Mampu mengukur IT Maturity Level atau IT Capability Level, merujuk</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan komponen struktur tata kelola TI yang mencakup aspek leadership dan struktur organisasi TI, termasuk pengembangan kompetensi TI.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan proses tata kelola TI, berdasarkan pertimbangan business goal dan organizational risk profile.</p>	<p>Mampu mengusulkan penyempurnaan model operasi TI dengan mempertimbangkan perubahan konteks organisasi dan trend TI terkait.</p> <p>Mampu mengusulkan penyempurnaan IT Governance yang telah diimplementasikan, merujuk kepada usulan model operasi penyempurnaan.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
Memahami metodologi untuk mengukur IT Maturity Level dan IT Capability Level untuk proses-proses pengelolaan TI berdasarkan framework yang dikeluarkan ISACA.	TI prioritas berdasarkan pertimbangan kepatuhan, business goal atau risiko prioritas.	<p>kepada framework yang dikeluarkan ISACA.</p> <p>Mampu menyusun program kerja untuk peningkatan IT Maturity Level atau IT Capability Level.</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan tool teknologi pendukung.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan metrik IT Governance.</p>	

7.4.20. IFT20 – Risk Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)
 Kode : IFT20
 Label : Risk Management
 Definisi : Kemampuan terkait pengelolaan risiko TI

Tabel 21 Deskripsi Area Kompetensi – IFT20

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami metodologi manajemen risiko TI.</p> <p>Memahami metodologi manajemen kualitas TI. Memahami metode terkait pengembangan, maintenance, dan control pada manajemen kualitas TI.</p> <p>Memahami metodologi penilaian tingkat kepatuhan terhadap framework kontrol TI internal atau good practices.</p>	<p>Mampu melakukan risk assessment atas sebuah proyek atau operasi TI.</p> <p>Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas sebuah proyek pengembangan sistem TI yang tidak kompleks. Membantu pada proyek, fungsi, atau tim, untuk merencanakan manajemen kualitas dan pengukuran kualitas di lingkungannya. Melaksanakan audit atau review untuk memastikan compliance pada standar manajemen kualitas.</p>	<p>Mampu melakukan seluruh proses dalam siklus manajemen risiko TI, baik untuk proyek, operasi maupun aspek-aspek strategis TI. Mampu menginvestigasi serta melaporkan risiko pada aspek TI, atau aspek bisnis yang berpengaruh pada TI.</p> <p>Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas sebuah proyek pengembangan sistem TI dan operasi TI yang kompleks. Memahami penerapan Teknik dan standar manajemen kualitas.</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko TI yang sudah berjalan. Mampu melakukan risk assessment pada aspek TI atau bisnis yang berkaitan dengan TI, dengan proses identifikasi potensi kemungkinan dan dampak risiko yang konsisten, dan mengembangkan contingency plan yang sesuai.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas manajemen</p>	<p>Mampu mengusulkan perbaikan strategi dalam pelaksanaan manajemen kualitas, kepatuhan dan risiko TI organisasi secara menyeluruh. Mampu menentukan alokasi resource untuk implementasi contingency plan pada risiko.</p> <p>Mampu mengusulkan program untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan manajemen kualitas, kepatuhan dan risiko TI. Mampu menentukan strategi dan kebijakan manajemen kualitas bagi perusahaan,</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
	Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas proses-proses dasar dalam operasi TI, yaitu manajemen insiden, manajemen permasalahan dan dukungan teknis.	<p>Mampu meren-canakan dan mengelola audit kualitas pada proyek, program, atau fungsi utama. Merencanakan dan mengim-plementasikan improvement untuk mengukur kualitas.</p> <p>Mampu mengintegrasikan pelaksanaan manajemen kualitas, kepatuhan dan risiko, sejak tahap perencanaan sampai dengan penilaian.</p>	<p>kualitas dan kepatuhan TI yang berjalan. Mampu memprioritaskan area peningkatan kualitas, sesuai dengan strategi, tujuan bisnis, serta hasil audit internal dan eksternal. Memimpin, mengembangkan, dan bertanggung jawab terhadap langkah perusahaan terkait QA. Menyusun framework pnegukuran kualitas dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas penyelarasan kegiatan dalam manajemen kualitas, kepatuhan dan risiko TI.</p>	serta memastikan adanya komitmen dari top management. Menentukan tingkat keselarasan kebijakan manajemen kualitas dengan kebutuhan perusahaan. Merencanakan, menyediakan sumber daya, serta memonitor performa sistem manajemen kualitas dan proses audit kualitas internal perusahaan.

7.4.21. IFT21 – Quality & Comformance Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT21

Label : Quality & Conformance Management

Definisi : Kemampuan terkait pengelolaan kualitas dan kepatuhan TI

Tabel 22 Deskripsi Area Kompetensi – IFT21

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami metodologi manajemen kualitas TI. Memahami metode terkait pengembangan, maintenance, dan control pada manajemen kualitas TI.</p> <p>Memahami metodologi penilaian tingkat kepatuhan terhadap framework kontrol TI internal atau good practices.</p>	<p>Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas sebuah proyek pengembangan sistem TI yang tidak kompleks. Membantu pada proyek, fungsi, atau tim, untuk merencanakan manajemen kualitas dan pengukuran kualitas di lingkungannya. Melaksanakan audit atau review untuk memastikan compliance pada standar manajemen kualitas.</p> <p>Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas proses-proses dasar dalam operasi TI, yaitu manajemen insiden, manajemen permasalahan dan dukungan teknis.</p>	<p>Mampu melakukan quality assurance dan penilaian kepatuhan atas sebuah proyek pengembangan sistem TI dan operasi TI yang kompleks. Memahami penerapan Teknik dan standar manajemen kualitas. Mampu merencanakan dan mengelola audit kualitas pada proyek, program, atau fungsi utama. Merencanakan dan mengimplementasikan improvement untuk mengukur kualitas.</p> <p>Mampu mengintegrasikan pelaksanaan manajemen kualitas dan kepatuhan, sejak tahap perencanaan sampai dengan penilaian.</p>	<p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas manajemen kualitas dan kepatuhan TI yang berjalan. Mampu memprioritaskan area peningkatan kualitas, sesuai dengan strategi, tujuan bisnis, serta hasil audit internal dan eksternal. Memimpin, mengembangkan, dan bertanggung jawab terhadap langkah perusahaan terkait QA. Menyusun framework pengukuran kualitas dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis.</p> <p>Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan atas penyelarasan kegiatan</p>	<p>Mampu mengusulkan program untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan manajemen kualitas dan kepatuhan TI. Mampu menentukan strategi dan kebijakan manajemen kualitas bagi perusahaan, serta memastikan adanya komitmen dari top management. Menentukan tingkat keselarasan kebijakan manajemen kualitas dengan kebutuhan perusahaan. Merencanakan, menyediakan sumber daya, serta memonitor performa sistem manajemen kualitas dan proses audit kualitas internal perusahaan.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
			dalam manajemen kualitas dan kepatuhan TI.	

7.4.22. IFT22 – Security Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)

Kode : IFT22

Label : Security Management

Definisi : Kemampuan terkait pengelolaan Keamanan TI dan keamanan informasi

Tabel 23 Deskripsi Area Kompetensi – IFT22

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Memahami konsep manajemen keamanan dan keamanan informasi</p> <p>Memahami framework terkait manajemen keamanan dan keamanan informasi</p> <p>Memahami risiko terkait dengan keamanan baik terkait teknis maupun korporat</p>	<p>Mampu mengkomunikasikan risiko keamanan TI dan menyampaikannya pada BPO.</p> <p>Mampu melaksanakan risk assessment standar pada sistem informasi berskala kecil.</p> <p>Mampu terlibat pada vulnerability assessment.</p>	<p>Mampu memberikan arahan dan panduan terkait penerapan keamanan TI.</p> <p>Memahami kontrol keamanan baik teknis, fisik, maupun procedural.</p> <p>Mampu melaksanakan security risk assessment, vulnerability assessment, serta business impact analysis</p>	<p>Mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan informasi di lingkup korporat, dan turunannya dalam bentuk standar, pedoman, serta prosedur.</p> <p>Mampu terlibat pada pengembangan strategi organisasi terkait dengan aspek keamanan TI.</p> <p>Memastikan prinsip dan arsitektur terkait keamanan informasi telah terimplementasikan untuk mengurangi risiko terkait</p>	<p>Mampu mengelola pengembangan, pengimplementasian, dan operasional dari strategi keamanan informasi perusahaan dan memastikannya selaras dengan kebutuhan bisnis.</p> <p>Memastikan kepatuhan strategi bisnis terhadap prinsip keamanan TI, secara corporate wide.</p>

7.4.23. IFT23 – Human Resource Management

Kelompok Kompetensi : Information Technology (IFT)
 Kode : IFT23
 Label : Human Resource Management
 Definisi : Kemampuan terkait pengelolaan SDM TI

Tabel 24 Deskripsi Area Kompetensi – IFT23

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>Mampu memonitor pekerjaan sesuai dengan KPI. Mampu memfasilitasi budaya kerja yang efektif antar anggota tim.</p> <p>Mampu memfasilitasi proses seleksi, assessment, dan pengalokasian SDM. Terlibat dalam proses transisi SDM sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.</p> <p>Terlibat dalam proses pengembangan kompetensi SDM. Mampu memonitor</p>	<p>Mampu mensupervisi baik individu maupun kelompok, dan mengalokasikan pekerjaan rutin dan project</p> <p>Mampu mengimplementasikan resource plan, dan melakukan recruitment interview.</p> <p>Mampu mengelola kamus kompetensi SDM dan memahami outcome dari program pengembangan kompetensi SDM.</p>	<p>Mampu mengalokasikan pekerjaan rutin dan project, termasuk alokasi tanggung jawab pengawasan. Mampu menetapkan target performa personel, dan memonitor performa sesuai dengan KPI. Mampu memberikan feedback terkait performa personel.</p> <p>Mampu memastikan perusahaan memiliki cukup personel yang berkompentensi sesuai dengan tujuan perusahaan. Mengimplemen-tasikan</p>	<p>Mampu menyediakan arahan pada personel sesuai dengan kompetensinya. Mampu memberi masukan terkait career path personel, serta mendorong peningkatan kompetensi personel secara proaktif.</p> <p>Mampu memberi masukan terkait standar, metode, atau tools terkait resource management. Memastikan kepatuhan proses recruitment dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku</p>	<p>Mampu menentukan tanggung jawab manajerial. Menentukan target performa, serta memonitor progress sesuai dengan KPI. Menyediakan bimbingan dan dukungan pada personel untuk mencapai tujuan perusahaan. Membimbing dan mempengaruhi personel senior terkait dengan peluang karirnya. Melakukan proses negosiasi kompensasi serta proses punishment pada personel.</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
<p>program pengembangan SDM dan memastikan outcome yang didapat sesuai dengan yang diharapkan.</p>		<p>proses resource planning, recruitment, assessment, serta transisi personel.</p> <p>Mampu menentukan outcome yang diharapkan dari proses pengembangan kompetensi dan menyusun analisa kebutuhan pelatihan (training need analysis).</p>	<p>Mampu memastikan ketercapaian outcome yang telah ditentukan.</p> <p>Memastikan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan arahan strategis.</p>	<p>Mampu menyusun kebijakan resourcing personel, sesuai dengan tujuan strategis perusahaan.</p> <p>Bertanggungjawab pada resource planning, recruitment, assessment, serta transisi SDM. Mendukung tercapainya SDM berkualifikasi untuk mendukung tujuan perusahaan.</p> <p>Melaksanakan audit ketercapaian proses resource management.</p> <p>Menyusun strategi pengembangan untuk mendukung ketercapaian kebutuhan bisnis dan arahan strategis. Mengembangkan, meng-encourage, dan mendukung personel untuk menentukan dan mencapai career path. Memonitor dan mengevaluasi keuntungan perusahaan</p>

Tingkat Kemahiran – Indikator Perilaku				
1 – Awareness	2 – Basic Application	3 – Skillfull Application	4 – Advance	5 – Expert
				dari pengembangan personel yang telah dilakukan.

7.5. Lampiran IT Maturity Assessment

7.5.1.PO1 – Define IT Strategic Plan

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Value management - Business/IT Alignment - Assessment of current capability & performance - IT Strategic Plan - IT Tactical Plan - IT Portfolio Management 	<p>1. Kebijakan sudah memuat komponen IT strategic plan, IT Tactical Plan</p> <p>2. Telah terdapat prosedur terkait strategi perencanaan TI</p> <p>3. Terkait IT Master plan pembuatannya masih berdasarkan Renstra</p>	<p>1. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116 Tahun 2020 tentang Peta Strategi BKKBN dan Eselon I BKKBN</p> <p>2. Perban No 6, Tahun 2020</p> <p>3. SOP Cetak Biru STIK BKKBN/Renstra/Kebijakan/lainya tentang pengelolaan STIK</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	<p>Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	<p>Perban 11 SOTK. (hal : 25)</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Telah terdapat KPI terkait (Penyerapan anggaran Direktorat Teknologi Informasi dan Data)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	- Pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi - Key person/PIC yang mengikuti pelatihan tersebut sudah tidak bekerja di unit terkait, dan belum pernah melaksanakan transfer knowledge	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Terdapat Notulensi terkait IT Strategic Plan	1. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. Notulensi Rapat	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level Proses	2,58	3,00
-----------------------	------	------

7.5.2.PO2 – Define the Information Architecture

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enterprise Information Architecture Model - Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules - Data Classification Scheme - Integrity Management 	<p>1. Terdapat kebijakan terkait arsitektur informasi</p> <p>2. Terdapat prosedur terkait arsitektur informasi</p> <p>3. Telah terdapat kamus data, namun belum dilegalkan</p>	<p>1.Perka Kebijakan Pengelolaan TIK Program KKBPK (Pasal 14, 30 & 52)</p> <p>2. Berikut SOP terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan laporan kebijakan/strategi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan laporan kebijakan/strategi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan evaluasi kebijakan pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan Perencanaan kebijakan teknis sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Pengelolaan Data Warehouse - Penyusunan standarisasi struktur basis data 	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
			3. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;		
Responsibility & Accountability	Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	Perban 11 SOTK. (hal : 25)	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Belum terdapat KPI khusus terkait arsitektur informasi/IT Master Plan	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Belum terdapat pelatihan dan sertifikasi khusus terkait arsitektur informasi * Contoh: TOGAF	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Terdapat notulensi terkait Arsitektur Informasi	1. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. Notulensi Rapat	3,00	3,00
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	1. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. Notulensi Rapat	1,00	3,00

Maturity Level Proses	2,00	3,00
-----------------------	------	------

7.5.3.PO3 – Determine Technological Direction

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technological Direction Planning - Technology Infrastructure Plan - Monitor Future Trends and Regulations - Technology Standards - IT Architecture Board 	<p>1. Telah terdapat kebijakan terkait arahan teknologi</p> <p>2. Telah terdapat SOP terkait</p> <p>3. Telah terdapat rencana strategi</p> <p>4. Belum terdapat ITSC</p>	<p>1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 425/PER/G5/2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. SOP Cetak Biru STIK BKKBN/Renstra/Kebijakan/lainya tentang pengelolaan STIK</p> <p>3. Perban No 6, Tahun 2020 (RENSTRA)</p> <p>4. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	<p>Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	<p>PERBAN 11 SOTK. (hal : 25)</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Belum terdapat KPI khusus terkait arahan teknologi/IT Master Plan	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	- Pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi - Key person/PIC yang mengikuti pelatihan tersebut sudah tidak bekerja di unit terkait, dan belum pernah melaksanakan transfer knowledge	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Terdapat Notulensi terkait arahan teknologi /IT Master Plan	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level Proses	2,25	3,00
-----------------------	------	------

7.5.4.PO4 – Define the IT Processes, Organization and Relationship

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
<p>Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur</p>	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT Process Framework - IT Strategy Committee - IT Steering Committee - Organisational Placement of the IT Function - IT Organisational Structure - Establishment of Roles and Responsibilities - Responsibility for IT Quality Assurance - Responsibility for Risk, Security and Compliance - Data and System Ownership - Supervision - Segregation of Duties - IT Staffing - Key IT Personnel - Contracted Staff Policies and Procedures - Relationships 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur keseluruhan proses TI</p> <p>2. Telah tersedia SOP terkait TI sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan laporan kebijakan/strategi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan evaluasi kebijakan pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan Perencanaan kebijakan teknis sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - Uraian Pekerjaan Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi - SOP Penyusunan telaahan pengembangan sistem aplikasi - SOP pembangunan/pengembangan sistem aplikasi 	<p>1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 425/PER/G5/2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Standar Operasional Prosedur (SOP)_2018</p> <p>3. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	<p>3,00</p>	<p>3,00</p>

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
		<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan sistem aplikasi 3. Untuk beberapa jobdesk masih belum menerapkan SoD 4. Telah terdapat proses QA, dan telah terdapat dokumentasi 			
Responsibility & Accountability	Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	Perban 11 SOTK. (hal : 25)	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Belum terdapat KPI khusus terkait proses Define the IT Processes, Organization and Relationships	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	1. Pelatihan Cobit 2. Analyze Cloud Computing	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Terdapat Notulensi terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
			Maturity Level Proses	2,25	3,00

7.5.5.PO5 – Manage the IT Investment

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Management Framework - Prioritisation Within IT Budget - IT Budgeting - Cost Management - Benefit Management 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai manajemen investasi TI</p> <p>2.Telah terdapat SOP terkait Manajemen investasi/SOP anggaran</p> <p>3. Telah terdapat RKAP</p> <p>4. Proses ini sudah ditunjang oleh aplikasi : SAKTI, SMART</p> <p>5. Belum menerapkan best practice</p>	<p>1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 425/PER/G5/2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. SOP BIREN_2020</p> <p>3.LAKIP_BIRO_PERENCANAAN_TAHUN_2019</p>	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Data - Biro Perencanaan - Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara - Budaya reward 	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
	dengan jobdesc yang sudah ada?	juga sudah dilaksanakan			
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	- Telah terdapat KPI terkait manajemen investasi TI - Penyerapan anggaran (dokumen BSC)	1. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. KPI bisa diakses di BKKbn.go.id --> Kinerja Akuntabilitas 3. KEPKA_IKU_Nomor_108_Tahun_2020	3,50	3,50
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	1. Pelatihan COBIT (namun belum terdokumentasi) 2. Pelatihan terkait penggunaan aplikasi terkait SAKTI dan SMART (documented)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	- MoM pembahasan anggaran - Teknik komunikasi yang mapan telah diterapkan serta tools komunikasi standar telah digunakan	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,50	3,50
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	SAKTI (proses pengajuan - evaluasi) SMART (untuk proses monitoring) KRISNA (Bappenas program dan anggran)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,50	3,50

Maturity Level Proses	3,33	3,50
-----------------------	------	------

7.5.6.PO6 – Communicate Management Aims and Direction

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT Policy and Control Environment - Enterprise IT Risk and Control Framework - IT Policies Management - Policy, Standard and Procedures Rollout - Communication of IT Objectives and Direction 	<p>1. Terdapat kebijakan khusus terkait</p> <p>2. Terdapat meeting dan draft dokumen terkait master plan</p> <p>3. Terdapat arahan deputyi terkait management aims dan direction</p>	<p>1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 425/PER/G5/2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116 Tahun 2020 tentang Peta Strategi BKKBN dan Eselon I BKKBN</p> <p>3. SOP Cetak Biru STIK</p> <p>4. Cetak Biru STIK BKKBN 2015-2019</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	<p>Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Pengukuran dilakukan secara lisan, evaluasi master plan dilakukan setiap tahunnya, namun belum ada kebijakan atau proses yang mengatur	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Pelatihan COBIT (namun belum terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Cisco Webex	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

Maturity Level Proses	2,58	3,00
-----------------------	------	------

7.5.7.PO7 – Manage IT Human Resources

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personnel Recruitment and Retention - Personnel Competencies - Staffing of Roles - Personnel Training - Dependence Upon Individuals - Personnel Clearance Procedures - Employee Job Performance Evaluation - Job Change and Termination 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur terkait IT Human resources</p> <p>2. Telah terdapat SOP yang mempertimbangkan terkait proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on boarding dan off boarding, dan mutasi pegawai - Proses training dan Job Performance Evaluation 	<p>1. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 116 Tahun 2020 tentang Peta Strategi BKKBN dan Eselon I BKKBN (Pasal 7/i)</p> <p>2. Kepka BKKBN nomor 92 tahun 2020 tentang SKJ.pdf</p> <p>3. Berikut SOP terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural - SOP Perpindahan Antar Unit Kerja di Lingkungan BKKBN Pusat - SOP Perpindahan Antar Unit Kerja di Lingkungan BKKBN Pusat 	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Sumber Daya Manusia - Direktorat Teknologi Informasi dan Data - Budaya reward juga sudah dilaksanakan 	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p> <p>3. Interview dengan Biro Sumber Daya Manusia</p>	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
	jobdesc yang sudah ada?				
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	1. Telah terdapat KPI berupa: kalau internal SDM berupa PK (Penilaian Kinerja) eselon 2 serentak semua unit sama 2. Indeks budaya kerja 3. Jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi (terdapat dalam BSC)	1. Interview dengan : - Biro Sumber Daya Manusia dan Data; - Direktorat Teknologi Informasi 2. KEPKA_IKU_Nomor_108_Tahun_2020 3. Peta Strategis Balance Scorecard	3,50	3,50
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	1. Telah terdapat: - Praktik transfer knowledge/pelatihan/Bimbingan teknis, walaupun pada praktiknya beberapa pelatihan dan sertifikasi belum terdokumentasi dengan baik 2. Untuk center pelatihan dilaksanakan di PUSDIKLAT	Interview dengan : - Biro Sumber Daya Manusia dan Data;	2,50	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Awareness	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	- Reguler meeting - Belum optimalnya pembahasan issue kritikal terkait proses Manage IT Human Resources (Belum ada tindaklanjut yang signifikan terkait kurang SDM di unit TI)	1. Interview dengan : - Biro Sumber Daya Manusia - Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. NOTULEN SOSIALISASI MEKANISME PPK PNS BKKBN PASCA JA KE JF 230920 fix.pdf 3. Notulen Meet n Greet PP.pdf	3,00	3,50
Tool	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	1. SIM SDM: seluruh pegawai memiliki akses ke aplikasi ini 2. SIFIKA (Sistem Informasi Visum Kinerja)	Interview dengan : - Biro Sumber Daya Manusia - Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,50	3,50

Maturity Level Proses	3,17	3,42
-----------------------	------	------

7.5.8.PO8 – Manage Quality

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quality Management System - IT Standards and Quality Practices - Development and Acquisition Standards - Customer Focus - Continuous Improvement - Quality Measurement, Monitoring and Review 	<p>1. Telah terdapat kebijakan terkait QA</p> <p>2. Belum terdapat prosedur terkait</p> <p>3. Terkait proses QA selalu dilaksanakan hanya saja, proses pendokumentasian belum konsisten</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIK Program KKBPK (Pasal 30)</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	2,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Belum terdapat KPI terkait manage quality	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Telah terdapat proses sharing knowledge terkait proses ini berupa pelatihan COBIT, namun belum ditemukan dokumentasi terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level Proses	2,08	3,00
-----------------------	------	------

7.5.9.PO9 – Assess and Manage IT Risks

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT Risk Management Framework - Establishment of Risk Context - Event Identification - Risk Assessment - Risk Response - Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur terkait proses manajemen risiko</p> <p>2. Telah terdapat SOP terkait proses manajemen risiko</p>	<p>1. kebijakan....</p> <p>2. SOP Kolektif Inspektorat Prosedur Penyusunan PKPT (Pelaporan Kerja Pengawasan Tahunan) dan PKAU (Pelaporan Kerja Administrasi Umum)</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<p>Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?</p>	<p>Telah terdapat KPI (Tingkat maturitas SPIP)</p>	<p>Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Pelatihan COBIT (namun belum terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Tool	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Telah terdapat tools khusus, berupa SPIP (Sistem Pengawasan Interen Pemerintah) BKKBN	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

Maturity Level Proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.10. PO10 – Assess and Manage IT Risks

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme Management Framework - Project Management Framework - Project Management Approach - Stakeholder Commitment - Project Scope Statement - Project Phase Initiation - Integrated Project Plan - Project Resources - Project Risk Management - Project Quality Plan 	<p>1. Belum terdapat kebijakan yang mengatur terkait manajemen proyek</p> <p>2. Belum terdapat SOP terkait manajemen proyek secara khusus</p>	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Responsibility & Accountability	<p>Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?</p>	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Belum terdapat KPI terkait	1. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 2. Bisa di akses di BKKBN.go.id	1,00	3,00
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	1. Pelatihan COBIT (namun belum terdokumentasi) 2. Belum terdapat proses pelatihan / sertifikasi terkait manajemen proyek	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level Proses	1,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.11. AI1 – Identify Automated Solution

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definition and Maintenance of Business Functional and Technical Requirements - Risk Analysis Report - Feasibility Study and Formulation of Alternative Courses of Action - Requirements and Feasibility Decision and Approval 	<p>1. Telah terdapat kebijakan terkait studi kelayakan</p> <p>2. Telah terdapat SOP terkait studi kelayakan</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIL Program KKBPK (Pasal 12 ayat 4)</p> <p>2. SOP Penyusunan telaahan pengembangan sistem aplikasi</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Belum terdapat KPI terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Programming Course	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Secara umum proses ini telah dipahami dengan baik oleh Manajemen dan Staf TI dan telah terdapat mekanisme khusus dalam mengkomunikasikan proses identifikasi automated solutions.	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level proses	2,33	3,00
-----------------------	------	------

7.5.12. AI2 – Acquire and Mantain Application Software

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - High-level Design - Detailed Design - Application Control and Auditability - Application Security and Availability - Configuration and Implementation of Acquired Application Software - Major Upgrades to Existing Systems - Development of Application Software - Software Quality Assurance - Applications Requirements Management - Application Software Maintenance 	<p>1. Terdapat kebijakan yang mengatur terkait manajemen proyek/pembangunan</p> <p>2. Terdapat SOP terkait manajemen proyek/pembangunan</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIK Program KKBPK (Pasal 7)</p> <p>2. Prosedur terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan telaahan pengembangan sistem aplikasi - SOP Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi 	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perban 11 SOTK 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 	3,00	3,50
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Telah terdapat KPI terkait (Persentase Aplikasi yang di kembangkan dan terintegrasi dalam satu portal data dan informasi BKKBN berdasarkan SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1.(KEPKA_IKU_Nomor_108_Tahun_2020) 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 	3,50	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<p>Telah terdapat course terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - application architecture - Analisis cloud computing - Kursus web desain - Web programming - Android programming - Pelatihan system analyst and design with UML - Pelatihan data 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
		warehouse dengan sql server			
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,50
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	<ul style="list-style-type: none"> - Coding menggunakan open source, PHP, Dreamweaver, Visual Studio Code, untuk pembuatan aplikasi - Most application web based - Untuk perancangan menggunakan tools Drwa.io online, Viso, dan Balsamiq 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
			Maturity Level proses	3,08	3,50

7.5.13. AI3 – Acquire and Mantain Technology Infrastucture

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technological Infrastructure Acquisition Plan - Infrastructure Resource Protection and Availability - Infrastructure Maintenance - Feasibility Test Environment 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur terkait infrastruktur</p> <p>2. Telah terdapat SOP yang mengatur terkait proses pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIK Program KKBPK (Pasal 14/16)</p> <p>2. Berikut prosedur terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan laporan kebijakan/strategi pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur - SOP penyusunan standarisasi pengelolaan infrastruktur TI - SOP Penyusunan evaluasi kebijakan pengelolaan infrastruktur TI - SOP Penyusunan Perencanaan kebijakan teknis pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI -SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Fasilitas pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TI 	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Telah terdapat KPI terkait (Jumlah Sarana dan Prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Strategis Balance Scorecard 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Telah terdapat sertifikasi COBIT, namun belum terdokumentasi, dan belum dilakukan transfer knowledge dan implementasi knowledge di satuan kerja terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level proses	2,58	3,00
-----------------------	------	------

7.5.14. AI4 – Enable Operation And Use

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planning for Operational Solutions - Knowledge Transfer to Business Management - Knowledge Transfer to End Users - Knowledge Transfer to Operations and Support Staff 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur terkait pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem aplikasi dan bank data, infrastruktur teknologi informasi</p> <p>2. Telah terdapat SOP terkait</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIL Program KKBPK (Pasal 1)</p> <p>2. SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi sistem aplikasi dan pengelolaan bank data</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Belum terdapat KPI terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan ITIL (namun belum ditemukan dokumentasi terkait)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi aplikasi baru 2. Reguler meeting 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level proses	2,25	3,00
-----------------------	------	------

7.5.15. AI5 – Procure IT Resources

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procurement Control - Supplier Contract Management - Supplier Selection - IT Resources Acquisition 	<p>1. Telah terdapat kebijakan yang mengatur terkait IT Reourcess</p> <p>2. Mengikut kebijakan Unit Layanan Pengadaan BKKBN di unit BIRUM</p> <p>3. Telah terdapat SOP yang mengatur</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIL Program KKBPK (Pasal 12 dan pasal 18)</p> <p>2. Perpres dan perlem LKPP</p> <p>3. Perka 465 STIK Tentang Kebijakan STIK</p> <p>4. SOP Pengadaan Bagian Sarana Prasarana</p>	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Data; - Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	<p>Telah terdapat KPI terkait (Jumlah pengadaan perangkat Unit pengolahan data dan komunikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - terkait pengadaan sarana dan prasarana juga sudah dimasukkan dalam IT BSC 	<p>Interview dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Teknologi Informasi dan Data; - Biro Umum dan Hubungan Masyarakat - KEPKA_IKU_Nomor_108_Tahun_2020 	3,50	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat pelatihan terkait Tata Kelola seperti COBIT dan ITIL (namun belum ditemukan dokumentasi terkait) 2. Bimbingan Teknis aplikasi LPSE 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	<ul style="list-style-type: none"> - Reguler meeting dan teknis komunikasi sudah mapan 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Electronic),	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,50	3,50

Maturity Level proses	3,25	3,50
-----------------------	------	------

7.5.16. AI6 – Manage Changes

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Change Standards and Procedures - Impact Assessment, Prioritisation and Authorisation - Emergency Changes - Change Status Tracking and Reporting - Change Closure and Documentation 	<p>1. Belum terdapat kebijakan terkait manajemen perubahan</p> <p>2. Belum terdapat prosedur terkait manajemen perubahan</p>	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Belum Terdapat KPI	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Telah terdapat Pelatihan/sertifikasi terkait Cobit dan ITIL namun belum ditemukan dokumentasi terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Terdapat Reguler meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level proses	1,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.17. AI7 – Install and Accredite Solutions and Changes

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Training - Test Plan - Implementation Plan - Test Environment - System and Data Conversion - Testing of Changes - Final Acceptance Test - Promotion to Production - Post-implementation Review 	<p>1. Belum terdapat kebijakan terkait yang spesifik</p> <p>2. Dalam kontrak proyek terdapat UAT, belum dalam bentuk SOP khusus</p> <p>3. Telah dilaksanakan beberapa testing diantaranya stress test, pentest, security test, dan UAT</p>	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	1,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<p>1. Perban 11 SOTK</p> <p>2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;</p>	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Belum terdapat KPI terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Terdapat pelatihan Cobit/ITIL, namun belum ditemukan dokumentasi terkait	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat reguler meeting 2. UAT testing 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi standar desktop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	1,00	3,00

Maturity Level proses	1,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.18. DS1 – Define and Manage Service Levels

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service level management framework - Definition of Services - Service level agreements (SLA) - Operating level agreements (OLA) - Monitoring & reporting of SLA - Review of SLA & contracts 	<p>1. Sudah terdapat kebijakan terkait pengelolaan tingkat layanan</p> <p>2. Telah terdapat prosedur terkait layanan helpdesk dan ditemukan dokumen SLA</p> <p>3. sudah teridentifikasi katalog layanan, SLA masih sebatas dengan pihak ketiga contoh : SLA mengenai Penyedia Layanan Internet dengan pihak ketiga (PT.Digital Wireless Indonesia) dan Penyewaan Disaster Recovery Center (DRC) dengan pihak Indosat</p>	<p>1. Kebijakan Standarisasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <p>2. SOP 2019 hal 9 dan laporan Service Level Agreement (SLA) dengan PT.Digital Wireless Indonesia dan Cetak Biru STIK BKKBN 2015-2019</p> <p>3. Interview dengan unit IT, Nota Dinas Nomor 2473/I/SP.03.05/G5/2019 Mengenai Hasil Telaah terhadap Pemohonan Penunjukkan Langsung Kegiatan Sewa Disaster Recovery Center (DRC) dan Laporan Pendahuluan Service Level Agreement (SLA) dengan PT.Digital Wireless Indonesia</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 SOTK Pasal 80	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Terdapat KPI terkait proses pendefinisian dan manajemen tingkat layanan	Peta Strategis Balance Scorecard	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan COBIT, namun proses pelatihan/sertifikasi belum terdokumentasi - Key person/PIC yang mengikuti pelatihan tersebut sudah tidak bekerja di unit terkait, dan belum pernah melaksanakan transfer knowledge 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Dokumen Perjanjian dengan pihak ketiga	Laporan Pendahuluan Service Level Agreement (SLA) dengan PT.Digital Wireless Indonesia	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EXISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Sistem Informasi dan Dokumentasi serta Aplikasi Desktop MS.Office	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.19. DS2 – Manage Third-Party Services

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Identification of All Supplier Relationships - Supplier Relationship Management - Supplier Risk Management - Supplier Performance Monitoring	1. Telah terdapat kebijakan di proses procurement 2. Terdapat kebijakan terkait pengelolaan pihak ketiga 3. Prosedur mengenai sewa bandwidth 4. Prosedur mengenai penandatanganan MOU dengan mitra kerja 5. telah terdapat perjanjian sewa Disaster Recovery Center untuk menangani proses procurement supplier 6. Anggaran telah disetujui 7. Negosiasi vendor 8. Pengadaan dilakukan oleh PR .	1. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 - Hal 5 tentang persiapan pengadaan barang dan jasa mengenai Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa melalui penyedia dan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 158/kep/B/2016 tentang perangkat unit layanan pengadaan BKKBN dan keputusan kepala bkkbn nomor 157/KEP/B3/2016 tentang layanan pengadaan bkkbn berdasarkan surat tugas nomor 1251/SP.0.05/B33/ULP/2019 2. Keputusan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan, dan informasi badan kependudukan dan keluarga 3. 2019 - Prosedur Mengenai Sewa Broadband 4. Prosedur Mengenai Penandatanganan MOU dengan Mitra Kerja 5. Langganan Jasa Jaringan TIK Tahun Anggaran 2020	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
			mengenai Sewa Disaster Recovery Center 6. Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2020 mengenai Rincian Anggaran Sewa Disaster Recovery 7. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Pengadaan Sewa Disaster Recovery Center 2020 nomor : 040/SP.03.05/B3/ULP/2020 8. Instruksi Kerja Sistem Informasi Rantai Pasok Alokasi berencana nasional pusat nomor 001/I/KU.02.01/0/202		
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Biro Pelayanan BKKBN dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	1. Perban 11 SOTK 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 3. Biro Pelayanan BKKBN dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,50	3,50
Goal Setting & Measurement	- Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	KPI: Percepatan kontrak/SPK, Percepatan Pengadaan	Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 - HAL 41 Pelaksanaan Kontrak mengenai Pedoman Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE BKKBN	LAKIP 2019 pada hal 5 bab 1 sub direktorat Dokumentasi dan penyebarluasan informasi dan Perban no 16 Tahun 2019 tentang PBSE hal 30 bab V Penyelenggara SPBE BKKBN	3,00	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Terdapat technical meeting 1x seminggu diproses pengadaan (MoM technical meeting pengadaan)	Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Pengadaan Sewa Disaster Recovery Center 2020 nomor : 040/SP.03.05/B3/ULP/2020	3,00	3,50
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	LPSE untuk tools dalam proses pengelolaan kebutuhan dan pengadaan serta kontrak	Perban no 16 Tahun 2019 tentang PBSE Pasal 21 Aplikasi PBSE	3,00	3,50

Maturity Level proses	3,08	3,50
-----------------------	------	------

7.5.20. DS3 – Manage Performance and Capacity

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Performance and Capacity Planning - Current Performance and Capacity - Future Performance and Capacity - IT Resources Availability - Monitoring and Reporting	1. Telah terdapat kebijakan mengenai performance dan capacity 2. Telah terdapat SOP mengenai pengukuran evaluasi performance dan kapasitas serta monitoring untuk infrastruktur 3. Sudah ada monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari KPI 4. Sudah terdapat server dan aplikasi monitoring untuk mengatur pengukuran kinerja	1. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 440/PER/G5/2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama 2. SOP mengenai SOP Evaluasi Uji Coba Pemuktahiran Infrastruktur TI SOP Biren 2020 3. Sosialisasi Aplikasi Balance Scorecard Tahun 2011 4. Interview dengan unit IT dan unit biro perencanaan serta Sosialisasi Aplikasi Balance Scorecard Tahun 2011	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Biro Perencanaan dan 'Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 80	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI Sudah ada, PIC masih atasan langsung terhadap bawahan	Peta Strategis Balance Scorecard	3,00	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan SMART dari Kemenkeu dan aplikasi Krisna dari Bappenas	Interview dengan unit Biro Perencanaan dan 'Bimbingan Teknis Penyusunan Renja KL	3,00	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Terkait MoU Aplikasi Krisna	Bimbingan Teknis Penyusunan Renja KL	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi SMART dari Kemenkeu dan Aplikasi Krisna dari BAPPENAS	Interview dengan Biro Perencanaan dan 'Bimbingan Teknis Penyusunan Renja KL	3,50	3,50

Maturity Level proses	3,17	3,50
-----------------------	------	------

7.5.21. DS4 – Ensure Continuous Service

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT Continuity Framework - IT Continuity Plans - Critical IT Resources - Maintenance of the IT Continuity Plan - Testing of the IT Continuity Plan - IT Continuity Plan Training - Distribution of the IT Continuity Plan - IT Services Recovery and Resumption - Offsite Backup Storage - Post-resumption Review 	<p>1. Terdapat di kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Prosedur kerja terdapat di SOP DITTIKDOK</p> <p>3. Sudah ada DRP dan DRC</p> <p>4. Cloud di-backup oleh pihak ketiga dan dilakukan sendiri (di NAS)</p> <p>5. Testing DRP sudah ada</p>	<p>1. Perka Kebijakan Pengelolaan TIK Program KKBPK dan Peraturan LKPP NO 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p> <p>2. Prosedur kerja terdapat di SOP DITTIKDOK mengenai SOP Implementasi Uji Coba Pemuktahiran Infrastruktur TI di Data Center BKKBN</p> <p>3. Dokumen Langganan Jasa Jaringan TIK Tahun Anggaran 2020 mengenai Sewa Disaster Recovery Center dan Cetak Biru STTIK BKKBN 2015-2019 Hal 11 Bab III</p> <p>4. Nota Dinas Nomor 2473/I/SP.0.05/G5/2019</p> <p>5. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 1041/I/SP.0.05/G5/2020 pada 8 Mei 2020</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 80	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI sudah ada dan PIC sudah ditetapkan	Peta Strategis Balance ScoreCard dan Data Prakom 2019	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan COBIT 5 (Namun belum terdokumentasi) dan tidak ada transfer knowledge dari pelatihan yang sudah dilakukan	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Laporan berkelanjutan pemeliharaan data center	Laporan Hasil Maintenance Periode 2	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Sudah ada tools E-Learning dan Evisum mengenai aplikasi cloud dan Tools Thermometer Humidy untuk mengukur suhu kelembaban di area data center serta sejalan 3 tahun namun untuk tools khusus masih ditangani sama pihak ketiga yang dipergunakan terkait proses rencana kontinuitas IT	Interview dengan unit Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.22. DS5 – Ensure Systems Security

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Management of IT Security - IT Security Plan - Identity Management - User Account Management - Security Testing, Surveillance and Monitoring - Security Incident Definition - Protection of Security Technology - Cryptographic Key Management - Malicious Software Prevention, Detection and Correction - Network Security - Exchange of Sensitive Data 	<p>1. Terdapat di kebijakan mengenai Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. Prosedur mengenai perencanaan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur IT</p> <p>3. Sudah ada sasaran keamanan informasi seperti (Manajemen Password, Pengelolaan Insiden firewall, antivirus (kaspersky -> Sopaos) dan Identity management integrasi dengan aplikasi SIVIKA (kebijakan di IT akses user)</p> <p>4. SIGA dilakukan untuk aplikasi publik</p> <p>5. Indikator Penguatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur ada di Peta Strategis Balance Scorecard</p> <p>6. Sudah terdapat monitoring untuk security insiden Infrastruktur</p>	<p>1. Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Publik - Pasal 8 Hal 7 dan perban Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 25 - Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. SOP DITIFFDOK 2019 - prosedur penyusunan perencanaan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur IT</p> <p>3. Perka 425/PER/G5/2016 - Kebijakan Pengelolaan TIK - Pasal 20 - Pengelolaan Jaringan</p> <p>4. Petunjuk Penggunaan Aplikasi SIGA</p> <p>5. Peta Strategis Balance ScoreCard</p> <p>6. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 80	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI Sudah ada PIC ditunjukkan didalam pengukuran Peta Strategis Balance SocreCard	Peta Strategis Balance ScoreCard dan Prakom 2019	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan COBIT 5 (Namun belum terdokumentasi) 'Pelatihan E-Five mengenai Keamanan Jaringan (Namun belum terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Regular Meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Sudah ada tools antivirus Sopaus dan firewall untuk keamanan jaringan	Standarisasi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi pada bagian kedua pasal 2 mengenai Perangkat lunak Infrastruktur TIK BKKBN yang berlisensi dan serta untuk antivirus	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.23. DS6 – Identify and Allocate Costs

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> - Definition of Services - IT Accounting - Cost Modelling and Charging - Cost Model Maintenance 	1. Terdapat dikebijakan PERBAN 11 STOK 2. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 3. Perencanaan anggaran terdapat di SKAP (Pelaksanaan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 4. Monitoring di Aplikasi SIM HP 5. Target dan realisasi anggaran di Renstra 2015-2019	1. Kebijakan PERBAN 11 STOK Pasal 16 2. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 3. SKAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Hal 7 Peranan Pelaporan Keuangan 4. Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi SIM HP 5. Renstra 2015-2019 - Hal 30 mengenai kerangka kelembagaan	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Pelaksanaan pengadaan anggaran pada masing-masing unit dan khusus Direktorat Teknologi Informasi dan Data Diatur di LAKIP 2019	Berdasarkan hasil interview dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DITIFFDOK 2019 - Hal 92 Realisasi Anggaran Tahun 2019	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI Sudah ada PIC ditunjukkan didalam pengukuran Peta Strategis Balance ScoreCard	Peta Strategies Balance ScoreCard - Penyerapan Anggaran Departemen Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Training Anggaran Berbasis Kinerja dan Pelatihan penyusunan LAKIP	SOP BIREN 2020 - Prosedur Penyusunan LAKIP BKKBN - Hal 108	3,50	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Realisasi Anggaran 2019 pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Laporan Kinerja Direktorat Teknologi Informasi dan Data 2019 - Hal 101 mengenai Realisasi Anggaran Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	SAKTI (proses pengajuan - evaluasi) SMART (untuk proses monitoring) KRISNA (Bappenas program dan anggaran)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,50	3,50

Maturity Level proses	3,25	3,50
-----------------------	------	------

7.5.24. DS7 - Educate & Train Users

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification of Education and Training Needs - Delivery of Training and Education - Evaluation of Training Received 	<p>1. Kebijakan mengenai Proses Pendidikan dan pelatihan</p> <p>2. Prosedur Pelatihan dan Pendidikan</p>	<p>1. PERBAN Nomor 8 TAHUN 2018 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</p> <p>2. Prosedur Perancangan Program Diklat dan Prosedur Penjaminan Mutu</p>	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 96 dan Pasal 80	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI sudah ada dan PIC sudah ditetapkan pada proses pendidikan dan pelatihan	Peta Strategis Balance Scorecard - Jumlah SDM Pada Direktorat Teknologi Informasi dan Data memenuhi standar kompetensi	3,00	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan E-Learning	Sertifikat Pelatihan E-Learning	3,50	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Hasil Kepuasan sistem pembelajaran	Angket PULAP Form 2019	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	E-Learning untuk tools dalam proses pelatihan dan pendidikan	Interview dengan Unit Direktorat Teknologi Informasi dan Data serta Direktorat Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	3,00	3,50

Maturity Level proses	3,17	3,50
-----------------------	------	------

7.5.25. DS8 – Manage Service Desk and Incidents

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service Desk - Registration of Customer Queries - Incident Escalation - Incident Closure - Reporting and Trend Analysis 	<p>1. Kebijakan sudah terdapat di Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 7 mengenai layanan helpdesk</p> <p>2. Belum ada Prosedur mengenai layanan Helpdesk</p> <p>3. Melalui helpdesk email dan telephone menangani insiden internal. Seluruh insiden melalui pintu utama Direktorat Teknologi Informasi dan Data lalu dieskalasi sesuai dengan bagian masing-masing.</p> <p>4. Reporting menggunakan Laporan dari unit yang terkait melalui via telepon dan e-mail</p>	<p>1. PERBAN Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 7 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Belum ada prosedur mengenai layanan Helpdesk</p> <p>3. PERBAN Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 7 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>4. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data</p>	2,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 80	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
	dengan jobdesc yang sudah ada?				
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI Sudah ada PIC ditunjukkan didalam pengukuran Peta Strategis Balance ScoreCard	Peta Strategis Balance ScoreCard - tentang Persentase Aplikasi yang di kembangkan dan terintegrasi dalam satu portal data dan informasi BKKBN berdasarkan SPBE	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan ITIL (Manajemen Layanan) namun belum terdokumentasi	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Tidak Terdokumentasi untuk form troubleshooting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,00	3,00
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	via e-mail dan telepon lebih sering melalui via telepon	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	1,00	3,00

Maturity Level proses	2,25	3,00
-----------------------	------	------

7.5.26. DS9 – Manage the Configuration

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuration Repository and Baseline - Identification and Maintenance of Configuration Items - Configuration Integrity Review 	<p>1. Kebijakan mengenai Konfigurasi Integrasi sistem dan pemeliharaan server</p> <p>2. Prosedur Konfigurasi mengenai pemeliharaan dan Perencanaan Kebijakan Teknis dalam pengembangan infrastruktur</p>	<p>1. Perban Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 17 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. SOP 2019 - Prosedur penyusunan perencanaan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur IT</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK - Pasal 80	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI sudah ada dan PIC yang bertanggungjawab adalah Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi dan Data	Data Prakom 2019 dan Peta Strategis Balance ScoreCard - Jumlah Sarana prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan E-Five mengenai Keamanan Jaringan (namun tidak terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Terdapat Hasil Pemeliharaan Data Center BKKBN Periode ke-3 pada 14 September 2019 dan Schedule Maintenance BKKBN	Hasil Pemeliharaan Data Center BKKBN Periode ke-3 pada 14 September 2019 dan Schedule Maintenance BKKBN	3,00	3,00
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Aplikasi Standar Dekstop	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	1,00	3,00

Maturity Level proses	2,58	3,00
-----------------------	------	------

7.5.27. DS10 – Manage Problem

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification and Classification of Problems - Problem Tracking and Resolution - Problem Closure - Integration of Configuration, Incident and Problem Management 	<p>1. terdapat kebijakan terkait pengelolaan insiden, manajemen masalah</p> <p>2. Belum ada Prosedur mengenai problem manajemen secara teknis sudah dilakukan</p> <p>3. Dalam mengelola masalah masih dilakukan secara teknis dan melalui stabilizer kelistrikan untuk mengetahui daya listrik</p>	<p>1. Perban Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 17 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Belum ada Prosedur mengenai problem manajemen</p> <p>3. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data</p>	2,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Perban 11 STOK - Pasal 80	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI sudah ada dan PIC yang bertanggungjawab adalah Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi dan Data	Data Prakom 2019 dan Peta Strategis Balance ScoreCard - Jumlah Sarana prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan COBIT (Ada tidak terdokumentasi ITIL (Pernah dilakukan tapi tidak terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Pelaporan Hasil Migrasi Sistem dan Maintenance Server	Pelaporan Hasil Migrasi Sistem dan Maintenance Server	3,00	3,00
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Tools yang digunakan adalah stabilizer kelistrikan untuk mengetahui daya listrik dan Thermometer Humidity - untuk mengukur kondisi suhu dan kelembaban di area data center	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,75	3,00
-----------------------	------	------

7.5.28. DS11 – Manage Data

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Business Requirements for Data Management - Storage and Retention Arrangements - Media Library Management System - Disposal - Backup and Restoration - Security Requirements for Data Management	1. Terdapat kebijakan terkait proses data 2. Prosedur pengelolaan bank data 3. Klasifikasi data sudah ada (misal pengelompokan data sensitive, penting, sangat penting) 4. Backup & restoration (database dilakukan backup sebulan sekali, sharing dilakukan setiap bulan) 5. Penghapusan data dilakukan secara penyimpanan tape (kaset pita) untuk nantinya data akan digunakan kembali oleh bagian arsip 6. Data disimpan pada Data Warehouse	1. Perka 425 Tahun 2016 - Hal 14 pengelolaan sistem aplikasi dan bank data 2. prosedur pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas sistem aplikasi dan pengelolaan bank data 3. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data 4. Berdasarkan hasil interview dengan User Yugo 5. Berdasarkan hasil interview dengan User Yugo 6. Perka 425 Tahun 2016 Pasal 33 - Mengenai pengelolaan Bank Data	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN STOK 11 - Pasal 80	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	KPI sudah ada pada Peta Strategis Balance ScoreCard	Peta Strategis Balance Scorecard - Jumlah dan pemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Program Bangga Kencana	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan data warehouse dengan sql server - Pelatihan COBIT (Namun belum terdokumentasi) dan pelatihan mengenai System Analysis and Design With UML serta Cloud Computing hal ini dimuat dalam 2019 pada tabel Kegiatan/pelatihan khusus pada hal 81 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Regular Meeting	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Tools backup database menggunakan Data Warehouse, online Analytical Processing (OLAP) dan business Intelligence (BI) serta data user dilakukan secara sistem di Data Warehouse	PERKA Kebijakan Pengelolaan TIK Program BKKBN Pasal 34	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.29. DS12 – Manage the Physical Environment

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Site Selection and Layout - Physical Security Measures - Physical Access - Protection Against Environmental Factors - Physical Facilities Management	1. Telah terdapat kebijakan dalam pengelolaan keamanan fisik 2. Prosedur mengenai pengelolaan keamanan fisik mengenai pemuktahiran infrastruktur IT di Data Center BKKBN 4. Sudah terdapat pengamanan fisik diruang server Terdapat termometer, apar, AC 5. terdapat raised floor, sudah ada pelindung kabel, genset, UPS 6. Monitoring ruang server sudah dilakukan	1. PERKA 15 Tahun 2018 - Standarisasi TIK pasal 28 mengenai Ruang Data Center 2. Prosedur 2019 - Prosedur Penyusunan Perencanaan Kebijakan Teknis Pengembangan Infrastruktur IT 3. PERKA 15 Tahun 2018 - Standarisasi TIK pasal 28 mengenai Ruang Data Center dan Rekap DBR Data Center 4. PERKA 15 Tahun 2018 - Standarisasi TIK pasal 28 mengenai Ruang Data Center dan Rekap DBR Data Center 5. PERKA 15 Tahun 2018 - Standarisasi TIK pasal 28 mengenai Ruang Data Center dan Rekap DBR Data Center 6. Laporan Hasil Maintenance Data Center BKKBN Periode ke-3	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	PERBAN 11 STOK	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Terdapat KPI dan PIC yang menangani proses pengamanan infrastruktur	Peta Strategis Balance ScoreCard - Jumlah Sarana prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Data Prakom 2019	3,00	3,00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<p>Pelatihan COBIT (Namun tidak terdokumentasi)</p> <p>'Pelatihan terkait proses pengelolaan Physical Environment dengan pelatihan PC Hardware dan network</p> <p>Technical Support dan SQL Server pada 17 -23 April 2018 dan 23 -27 Juli 2018</p>	LAKIP Dittfdok 2018 - Hal 68 Mengenai Capacity Buiding Tim Teknis STIK	2,50	3,00
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Rekap DBR Data Center	Rekap DBR Data Center	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	<p>Sudah terdapat tools yaitu Thermometer Humudity dan yang digunakan untuk memonitor serta mengukur kondisi suhu dan kelembaban di area data center yang dapat terintegrasi dengan perangkat-perangkat seperti : UPS, PAC, FSS, Door access dan memfasilitasi terkait proses pengelolaan Physical Environment Environment</p>	PERKA 15 Tahun 2018 - Pasal 28 - Spesifikasi Ruang Data Center	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.30. DS13 – Manage Operations

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Operations Procedures and Instructions - Job Scheduling - IT Infrastructure Monitoring - Sensitive Documents and Output Devices - Preventive Maintenance for Hardware	1. Kebijakan mengenai proses Pemeliharaan dan Monitoring Infrastruktur IT 2. Prosedur pemeliharaan penjadwalan, dan pemuktahiran TI 3. Checklist maintenance setiap bulan 4. Job scheduling sudah dilakukan	1. Perban Nomor 425/PER/G5/2016 pasal 17 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 2. SOP 2019 - prosedur penyusunan perencanaan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur IT 3. Dokumen SPBE terdapat Laporan Hasil Maintenance Data Center BKKBN Periode ke-3 4. Schedule Mintenance BKKBN	3,00	3,50
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Perban 11 STOK - Pasal 80	3,50	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Terdapat KPI dan PIC yang menangani proses pengamanan infrastruktur	Peta Strategis Balance ScoreCard - Jumlah Sarana prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi dan Data Prakom 2019	3,00	3,50
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Seminar internal terkait prosedur eskalasi, cloud computing	Cetak Biru STIK BKKBN 2015-2019 pada model private cloud computing dan Interview dengan unit IT	3,00	3,50
Awareness	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Materi seminar	Berdasarkan hasil interview dan hal ini dimuat dalam Lakip 2019 pada tabel Kegiatan/pelatihan khusus pada hal 81	3,00	3,50

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	Sudah terdapat tools yaitu Thermometer Humudity dan yang digunakan untuk memonitor serta mengukur kondisi suhu dan kelembaban di area data center	PERKA 15 Tahun 2018 - Pasal 28 - Spesifikasi Ruang Data Center	3,00	3,50

Maturity Level proses	3,08	3,50
-----------------------	------	------

7.5.31. ME1 – Monitor and Evaluate IT Performance

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini? 2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Monitoring Approach - Definition and Collection of Monitoring Data - Monitoring Method - Performance Assessment - Board and Executive Reporting - Remedial Actions	1. terdapat kebijakan yang mengatur spesifik terkait hal ini dalam kebijakan tata kelola TI 2. Adapun monitoring nya berdasarkan dokumen STIK, sebagai sarana Board dan executive reporting 3. Terdapat beberapa SOP terkait evaluasi: - SOP Penyusunan evaluasi kebijakan pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data - SOP Penyusunan evaluasi kebijakan pengelolaan infrastruktur TI	1. Perban No 425/PER/G5/2016 - Pasal 1 Ketentuan Umum - Mengenai Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan Cetak Biru STIK BKKBN 2015-2019 2. PERKA 15 Tahun 2018-Standardisasi TIK 3. SOP 2018 dan SOP 2019	3.00	3.00
Responsibility & Accountability	- Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Teknologi Informasi dan Data	1. Perban 11 SOTK 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	3.00	3.00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Terdapat KPI dan diukur dengan indikator SPBE	Rencana Strategis Balance Score card - Indeks PBSE	3.00	3.00
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	Pelatihan COBIT (Namun belum ditemukan dokumentasi terkait)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2.50	3.00
Awareness & Communication	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	Telah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiatif pengukuran maturity level 2. Uraian Pekerjaan Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi 	3.00	3.00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tools & Automation	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	<ul style="list-style-type: none"> - SIMWAS: Sistem Pengawasan - B11 RADAGRAM (Rapat Pengendalian Program) - AMS (Audit Manajemen Sistem) - Dalam Tahap Pengembangan 	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; dan Interview dengan Direktorat Inspectorat Wilayah III	3.00	3.00

Maturity Level proses	2.92	3.00
-----------------------	------	------

7.5.32. ME2 – Monitor and Evaluate Internal Control

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	<p>1. Bagaimanakah pelaksanaan proses terkait proses ini?</p> <p>2. Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring of Internal Control Framework - Supervisory Review - Control Exceptions - Control Self-assessment - Assurance of Internal Control - Internal Control at Third Parties - Remedial Actions 	<p>1. Kebijakan proses Internal Kontrol dan penilaian dari atasan langsung</p> <p>2. Prosedur mengenai internal kontrol</p>	<p>1. Perban No 425/PER/G5/2016 - Pasal 1 Ketentuan Umum - Mengenai Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga</p> <p>2. Prosedur Cetak Biru STIK BKKBN Renstra Kebijakan Lainnya tentang Pengelolaan STIK</p>	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? - Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada? 	Direktorat Teknologi Informasi dan Data dengan masing-masing unit	PERBAN 11 STOK Pasal 80	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? - Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI? 	Terdapat KPI dan PIC yang menangani proses manajemen internal kontrol	Peta Strategis Balance ScoreCard - Tingkat maturitas SPIP	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? - Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini? 	<p>Pelatihan COBIT (Tidak Terdokumentasi) Pelatihan Audit Tingkat Dasar (Tersertifikasi)</p>	<p>Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data Dokumen Sertifikasi Audit Tingkat Dasar</p>	2,50	3,00
Awareness & Communication	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) - Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini? 	<p>Penilaian Risiko kegiatan seluruh Satuan Kerja (SATKER)</p>	<p>Interview dengan Direktorat Teknologi informasi dan data dan Direktorat BIKUB dokumen Penilaian Risiko kegiatan Seluruh Satuan Kerja (SATKER)</p>	3,00	3,00
Tools & Automation	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? - Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? - Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi? 	<p>Aplikasi Dekstop (MS Office) terdapat tools mengenai kebijakan internal Kontrol dengan aplikasi 'SIMWAS: Sistem Pengawasan, Aplikasi ZI (Zona integritas) yakni aktivitas yang dilakukan untuk tahap penilaian serta AMS (Audit Manajemen Sistem) - Dalam Tahap Pengembangan dan Aplikasi SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) untuk mengukur kinerja pemerintah hal ini dimuat</p>	<p>Interview dengan Direktorat Teknologi informasi dan data serta Direktorat Inspectorat Wilayah III</p>	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
		dalam Rencana Strategis Balance Scorecard			

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------

7.5.33. ME3 – Ensure Compliance With External Requirements

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: - Identification of External Legal, Regulatory and Contractual Compliance Requirements - Optimisation of Response to External Requirements - Evaluation of Compliance With External Requirements - Positive Assurance of Compliance - Integrated Reporting	1. Telah terdapat kebijakan tata kelola TI yang mengacu kepada kebijakan/peraturan regulator/pemerintah 2. Telah terdapat SOP terkait: - prosedur standarisasi/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk operasional/kebijakan lainnya	1. Perka SPBE no 6 dan PERKA 15 Tahun 2018-Standardisasi TIK 3. prosedur standarisasi/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk operasional/kebijakan lainnya prosedur penyusunan pedoman	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	Direktorat Inspectorat Wilayah II dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	Interview dengan Direktorat Inspectorat Wilayah II dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?	Terdapat KPI dan PIC sudah terdokumentasi	Peta Strategis Balance Scorecard - Jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi dan Tingkat Maturitas SPIP Serta PIC bisa dilihat pada data Prakom 2019	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Pelatihan COBIT (Belum Terdokumentasi) Pelatihan ISO 37001:2016 - Manajemen Anti Penyuapan (Terdokumentasi)	Interview dengan Direktorat Inspectorat Wilayah III dan Direktorat Teknologi Informasi dan Data Dokumentasi untuk pelatihan ISO 37001:2016 - Manajemen Anti Penyuapan	2,50	3,00
Awareness & Communication	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Proses telah cukup dipahami, telah ada sosialisasi dan inisiatif terkait pemahaman tata kelola dan proses IT secara menyeluruh	Risk Assestment dan Laporan Hasil Audit	3,00	3,00
Tools & Automation	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Saat ini masih menggunakan Aplikasi Dekstop, dibantu dengan repository management dan SIMRI dan RBS	Interview dengan Direktorat Inspectoart Wilayah III	1,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
			Maturity Level proses	2,58	3,00

7.5.34. ME4 – Provide IT Governance

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Perencanaan, Kebijakan, dan Prosedur	Apakah ada Kebijakan atau SOP yang mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> - Establishment of an IT Governance Framework - Strategic Alignment - Value Delivery - Resource Management - Risk Management - Performance Measurement - Independent Assurance 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat kebijakan khusus terkait tata kelola TI 2. Terdapat beberapa SOP terkait pengelolaan TI terkait: <ul style="list-style-type: none"> - SOP Manajemen Risiko - SOP terkait Resource Management/pengadaan 3. Telah terdapat KPI terkait pengelolaan investasi TI (KPI ada di BIREN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perka Kebijakan No 425/PER/G5/2016 - Pasal 1 Ketentuan Umum - Pengelolaan TIK Program KKBPK 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) - Prosedur Penyusunan PKPT dan PKAU Berbasis Risiko 3. Interview dengan Biro Perencanaan dan Kepka IKU No. 108 Tahun 2020 	3,00	3,00
Responsibility & Accountability	Dalam struktur organisasi, entitas struktur apa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses ini? Apakah penugasan tersebut sejalan dengan jobdesc yang sudah ada?	1. Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perban 11 SOTK - Pasal 80 2. Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; 	3,00	3,00
Goal Setting & Measurement	Apakah ada indikator kinerja yang ditetapkan terkait dengan proses ini? Apakah ada alasan penetapan	Terdapat KPI terkait (Indeks SPBE) diukur dari Nilai Akuntabilitas (SAKIP)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data dan Peta Strategis Balance Scorecard	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
	indikator kinerja terhadap pencapaian kinerja strategis TI?				
Skill & Expertise	Apakah terdapat program pengembangan kapasitas SDM terkait dengan pemahaman dan penguasaan proses ini? Bagaimana realisasi dari program pengembangan SDM terkait dengan proses ini?	Pelatihan COBIT (Pernah dilakukan namun tidak terdokumentasi dan tidak ada transfer knowledge)	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data;	2,50	3,00
Awareness	Apakah terdapat pemahaman yang memadai atas proses (oleh pihak-pihak terkait) Apakah ada mekanisme komunikasi atas keberjalanan proses ini?	Proses telah cukup dipahami, telah ada sosialisasi dan inisiatif terkait pemahaman tata kelola dan proses IT secara menyeluruh dengan dokumen Risk Assesment dan Laporan PKPT berbasisi Risiko serta Laporan Hasil Audit (LHA) untuk dokumen penilaian risiko	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data; Prosedur Penyusunan PKPT dan PKAU berbasis Risiko Prosedur Penyusunan LHA (Laporan Hasil Audit)	3,00	3,00

ATRIBUT	KRITERIA	KONDISI EKSISTING	EVIDENCE	MATURITY EXISTING	MATURITY TARGET
Tool	Apakah ada tool yang digunakan untuk memfasilitasi proses ini? Apakah tool ini terintegrasi dengan tool lain yang memfasilitasi proses terkait? Apakah tool bisa membantu mendeteksi perkecualian kontrol jika terjadi?	Telah terdapat tools khusus, berupa SPIP (Sistem Pengawasan Interen Pemerintah) BKKBN	Interview dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Data	3,00	3,00

Maturity Level proses	2,92	3,00
-----------------------	------	------